



LAPORAN PENDAHULUAN

REVIEW MASTERPLAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Dasar Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	4
2.1 Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan	4
2.1.1 Visi Kabupaten Balangan.....	4
2.1.2 Misi Kabupaten Balangan	4
2.1.3 Kebijakan.....	5
2.2 Kondisi Geografi dan Demografi	6
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	6
2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis	9
2.2.3 Demokrasi.....	15
2.3 Penduduk Kabupaten Balangan	16
2.4 Kondisi IPM Tahun 2015	18
2.4.1 Peringkat Masing-Masing Komponen IPM	20
2.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan	23
2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.5.3 Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	30
2.6 Pendidikan Kabupaten Balangan.....	31
2.6.1 Profil Pendidikan Kabupaten Balangan	31
2.6.2 Satuan dan Sebaran Pendidikan	32
2.6.3 Capaian Rata-Rata Lama dan Harapan Sekolah.....	37
2.7 Kesehatan Kabupaten Balangan	42
2.7.1 Sarana dan Prasarana.....	43

2.7.2	Angka Kematian Bayi.....	55
2.7.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	57
2.7.4	Angka Balita Gizi Buruk.....	59
2.7.5	Sanitasi dan Air Bersih	60
2.7.6	Persebaran Tenaga Kesehatan	62
BAB III METODE KEGIATAN		66
3.1	Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan	66
3.2	Jadwal Kerja	66
3.3	Alokasi Tenaga Ahli	68
3.4	Sumber Data	68
3.5	Analisis Data	69
3.6	Sistematika Penulisan	72
3.7	Target dan Sasaran	72
3.7.1	Target.....	72
3.7.2	Sasaran.....	72
3.8	Keluaran yang Diharapkan	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Pembangunan Kabupaten BaJangan tahun 2016 – 2021 adalah terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Salah satu misi untuk mengarahkan pencapaian visi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah menetapkan beberapa indikator kinerja pembanguana daerah di bidang pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan serta guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV. Indikator kinerja ini untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Balangan.

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusla yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmanl-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berلمان dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabpaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Balangan telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar 6 tahun yang didukung pembanguanaan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan wajib belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah/ APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Pada tahun 2015, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,38 persen dan APS usia 13-15 tahun 96,14 persen, APK SD mencapai 112,06, ini

berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar dari pada jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 12,06 persen penduduk di luar usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK Penduduk Balangan cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 98,82. Seperti halnya APK, APM juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD APM 95,67 persen. Artinya hanya 95,67 persen penduduk usia 7-12 tahun yang terserap sebagai siswa SD. Pada jenjang SMP, APM menjadi 77,12. Dari pencapaian tersebut diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu penyebab utama kemiskinan dan indikator tingkat kesejahteraan adalah pendidikan sehingga dalam kerangka jangka panjang dibutuhkan sebuah perencanaan pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dari berbagai sektor. Ide dasar ini yang mengharuskan Bappeda Kabupaten Balangan untuk melakukan kegiatan Penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dengan disusunnya Kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah memberikan arahan dalam penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari kegiatan Review Masterplan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan;
2. Mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan;
3. Menyusun strategi, kebijakan dan program lintas sektor dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Balangan;

1.3 Manfaat

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah direncanakan dengan melibatkan berbagai secktor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
3. Permerhati dan aktifi pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
4. Masyarakat di kabupaten Balangan dalam partisipasinya dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

1.4 Dasar Hukum

Landasan hokum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
7. Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
8. Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru.
9. Permendiknas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengolahan Pendidikan.
10. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian.
11. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarpras.
12. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
13. Permendiknas No. 11 Tahun 2008 Tentang Sertifikasi Guru Dalam.
14. Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Tentnag Standar Biaya.
15. SPM Pendidikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan

2.1.1. Visi Kabupaten Balangan

Menghadapi tantangan pembangunan maka dicanangkan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia" dengan makna visi berikut:

1. Maju

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan.

2. Sejahtera

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

2.1.2. Misi Kabupaten Balangan

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan

- dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
 6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
 7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

2.1.3. Kebijakan

Berikut ini ditampilkan rencana pemerintahh Jangka Menengah (RPKM) Tingkat Nasional dan Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
1. rioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Membangun kehidupan sosial dan budaya (P.11, P.10,P14)	1. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
2. Prioritas 2, Pendidikan	2. Membangun Sumber daya manusia (P2,P3,P4)	2. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3. Prioritas 3, Kesehatan	3. Peningkatan Perekonomian (P13,P5,P7,P8)	3. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan	4. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (P6)	4. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan	5. Pengelolaan lingkungan Hidup (P9)	5. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6. Prioritas 6, Infrastruktur	6. Melaksanakan pemerintahan yang baik (P1,P12)	
7. Prioritas 7, Iklim dan Investasi		
8. Prioritas 8, Energi		
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
10. Prioritas 10, Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Prioritas 11, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 12. Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Prioritas 13, Perekonomian 14. Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat		6. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi 7. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar 8. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah 9. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah 10. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin 11. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses. 12. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 13. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil 14. Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan 15. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Sumber: RPJMD Kab. Balangan Revisi 2016-2021

2.2 Kondisi Geografis dan Demografi

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2^o 01' 37" sampai dengan 2^o 35' 58" Lintang Selatan dan 114^o 50' 24"

sampai dengan $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

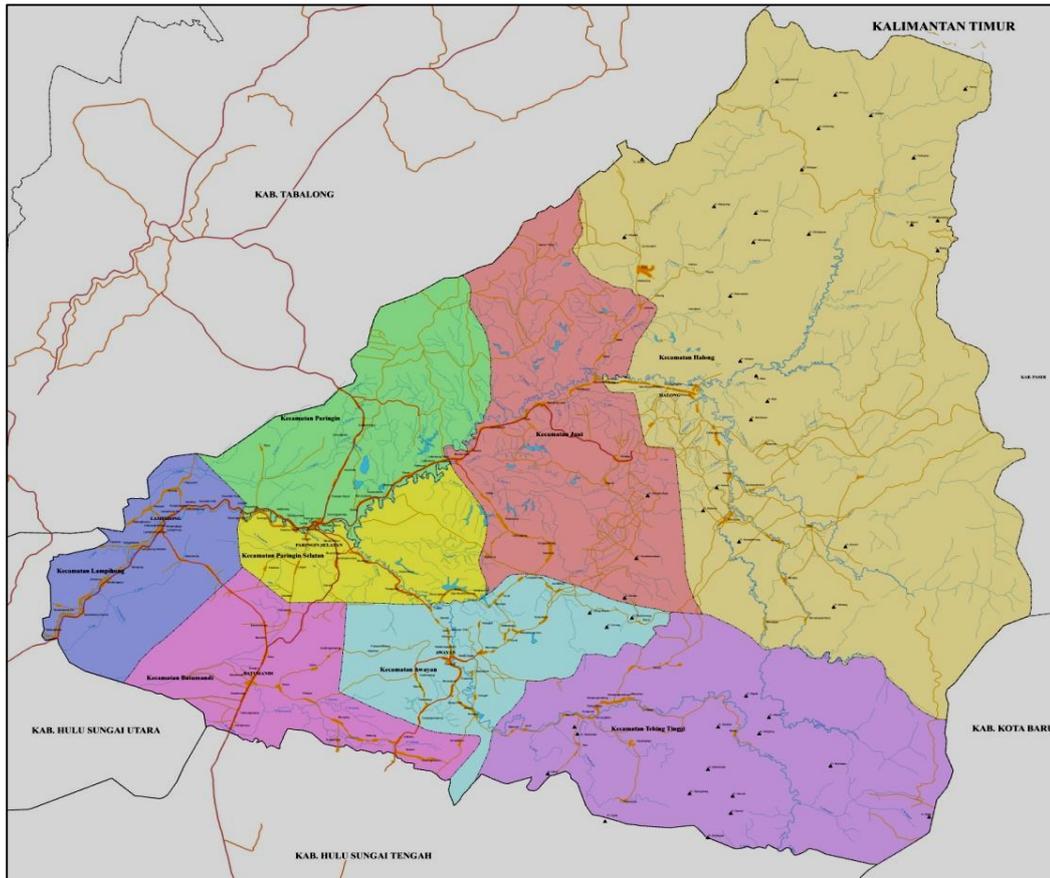
- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Balangan terdiri dari:

0 m - 7 m	= 1,87 %
7 m - 25 m	= 19,56 %
25 m -100 m	= 38,28 %
100 m – 500m	= 31,27 %
500 m keatas	= 9 %

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan :

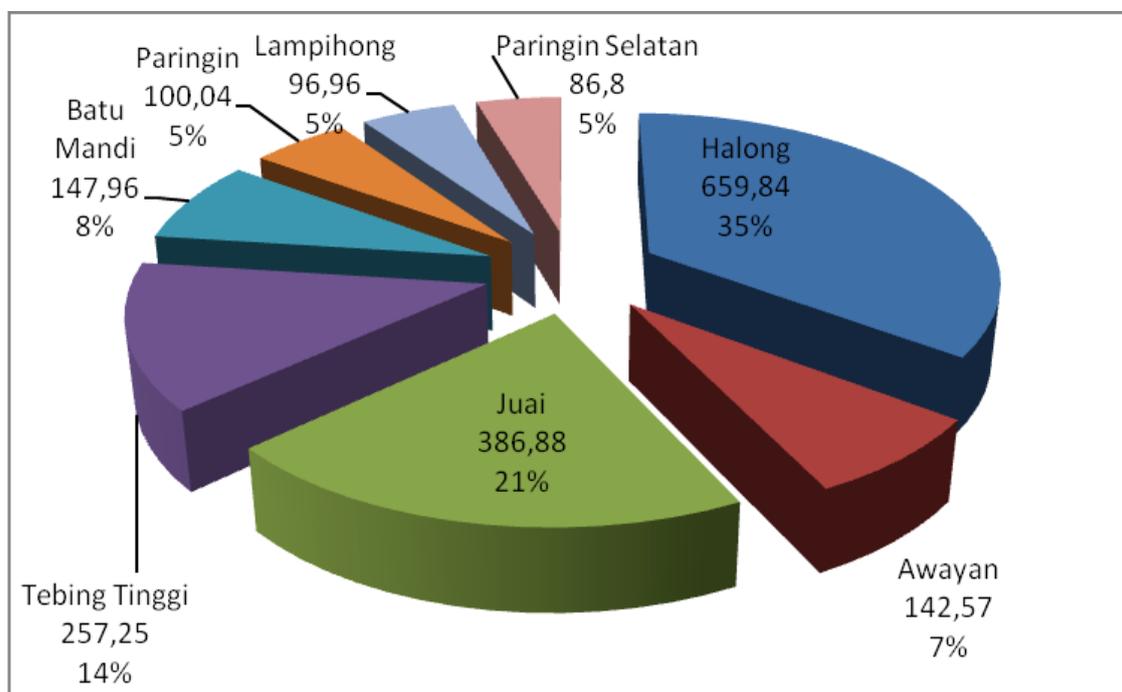
1. Paringin Selatan – Lampihong: 15 km.
2. Paringin Selatan – Batumandi: 12 km.
3. Paringin Selatan - Awayan: 13 km.
4. Paringin Selatan – Tebing Tinggi: 18 km.
5. Paringin Selatan - Paringin: 3 km.
6. Paringin Selatan – Juai: 21 km.
7. Paringin Selatan - Halong: 12 km.



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen) Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awaysan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini.

Gambar 2.2 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km2

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Daerah	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	Simpang Tiga	96,96	-	27
Paringin	Paringin	100,04	2	14
Juai	Mungkur Uyam	386,88	-	21
Halong	Halong	659,84	-	24
Batu Mandi	Batu Mandi	147,96	-	18
Paringin Selatan	Batu Piring	86,80	1	15
Awayan	Putat Basiun	142,57	-	23
Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	257,25	-	12
Jumlah		1.878,30	3	154

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 20 02'25,99" sampai dengan 20 31' 57,96" Lintang Selatan dan 115o 18' 45,03" sampai dengan 115o 50' 11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157

desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong,

misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah -jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian. karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

a) Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak- anak sungainya

b) Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten

Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

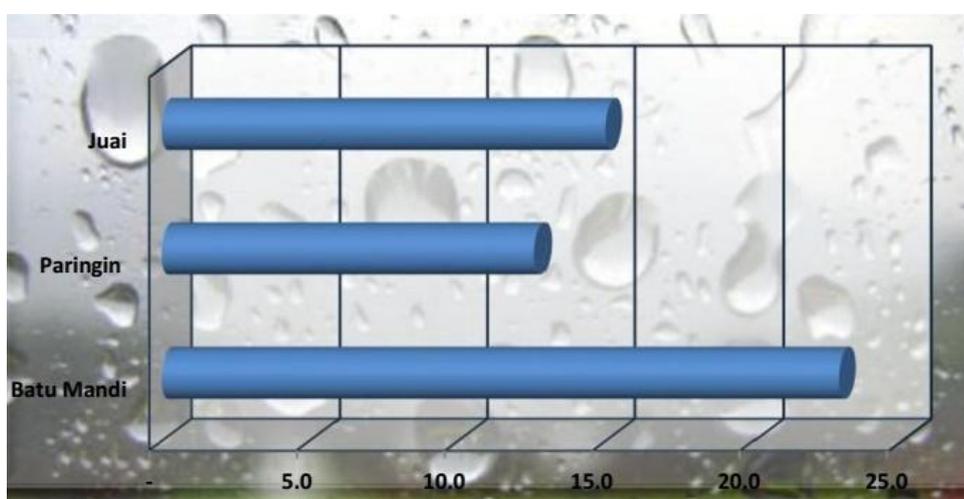
4) Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda.

Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2014 initerpantau di stasiun pengamatan Juaiyaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015



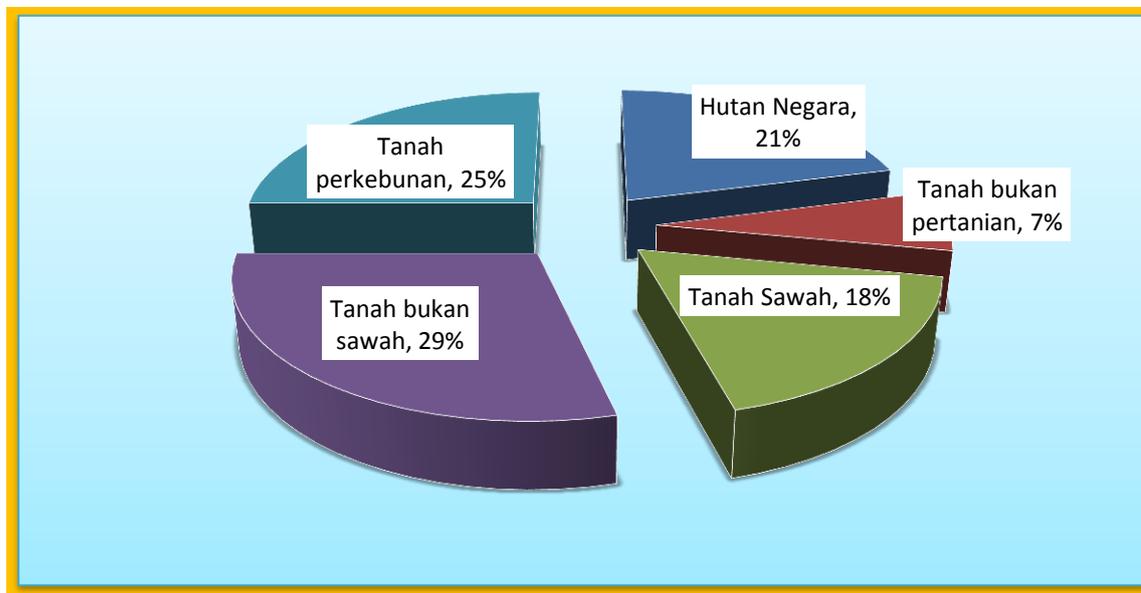
Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen.Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran.Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk,sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang

belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.3 Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4

Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/Total		
		Desa/Kel.	Rumah Tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber : Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-Laki		Perempuan		2014	2015	2014	2015
	2014	2015	2014	2015				
1. Lampihong	9.013	8.568	8.896	8.376	17.927	16.944	102	102
2. Batumandi	9.148	8.877	8.836	8.541	17.984	17.418	104	104
3. Awayan	6.706	6.944	6.743	6.995	13.939	13.939	99	99
4. Tebing Tinggi	3.462	3.206	3.348	3.074	6.280	6.280	103	104
5. Paringin	8.956	8.790	8.998	8.824	17.614	17.614	100	100
6. Paringin Selatan	6.467	6.294	6.399	6.221	12.515	12.515	101	101
7. Juai	8.448	8.815	8.261	8.577	17.392	17.392	102	103
8. Halong	9.394	10.985	8.951	10.408	21.393	21.393	105	106
Jumlah	76.505	62.479	60.432	61.016	122.044	123.495	102	102

Sumber: Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.3 Penduduk Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan hasil proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 123.449 jiwa yang terdiri dari 62.138 laki-laki dan 61.311 perempuan. Dengan luas wilayah 1.878,30 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 66 orang per kilometer persegi. Dua kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan Lampihong dengan kepadatan penduduk masing-masing 185 dan 176 orang per km². Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai dimana tingkat kepadatannya lebih rendah daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk Balangan 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah perlu menyiapkan

perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang.

Komposisi penduduk Kabupaten Balangan yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 0-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Balangan memiliki populasi penduduk muda yang relatif besar seperti seperti digambarkan oleh piramida penduduk dengan karakteristik ekspansif. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin per kelompok umur, persentase penduduk laki-laki hampir pada setiap kelompok umur lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun pada kelompok umur tua (55 thn ke atas) akan terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dibanding penduduk laki-laki.

Pada tahun 2015, penduduk usia muda (usia di bawah 15 tahun) sebesar 30,4%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) 66,1% dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) 3,5%. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif ini mengimplikasikan tersedianya angkatan kerja dan basis konsumen yang besar dan potensial.

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin dan rata-rata penduduk per desa seerta kepadatan penduduk yang merupakan angka perkiraan pada tahun 2015.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-rata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2015*

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
1	Lampihong	8 490	8 556	17.046	27	631	176
2	Batu Mandi	8 862	8 590	17.452	18	970	118
3	Awayan	6 550	6 712	13.262	23	577	93
4	Tebing Tinggi	3 281	3 275	6.556	12	546	25
5	Paringin	9 334	9 164	18.498	16	1.156	185

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
6	Paringin Selatan	6 347	6 249	12.596	16	787	145
7	Juai	8 810	8 630	17.440	21	830	45
8	Halong	10 464	10 135	20.599	24	858	31
	Balangan	62 138	61 311	123.449	157	786	66

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2016

*) Angka Sementara Proyeksi Penduduk Tahun 2015

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin dengan luas 5,53% dari luas Kabupaten Balangan mendudukan urutan kedua setelah Kecamatan Halong dari segi jumlah penduduk yaitu sebanyak 18.498 jiwa atau sebesar 14,98% dari penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan dengan rasio 101. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 6.556 jiwa dengan rata-rata penduduk sebanyak 546 jiwa per desa atau di bawah rata-rata penduduk per desa di Kabupaten Balangan.

2.4 Kondisi IPM Tahun 2015

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

United Nations Development Programmes (UNDP) telah merekomendasikan

penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan daerah dan waktu lainnya.

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka akan tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.



Gambar 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015

IPM Kabupaten Balangan dengan perhitungan metode baru sebesar 62,88 pada tahun 2010 meningkat menjadi 65,34 pada tahun 2015. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPM Kabupaten Balangan menunjukkan kemajuan yang besar, namun masih dibawah rata-rata IPM provinsi Kalimantan Selatan dan status pembangunan manusia kabupaten Balangan masih stagnan pada kategori status sedang. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Balangan dengan Kabupaten/kota lainya di kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Perbandingan IPM Kabupaten/kota Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015

No	Kabupaten	Tahun										Peringkat	
		2010	Peringkat	2011	Peringkat	2012	Peringkat	2013	Peringkat	2014	Peringkat		2015
KALIMANTAN SELATAN		65.20		65.89		66.68		67.17		67.63		68.38	
1	TANAH LAUT	63.56	8	64.35	7	65.16	6	66.11	6	66.50	6	66.99	6
2	KOTA BARU	63.64	7	64.27	8	64.87	8	65.41	7	65.76	7	66.61	7
3	BANJAR	64.46	6	64.75	6	65.04	7	65.36	8	65.71	8	66.39	9
4	BARITO KUALA	60.24	12	60.93	12	61.62	12	62.12	12	62.56	12	63.53	12
5	TAPIN	64.89	5	65.41	5	65.92	5	66.48	5	66.99	4	67.67	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	62.80	11	63.44	10	64.03	10	64.59	10	65.25	10	66.31	10
7	HULU SUNGAI TENGAH	63.49	9	63.90	9	64.34	9	64.63	9	65.37	9	66.56	8
8	HULU SUNGAI UTARA	58.50	13	59.24	13	60.12	13	60.77	13	61.32	13	62.49	13
9	TABALONG	65.87	3	66.60	3	67.36	3	68.08	3	68.36	3	69.35	3
10	TANAH BUMBU	64.98	4	65.59	4	66.13	4	66.51	4	66.94	5	67.58	5
11	BALANGAN	62.88	10	63.28	11	63.69	11	64.03	11	64.44	11	65.38	11
12	KOTA BANJARMASIN	71.01	2	72.01	2	73.45	2	74.59	2	74.94	2	75.41	2
13	KOTA BANJAR BARU	75.49	1	76.23	1	76.67	1	77.10	1	77.30	1	77.56	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan perkembangan metode terbaru, IPM Kabupaten Balangan mengalami penurunan peringkat dari tahun 2010 ke 2011. Sedangkan perkembangan IPM dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat konstan pada peringkat ke 11. Jadi perlu upaya yang lebih keras mengingat beberapa kabupaten terlihat bisa meningkatkan IPM mereka ke arah yang lebih baik.

2.4.1 Peringkat Masing-masing Komponen IPM

2.4.1.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Selain angka harapan lama sekolah, indikator penting lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata- Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Berikut ini adalah Angka harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Balangan tahun 2014-2015 beserta perbandingan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.7 HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	HLS (Tahun)				RLS (Tahun)			
		Periode/Peringkat				Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat	2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		11.96		12.21		7.6		7.76	
1	TANAH LAUT	11.09	11	11.25	11	7.72	4	7.29	8
2	KOTA BARU	11.11	10	11.41	10	6.80	10	6.99	10
3	BANJAR	10.99	13	11.16	13	6.96	9	6.99	9
4	BARITO KUALA	11.54	6	11.72	7	6.47	12	6.81	11
5	TAPIN	11.17	9	11.21	12	7.17	8	7.43	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11.68	5	11.83	6	7.21	7	7.67	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11.42	7	11.94	5	7.27	5	7.52	5
8	HULU SUNGAI UTARA	12.1	3	12.78	3	6.63	11	6.73	12
9	TABALONG	11.96	4	12.32	4	7.95	3	8.24	3
10	TANAH BUMBU	11.2	8	11.42	9	7.26	6	7.38	7
11	BALANGAN	11.03	12	11.48	8	6.38	13	6.46	13
12	KOTA BANJARMASIN	13.73	2	13.76	2	9.88	2	9.90	2
13	KOTA BANJAR BARU	14.73	1	14.75	1	10.74	1	10.75	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.7 terlihat bahwa komponen HLS dan RLS pembentuk Indeks Pendidikan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia di Kabupaten Balangan masih rendah peringkat ke 12 untuk HLS pada tahun 2014 meskipun pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat 8 namun nilai HLS ini masih di Bawah HLS Provinsi tahun 2015 yaitu sebesar 12,21.

Ditinjau dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan tahun 2014-2015. Permasalahan ini harus menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi modal penting pada era kompetisi saat ini.

2.4.1.2 Kesehatan

Salah satu aspek penting pembangunan manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Komponen IPM yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH-e⁰). Berikut ini perbandingan derajat kesehatan yang ditunjukkan oleh nilai

Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.8 AHH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)			
		Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		67.47		67.8	
1	TANAH LAUT	68.22	6	68.62	6
2	KOTA BARU	68.14	7	68.49	7
3	BANJAR	65.32	9	65.97	9
4	BARITO KUALA	64.49	10	64.94	10
5	TAPIN	69.02	4	69.47	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	63.64	12	64.14	12
7	HULU SUNGAI TENGAH	64.33	11	64.83	11
8	HULU SUNGAI UTARA	62.09	13	62.49	13
9	TABALONG	69.39	3	69.74	3
10	TANAH BUMBU	68.84	5	69.19	5
11	BALANGAN	66.65	8	66.95	8
12	KOTA BANJARMASIN	70.02	2	70.32	2
13	KOTA BANJAR BARU	71.76	1	71.36	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.8 terlihat bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Balangan berada pada peringkat 8 baik pada tahun 2014 maupun 2015. Angka harapan hidup kabupaten Balangan pada tahun 2015 mencapai 66,95 tahun masih berada di bawah rata-rata Provinsi. Perlu upaya yang keras pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat pada tahun-tahun mendatang agar peringkat pembangunan manusia menjadi lebih baik.

2.4.1.3 Ekonomi (Kesejahteraan Masyarakat)

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan kemampuan daya beli atau konsumsi riil per kapita. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Berikut ini pengeluaran per kapita Kabupaten Balangan dan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.9 Pengeluaran Per kapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp. 000)			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
	KALIMANTAN	10,748		1089	
1	TANAH LAUT	10,632	8	10,753	8
2	KOTA BARU	10,536	10	10,645	10
3	BANJAR	12,004	3	12,185	3
4	BARITO KUALA	8,936	12	9,062	12
5	TAPIN	10,839	6	10,906	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11,077	4	11,161	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11,040	5	11,142	5
8	HULU SUNGAI UTARA	8,164	13	8,298	13
9	TABALONG	10,088	11	10,171	11
10	TANAH BUMBU	10,697	7	10,781	7
11	BALANGAN	10,617	9	10,736	9
12	KOTA BANJARMASIN	12,501	1	12,834	1
13	KOTA BANJAR BARU	12,376	2	12,467	2

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2015 Kabupaten Balangan mencapai Rp. 10.736.000,- per tahun dengan peringkat ke-9 dari 13 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kemampuan daya beli masyarakat ini relatif memiliki peringkat lebih baik dibandingkan dengan komponen pembentuk IPM lainnya seperti HLS dan RLS pada komponen Pendidikan dan AHH pada ukuran derajat kesehatan pada pembahasan sebelumnya.

Pengeluaran riil perkapita tertinggi di Kota Banjarmasin yaitu mencapai Rp. 12.834.000,- per kapita/tahun, dan terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp. 8.298.000,- per kapita/tahun. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata sebesar Rp. 10.891.000,- per kapita/Tahun.

2.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan

Pengeluaran penduduk dicatat dalam segala aspek, dari konsumsi makanan, non-makanan, dan aneka transaksi keuangan. Pengeluaran per kapita penduduk

Kabupaten Balangan di tahun 2015 paling besar di kelompok Rp 500.000,- hingga Rp 750.000,- perbulan dengan persentase sebanyak 35,20% dari total penduduk Balangan. Walaupun masih tercatat ada 1,84% penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah angka Rp 300.000,- per bulannya.

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 76,78%, dimana andil terbesar didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 65,30%. Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,02% terhadap total PDRB (dengan minyak bumi dan pertambangan batu bara) atas dasar harga berlaku.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Distribusi PDRB Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 (juta Rp)

NO	Lapangan Usaha	2014*		2015**	
		Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.005.985,0	10,73	1.081.429,5	11,48
2	Pertambangan dan Penggalian	6.453.129,2	68,82	6.152.916,5	65,30
3	Industri Pengolahan	141.979,7	1,51	160.316,6	1,70
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.499,8	0,02	2.162,0	0,02
5	Pengadaan Air	18.099,7	0,19	19.887,8	0,21
6	Konstruksi	327.495,0	3,49	376.382,9	3,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392.288,1	4,18	434.399,7	4,61
8	Transportasi dan Pergudangan	142.661,3	1,52	159.565,9	1,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.660,5	0,25	25.851,4	0,27
10	Informasi dan Komunikasi	104.387,6	1,11	112.070,6	1,19
11	Jasa Keuangan	22.401,6	0,24	25.283,8	0,27
12	Real Estate	73.752,0	0,79	80.484,5	0,85
13	Jasa Perusahaan	4.923,6	0,05	5.577,4	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	341.184,6	3,64	404.951,1	4,30
15	Jasa Pendidikan	224.435,5	2,39	266.420,4	2,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.416,8	0,66	71.700,3	0,76
17	Jasa lainnya	37.086,1	0,40	43.266,8	0,46
	PDRB dengan Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	9.376.386,2	100	9.422.667,1	100
	PDRB tanpa Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	2.927.069,6		3.274.386,0	

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku baik dengan sektor pertambangan, maupun tanpa sektor pertambangan di Kabupaten Balangan

tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan. Dilihat dari lapangan usaha, Kabupaten Balangan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 65,30%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,48%, dan perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61%. PDRB per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2015

PDRB Perkapita	2011	2012	2013	2014*	2015**
Dengan Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	64.977,72	67.366,73	72.705,60	77.287,68	76.328,42
ADHK (Ribu Rp)	58.239,96	61.046,24	64.801,00	67.482,17	68.383,19
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	19,10	3,68	7,93	6,30	(1,24)
ADHK (%)	6,75	4,82	6,15	4,14	1,34
Tanpa Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	19.038,17	20.356,27	21.935,97	24.12,725	26.524,20
ADHK (Ribu Rp)	18.007,05	18.503,65	19.097,85	19.691,48	20.507,24
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	9,63	6,92	7,76	9,99	9,93
ADHK (%)	3,69	2,76	3,21	3,11	4,14

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

*) Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Balangan dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan meningkat dari 64,98 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 76,33 juta rupiah pada tahun 2015. Namun dari sisi pertumbuhan, PDRB perkapita cenderung melambat hingga 2014 bahkan menurun di tahun 2015. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan cenderung tumbuh melambat selama periode 2011-2015, atau dari 6,75% pada tahun 2011 menjadi 1,34% pada tahun 2015. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang

sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan semakin meningkat setiap tahunnya dari 19,04 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 26,52 juta rupiah pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 8,85% setiap tahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit tetap tumbuh selama periode 2011-2015, atau dari 3,69% pada tahun 2011 menjadi 4,14% pada tahun 2015. Selanjutnya, untuk melihat pemerataan pendapatan yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan maka dapat dilihat dari angka gini ratio di Kalimantan Selatan pada tahun 2015, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.12:

Tabel 2.12 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Dan Daerah Lainnya Di Kalsel Tahun 2011 – 2015

No	Kabupaten	Gini Ratio Tahunan
1	Tanah Laut	0,27
2	Kotabaru	0,35
3	Banjar	0,32
4	Barito Kuala	0,37
5	Tapin	0,35
6	Hulu Sungai Selatan	0,31
7	Hulu Sungai Tengah	0,33
8	Hulu Sungai Utara	0,36
9	Tabalong	0,29
10	Tanah Bumbu	0,33
11	Balangan	0,4
12	Kota Banjarmasin	0,39
13	Kota Banjarbaru	0,35
	Kaimantan Selatan	0,35

Sumber: BPS Kalsel 2016

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Balangan mendapatkan tingkat gini ratio sebesar 0,4. Angka ini paling tinggi dibandingkan dengan angka gini ratio di setiap kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi

di Kalimantan Selatan.

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama tahun 2011-2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2011 sampai 2015 ditunjukkan dalam tabel 2.13:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (persen)

NO	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,99	2,68	3,44	4,06	4,45
2	Pertambangan dan Penggalian	10,30	7,63	9,34	6,45	1,94
3	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,74	4,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,61	8,50	2,61	12,99	16,70
5	Pengadaan Air	5,14	3,82	3,73	6,48	4,57
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,48	5,81	6,13	4,33	6,94
8	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,45	6,79	6,54	5,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	5,28	8,43	5,12	4,59
10	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,15	3,46	4,95	5,39
11	Jasa Keuangan	16,77	3,51	6,25	5,43	4,33
12	Real Estate	7,87	7,81	9,10	5,34	5,03
13	Jasa Perusahaan	4,40	5,43	7,89	7,54	7,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	5,90	5,69	5,54	8,71
15	Jasa Pendidikan	4,09	5,46	6,07	6,21	9,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	6,02	7,24	5,74	6,17
17	Jasa lainnya	7,36	5,35	3,64	5,78	6,34
	PDRB dengan Pertambangan Minyak	8,84	6,69	8,04	6,01	3,12
	PDRB tanpa subkategori pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara dan Lignit, dan Bijih Logam	5,72	4,60	5,05	4,97	5,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan cenderung melambat di tahun 2012 yaitu sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai

tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontribusi subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan.

2.5.3 Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan memiliki tenaga kerja yang relatif besar. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 75,38% penduduk Balangan berumur 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan 24,62% sisanya bukan angkatan kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013-2015

Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	77,24	78,26	75,38
- Bekerja	97,28	98,66	95,69
- Penganggur	2,72	1,34	4,31
Bukan Angkatan Kerja	22,76	21,74	24,62
- Sekolah	36,56	40,72	35,72
- Mengurus rumah tangga	50,98	45,69	53,81
- Lainnya	12,46	13,59	10,48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,24	78,26	75,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,72	1,34	4,31

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31%, meningkat dibandingkan dua tahun terakhir yang berkisar 1,34% di 2014 dan 2,72% 2013. Penyebab peningkatan pengangguran ini disebabkan perlambatan ekonomi Balangan.

Ditinjau dari sektor lapangan kerja utama, lebih dari separuh penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.16:

Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Primer	56,03	58,85	57,21
Sekunder	8,99	3,82	6,80
Tersier	34,98	37,36	35,99
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57,21%. Sementara sektor tersier dan sekunder menyerap tenaga kerja masing-masing 35,99 dan 6,80%. Penduduk Kabupaten Balangan yang bekerja pada sektor primer dan tersier lebih banyak berjenis kelamin perempuan, hal ini bertolak belakang dengan jumlah penduduk yang lebih banyak laki-laki. Selanjutnya angkatan kerja di kabupaten balangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.17:

Tabel 2.17 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015

Jenis Kegiatan Utama	Pendidikan yang Ditamatkan			
	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Senior keatas
Angkatan Kerja	24,36	31,38	12,06	32,20
Bukan Angkatan Kerja	19,35	24,84	35,85	19,96
Jumlah	23,13	29,77	17,92	29,18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,39	79,46	50,74	83,16

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA ke atas sebesar 32,20%, demikian pula dengan TPAK pada tahun 2015 sebesar 83,16%. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2.6 Pendidikan Kabupaten Balangan

2.6.1 Profil Pendidikan Kabupaten Balangan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pemberdayaan peserta didik baik sebagai subjek maupun objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di daerah itu. Selain itu pendidikan juga sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan menciptakan lapisan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Faktor utama dalam peningkatan pendidikan adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Balangan hingga tahun 2015 antara lain 113 TK, 172 SD, 23 SMP, 11 SMA serta 3 SMK; dengan tenaga guru tercatat sebanyak 316 orang guru TK, 1.602 orang guru SD, 318 orang guru SMP, 307 orang guru SMU serta 72 orang guru SMK (Dinas Pendidikan dan KDA Balangan, 2016). Kemudian jumlah siswa pada masing-masing tingkatan pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa jumlah siswa TK sebanyak 4.560 orang, 12.892 orang siswa SD, 2.960 orang siswa SMP, sedangkan untuk tingkat SMU dan SMK masing-masing memiliki 2.730 orang murid dan 1.027 orang siswa.

Disamping itu terdapat sarana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jumlah sarana pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama di wilayah kabupaten Balangan antara lain 7 Raudatul Athfal/Bustanul Athfal dengan jumlah guru sebanyak 28 orang dan siswa sebanyak 302 orang, 34 Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 325 guru dengan siswa sebanyak 2.328 orang, 17 Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah guru sebanyak 303 guru dengan 2.903 siswa serta 6 Madrasah Aliyah dengan 119 orang guru dan 1.135 siswa.

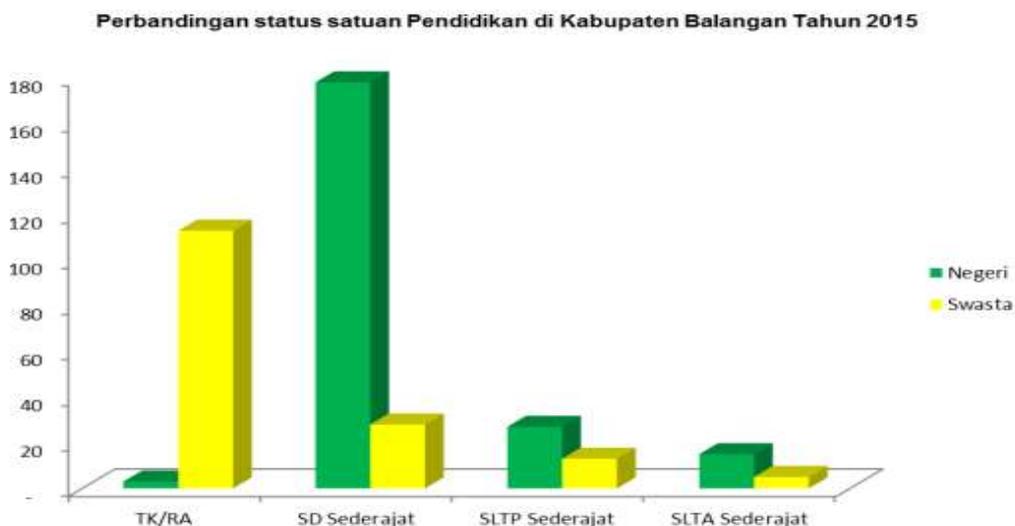
2.6.2 Satuan dan Sebaran Pendidikan

Satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK/RA), Pendidikan Dasar (SD Sederajat & SLTP) dan Pendidikan Menengah (SLTA sederajat). Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Balangan yakni 386 sekolah dengan perbandingan yakni 224 satuan pendidikan atau 58,03% berstatus negeri dan 162 satuan pendidikan atau 41,97% berstatus swasta, hal ini menunjukkan satuan pendidikan di Kabupaten Balangan hampir berimbang antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan yang dikelola masyarakat. Meskipun satuan pendidikan itu terlihat perbedaan yang nyata pada pendidikan TK sederajat dan SD Sederajat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah relatif baik pada pendidikan awal (pendidikan usia dini dan tingkat sekolah dasar), namun demikian proporsi terbesar satuan pendidikan yang dikelola masyarakat baru pada tingkat pendidikan usia dini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.2 berikut ini.

Tabel 2.18 Perbandingan Pengelolaan Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Ruang Kelas		Siswa		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	13	224	259	4,602	18	315
	TK	3	110	13	211	259	4,301	18	289
	RA	-	6	-	13	-	301	-	26
2	SD Sederajat	178	28	1,036	4	12,81	74	1,435	7
	SD	171	1	1,036	4	2,817	74	1,435	167
	MI	7	27						
3	SLTP Sederajat	28	13	135	3	2,884	96	305	13
	SMP	23	1	135	3	2,884	96	305	13
	MTs	5	12						
4	SLTA Sederajat	15	5	154	54	3,366	1,526	326	142
	SMA	9	3	81	42	1,540	1,190	179	98
	SMK	2	-	35	-	1,027	-	72	-
	MA	4	2	38	12	799	336	75	44
Satuan Pendidikan		224	162	1,338	285	19,32	6,298	2,08	477
Persentase (%)		58.03	41.97	82.439	17.560	75.421	24.578	81.374	18.625

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016



Gambar 2.6 Perbandingan Status Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagian besar dikelola masyarakat untuk tingkat pendidikan anak usia dini yaitu sebanyak 113 sekolah (97,41%) dan hanya 2,59% (3 sekolah) yang pengelolaannya oleh pemerintah baik itu dibawah dinas pendidikan ataupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah diatas 67% dikelola pemerintah, untuk tingkat SD sederajat 86,41% dikelola pemerintah baik oleh dinas pendidikan maupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk sekolah SLTA sederajat 75% pengelolaannya oleh pemerintah dan baru 25% yang dikelola swasta. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengelolaan pendidikan dan ketersediaan sekolah masih bergantung pada pemerintah Kabupaten Balangan sehingga pemerintah memerlukan penganggaran pendidikan dari kas pemerintah daerah yang memadai untuk membiayai sekolah-sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan di dalamnya. Satuan pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Distribusi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan								Kabupaten Balangan
		Lampihong	Batu Mandi	Awayan	Tebing Tinggi	Paringin	Paringin Selatan	Juai	Halong	
1	TK/RA	20	20	9	5	17	10	22	16	119
1a	TK	19	18	8	5	15	10	22	16	113
	Negeri Swasta	19	1	8	5	1	10	1	16	
	Swasta	19	17	8	5	14	10	21	16	
1b	RA	1	2	1		2				6
	Negeri Swasta	1	2	1		2				
2	SD/MI	31	26	26	12	23	18	34	36	206
2a	SD	26	22	21	12	19	17	24	31	172
	Negeri Swasta	26	22	21	12	19	16	24	31	
	Swasta	26	22	21	12	19	1	24	31	
2b	MI	5	4	5		4	1	10	5	34
	Negeri Swasta	1	3	1		1		1	1	
	Swasta	4	1	4		3	1	10	4	
3	SMP/MTs	3	6	4	3	6	6	6	7	41
3a	SMP	2	4	2	2	4	3	2	5	24
	Negeri Swasta	2	4	2	2	3	3	2	5	
	Swasta	2	4	2	2	1	3	2	5	
3b	MTs	1	2	2	1	2	3	4	2	17
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1		1	1	
	Swasta	1	1	1	1	1	3	4	1	
4	SMA/MA/SMK	2	3	2	1	3	4	2	4	21
4a	SMA	1	1	1	1	1	3	2	2	12
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1	2	2	2	
	Swasta	1	1	1	1	1	1	2	2	
4b	MA	1	1	1		1			2	6
	Negeri Swasta	1	1	1		1			1	
	Swasta	1	1	1		1			1	
4c	SMK		1			1	1			3
	Negeri Swasta		1			1	1			
	Swasta		1			1	1			
Jumlah		5	55	4	2	49	38	6	6	387

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.19, jumlah satuan pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Balangan yaitu 386 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 64 satuan pendidikan dan yang paling terendah terdapat di kecamatan Tebing Tinggi yaitu 21 satuan pendidikan. Namun demikian, meskipun belum merata fasilitas sekolah pada masing-masing

Kecamatan tetapi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Balangan secara keseluruhan sudah memiliki semua jenjang pendidikan dari TK/RA hingga SLTA sederajat. Kemudian satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasikan berdasarkan status negeri dan swasta. Distribusi seluruh satuan pendidikan berdasarkan status negeri dan swasta menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan (%)		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Lampihong	32	24	56	57.14	42.86	100
2	Batu Mandi	32	22	54	59.26	40.74	100
3	Awayan	26	15	41	63.41	36.59	100
4	Tebing Tinggi	15	6	21	71.43	28.57	100
5	Paringin	27	22	49	55.10	44.90	100
6	Paringin Selatan	22	16	38	57.89	42.11	100
7	Juai	29	35	64	45.31	54.69	100
8	Halong	41	22	63	65.08	34.92	100
Total		224	162	386	58.03	41.97	100

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.20, Jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri yaitu 224 satuan pendidikan. Satuan pendidikan berdasarkan berstatus negeri yang paling banyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 41 satuan pendidikan dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 15 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang berstatus swasta yaitu 162 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan berdasarkan status swasta yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 35 satuan pendidikan dan kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan satuan pendidikan yang paling sedikit yang dikelola swasta yaitu 6 satuan pendidikan.

Berdasarkan paparan data pada tabel dan grafik di atas selanjutnya dapat dihitung rasio guru dengan murid, rasio murid dengan ruang kelas dan rasio sekolah dengan ruang kelas. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid di Kabupaten Balangan menunjukkan angka yang relatif sangat baik yakni 1:14, angka ini merupakan angka yang sangat ideal sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana

pendidikan mengenai rasio guru yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Uraian mengenai kondisi rasio jumlah guru dengan jumlah murid disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Rasio Jumlah Guru dengan Siswa di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	14.39	14.61
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	8.93	10.57
	SD	171	1	7	74	1,435	167		
	MI	7	27	12,817					
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,128	441	180	10.74	6.27
	SMP	23	1	2,884	76	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052	136	167		
4	SLTA Sederajat	16	5	3,366	1,526	326	142	10.33	10.75
	SMA	9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMK	3	-	1,027	-	72	-		
	MA	4	2	799	336	75	44		

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Selanjutnya rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas secara umum di Kabupaten Balangan menunjukkan angka rasio yang paling tinggi 1:28, angka ini sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya mengenai rasio jumlah guru dengan siswa yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Rasio jumlah siswa dengan ruang kelas secara prinsip adalah untuk mengetahui rasio siswa setiap rombongan belajar, sehingga di Kabupaten Balangan secara keseluruhan telah memenuhi syarat jumlah ruang kelas untuk setiap rombongan belajar. Uraian rasio jumlah murid dengan jumlah ruang kelas disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rasio Jumlah Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	19.92	20.54
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	12.37	18.50
	SD	171	1	12,817	74	1,435	167		
	MI	7	27						
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,148	305	13	24.41	21.26
	SMP	23	1	2,884	96	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052				

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
4	SLTA	15	5	3,366	1,526	326	142	21.86	28.26
	Sederajat	9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMA	2	-	1,027	-	72	-		
	SMK	4	2	799	336	75	44		
	MA								

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

2.6.3 Capaian Rata-rata Lama dan Harapan Sekolah

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat di suatu daerah maka semakin besar akses dan peluang daerah tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Sektor pendidikan merupakan sektor yang juga menjadi permasalahan utama dalam pembangunan manusia. Kebijakan pemerintah dengan Program Wajib Belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping upaya peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, perlu ada upaya untuk pemerataan pendidikan.

Salah satu target capaian suatu pembangunan manusia adalah menciptakan manusia yang pintar dan berkualitas dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dan urgen bagi pembangunan suatu bangsa.

Tabel 2.23 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/ belum Pernah Sekolah	0.85	3.47	2.16
Tidak/ Bbelum Tamat SD	22.25	31.73	26.99
SD/ Sederajat	34.49	33.37	33.93
SLTP	21.46	16.42	18.94
SLTA	16.38	11.03	13.71

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Diploma Keatas	4.57	3.98	4.27
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pendidikan penduduk Kabupaten Balangan sebagian besarnya masih berpendidikan SD/ sederajat ke bawah. Bahkan sekitar 26 persen di antaranya tidak tamat SD/ sederajat dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sementara penduduk Kab. Balangan yang melanjutkan hingga pendidikan tinggi hanya pada kisaran 4 persen. Melihat hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Kab. Balangan untuk meningkatkan pendidikan penduduknya. Pemerintah harus memacu pembangunan pendidikan agar tingkat pendidikan penduduk Kab. Balangan terus meningkat. Namun demikian tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendidikan ini. Usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak terlepas dukungan dari semua pihak, terutama orang tua dan masyarakat.

Selain melihat tingkat pendidikan suatu daerah, indikator utama dalam pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan harapan lama sekolah (expected of years schooling), serta angka partisipasi sekolah. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menjadi komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM. Dua indikator ini menjadi ukuran seberapa besar dan seberapa lama partisipasi masyarakat usia sekolah yang bersekolah, serta melihat sejauh mana seseorang memiliki harapan untuk terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada metode baru usia 25 tahun ke atas digunakan dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap

level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalani oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah.

Tabel 2.24 Konversi Tahun Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pendidikan

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (th)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	16

Sumber : BPS

Secara relatif dibandingkan dengan angka Kalimantan Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan masih berada di bawah penduduk Kalimantan Selatan. Problema ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Kabupaten Balangan agar ke depannya ada peningkatan rata-rata lama sekolah sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Namun dari sisi pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan sebesar 1,52 persen per tahun, masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan (1,03) dan Indonesia (0,92).

Tabel 2.25 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2012-2016

Wilayah	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Balangan	6.21	6.23	6.36	6.46	6.71	1.52
Provinsi Kalsel	7.48	7.59	7.6	7.76	7.89	1.03
Indonesia	7.59	7.61	7.73			0.92

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Indikator lain dalam melihat pembangunan sektor pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (*Expected Years School/EYS*). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS ini menggantikan AMH dalam penghitungan IPM metode yang lama. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar anak SD yang dimulai dari usia 7 tahun.

Tabel 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2011-2014

Wilayah	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kab. Balangan	10.49	10.63	10.85	11.03
Provinsi Kalsel	11.14	11.54	11.67	11.96
Indonesia	11.44	11.68	12.1	12.39

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Balangan pada tahun 2014 adalah 11,03 tahun. Angka rata-rata harapan lama sekolah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2011, rata-rata harapan lama sekolah adalah 10,49 tahun dan meningkat menjadi 11,03 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rata-rata harapan penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 11,03 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Balangan mempunyai harapan berpendidikan sampai dengan kelas 2 atau 3 SMA sederajat. Meskipun demikian sebagaimana dengan rata-rata lama sekolah sebelumnya, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan juga masih berada di bawah angka provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga perlu program-program yang dapat mengakselerasi tingkat pendidikan Kabupaten Balangan menjadi lebih tinggi lagi.

Harapan lama sekolah sangat terkait dengan angka partisipasi sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, semakin meningkat pula harapan lama sekolah. Oleh karena itu kita bisa melihat angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Balangan. Dalam hal ini yang digunakan hanya dari angka partisipasi murni (APM) yang sejalan dengan penghitungan harapan lama sekolah. Karena keterkaitan itu, maka harapan lama sekolah dapat ditingkatkan dengan upaya

pengecahan seminim mungkin angka putus sekolah.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	APS				
	a. SD Sederajat	104.71%	102,54%	102.69%	96.11%
	b. SLTP	77.70%	91.61%	89.19%	82.51%
	c. SLTA	52.50%	46.67%	50.90%	54.97%
2	APK				
	a. SD Sederajat	116.57%	116.99%	115.04%	106.45%
	b. SLTP	99.78%	90.78%	97.60%	93.32%
	c. SLTA	74.81%	78.33%	81.58%	82.66%
3	APM				
	a. SD Sederajat	97.10%	95.27%	93.42%	87.41%
	b. SLTP	58.81%	64.13%	63.94%	60.60%
	c. SLTA	50.14%	39.69%	43.88%	47.71%

Sumber : Diknas Balangan 2016

APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, APM membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan, sebagaimana yang telah diatur pemerintah mengenai usia sekolah menurut jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD merupakan perbandingan antara jumlah jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD berumur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SLTP merupakan perbandingan antara jumlah jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTP berumur 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SLTA merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTA berumur 16-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

APM pada semua jenjang baik SD (7-12), SLTP (13-15) dan SLTA (16-18) menunjukkan tren yang meningkat sejak 2012 hingga 2015. APM di tingkat sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 95,67 persen, Angka ini menunjukkan terdapat 95-96 orang anak usia 7-12 tahun di antara 100 penduduk kelompok usia 7-12 sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Pada jenjang pendidikan lanjutan pertama APM sebesar 77,12 persen, menunjukkan ada sebanyak 77-78 anak usia 13-15 tahun dari 100 orang yang sama usia dengan mereka sedang mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Pada jenjang pendidikan lanjutan atas APM Kabupaten semakin menunjukkan penurunan, yakni sebesar 53,57 persen memberi arti hanya sebanyak 53-54 orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang mengikuti pendidikan di bangku SLTA/ sederajat, selebihnya sekitar 46 orang tidak bersekolah.

Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait agar dapat mewujudkan angka partisipasi murni sekolah di balangan khususnya untuk tingkat pendidikan menengah menjadi lebih baik lagi. Terkait dengan angka partisipasi murni sekolah penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2015 yang cenderung menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan (SD 95,67%, SLTP 77,12% dan SLTA 53,57%), perlu dipikirkan bagaimana cara mempertahankan anak yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas agar dapat menamatkan pendidikannya bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.7 Kesehatan Kabupaten Balangan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat

kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

2.7.1 Sarana dan Prasarana

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang mulia ini diperlukan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan secara berkesinambungan dan paripurna meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan yang membutuhkan sarana/fasilitas kesehatan.

Penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan hal ini masih merupakan tantangan bagi negara Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Balangan yang merupakan daerah pemekaran. Menjawab tantangan ini diperlukan perencanaan sehingga penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan bermutu berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan selaku koordinator pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan telah menyusun strategi diantaranya melalui revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang melalui peningkatan akses pada pelayanan kesehatan, terutama dikecamatan-kecamatan selain diibukota kabupaten.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan

kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari: (1) Upaya promosi kesehatan; (2) Upaya kesehatan lingkungan; (3) Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana; (4) Upaya perbaikan gizi; (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) Upaya pengobatan.

Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Balangan pada tahun 2015 sebanyak 1 unit dan belum terdapat rumah sakit khusus. Jumlah puskesmas di Kabupaten Balangan sampai tahun 2015 sebanyak 58 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 1 unit puskesmas rawat inap dan 11 unit puskesmas non rawat inap, 14 puskesmas keliling dan 22 puskesmas pembantu. Adapun jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/ KOTA	TN/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			1				1
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			1				1
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			10				10
2	PUSKESMAS NON RAWAT			11				11
3	PUSKESMAS KELILING			14				14
4	PUSKESMAS PEMBANTU			22				22
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN							-
2	BALAI PENGOBATAN/KLINIK							-
3	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
4	PRAKTIK DOKTER						23	23
5	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL						1	1
6	BANK DARAH RUMAH SAKIT							-
7	UNIT TRANSFUSI DARAH			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-
3	USAHA KECIL OBAT							-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							-
6	APOTEK						3	3
7	TOKO OBAT						17	17
8	PENYALUR ALAT KESEHATAN							-

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Keterangan

- Praktik dokter perorangan terdiri dari dokter umum dan dokter gigi
- Toko obat terdiri dari toko obat tidak berizin 13 (Tiga Belas) buah dan toko obat berizin 4 (Empat) buah

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain: menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Di Kabupaten Balangan terdapat 84 posyandu pratama, 88 madya dan 4 mandiri sedangkan posyandu aktif sebanyak 139 buah.

Berdasarkan data posyandu aktif terbanyak dikecamatan Paringin sebanyak 29, 25 dikecamatan Juai, 23 di kecamatan Paringin Selatan dan Awayan, 22 dikecamatan Batumandi, 9 dikecamatan Tebing Tinggi, 8 dikecamatan Juai, sedangkan dikecamatan Halong tidak ada posyandu yang aktif. Secara garis jumlah posyandu sudah cukup banyak namun tingkat sebaran tidak merata, contoh dikecamatan Paringin sebanyak 29 posyandu aktif sedangkan dikecamatan Halong tidak ada satupun posyandu aktif. Adapun jumlah posyandu menurut strata, kecamatan dan puskesmas Kabupaten Balangan tahun 2015 dilihat pada tabel 2.23:

Tabel 2.23 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF			
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Paringin	Paringin	29	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	29	29	100,0	
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	4,2	21	87,5	0	0,0	2	8,3	24	23	95,8	
3	Lampihong	Lampihong	20	95,2	1	4,8	0	0,0	0	0,0	21	1	4,8	
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0,0	6	28,6	1	4,8	0	0,0	7	7	100,0	
5	Batumandi	Batu Mandi	0	0,0	0	0,0	15	93,8	1	6,3	16	16	100,0	
6	Batumandi	Lok Batu	2	25,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	8	6	75,0	
7	Awayan	Awayan	0	0,0	22	95,7	0	0,0	1	4,3	23	23	100,0	
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	4	30,8	8	61,5	1	7,7	0	0,0	13	9	69,2	
9	Juai	Juai	0	0,0	17	100,0	0	0,0	0	0,0	17	17	100,0	
10	Juai	Pirsus	0	0,0	7	87,5	1	12,5	0	0,0	8	8	100,0	
11	Halong	Halong	21	262,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	0	0,0	
12	Halong	Uren	7	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0	0,0	
JUMLAH (KAB/KOTA)			84	43,3	88	45,4	18	9,3	4	2,1	194	139	71,6	
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA												1,4		

Sumber: Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Sebagai perpanjangan tangan pelayanan kesehatan, agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat maka sudah cukup banyak dibangun Puskesmas, untuk terlayannya masyarakat. Pembangunan sarana

kesehatan juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi pada beberapa sarana kesehatan yang ada, seperti Pustu dan Polindes.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan perlu digali potensi yang ada pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) dengan penekanan atau fokus pelayanan pada upaya promotif dan preventif. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sangat berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di kabupaten Balangan terdapat 105 poskesdes, 28 polindes dan 14 posbindu. Sebaran puskesmas terbanyak berada kecamatan Awayan yaitu sebanyak 23, sedangkan yang paling sedikit berada dikecamatan Paringin Selatan yaitu sebanyak 2. Sebaran polindes terbanyak diecamatan Paringin Selatan dan Awayan, sedang dikecamatan lainnya tidak ada. Sedangkan data sebaran jumlah Posbindu terbanyak dikecamatan Batu Mandi sebanyak 6, dikecamatan Awayan ada 4, 2 dikecamatan Lampihong sedangkan dikecamatan lainnya tidak ada.

Tingkat sebaran poskesdes, polindes dan posbindu di kabupaten Balangan belum merata, hal tersebut dapat dilihat pada data jumlah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) menurut kecamatan pada tabel 2.24:

Tabel 2.24 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN	PAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA		
				POSKESDES	POLINDES	POSBINDU
1	2	3	4	5	6	7
1	Paringin	Paringin	16	7	0	-
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	2	14	-
3	Lampihong	Lampihong	20	13	0	2
4	Lampihong	Tanah Habang	7	6	0	-
5	Batumandi	Batu Mandi	12	11	0	2
6	Batumandi	Lok Batu	6	4	0	4
7	Awayan	Awayan	23	23	14	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	8	0	-
9	Juai	Juai	16	12	0	-
10	Juai	Pirsus	5	5	0	-

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN	PAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA		
				POSKEDES	POLINDES	POSBINDU
1	2	3	4	5	6	7
11	Halong	Halong	17	9	0	-
12	Halong	Uren	7	5	0	2
JUMLAH (KAB/KOTA)			157	105	28	14

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Desa yang dimaksud di sini dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desa siaga adalah

membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu). Di kabupaten Balangan terdapat 53 kategori pratama, 52 madya, 2 purnama dan 1 mandiri.

Sebaran desa siaga menurut kecamatan terbanyak berada dikecamatan Lampihong yaitu sebanyak 27, 22 dikecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai 21, 18 dikecamatan Batu Mandi, 12 dikecamatan Tebang Tinggi, 7 dikecamatan Halong, 1 dikecamatan Awayan. Sedangkan dikecamatan Paringin tidak ada. Tingkat sebaran desa siaga di kabupaten Balangan belum merata hal ini terlihat pada jumlah di beberapa kecamatan mencapai 27 (kecamatan Lampihong) sedangkan dikecamatan Awayan hanya 1 desa siaga saja. Adapun jumlah desa siaga menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.25:

Tabel 2.25 Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA					JUMLAH	%
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Paringin	Paringin	16	-	0	-	0	-	0	
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	-	21	-	1	22	137,50	
3	Lampihong	Lampihong	20	19	1	-	0	20	100	
4	Lampihong	Tanah Habang	7	-	6	1	0	7	100	
5	Batumandi	Batu Mandi	17	-	11	1	0	12	70,59	
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	-	-	0	6	100	
7	Awayan	Awayan	6	1	-	-	0	1	16,67	
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	23	12	-	-	0	12	52,173913	
9	Juai	Juai	16	3	13	-	0	16	100	
10	Juai	Pirsus	5	5	-	-	0	5	100	
11	Halong	Halong		-	0	-	0	-	0	
12	Halong	Uren	17	7	0	-	0	7	41,1764706	
JUMLAH (KAB/KOTA)			149	53	52	2	1	108	72,48	

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, *physician* (dokter fisit), maupun *dentist* (dokter gigi). Di Kabupaten Balangan sendiri terdapat 6 orang dokter spesialis, 22 dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Sebaran di RSUD Balangan terdapat 6 orang dokter spesialis, 11 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Sebaran data dokter umum yang ada dikecamatan yang ada di Balangan terbagi atas, 2 orang di kecamatan Paringin Selatan dan Halong. Sedangkan dikecamatan lain ada masing-masing dokter umum, kecuali di kecamatan Tebing Tinggi. Sebaran dokter gigi hanya ada 1 orang dikecamatan Halong, sedangkan kecamatan lain tidak ada. Dengan melihat data sebaran tenaga medis maka dapat digambarkan bahwa dikecamatan Batu Mandi dan Tebing Tinggi belum ada dokter umum yang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2015 terdapat sarana puskesmas sebanyak 11 buah, dimana jumlah penduduk tahun 2015 hasil proyeksi penduduk adalah 123.449 jiwa sehingga secara rata-rata setiap puskesmas dapat melayani 11.223 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah dokter yang terdapat di Kabupaten Balangan sebanyak 32 orang. Maka dapat dikatakan rata-rata 1 orang dokter melayani 3.857 Orang. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini yang mengakibatkan kurangnya pelayanan di bidang kesehatan terhadap masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi himbauan kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan tenaga dokter dalam rekrutmen pegawai di masa yang akan datang. Berikut gambaran jumlah tenaga medis difasilitas kesehatan di kabupaten Balangan:

Tabel 2.26 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Puskesmas Paringin			-	-	-	-	-	-	-									
2	Puskesmas Paringin Selatan			-	1	1	2	1	1	2									
3	Puskesmas Lampihong			-	1	-	1	1	-	1									
4	Puskesmas Tanah Habang			-	-	1	1	-	1	1									
5	Puskesmas Batu Mandi			-	1	-	1	1	-	1									
6	Puskesmas Lok Batu			-	-	-	-	-	-	-									
7	Puskesmas Awayan			-	-	1	1	-	1	1									
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-	-	-	-	-	-	-									
9	Puskesmas Juai			-	-	1	1	-	1	1									
10	Puskesmas Pirsus			-	-	1	1	-	1	1									
11	Puskesmas Halong			-	2	-	2	2	-	2		1	1					1	1
12	Puskesmas Uren			-	1	-	1	1	-	1									
				-	-	-	-	-	-	-									
	SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)	-	-	-	6	5	11	6	5	11	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	1 RSUD Balangan	4	2	6	2	9	11	6	11	17	1		1					1	1
				-	-	-	-	-	-	-									
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	4	2	6	2	9	11	6	11	17	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																		

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			-			-		-			-			-			-		-
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			-			-		-			-			-			-		-
	JUMLAH (KAB/KOTA)	4	2	6	8	14	22	12	16	28	1	1	2	-	-	-	1	1	2	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			4,9			18			22,7			1,6			-			1,6	

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : -^a termasuk S3

- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga medis yang juga sangat berperan terhadap pelayanan kesehatan adalah perawat. Perawat sendiri terbagi atas bidan, perawat dan perawat gigi. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 176 bidan, 114 perawat dan 15 perawat gigi.

Sebaran Bidan terbanyak sebanyak 25 bidang ada di puskesmas Awayan, sedangkan yang paling sedikit sebanyak 6 orang di puskesmas Tanah Habang dan Pirsus. Sebaran Perawat paling banyak 16 orang di puskesmas Halong sedangkan paling sedikit berada di puskesmas Tanah Habang sebanyak 3 orang. Sedangkan Perawat Gigi terbanyak di puskesmas yang berada di puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Lok Batu dan Awayan sebanyak 2 orang. Sedangkan di puskesmas Tanah Habang, Pirsus dan Uren tidak ada Perawat Gigi. Dengan melihat data sebaran tenaga keperawatan maka dapat digambarkan bahwa untuk bidan dan perawat sudah cukup merata sedangkan untuk perawat gigi masih ada di kecamatan yang hanya memiliki 1 orang perawat gigi sedangkan yang lainnya minimal memiliki 2 orang perawat gigi.

Jumlah bidan tahun 2015 adalah 215 orang dan perawat 246 orang. Secara rata-rata dari seluruh jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 250 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2015. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan, merupakan salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya angka harapan hidup. Hal ini diduga dipicu juga oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih suka menggunakan tenaga kesehatan tradisional atau bahkan mengobati sendiri. Adapun gambaran jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.27:

Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	BIDAN	PERAWAT ^a			PERAWAT GIGI		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puskesmas Paringin	21	2	9	11	1	1	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	22	3	7	10	0	2	2
3	Puskesmas Lampihong	18	2	7	9	0	2	2
4	Puskesmas Tanah Habang	6	1	2	3	0	0	0
5	Puskesmas Batu Mandi	14	3	10	13	0	2	2
6	Puskesmas Lok Batu	7	2	6	8	1	1	2
7	Puskesmas Awayan	25	3	4	7	0	2	2
8	Puskesmas Tebing Tinggi	13	6	5	11	1	0	1
9	Puskesmas Juai	18	3	3	6	0	1	1
10	Puskesmas Pirsus	6	4	3	7	0	0	0
11	Puskesmas Halong	19	6	10	16	0	1	1
12	Puskesmas Uren	7	5	8	13	0	0	0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		176	40	74	114	3	12	15
1	RSUD Balangan	39	36	78	114	1	2	3
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		39	36	78	114	1	2	3
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0	0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0	0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0	0			0
JUMLAH (KAB/KOTA)		215	76	152	228	4	14	18
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK		350,67			184,69			14,58

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - ^a termasuk perawat anastesi dan perawat spesialis
- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan, serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 21 tenaga teknis kefarmasian dan 7 orang apoteker. Sebaran dikecamatan Paringin dan Halong terdapat 2 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang dipuskesmas Paringin Selatan, Lampihong, Tanah Habang, Batu Mandi, Lok Batu, Juai, Pirsus dan Uren. Sedangkan Awayan dan Uren tidak ada tenaga teknis kefarmasian. Jumlah tenaga kefarmasian tahun 2015 adalah 40 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan. Adapun gambaran jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel

2.28:

Tabel 2.28 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas Paringin	-	2	2			-	-	2	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	-	1	1			-	-	1	1
3	Puskesmas Lampihong	-	1	1			-	-	1	1
4	Puskesmas Tanah Habang	-	1	1			-	-	1	1
5	Puskesmas Batu Mandi	-	1	1			-	-	1	1
6	Puskesmas Lok Batu	-	1	1			-	-	1	1
7	Puskesmas Aawayan	-	-	-			-	-	-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi	-	-	-			-	-	-	-
9	Puskesmas Juai	-	1	1			-	-	1	1
10	Puskesmas Pirsus	-	1	1			-	-	1	1
11	Puskesmas Halong	1	1	2			-	1	1	2
12	Puskesmas Uren	-	1	1			-	-	1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		1	11	12	-	-	-	1	11	12
1	RSUD Balangan	6	15	21	-	7	7	6	22	28
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		6	15	21	-	7	7	6	22	28
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				-			-			-
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				-			-			-
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-			-
JUMLAH (KAB/KOTA)		7	26	33	-	7	7	7	33	40
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				26,7			5,7			32,4

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - a termasuk analis farmasi, asisten apoteker, sarjana farmasi

- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Ahli Gizi atau dietitian adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika, yaitu studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus untuk mencegah dan mengobati penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dikatakan bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374/MENKES/SK/III/2007, dikatakan bahwa ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai

tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit.

Tugas pokok *nutrisionis* adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit manapun di institusi kesehatan lainnya. *Nutrisionis* bersama dengan profesi lainnya saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi sekaligus status gizinya. Sedangkan Kegiatan *Nutrisionis* berkaitan dengan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan hasil laporan kegiatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 2 tenaga fisioterapis. Adapun gambaran jumlah tenaga gizi di fasilitas kesehatan di kabupaten Balangan masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.29:

Tabel 2.29 Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KETERAPIAN FISIK												TOTAL		
		FISIOTERAPIS			OKUPASI TERAPIS			TERAPIS WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Puskesmas Paringin			-			-			-			-	-	-	-
2	Puskesmas Paringin Selatan			-			-			-			-	-	-	-
3	Puskesmas Lampihong			-			-			-			-	-	-	-
4	Puskesmas Tanah Habang			-			-			-			-	-	-	-
5	Puskesmas Batu Mandi			-			-			-			-	-	-	-
6	Puskesmas Lok Batu			-			-			-			-	-	-	-
7	Puskesmas Awayan			-			-			-			-	-	-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-			-			-			-	-	-	-
9	Puskesmas Juai			-			-			-			-	-	-	-
10	Puskesmas Pirsus			-			-			-			-	-	-	-
11	Puskesmas Halong			-			-			-			-	-	-	-
12	Puskesmas Uren			-			-			-			-	-	-	-
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	RSUD Balangan	1	1	2										1	1	2
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SARANA PELAYANAN KESEHATAN				-			-			-			-	-	-	-
KLINIK DI INSTITUSI				-			-			-			-	-	-	-
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-			-			-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)		1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK																1,6

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga teknik elektromedik adalah seorang yang berpendidikan dalam bidang teknik elektromedik dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik,

berdasarkan rekomendasi atau akreditasi organisasi profesi teknik elektromedik. Pelayanan teknik elektromedik mencakup perencanaan, pelaksanaan, wasdal, dan berperan serta dalam pengadaan/penerimaan, evaluasi dan pendayagunaan alat kesehatan serta bimbingan pengoperasian alat kesehatan.

Alat kesehatan menurut UU.No.23 tentang kesehatan adalah: Instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis. Berdasarkan data dikabupaten Balangan terdapat 5 orang radiografer, 1 orang tenaga elektromedis, 13 analisis kesehatan, 2 refraksonis optisen, 7 orang tenaga rekam medis dan informasi kesehatan. Sebaran tenaga keteknisan medis hanya ada pada analisis kesehatan, dimana terdapat 2 orang dipuskesmas Paringin, sedangkan dipuskesmas lainnya hanya terdapat 1 orang tenaga analisis kesehatan.

2.7.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup adalah jumlah bayi yang meninggal pada usia 1 hari sampai dengan 1 hari sebelum bayi tersebut merayakan ulang tahunnya yang pertama dalam suatu wilayah tertentu selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup (KH) diwilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1000.

AKB merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Ia tidak hanya berguna dalam memberikan informasi tentang bayi, tetapi juga sebagai gambaran penduduk dengan tingkat sosial ekonominya. Selain itu AKB merupakan indikator yang sensitif dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan keefektifan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan perinatal. Berdasarkan data tahun 2015 diketahui angka kematian bayi sebanyak 4 bayi. Angka kematian bayi sangat berkaitan erat dengan jumlah ibu hamil dan ibu yang melahirkan pada saat itu sehingga jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun dalam kurun waktu satu tahun akan mempengaruhi capaian angka kematian bayinya. Dari 2.446 jumlah kelahiran terdapat 4 bayi yang

meninggal di Kabupaten Balangan pada tahun 2015. Sebarannya terdapat 2 orang di kecamatan Tebing Tinggi, masing-masing 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Halong. Adapun gambaran jumlah kelahiran dan kematian bayi menurut jenis kelamin, kecamatan dan puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN									IUFD
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paringin	Paringin	227	2	229	175	4	179	402	0	402	4
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	120	0	120	127	1	128	247	1	248	2
3	Lampihong	Lampihong	145	1	146	116	0	116	261	0	261	0
4	Lampihong	Tanah Habang	35	0	35	40	0	40	75	0	75	0
5	Batumandi	Batu Mandi	122	1	123	122	2	124	244	0	244	5
6	Batumandi	Lok Batu	48	0	48	40	0	40	88	0	88	0
7	Awayan	Awayan	122	0	122	124	2	126	246	0	246	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	68	2	70	65	2	67	133	2	135	0
9	Juai	Juai	112	1	113	143	1	144	255	0	255	1
10	Juai	Pirsus	43	0	43	34	1	35	77	0	77	2
11	Halong	Halong	155	1	156	154	2	156	309	0	309	2
12	Halong	Uren	60	0	60	45	1	46	105	1	106	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			1.257	8	1.265	1.185	16	1.201	2.442	4	2.446	
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				6,3			13,3			1,6		20

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Sedangkan angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Kematian ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Angka kematian neonatal di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 11,1. Angka kematian neonatal tertinggi di Kecamatan Paringin dan yang terendah di kecamatan Awayan. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 14,7. Dibandingkan

dengan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 17/1.000 kelahiran hidup maka AKB di kabupaten Balangan Tengah tahun 2015 sudah melampaui target. AKB tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–5 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. AKABA kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 16,8. Dibandingkan dengan cakupan yang diharapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup, AKABA Kabupaten Balangan tahun 2015 sudah melampaui target. AKABA tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Tekait kematian neonatal, bayi dan balita dapat dilihat pada tabel 2.31:

Tabel 2.31 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Paringin	Paringin	3	4	0	4	1	1	1	2	4	5	1	6
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	3	5	1	6	2	2	0	2	5	7	1	8
3	Lampihong	Lampihong	2	3	0	3	2	3	0	3	4	6	0	6
4	Lampihong	Tanah Habang	1	2	0	2	0	1	0	1	1	3	0	3
5	Batumandi	Batu Mandi	2	2	0	2	1	2	0	2	3	4	0	4
6	Batumandi	Lok Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Awayan	Awayan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	3	3	1	4	1	1	1	2	4	4	2	6
9	Juai	Juai	3	3	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3
10	Juai	Pirsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Halong	Halong	2	2	0	2	0	1	0	1	2	3	0	3
12	Halong	Uren	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
JUMLAH (KAB/KOTA)			19	24	2	26	8	12	3	15	27	36	5	41
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			15,1	19,1	1,6	20,7	6,8	10,1	2,5	12,7	11,1	14,7	2,0	16,8

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

2.7.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu dapat menunjukkan

indikasi tingkat kesakitan seorang ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil hingga melahirkan. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan (BPS, 2015)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) juga berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Oleh karena itu Sektor kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator angka harapan hidup dapat diukur dengan melihat angka kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu.

AKI adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun di bagi jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada periode yang sama dikalikan 100.000. AKI mencerminkan risiko yang mengancam ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan. Angka ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, gizi, sanitasi dan yang tak kalah pentingnya adalah pelayanan kesehatan ibu. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu di Kabupaten Balangan ada sebanyak 6 orang. Berdasarkan data terdapat 2 orang dikecamatan Paringin dan Batu Mandi, 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun gambaran jumlah kematian ibu dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU																
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU				
				<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Paringin	Paringin	402	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	
3	Lampihong	Lampihong	261	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Lampihong	Tanah Habang	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	244	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	
6	Batumandi	Lok Batu	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Awayan	Awayan	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Juai	Juai	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Juai	Pirus	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Halong	Halong	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Halong	Uren	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU																
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU				
				<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	
JUMLAH (KAB/KOTA)			2.442	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	2	0	3	1	4	1	6
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																				246

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan: - Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas

- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

2.7.4 Angka Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 27 jumlah temuan dan semua telah mendapat perawatan. Sebaran kasus gizi buruk berdasarkan kecamatan dengan rincian terdapat 4 orang di kecamatan Halong, 3 orang di kecamatan Juai, 2 orang di kecamatan Batu Mandi dan masing-masing 1 orang di kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Lampihong dan Tebing Tinggi. Keseluruhan kasus gizi buruk sudah mendapat perawatan semua. Adapun gambaran jumlah cakupan kasus gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Balangan bisa dilihat pada tabel 2.33:

Tabel 2.33 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KASUS BALITA GIZI BURUK								
			JUMLAH DITEMUKAN			MENDAPAT PERAWATAN					
			L	P	L+P	L		P		L + P	
			S	%	S	%	S	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Paringin	Paringin	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	3	4	1	100,0	3	100,0	4	100,0
3	Lampihong	Lampihong	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
4	Lampihong	Tanah Habang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Batumandi	Batu Mandi	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
6	Batumandi	Lok Batu	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
7	Awayan	Awayan	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
9	Juai	Juai	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
10	Juai	Pirsus	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
11	Halong	Halong	4	7	11	4	100,0	7	100,0	11	100,0
12	Halong	Uren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)			13	14	27	13	100,0	14	100,0	27	100,0

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

2.7.5 Sanitasi dan Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka kejadian penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan air bersih adalah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Sarana air minum terdiri atas sumur gali, sumur bor, terminal air, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan perpipaan. Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 59,4 persen. Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) terbanyak ada dikecamatan Paringin, sedangkan yang terendah ada dikecamatan Tebing Tinggi.

Persentase Penyelenggara Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. Adapun cakupan kualitas air minum di penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 98,23 persen. Adapun gambaran persentase kualitas air minum dipenyenggaraan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.34:

Tabel 2.34 Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENYELENGGARA AIR MINUM	JUMLAH SAMPEL DIPERIKSA	MEMENUHI SYARAT (FISIK, BAKTERIOLOGI, DAN KIMIA)	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7,00
1	Paringin	Paringin	24	23	17	73,91
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	13	18	14	77,78
3	Lampihong	Lampihong	1	1	0	0,00
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	7	21	15	71,43
6	Batumandi	Lok Batu	452	6	0	0,00
7	Awayan	Awayan	134	134	134	100,00
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	0	0	0	0
9	Juai	Juai	1	1.088	1.088	100,00
10	Juai	Pirsus	2	2	2	100,00
11	Halong	Halong	11	6	6	100,00
12	Halong	Uren	9	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			654	1.299	1.276	98,23

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi yang Layak Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2015 adalah 54,5% Jenis sarana sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi jamban komunal (100%), Leher Angsa (87,7%), Plengsengan (22,5%) dan Cemplung (91,1%). Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) terbanyak ada dikecamatan Paringin Selatan (86,8%) sedangkan yang terendah ada dikecamatan Tebing Tinggi (5,1%).

Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 5 pilar yaitu: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, (2) Cuci Tangan pakai sabun, (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, (5) Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga. Capaian desa yang melaksanakan STBM pada tahun 2015 adalah sebanyak 39 desa (23,8%). Sebaran desa yang melaksanakan STBM sebanyak 13 desa dikecamatan Lampihong, 12 desa dikecamatan Halong, 9 desa dikecamatan Batu Mandi dan 5 desa dikecamatan Juai. Adapun gambaran desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.35:

Tabel 2.35 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
				DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paringin	Paringin	20	2	10	0	0,0	0	0,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	19	14	73,7	4	21,1	0	0,0
3	Lampihong	Lampihong	20	9	45,0	0	0,0	9	45,0
4	Lampihong	Tanah Habang	7	4	57,1	0	0,0	4	57,1
5	Batumandi	Batu Mandi	12	9	75,0	5	41,7	9	75,0
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
7	Awayan	Awayan	23	13	56,5	1	4,3	0	0,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	10	83,3	0	0,0	0	0,0
9	Juai	Juai	16	8	50,0	2	12,5	0	0,0
10	Juai	Pirsus	5	5	100,0	1	20,0	5	100,0
11	Halong	Halong	17	12	70,6	2	11,8	12	70,6
12	Halong	Uren	7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			164	99	60,4	15	9,1	39	23,8

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

2.7.6 Persebaran Tenaga Kesehatan

Dikabupaten Balangan ketersediaan dan kondisi persebaran tenaga kesehatan yang belum terpenuhi. Tenaga yang masih kurang antara lain tenaga dokter gigi, dokter, perawat dan bidan. Kekurangan Bidan selama ini diatasi dengan merekrut PTT daerah, selain itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat sejak tahun 2010 diprogramkan dengan beasiswa putra daerah wilayah setempat, hal ini merupakan salah satu jalan keluar bagi daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat didaerah-daerah yang terpencil. Penyebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Balangan dapat dikatakan masih belum merata. Untuk daerah dalam kota yang dekat dengan pusat pemerintahan, hampir tidak ada ditemui permasalahan persebaran tenaga kesehatan, bahkan kondisi tenaga kesehatannya berlebih namun sebaliknya di luar perkotaan masih kurang. Umumnya sangat sulit sekali untuk memindahkan tenaga kesehatan PNS yang sudah berada di daerah kota ke daerah luar kota/terpencil.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan sarana prasarana daerah- daerah terpencil atau sangat terpencil dalam hal ini transportasi, penerangan, sarana komunikasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dirasa perlu lebih memperhatikan masalah insentif yang seharusnya lebih banyak dibanding dengan petugas lain di daerah perkotaan serta kemudahan dalam

pengembangan kualitas diri atau karir.

Sesuai dengan UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah kabupaten/kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Kesehatan pada IPM Kabupaten Balangan, dimana sektor sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Balangan. Proses pembangunan sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD serta dokumen RTRW. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah :

1. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Balangan dalam jangka panjang.
2. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan.
3. Kawasan beresiko sanitasi.
4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah).

Adapun beberapa permasalahan utama dalam perbaikan sanitasi adalah terdapatnya sebesar 25,70% masyarakat belum mengakses jamban, terutama masyarakat miskin dalam mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu juga belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kondisi geografis wilayah Balangan juga kurang mendukung, sehingga menjadikan rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

Bentuk pengembangan pengelolaan sanitasi dibagi menjadi sistem on site (on site individual (*septic tank*) dan on site komunal-MCK) dan sistem off site (penyediaan instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan limbah tinja).

Dalam rangka pemasyarakatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), adalah sektor pengelolaan sampah. Hal penting dari pengelolaan sampah adalah

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) yakni pembatasan dan pengurangan timbulan sampah (reduce), adalah pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan pendaur ulangan sampah (recycle). Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Balangan, volume timbulan sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga maupun non rumah tangga juga bertambah. Besarnya jumlah penduduk bisa menjadi potensi karena perannya sebagai pelaku pemilahan dan pengurangan sampah. Dalam hal penanganan sampah, faktor prasarana dan sarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat menentukan. Semakin kontinyu dan besarnya kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, maka semakin bagus juga pengelolaan persampahan. Dalam rangka pengelolaan persampahan baik di permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, peran pemerintah dan swasta sangat menentukan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, pembinaan, menampung dan memasarkan produk 3R di masyarakat.

Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Balangan terdiri desa dan kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat. Bisa jadi merupakan desa dan kelurahan yang memiliki posisi strategis ekonomi salah satunya dilalui jalan nasional penghubung ke Kalimantan Timur dan desa-desa yang menjadi ibukota kecamatan dengan kegiatan ekonomi relatif homogen. Sedangkan untuk desa yang pertumbuhannya relatif lamban yakni daerah perdesaan untuk pengelolaan sampahnya masih dikelola secara mandiri oleh individu maupun lingkungannya masing-masing.

Rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Balangan terbagi menjadi penanganan secara langsung (direct) maupun sistem penanganan secara tidak langsung. Sistem penanganan langsung berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan sampah. Sedangkan penanganan

tidak langsung merupakan bentuk pengurangan sampah melalui sistem 3R. Sistem penanganan langsung dilakukan di kawasan cepat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perkotaan yang dindikasikan dari adanya kawasan komersial, sedangkan penanganan tidak langsung melalui 3R dilakukan di kawasan yang lambat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perdesaan.

BAB III METODE KEGIATAN

3.1 Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan

Metodologi merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan tentang isu-isu yang dihadapi. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Kabupaten Balangan. Berikut metode yang akan digunakan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan Di Kabupaten Balangan:

1. Metode Survey dengan teknik analisa data statistik

Survey kelapangan dengan terhadap Pendidik/kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa, untuk pengambilan angket survey.

2. Observasi, kuisisioner, dan dokumentasi

Observasi, kuisisioner dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data di lapangan berkaitan erat dengan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

3.2 Jadwal Kerja

Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari kalender kegiatan yang disusun oleh tim Review Masterplan Pendidikan dibawah ini:

Tabel. 3. 1 Kalender Kegiatan Pelaksanaan Review Pendidikan Di Kabupaten Balangan Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2016							
		Juli		Agustus		September		Oktober	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal Kegiatan	X							

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2016							
		Juli		Agustus		September		Oktober	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
2.	Workshop Rencana Kegiatan Review Masterplan Pendidikan (di Balangan)		X						
3.	Penyusunan dan penyerahan Laporan Awal			X					
4.	Pengumpulan Data Lapangan								
a.	Kecamatan Lampihong, Batu Mandi, Awayan				X				
b.	Kecamatan Paringin, Juai, dan Halong				X				
c.	Kecamatan Tebing Tinggi dan Paringin Selatan					X			
5.	Analisis Data Kependidikan:								
a.	Kecamatan Lampihong, Batu Mandi, Awayan					X			
b.	Kecamatan Paringin, Juai, dan Halong					X			
c.	Kecamatan Tebing Tinggi dan Paringin Selatan						X		
6.	Kompilasi Data Kependidikan untuk Seluruh Wilayah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan						X		
7.	FGD Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan							X	
8.	Workshop Hasil Kegiatan (di Balangan)							X	
9.	Finalitas Laporan Akhir Kegiatan								X

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2016							
		Juli		Agustus		September		Oktober	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
10.	Pengadaan dan Penyerahan Laporan Akhir Kegiatan								X

3.3 Alokasi Tenaga Ahli

Tenaga ahli Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan, hal ini dipercayakan pihak Bappeda bekerjasama dengan PT. Technicatama. Tenaga ahli yang dimiliki sesuai dengan kompetensi ahli masing-masing dan memiliki pengalaman dalam penyusunan konsep Kajian Kebijakan Pendidikan. Tenaga ahli sebagai praktisi konsultan di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3. 2 Alokasi Tenaga Ahli Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Syubhan Annur, S.Pd, M,Pd	S-2 Manajemen Pendidikan	Team Leader (Ahli) Manajemen Pendidikan
2.	Dr. Ahmad Yunani, M.M	S-3 Ekonomi Pembangunan	Ahli Kebijakan Publik
3	Mansyur, M. Hum	S-2 Sosial-Budaya	Ahli Manajemen SDM
4.	M. Muslim, S.Pd	S-1 Pendidikan	Ahli Perencanaan Pendidikan

Alokasi tenaga ahli di sesuaikan dengan kompetensi dan keahlian dibidangnya masing-masing, dimana ke- 5 tenaga ahli yang diminta rata-rata memiliki masa kerja diatas 8 tahun lebih, dan mempunyai pengalaman dibidang pendidikan dan perencana (konseptor).

3.4 Sumber Data

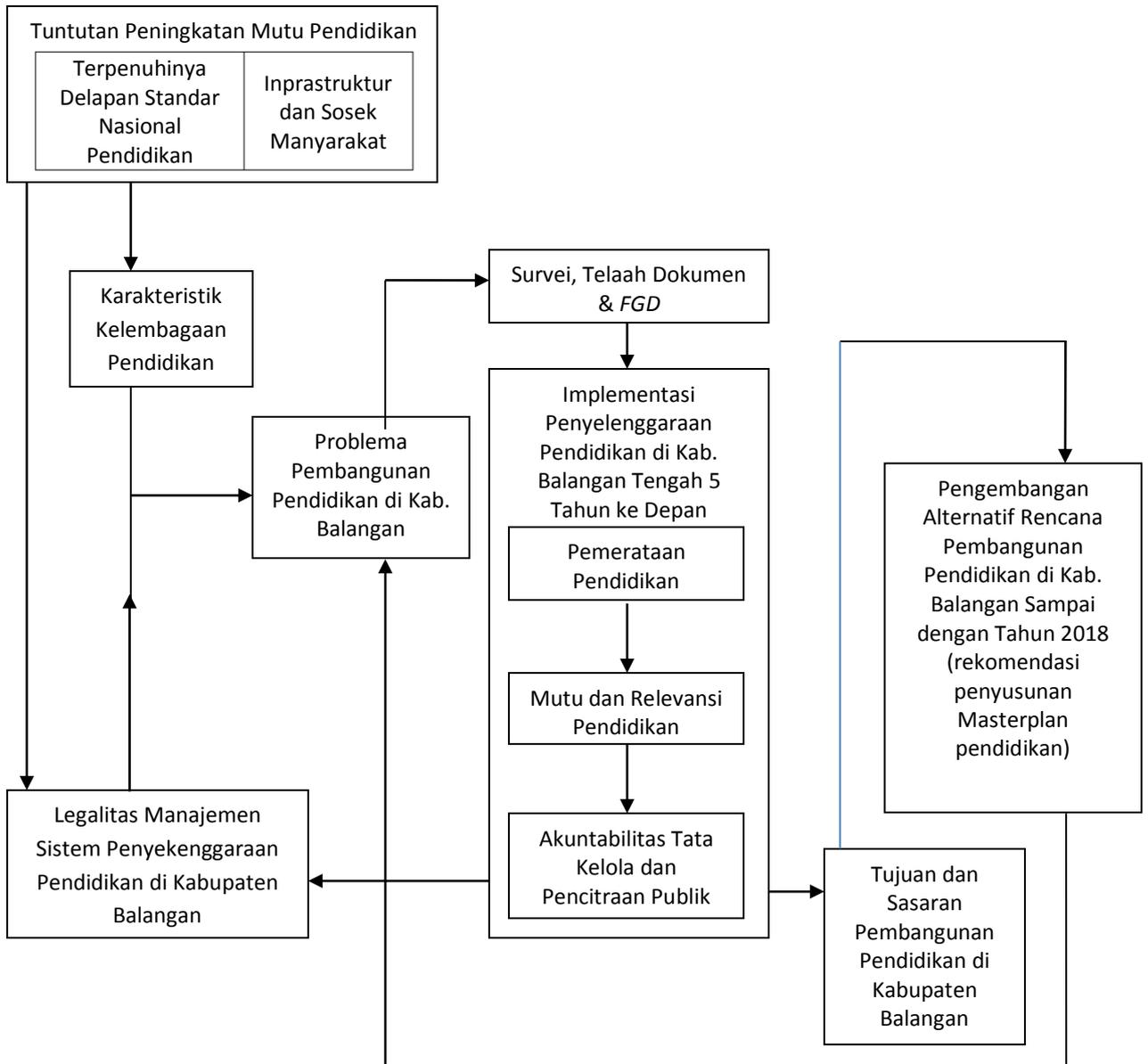
Data dasar berupa Harga Satuan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Standar Teknis berupa Petunjuk/Peraturan/kajian teknis yang mendukung. Dan Studi-studi terdahulu Disampaikan kemudian.

3.5 Analisis Data

Unit analisis untuk kepentingan Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan, meliputi : (1) Unsur Kepala Daerah dan DPRD; (2) Unsur Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3) Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan; (5) Dokumen-dokumen seperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (c) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan; (d) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); (e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (f) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021; (g) Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (h) RKPD 2013; (i) PerUndang-Undangan pendidikan; (j) Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015; (k) Kajian tentang potensi sekolah kejuruan di Kabupaten Balangan; (l) Analisis butir soal UAS mata pelajaran PPKn di SMPN Kab. Balangan; (m) Kajian tentang identifikasi dan potensi anak usia sekolah di Kab. Balangan; (n) Kajian potensi pendidikan dan anak untuk pendidikan anak usia dini; (o) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; (p) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; (q) Kajian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Balangan tahun 2015.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015, diilustrasikan seperti pada Gambar 3. 1 berikut ini.

Gambar 3. 1 Kerangka Analisis Review Masterplan Pendidikan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Balangan



Gambar 3. 2 Skema Review Master Plan Pendidikan Tahun 2011-2015

3.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kajian kebijakan sebagai berikut :

1. Bab 1 terdiri dari Laporan Pendahuluan, latar belakang, Rencana Kegiatan, Jadwal kegiatan dan penelitian lapangan, Metode Penelitian. Demografi dan sebagainya
2. Bab 2 terdiri dari visi misi pembangunan pendidikan berikut kondisi exciting pendidikan di Kabupaen Balangan
3. Bab 3 terdiri implementasi pembangunan pendidikan
4. Bab 4 terdiri perencanaan 5 tahunan pembangunan pendidikan di lihat dari dua pilar pembangunan yaitu pendidik dan masyarakat.
5. Bab 5 terdiri dari implementasi program pendidikan yang berkelanjutan sehingga pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat berjalan sesuai dengan koridornya.

3.7 Target dan Sasaran

3.7.1 Target dari Kajian Kebijakan Pendidikan

Target yang menajdi tujuan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidik/Kepala sekolah, guru, masyarakat/orang tua siswa serta siswa.
- b. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam hal kualitas dan kuantitas pendidikan di daerah Kabupaten Balangan.
- c. Terlaksananya semua kegiatan yang di laksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam hal ini di bidang pendidikan.

3.7.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah teridentifikasinya konidisi umum penyelenggaraan pendidikan serta terumusnya strategi, kebijakan dan program, yang seluruhnya tertuang dalam Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan. Hasil ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Pemerintah Derah kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah

- direncanakan dengan melibatkan berbagai sektor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
 3. Pemerhati dan aktifis pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
 4. Masyarakat di Kabupaten Balangan dalam partisipasi dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

3.8 Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan, yang berisi tentang:

1. Laporan Pendahuluan dengan spesifikasi:
 - a. Judul buku : Laporan Pendahuluan
 - b. Jumlah buku : 5 Buku
 - c. Ukuran buku : A4 (29,7 x 21 cm)
 - d. Pengetikan : 1,5 spasi, pada kertas putih polos
2. Laporan Antara dengan spesifikasi:
 - a. Judul buku : Laporan Pendahuluan
 - b. Jumlah buku : 5 Buku
 - c. Ukuran buku : A4 (29,7 x 21 cm)
 - d. Pengetikan : 1,5 spasi, pada kertas putih polos
3. Executive summary yang berisikan ringkasan dari laporan yang digunakan untuk seminar. Laporan ini diserahkan sebanyak 20 (dua puluh) buah.
4. Laporan Antara dengan spesifikasi:
 - a. Judul buku : Laporan Pendahuluan
 - b. Jumlah buku : 5 Buku
 - c. Ukuran buku : A4 (29,7 x 21 cm)
 - a. Pengetikan : 1,5 spasi, pada kertas putih polos.
5. CD Data sebanyak 5 (lima) buah.



LAPORAN ANTARA

REVIEW MASTERPLAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Dasar Hukum	3
1.5 Target dan Sasaran	4
1.5.1 Target	4
1.5.2 Sasaran	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	5
2.1 Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan	5
2.1.1 Visi Kabupaten Balangan.....	5
2.1.2 Misi Kabupaten Balangan	5
2.1.3 Kebijakan.....	6
2.2 Kondisi Geografi dan Demografi	7
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	7
2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis	10
2.2.3 Demografi.....	16
2.3 Penduduk Kabupaten Balangan	17
2.4 Kondisi IPM Tahun 2015	19
2.4.1 Peringkat Masing-Masing Komponen IPM	21
2.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan	24
2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.5.3 Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	30
2.6 Pendidikan Kabupaten Balangan.....	32
2.6.1 Profil Pendidikan Kabupaten Balangan	32
2.6.2 Satuan dan Sebaran Pendidikan	33

2.6.3	Capaian Rata-Rata Lama dan Harapan Sekolah.....	38
2.7	Kesehatan Kabupaten Balangan	43
2.7.1	Sarana dan Prasarana.....	44
2.7.2	Angka Kematian Bayi.....	56
2.7.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	59
2.7.4	Angka Balita Gizi Buruk.....	60
2.7.5	Sanitasi dan Air Bersih	61
2.7.6	Persebaran Tenaga Kesehatan	63
BAB III METODE KEGIATAN		67
3.1	Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan	67
3.2	Analisis Data	67
3.3	Proses Pengumpulan Data.....	71
3.4	Instrumen (Kuesioner) Kajian.....	71
3.5	Sistematika Penulisan	71
BAB IV GAMBARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH.....		73
4.1	Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.1.1	Visi Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.1.2	Misi Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.2.1	Tujuan.....	73
4.2.2	Sasaran	74
4.3	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah	74
4.3.1	Strategi.....	74
4.3.2	Kebijakan.....	75
4.4	Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Balangan	77
4.4.1	Kondisi Pendidikan Disetiap Tingkatan Kabupaten Balangan	78
4.4.2	Pendidikan Non Formal	93
4.5	Rasio Guru dan Siswa	97
4.6	Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Peduduk Usia Sekolah.....	98

4.7	Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan.....	99
4.7.1	Hasil Survei Kepada Kepala Sekolah.....	99
4.7.2	Hasil Survei Kepada Guru Pengajar	101
4.7.3	Hasil Survei Kepada Komite Sekolah/Orang Tua Siswa	102
4.7.4	Hasil Survei Kepada Siswa.....	105
4.8	Sarana dan Prasarana Pendidikan	106
4.9	Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)	107
4.10	Dukungan Sumber Dana	107
4.11	Masyarakat dan Lingkungan Sekolah	108
BAB V ISSUE (MASALAH) PENDIDIKAN DAN ANALISIS SWOT		109
5.1	Analisis SWOT Terhadap Kondisi Pendidikan.....	109
5.1.1	Kekuatan	109
5.1.2	Kelemahan.....	110
5.1.2	Tantangan	110
5.1.4	Ancaman.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Pembangunan Kabupaten BaJangan tahun 2016 – 2021 adalah terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Salah satu misi untuk mengarahkan pencapaian visi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah menetapkan beberapa indikator kinerja pembangunaa daerah di bidang pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan serta guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV. Indikator kinerja ini untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Balangan.

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusla yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmanl-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berلمان dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabpaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Balangan telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar 6 tahun yang didukung pembangunaan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan wajib belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah/ APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Pada tahun 2015, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,38 persen dan APS usia 13-15 tahun 96,14 persen, APK SD mencapai 112,06, ini

berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar dari pada jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 12,06 persen penduduk di luar usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK Penduduk Balangan cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 98,82. Seperti halnya APK, APM juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD APM 95,67 persen. Artinya hanya 95,67 persen penduduk usia 7-12 tahun yang terserap sebagai siswa SD. Pada jenjang SMP, APM menjadi 77,12. Dari pencapaian tersebut diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu penyebab utama kemiskinan dan indikator tingkat kesejahteraan adalah pendidikan sehingga dalam kerangka jangka panjang dibutuhkan sebuah perencanaan pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dari berbagai sektor. Ide dasar ini yang mengharuskan Bappeda Kabupaten Balangan untuk melakukan kegiatan Penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dengan disusunnya Kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah memberikan arahan dalam penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari kegiatan Review Masterplan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan;
2. Mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan;
3. Menyusun strategi, kebijakan dan program lintas sektor dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Balangan;

1.3 Manfaat

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah direncanakan dengan melibatkan berbagai secktor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
3. Permerhati dan aktifi pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
4. Masyarakat di kabupaten Balangan dalam partisipasinya dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

1.4 Dasar Hukum

Landasan hokum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
7. Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
8. Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru.
9. Permendiknas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengolahan Pendidikan.
10. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian.
11. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarpras.
12. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
13. Permendiknas No. 11 Tahun 2008 Tentang Sertifikasi Guru Dalam.
14. Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Tentnag Standar Biaya.
15. SPM Pendidikan.

1.5 Target dan Sasaran

1.5.1 Target

Target yang menjadi tujuan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidik/Kepala sekolah, guru, masyarakat/orang tua siswa serta siswa.
- b. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam hal kualitas dan kuantitas pendidikan di daerah Kabupaten Balangan.
- c. Terlaksananya semua kegiatan yang di laksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam hal ini di bidang pendidikan.

1.5.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah teridentifikasinya kondisi umum penyelenggaraan pendidikan serta terumusnya strategi, kebijakan dan program, yang seluruhnya tertuang dalam Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan. Hasil ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah direncanakan dengan meilibatkan berbagai sektor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
3. Pemerhati dan aktifis pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
4. Masyarakat di Kabupaten Balangan dalam partisipasi dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan

2.1.1. Visi Kabupaten Balangan

Menghadapi tantangan pembangunan maka dicanangkan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia" dengan makna visi berikut:

1. Maju

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan.

2. Sejahtera

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

2.1.2. Misi Kabupaten Balangan

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan

- dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
 6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
 7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

2.1.3. Kebijakan

Berikut ini ditampilkan rencana pemerintahh Jangka Menengah (RPKM) Tingkat Nasional dan Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
1. rioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Membangun kehidupan sosial dan budaya (P.11, P.10,P14)	1. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
2. Prioritas 2, Pendidikan	2. Membangun Sumber daya manusia (P2,P3,P4)	2. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3. Prioritas 3, Kesehatan	3. Peningkatan Perekonomian (P13,P5,P7,P8)	3. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan	4. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (P6)	4. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan	5. Pengelolaan lingkungan Hidup (P9)	5. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6. Prioritas 6, Infrastruktur	6. Melaksanakan pemerintahan yang baik (P1,P12)	
7. Prioritas 7, Iklim dan Investasi		
8. Prioritas 8, Energi		
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
10. Prioritas 10, Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Prioritas 11, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 12. Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Prioritas 13, Perekonomian 14. Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat		6. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi 7. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar 8. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah 9. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah 10. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin 11. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses. 12. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 13. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil 14. Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan 15. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Sumber: RPJMD Kab. Balangan Revisi 2016-2021

2.2 Kondisi Geografis dan Demografi

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2^o 01' 37" sampai dengan 2^o 35' 58" Lintang Selatan dan 114^o 50' 24"

sampai dengan $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

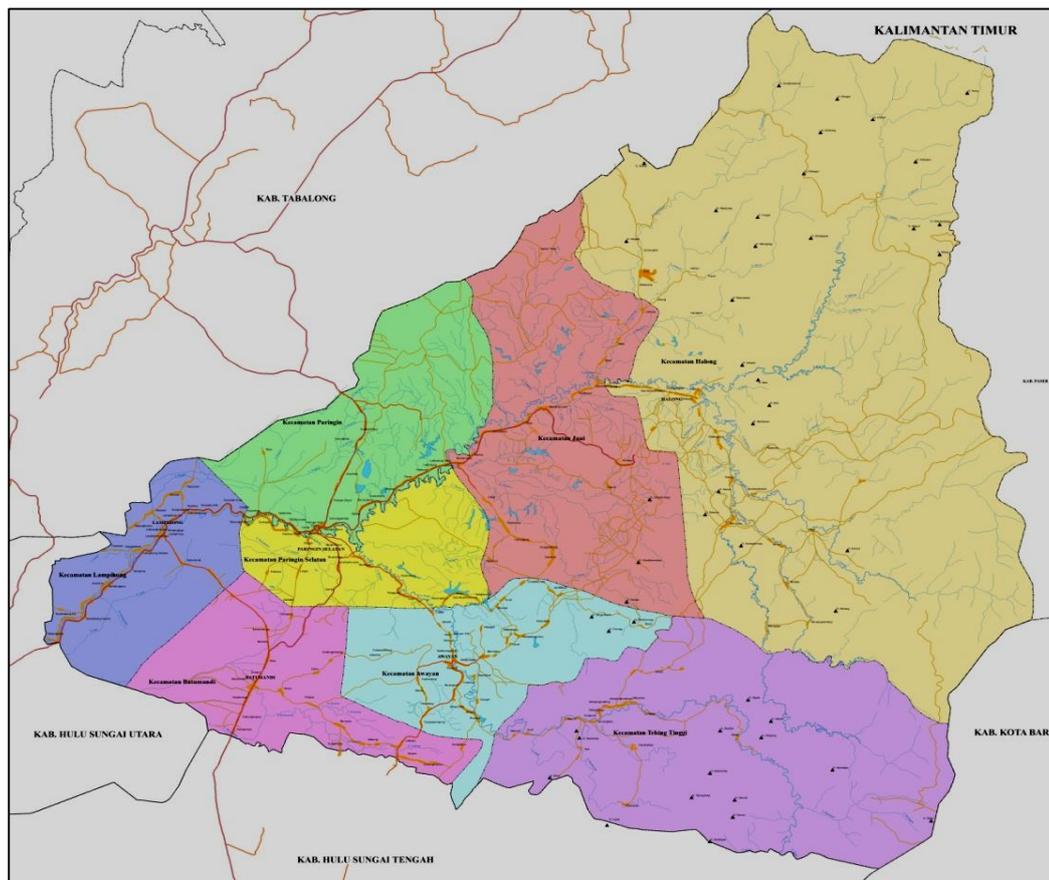
- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Balangan terdiri dari:

0 m - 7 m	= 1,87 %
7 m - 25 m	= 19,56 %
25 m -100 m	= 38,28 %
100 m – 500m	= 31,27 %
500 m keatas	= 9 %

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan :

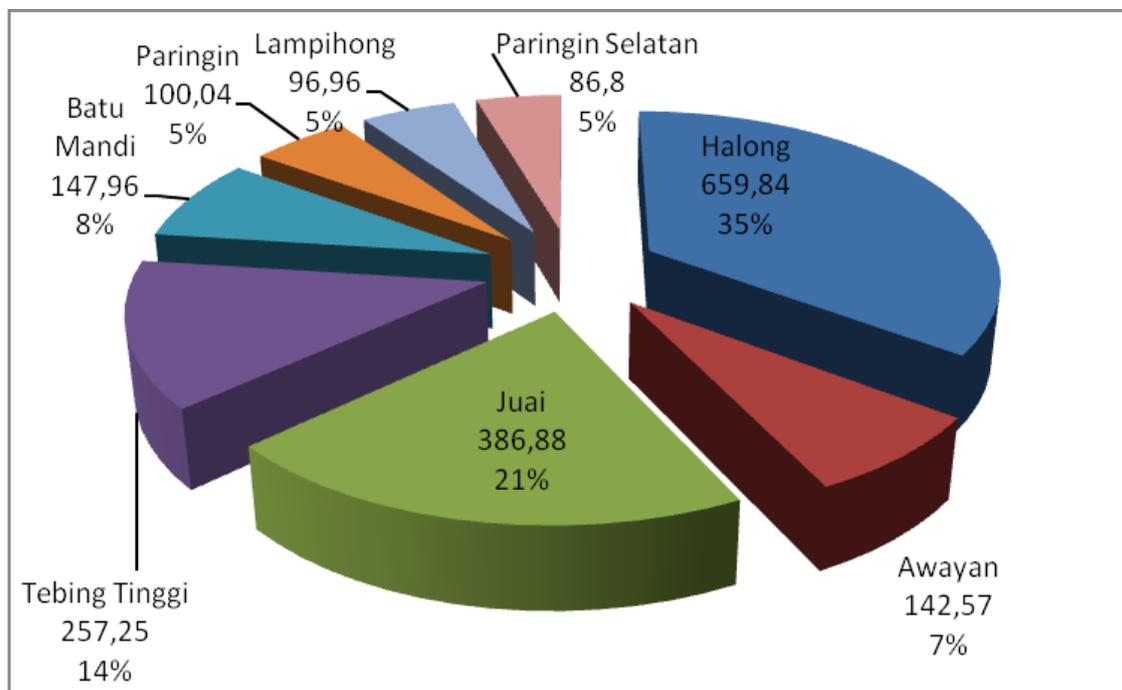
1. Paringin Selatan – Lampihong: 15 km.
2. Paringin Selatan – Batumandi: 12 km.
3. Paringin Selatan - Awayan: 13 km.
4. Paringin Selatan – Tebing Tinggi: 18 km.
5. Paringin Selatan - Paringin: 3 km.
6. Paringin Selatan – Juai: 21 km.
7. Paringin Selatan - Halong: 12 km.



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen) Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awaysan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini.

Gambar 2.2 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Daerah	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	Simpang Tiga	96,96	-	27
Paringin	Paringin	100,04	2	14
Juai	Mungkur Uyam	386,88	-	21
Halong	Halong	659,84	-	24
Batu Mandi	Batu Mandi	147,96	-	18
Paringin Selatan	Batu Piring	86,80	1	15
Awayan	Putat Basiun	142,57	-	23
Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	257,25	-	12
Jumlah		1.878,30	3	154

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 20 02'25,99" sampai dengan 20 31' 57,96" Lintang Selatan dan 115o 18' 45,03" sampai dengan 115o 50' 11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157

desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong,

misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah -jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian. karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektanguler dan pola pengaliran subdentritik.

a) Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak- anak sungainya

b) Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten

Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan pelapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

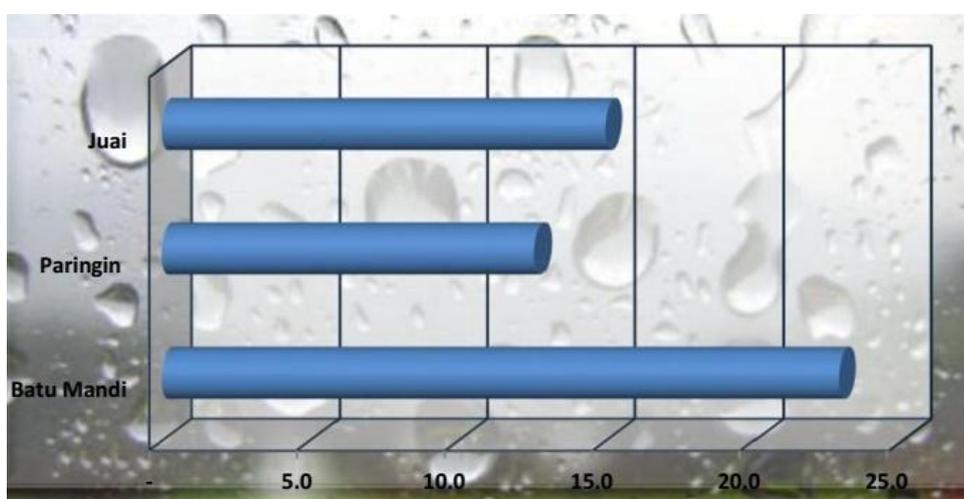
4) Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda.

Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2014 initerpantau di stasiun pengamatan Juaiyaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015



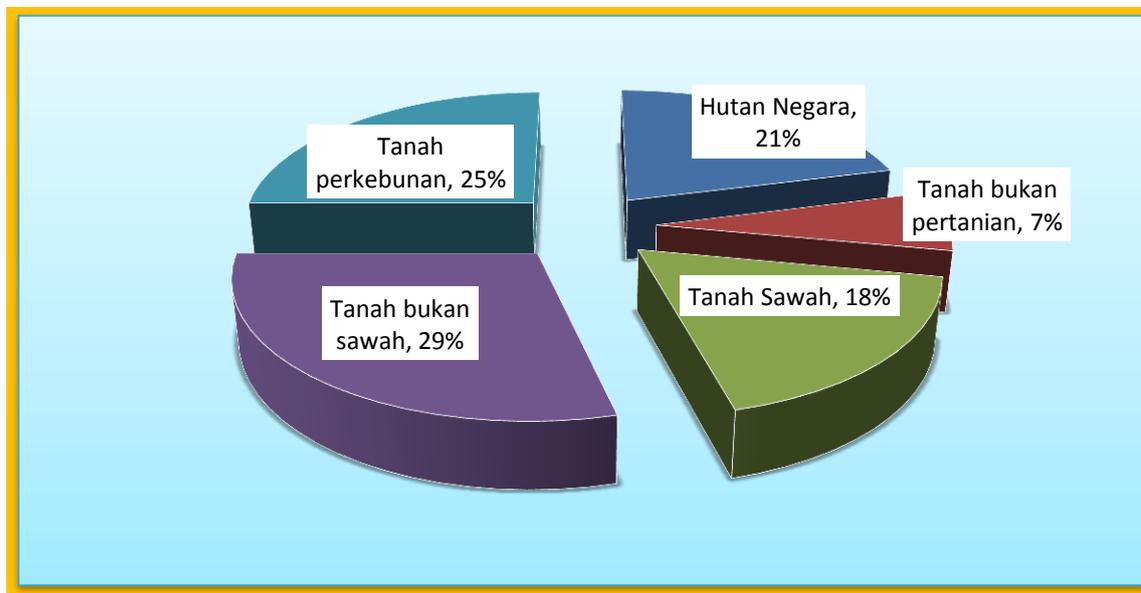
Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen.Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran.Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk,sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang

belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.3 Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4

Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/Total		
		Desa/Kel.	Rumah Tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber : Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-Laki		Perempuan		2014	2015	2014	2015
	2014	2015	2014	2015				
1. Lampihong	9.013	8.568	8.896	8.376	17.927	16.944	102	102
2. Batumandi	9.148	8.877	8.836	8.541	17.984	17.418	104	104
3. Awayan	6.706	6.944	6.743	6.995	13.939	13.939	99	99
4. Tebing Tinggi	3.462	3.206	3.348	3.074	6.280	6.280	103	104
5. Paringin	8.956	8.790	8.998	8.824	17.614	17.614	100	100
6. Paringin Selatan	6.467	6.294	6.399	6.221	12.515	12.515	101	101
7. Juai	8.448	8.815	8.261	8.577	17.392	17.392	102	103
8. Halong	9.394	10.985	8.951	10.408	21.393	21.393	105	106
Jumlah	76.505	62.479	60.432	61.016	122.044	123.495	102	102

Sumber: Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.3 Penduduk Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan hasil proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 123.449 jiwa yang terdiri dari 62.138 laki-laki dan 61.311 perempuan. Dengan luas wilayah 1.878,30 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 66 orang per kilometer persegi. Dua kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan Lampihong dengan kepadatan penduduk masing-masing 185 dan 176 orang per km². Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai dimana tingkat kepadatannya lebih rendah daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk Balangan 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah perlu menyiapkan

perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang.

Komposisi penduduk Kabupaten Balangan yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 0-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Balangan memiliki populasi penduduk muda yang relatif besar seperti seperti digambarkan oleh piramida penduduk dengan karakteristik ekspansif. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin per kelompok umur, persentase penduduk laki-laki hampir pada setiap kelompok umur lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun pada kelompok umur tua (55 thn ke atas) akan terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dibanding penduduk laki-laki.

Pada tahun 2015, penduduk usia muda (usia di bawah 15 tahun) sebesar 30,4%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) 66,1% dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) 3,5%. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif ini mengimplikasikan tersedianya angkatan kerja dan basis konsumen yang besar dan potensial.

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin dan rata-rata penduduk per desa seerta kepadatan penduduk yang merupakan angka perkiraan pada tahun 2015.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-rata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2015*

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)
		Laki-laki	Perempuan				
1	Lampihong	8 490	8 556	17.046	27	631	176
2	Batu Mandi	8 862	8 590	17.452	18	970	118
3	Awayan	6 550	6 712	13.262	23	577	93
4	Tebing Tinggi	3 281	3 275	6.556	12	546	25
5	Paringin	9 334	9 164	18.498	16	1.156	185

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)
		Laki-laki	Perempuan				
6	Paringin Selatan	6 347	6 249	12.596	16	787	145
7	Juai	8 810	8 630	17.440	21	830	45
8	Halong	10 464	10 135	20.599	24	858	31
	Balangan	62 138	61 311	123.449	157	786	66

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2016

*) Angka Sementara Proyeksi Penduduk Tahun 2015

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin dengan luas 5,53% dari luas Kabupaten Balangan mendudukan urutan kedua setelah Kecamatan Halong dari segi jumlah penduduk yaitu sebanyak 18.498 jiwa atau sebesar 14,98% dari penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan dengan rasio 101. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 6.556 jiwa dengan rata-rata penduduk sebanyak 546 jiwa per desa atau di bawah rata-rata penduduk per desa di Kabupaten Balangan.

2.4 Kondisi IPM Tahun 2015

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

United Nations Development Programmes (UNDP) telah merekomendasikan

penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan daerah dan waktu lainnya.

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka akan tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.



Gambar 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015

IPM Kabupaten Balangan dengan perhitungan metode baru sebesar 62,88 pada tahun 2010 meningkat menjadi 65,34 pada tahun 2015. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPM Kabupaten Balangan menunjukkan kemajuan yang besar, namun masih dibawah rata-rata IPM provinsi Kalimantan Selatan dan status pembangunan manusia kabupaten Balangan masih stagnan pada kategori status sedang. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Balangan dengan Kabupaten/kota lainya di kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Perbandingan IPM Kabupaten/kota Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015

No	Kabupaten	Tahun										Peringkat	
		2010	Peringkat	2011	Peringkat	2012	Peringkat	2013	Peringkat	2014	Peringkat		2015
KALIMANTAN SELATAN		65.20		65.89		66.68		67.17		67.63		68.38	
1	TANAH LAUT	63.56	8	64.35	7	65.16	6	66.11	6	66.50	6	66.99	6
2	KOTA BARU	63.64	7	64.27	8	64.87	8	65.41	7	65.76	7	66.61	7
3	BANJAR	64.46	6	64.75	6	65.04	7	65.36	8	65.71	8	66.39	9
4	BARITO KUALA	60.24	12	60.93	12	61.62	12	62.12	12	62.56	12	63.53	12
5	TAPIN	64.89	5	65.41	5	65.92	5	66.48	5	66.99	4	67.67	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	62.80	11	63.44	10	64.03	10	64.59	10	65.25	10	66.31	10
7	HULU SUNGAI TENGAH	63.49	9	63.90	9	64.34	9	64.63	9	65.37	9	66.56	8
8	HULU SUNGAI UTARA	58.50	13	59.24	13	60.12	13	60.77	13	61.32	13	62.49	13
9	TABALONG	65.87	3	66.60	3	67.36	3	68.08	3	68.36	3	69.35	3
10	TANAH BUMBU	64.98	4	65.59	4	66.13	4	66.51	4	66.94	5	67.58	5
11	BALANGAN	62.88	10	63.28	11	63.69	11	64.03	11	64.44	11	65.38	11
12	KOTA BANJARMASIN	71.01	2	72.01	2	73.45	2	74.59	2	74.94	2	75.41	2
13	KOTA BANJAR BARU	75.49	1	76.23	1	76.67	1	77.10	1	77.30	1	77.56	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan perkembangan metode terbaru, IPM Kabupaten Balangan mengalami penurunan peringkat dari tahun 2010 ke 2011. Sedangkan perkembangan IPM dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat konstan pada peringkat ke 11. Jadi perlu upaya yang lebih keras mengingat beberapa kabupaten terlihat bisa meningkatkan IPM mereka ke arah yang lebih baik.

2.4.1 Peringkat Masing-masing Komponen IPM

2.4.1.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Selain angka harapan lama sekolah, indikator penting lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata- Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Berikut ini adalah Angka harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Balangan tahun 2014-2015 beserta perbandingan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.7 HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	HLS (Tahun)				RLS (Tahun)			
		Periode/Peringkat				Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat	2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		11.96		12.21		7.6		7.76	
1	TANAH LAUT	11.09	11	11.25	11	7.72	4	7.29	8
2	KOTA BARU	11.11	10	11.41	10	6.80	10	6.99	10
3	BANJAR	10.99	13	11.16	13	6.96	9	6.99	9
4	BARITO KUALA	11.54	6	11.72	7	6.47	12	6.81	11
5	TAPIN	11.17	9	11.21	12	7.17	8	7.43	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11.68	5	11.83	6	7.21	7	7.67	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11.42	7	11.94	5	7.27	5	7.52	5
8	HULU SUNGAI UTARA	12.1	3	12.78	3	6.63	11	6.73	12
9	TABALONG	11.96	4	12.32	4	7.95	3	8.24	3
10	TANAH BUMBU	11.2	8	11.42	9	7.26	6	7.38	7
11	BALANGAN	11.03	12	11.48	8	6.38	13	6.46	13
12	KOTA BANJARMASIN	13.73	2	13.76	2	9.88	2	9.90	2
13	KOTA BANJAR BARU	14.73	1	14.75	1	10.74	1	10.75	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.7 terlihat bahwa komponen HLS dan RLS pembentuk Indeks Pendidikan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia di Kabupaten Balangan masih rendah peringkat ke 12 untuk HLS pada tahun 2014 meskipun pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat 8 namun nilai HLS ini masih di Bawah HLS Provinsi tahun 2015 yaitu sebesar 12,21.

Ditinjau dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan tahun 2014-2015. Permasalahan ini harus menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi modal penting pada era kompetisi saat ini.

2.4.1.2 Kesehatan

Salah satu aspek penting pembangunan manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Komponen IPM yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH-e⁰). Berikut ini perbandingan derajat kesehatan yang ditunjukkan oleh nilai

Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.8 AHH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)			
		Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		67.47		67.8	
1	TANAH LAUT	68.22	6	68.62	6
2	KOTA BARU	68.14	7	68.49	7
3	BANJAR	65.32	9	65.97	9
4	BARITO KUALA	64.49	10	64.94	10
5	TAPIN	69.02	4	69.47	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	63.64	12	64.14	12
7	HULU SUNGAI TENGAH	64.33	11	64.83	11
8	HULU SUNGAI UTARA	62.09	13	62.49	13
9	TABALONG	69.39	3	69.74	3
10	TANAH BUMBU	68.84	5	69.19	5
11	BALANGAN	66.65	8	66.95	8
12	KOTA BANJARMASIN	70.02	2	70.32	2
13	KOTA BANJAR BARU	71.76	1	71.36	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.8 terlihat bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Balangan berada pada peringkat 8 baik pada tahun 2014 maupun 2015. Angka harapan hidup kabupaten Balangan pada tahun 2015 mencapai 66,95 tahun masih berada di bawah rata-rata Provinsi. Perlu upaya yang keras pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat pada tahun-tahun mendatang agar peringkat pembangunan manusia menjadi lebih baik.

2.4.1.3 Ekonomi (Kesejahteraan Masyarakat)

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan kemampuan daya beli atau konsumsi riil per kapita. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Berikut ini pengeluaran per kapita Kabupaten Balangan dan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.9 Pengeluaran Per kapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp. 000)			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
	KALIMANTAN	10,748		1089	
1	TANAH LAUT	10,632	8	10,753	8
2	KOTA BARU	10,536	10	10,645	10
3	BANJAR	12,004	3	12,185	3
4	BARITO KUALA	8,936	12	9,062	12
5	TAPIN	10,839	6	10,906	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11,077	4	11,161	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11,040	5	11,142	5
8	HULU SUNGAI UTARA	8,164	13	8,298	13
9	TABALONG	10,088	11	10,171	11
10	TANAH BUMBU	10,697	7	10,781	7
11	BALANGAN	10,617	9	10,736	9
12	KOTA BANJARMASIN	12,501	1	12,834	1
13	KOTA BANJAR BARU	12,376	2	12,467	2

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2015 Kabupaten Balangan mencapai Rp. 10.736.000,- per tahun dengan peringkat ke-9 dari 13 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kemampuan daya beli masyarakat ini relatif memiliki peringkat lebih baik dibandingkan dengan komponen pembentuk IPM lainnya seperti HLS dan RLS pada komponen Pendidikan dan AHH pada ukuran derajat kesehatan pada pembahasan sebelumnya.

Pengeluaran riil perkapita tertinggi di Kota Banjarmasin yaitu mencapai Rp. 12.834.000,- per kapita/tahun, dan terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp. 8.298.000,- per kapita/tahun. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata sebesar Rp. 10.891.000,- per kapita/Tahun.

2.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan

Pengeluaran penduduk dicatat dalam segala aspek, dari konsumsi makanan, non-makanan, dan aneka transaksi keuangan. Pengeluaran per kapita penduduk

Kabupaten Balangan di tahun 2015 paling besar di kelompok Rp 500.000,- hingga Rp 750.000,- perbulan dengan persentase sebanyak 35,20% dari total penduduk Balangan. Walaupun masih tercatat ada 1,84% penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah angka Rp 300.000,- per bulannya.

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 76,78%, dimana andil terbesar didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 65,30%. Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,02% terhadap total PDRB (dengan minyak bumi dan pertambangan batu bara) atas dasar harga berlaku.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Distribusi PDRB Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 (juta Rp)

NO	Lapangan Usaha	2014*		2015**	
		Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.005.985,0	10,73	1.081.429,5	11,48
2	Pertambangan dan Penggalian	6.453.129,2	68,82	6.152.916,5	65,30
3	Industri Pengolahan	141.979,7	1,51	160.316,6	1,70
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.499,8	0,02	2.162,0	0,02
5	Pengadaan Air	18.099,7	0,19	19.887,8	0,21
6	Konstruksi	327.495,0	3,49	376.382,9	3,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392.288,1	4,18	434.399,7	4,61
8	Transportasi dan Pergudangan	142.661,3	1,52	159.565,9	1,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.660,5	0,25	25.851,4	0,27
10	Informasi dan Komunikasi	104.387,6	1,11	112.070,6	1,19
11	Jasa Keuangan	22.401,6	0,24	25.283,8	0,27
12	Real Estate	73.752,0	0,79	80.484,5	0,85
13	Jasa Perusahaan	4.923,6	0,05	5.577,4	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	341.184,6	3,64	404.951,1	4,30
15	Jasa Pendidikan	224.435,5	2,39	266.420,4	2,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.416,8	0,66	71.700,3	0,76
17	Jasa lainnya	37.086,1	0,40	43.266,8	0,46
	PDRB dengan Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	9.376.386,2	100	9.422.667,1	100
	PDRB tanpa Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	2.927.069,6		3.274.386,0	

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku baik dengan sektor pertambangan, maupun tanpa sektor petambangan di Kabupaten Balangan

tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan. Dilihat dari lapangan usaha, Kabupaten Balangan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 65,30%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,48%, dan perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61%. PDRB per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2015

PDRB Perkapita	2011	2012	2013	2014*	2015**
Dengan Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	64.977,72	67.366,73	72.705,60	77.287,68	76.328,42
ADHK (Ribu Rp)	58.239,96	61.046,24	64.801,00	67.482,17	68.383,19
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	19,10	3,68	7,93	6,30	(1,24)
ADHK (%)	6,75	4,82	6,15	4,14	1,34
Tanpa Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	19.038,17	20.356,27	21.935,97	24.12,725	26.524,20
ADHK (Ribu Rp)	18.007,05	18.503,65	19.097,85	19.691,48	20.507,24
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	9,63	6,92	7,76	9,99	9,93
ADHK (%)	3,69	2,76	3,21	3,11	4,14

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

*) Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Balangan dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan meningkat dari 64,98 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 76,33 juta rupiah pada tahun 2015. Namun dari sisi pertumbuhan, PDRB perkapita cenderung melambat hingga 2014 bahkan menurun di tahun 2015. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan cenderung tumbuh melambat selama periode 2011-2015, atau dari 6,75% pada tahun 2011 menjadi 1,34% pada tahun

2015. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan semakin meningkat setiap tahunnya dari 19,04 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 26,52 juta rupiah pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 8,85% setiap tahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit tetap tumbuh selama periode 2011-2015, atau dari 3,69% pada tahun 2011 menjadi 4,14% pada tahun 2015. Selanjutnya, untuk melihat pemerataan pendapatan yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan maka dapat dilihat dari angka gini ratio di Kalimantan Selatan pada tahun 2015, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.12:

Tabel 2.12 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Dan Daerah Lainnya Di Kalsel Tahun 2011 – 2015

No	Kabupaten	Gini Ratio Tahunan
1	Tanah Laut	0,27
2	Kotabaru	0,35
3	Banjar	0,32
4	Barito Kuala	0,37
5	Tapin	0,35
6	Hulu Sungai Selatan	0,31
7	Hulu Sungai Tengah	0,33
8	Hulu Sungai Utara	0,36
9	Tabalong	0,29
10	Tanah Bumbu	0,33
11	Balangan	0,4
12	Kota Banjarmasin	0,39
13	Kota Banjarbaru	0,35
	Kaimantan Selatan	0,35

Sumber: BPS Kalsel 2016

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Balangan mendapatkan tingkat gini ratio sebesar 0,4. Angka ini paling tinggi dibandingkan dengan angka gini ratio di setiap kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi di Kalimantan Selatan.

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama tahun 2011-2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2011 sampai 2015 ditunjukkan dalam tabel 2.13:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (persen)

NO	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,99	2,68	3,44	4,06	4,45
2	Pertambangan dan Penggalian	10,30	7,63	9,34	6,45	1,94
3	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,74	4,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,61	8,50	2,61	12,99	16,70
5	Pengadaan Air	5,14	3,82	3,73	6,48	4,57
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,48	5,81	6,13	4,33	6,94
8	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,45	6,79	6,54	5,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	5,28	8,43	5,12	4,59
10	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,15	3,46	4,95	5,39
11	Jasa Keuangan	16,77	3,51	6,25	5,43	4,33
12	Real Estate	7,87	7,81	9,10	5,34	5,03
13	Jasa Perusahaan	4,40	5,43	7,89	7,54	7,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	5,90	5,69	5,54	8,71
15	Jasa Pendidikan	4,09	5,46	6,07	6,21	9,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	6,02	7,24	5,74	6,17
17	Jasa lainnya	7,36	5,35	3,64	5,78	6,34
	PDRB dengan Pertambangan Minyak	8,84	6,69	8,04	6,01	3,12
	PDRB tanpa subkategori pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara dan Lignit, dan Bijih Logam	5,72	4,60	5,05	4,97	5,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan

cenderung melambat di tahun 2012 yaitu sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontribusi subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan.

2.5.3 Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan memiliki tenaga kerja yang relatif besar. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 75,38% penduduk Balangan berumur 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan 24,62% sisanya bukan angkatan kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013-2015

Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	77,24	78,26	75,38
- Bekerja	97,28	98,66	95,69
- Penganggur	2,72	1,34	4,31
Bukan Angkatan Kerja	22,76	21,74	24,62
- Sekolah	36,56	40,72	35,72
- Mengurus rumah tangga	50,98	45,69	53,81
- Lainnya	12,46	13,59	10,48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,24	78,26	75,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,72	1,34	4,31

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31%, meningkat dibandingkan dua tahun terakhir yang berkisar 1,34% di 2014 dan 2,72% 2013. Penyebab peningkatan pengangguran ini disebabkan perlambatan ekonomi Balangan.

Ditinjau dari sektor lapangan kerja utama, lebih dari separuh penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.16:

Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Primer	56,03	58,85	57,21
Sekunder	8,99	3,82	6,80
Tersier	34,98	37,36	35,99
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57,21%. Sementara sektor tersier dan sekunder menyerap tenaga kerja masing-masing 35,99 dan 6,80%. Penduduk Kabupaten Balangan yang bekerja pada sektor primer dan tersier lebih banyak berjenis kelamin perempuan, hal ini bertolak belakang dengan jumlah penduduk yang lebih banyak laki-laki. Selanjutnya angkatan kerja di kabupaten balangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.17:

Tabel 2.17 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015

Jenis Kegiatan Utama	Pendidikan yang Ditamatkan			
	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Senior keatas
Angkatan Kerja	24,36	31,38	12,06	32,20
Bukan Angkatan Kerja	19,35	24,84	35,85	19,96
Jumlah	23,13	29,77	17,92	29,18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,39	79,46	50,74	83,16

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA ke atas sebesar 32,20%, demikian pula dengan TPAK pada tahun 2015 sebesar 83,16%. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2.6 Pendidikan Kabupaten Balangan

2.6.1 Profil Pendidikan Kabupaten Balangan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pemberdayaan peserta didik baik sebagai subjek maupun objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di daerah itu. Selain itu pendidikan juga sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan menciptakan lapisan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Faktor utama dalam peningkatan pendidikan adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Balangan hingga tahun 2015 antara lain 113 TK, 172 SD, 23 SMP, 11 SMA serta 3 SMK; dengan tenaga guru tercatat sebanyak 316 orang guru TK, 1.602 orang guru SD, 318 orang guru SMP, 307 orang guru SMU serta 72 orang guru SMK (Dinas Pendidikan dan KDA Balangan, 2016). Kemudian jumlah siswa pada masing-masing tingkatan pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa jumlah siswa TK sebanyak 4.560 orang, 12.892 orang siswa SD, 2.960 orang siswa SMP, sedangkan untuk tingkat SMU dan SMK masing-masing memiliki 2.730 orang murid dan 1.027 orang siswa.

Disamping itu terdapat sarana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jumlah sarana pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama di wilayah kabupaten Balangan antara lain 7 Raudatul Athfal/Bustanul Athfal dengan jumlah guru sebanyak 28 orang dan siswa sebanyak 302 orang, 34 Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 325 guru dengan siswa sebanyak 2.328 orang, 17 Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah guru sebanyak 303 guru dengan 2.903 siswa serta 6 Madrasah Aliyah dengan 119 orang guru dan 1.135 siswa.

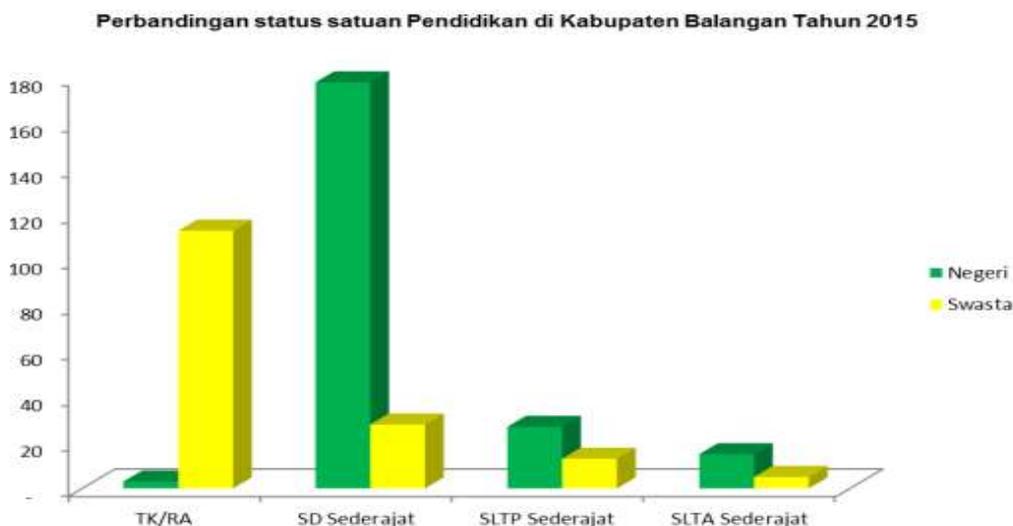
2.6.2 Satuan dan Sebaran Pendidikan

Satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK/RA), Pendidikan Dasar (SD Sederajat & SLTP) dan Pendidikan Menengah (SLTA sederajat). Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Balangan yakni 386 sekolah dengan perbandingan yakni 224 satuan pendidikan atau 58,03% berstatus negeri dan 162 satuan pendidikan atau 41,97% berstatus swasta, hal ini menunjukkan satuan pendidikan di Kabupaten Balangan hampir berimbang antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan yang dikelola masyarakat. Meskipun satuan pendidikan itu terlihat perbedaan yang nyata pada pendidikan TK sederajat dan SD Sederajat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah relatif baik pada pendidikan awal (pendidikan usia dini dan tingkat sekolah dasar), namun demikian proporsi terbesar satuan pendidikan yang dikelola masyarakat baru pada tingkat pendidikan usia dini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.2 berikut ini.

Tabel 2.18 Perbandingan Pengelolaan Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Ruang Kelas		Siswa		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	13	224	259	4,602	18	315
	TK	3	110	13	211	259	4,301	18	289
	RA	-	6	-	13	-	301	-	26
2	SD Sederajat	178	28	1,036	4	12,81	74	1,435	7
	SD	171	1	1,036	4	2,817	74	1,435	167
	MI	7	27						
3	SLTP Sederajat	28	13	135	3	2,884	96	305	13
	SMP	23	1	135	3	2,884	96	305	13
	MTs	5	12						
4	SLTA Sederajat	15	5	154	54	3,366	1,526	326	142
	SMA	9	3	81	42	1,540	1,190	179	98
	SMK	2	-	35	-	1,027	-	72	-
	MA	4	2	38	12	799	336	75	44
Satuan Pendidikan		224	162	1,338	285	19,32	6,298	2,08	477
Persentase (%)		58.03	41.97	82.439	17.560	75.421	24.578	81.374	18.625

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016



Gambar 2.6 Perbandingan Status Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagian besar dikelola masyarakat untuk tingkat pendidikan anak usia dini yaitu sebanyak 113 sekolah (97,41%) dan hanya 2,59% (3 sekolah) yang pengelolaannya oleh pemerintah baik itu dibawah dinas pendidikan ataupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah diatas 67% dikelola pemerintah, untuk tingkat SD sederajat 86,41% dikelola pemerintah baik oleh dinas pendidikan maupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk sekolah SLTA sederajat 75% pengelolaannya oleh pemerintah dan baru 25% yang dikelola swasta. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengelolaan pendidikan dan ketersediaan sekolah masih bergantung pada pemerintah Kabupaten Balangan sehingga pemerintah memerlukan penganggaran pendidikan dari kas pemerintah daerah yang memadai untuk membiayai sekolah-sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan di dalamnya. Satuan pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Distribusi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan								Kabupaten Balangan
		Lampih ong	Batu Mandi	Awayan	Tebing Tinggi	Paringin	Paringin Selatan	Juai	Halong	
1	TK/RA	20	20	9	5	17	10	22	16	119
1a	TK	19	18	8	5	15	10	22	16	113
	Negeri Swasta	19	1	8	5	1	10	1	16	
	Swasta	19	17	8	5	14	10	21	16	
1b	RA	1	2	1		2				6
	Negeri Swasta	1	2	1		2				
	Swasta	1	2	1		2				
2	SD/MI	31	26	26	12	23	18	34	36	206
2a	SD	26	22	21	12	19	17	24	31	172
	Negeri Swasta	26	22	21	12	19	16	24	31	
	Swasta	26	22	21	12	19	1	24	31	
2b	MI	5	4	5		4	1	10	5	34
	Negeri Swasta	1	3	1		1	1	10	1	
	Swasta	4	1	4		3	1	10	4	
3	SMP/MTs	3	6	4	3	6	6	6	7	41
3a	SMP	2	4	2	2	4	3	2	5	24
	Negeri Swasta	2	4	2	2	3	3	2	5	
	Swasta	2	4	2	2	1	3	2	5	
3b	MTs	1	2	2	1	2	3	4	2	17
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1	3	4	1	
	Swasta	1	1	1	1	1	3	4	1	
4	SMA/MA/SMK	2	3	2	1	3	4	2	4	21
4a	SMA	1	1	1	1	1	3	2	2	12
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1	2	2	2	
	Swasta	1	1	1	1	1	1	2	2	
4b	MA	1	1	1		1			2	6
	Negeri Swasta	1	1	1		1			1	
	Swasta	1	1	1		1			1	
4c	SMK		1			1	1			3
	Negeri Swasta		1			1	1			
	Swasta		1			1	1			
	Jumlah	5	55	4	2	49	38	6	6	387

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.19, jumlah satuan pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Balangan yaitu 386 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 64 satuan pendidikan dan yang paling terendah terdapat di kecamatan Tebing Tinggi yaitu 21 satuan pendidikan. Namun demikian, meskipun belum merata fasilitas sekolah pada masing-masing

Kecamatan tetapi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Balangan secara keseluruhan sudah memiliki semua jenjang pendidikan dari TK/RA hingga SLTA sederajat. Kemudian satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasikan berdasarkan status negeri dan swasta. Distribusi seluruh satuan pendidikan berdasarkan status negeri dan swasta menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan (%)		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Lampihong	32	24	56	57.14	42.86	100
2	Batu Mandi	32	22	54	59.26	40.74	100
3	Awayan	26	15	41	63.41	36.59	100
4	Tebing Tinggi	15	6	21	71.43	28.57	100
5	Paringin	27	22	49	55.10	44.90	100
6	Paringin Selatan	22	16	38	57.89	42.11	100
7	Juai	29	35	64	45.31	54.69	100
8	Halong	41	22	63	65.08	34.92	100
Total		224	162	386	58.03	41.97	100

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.20, Jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri yaitu 224 satuan pendidikan. Satuan pendidikan berdasarkan berstatus negeri yang paling banyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 41 satuan pendidikan dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 15 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang berstatus swasta yaitu 162 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan berdasarkan status swasta yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 35 satuan pendidikan dan kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan satuan pendidikan yang paling sedikit yang dikelola swasta yaitu 6 satuan pendidikan.

Berdasarkan paparan data pada tabel dan grafik di atas selanjutnya dapat dihitung rasio guru dengan murid, rasio murid dengan ruang kelas dan rasio sekolah dengan ruang kelas. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid di Kabupaten Balangan menunjukkan angka yang relatif sangat baik yakni 1:14, angka ini merupakan angka yang sangat ideal sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan mengenai rasio guru yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Uraian mengenai kondisi rasio jumlah guru dengan jumlah murid disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Rasio Jumlah Guru dengan Siswa di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	14.39	14.61
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	8.93	10.57
	SD	171	1	7	74	1,435	167		
	MI	7	27	12,817					
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,128	441	180	10.74	6.27
	SMP	23	1	2,884	76	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052	136	167		
4	SLTA Sederajat	16	5	3,366	1,526	326	142	10.33	10.75
	SMA	9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMK	3	-	1,027	-	72	-		
	MA	4	2	799	336	75	44		

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Selanjutnya rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas secara umum di Kabupaten Balangan menunjukkan angka rasio yang paling tinggi 1:28, angka ini sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya mengenai rasio jumlah guru dengan siswa yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Rasio jumlah siswa dengan ruang kelas secara prinsip adalah untuk mengetahui rasio siswa setiap rombongan belajar, sehingga di Kabupaten Balangan secara keseluruhan telah memenuhi syarat jumlah ruang kelas untuk setiap rombongan belajar. Uraian rasio jumlah murid dengan jumlah ruang kelas disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rasio Jumlah Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	19.92	20.54
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	12.37	18.50
	SD	171	1	12,817	74	1,435	167		
	MI	7	27						

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,148	305	13	24.41	21.26
	SMP	23	1	2,884	96	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052				
4	SLTA Sederajat	15	5	3,366	1,526	326	142	21.86	28.26
		9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMA	2	-	1,027	-	72	-		
	SMK	4	2	799	336	75	44		
	MA								

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

2.6.3 Capaian Rata-rata Lama dan Harapan Sekolah

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat di suatu daerah maka semakin besar akses dan peluang daerah tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Sektor pendidikan merupakan sektor yang juga menjadi permasalahan utama dalam pembangunan manusia. Kebijakan pemerintah dengan Program Wajib Belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping upaya peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, perlu ada upaya untuk pemerataan pendidikan.

Salah satu target capaian suatu pembangunan manusia adalah menciptakan manusia yang pintar dan berkualitas dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dan urgen bagi pembangunan suatu bangsa.

Tabel 2.23 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/ belum Pernah Sekolah	0.85	3.47	2.16

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/ Bbelum Tamat SD	22.25	31.73	26.99
SD/ Sederajat	34.49	33.37	33.93
SLTP	21.46	16.42	18.94
SLTA	16.38	11.03	13.71
Diploma Keatas	4.57	3.98	4.27
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pendidikan penduduk Kabupaten Balangan sebagian besarnya masih berpendidikan SD/sederajat ke bawah. Bahkan sekitar 26 persen di antaranya tidak tamat SD/sederajat dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sementara penduduk Kab. Balangan yang melanjutkan hingga pendidikan tinggi hanya pada kisaran 4 persen. Melihat hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Kab. Balangan untuk meningkatkan pendidikan penduduknya. Pemerintah harus memacu pembangunan pendidikan agar tingkat pendidikan penduduk Kab. Balangan terus meningkat. Namun demikian tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendidikan ini. Usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak terlepas dukungan dari semua pihak, terutama orang tua dan masyarakat.

Selain melihat tingkat pendidikan suatu daerah, indikator utama dalam pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan harapan lama sekolah (expected of years schooling), serta angka partisipasi sekolah. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menjadi komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM. Dua indikator ini menjadi ukuran seberapa besar dan seberapa lama partisipasi masyarakat usia sekolah yang bersekolah, serta melihat sejauh mana seseorang memiliki harapan untuk terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada metode baru usia 25 tahun ke atas digunakan dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalani oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah.

Tabel 2.24 Konversi Tahun Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pendidikan

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (th)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	16

Sumber : BPS

Secara relatif dibandingkan dengan angka Kalimantan Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan masih berada di bawah penduduk Kalimantan Selatan. Problema ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Kabupaten Balangan agar ke depannya ada peningkatan rata-rata lama sekolah sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Namun dari sisi pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan sebesar 1,52 persen per tahun, masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan (1,03) dan Indonesia (0,92).

Tabel 2.25 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2012-2016

Wilayah	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Balangan	6.21	6.23	6.36	6.46	6.71	1.52
Provinsi Kalsel	7.48	7.59	7.6	7.76	7.89	1.03
Indonesia	7.59	7.61	7.73			0.92

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Indikator lain dalam melihat pembangunan sektor pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (*Expected Years School/EYS*). Angka Harapan Lama Sekolah

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS ini menggantikan AMH dalam penghitungan IPM metode yang lama. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar anak SD yang dimulai dari usia 7 tahun.

Tabel 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2011-2014

Wilayah	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kab. Balangan	10.49	10.63	10.85	11.03
Provinsi Kalsel	11.14	11.54	11.67	11.96
Indonesia	11.44	11.68	12.1	12.39

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Balangan pada tahun 2014 adalah 11,03 tahun. Angka rata-rata harapan lama sekolah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2011, rata-rata harapan lama sekolah adalah 10,49 tahun dan meningkat menjadi 11,03 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rata-rata harapan penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 11,03 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Balangan mempunyai harapan berpendidikan sampai dengan kelas 2 atau 3 SMA sederajat. Meskipun demikian sebagaimana dengan rata-rata lama sekolah sebelumnya, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan juga masih berada di bawah angka provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga perlu program-program yang dapat mengakselerasi tingkat pendidikan Kabupaten Balangan menjadi lebih tinggi lagi.

Harapan lama sekolah sangat terkait dengan angka partisipasi sekolah.

Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, semakin meningkat pula harapan lama sekolah. Oleh karena itu kita bisa melihat angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Balangan. Dalam hal ini yang digunakan hanya dari angka partisipasi murni (APM) yang sejalan dengan penghitungan harapan lama sekolah. Karena keterkaitan itu, maka harapan lama sekolah dapat ditingkatkan dengan upaya pencegahan seminim mungkin angka putus sekolah.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	APS				
	a. SD Sederajat	104.71%	102,54%	102.69%	96.11%
	b. SLTP	77.70%	91.61%	89.19%	82.51%
	c. SLTA	52.50%	46.67%	50.90%	54.97%
2	APK				
	a. SD Sederajat	116.57%	116.99%	115.04%	106.45%
	b. SLTP	99.78%	90.78%	97.60%	93.32%
	c. SLTA	74.81%	78.33%	81.58%	82.66%
3	APM				
	a. SD Sederajat	97.10%	95.27%	93.42%	87.41%
	b. SLTP	58.81%	64.13%	63.94%	60.60%
	c. SLTA	50.14%	39.69%	43.88%	47.71%

Sumber : Diknas Balangan 2016

APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, APM membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan, sebagaimana yang telah diatur pemerintah mengenai usia sekolah menurut jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD merupakan perbandingan antara

jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD berumur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SLTP merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTP berumur 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SLTA merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTA berumur 16-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

APM pada semua jenjang baik SD (7-12), SLTP (13-15) dan SLTA (16-18) menunjukkan tren yang meningkat sejak 2012 hingga 2015. APM di tingkat sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 95,67 persen, Angka ini menunjukkan terdapat 95-96 orang anak usia 7-12 tahun di antara 100 penduduk kelompok usia 7-12 sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Pada jenjang pendidikan lanjutan pertama APM sebesar 77,12 persen, menunjukkan ada sebanyak 77-78 anak usia 13-15 tahun dari 100 orang yang sama usia dengan mereka sedang mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Pada jenjang pendidikan lanjutan atas APM Kabupaten semakin menunjukkan penurunan, yakni sebesar 53,57 persen memberi arti hanya sebanyak 53-54 orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang mengikuti pendidikan di bangku SLTA/ sederajat, selebihnya sekitar 46 orang tidak bersekolah.

Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait agar dapat mewujudkan angka partisipasi murni sekolah di balangan khususnya untuk tingkat pendidikan menengah menjadi lebih baik lagi. Terkait dengan angka partisipasi murni sekolah penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2015 yang cenderung menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan (SD 95,67%, SLTP 77,12% dan SLTA 53,57%), perlu dipikirkan bagaimana cara mempertahankan anak yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas agar dapat menamatkan pendidikannya bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.7 Kesehatan Kabupaten Balangan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan

kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

2.7.1 Sarana dan Prasarana

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang mulia ini diperlukan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan secara berkesinambungan dan paripurna meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan yang membutuhkan sarana/fasilitas kesehatan.

Penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan hal ini masih merupakan tantangan bagi negara Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Balangan yang merupakan daerah pemekaran. Menjawab tantangan ini diperlukan perencanaan sehingga penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan bermutu berdaya guna dan

berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan selaku koordinator pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan telah menyusun strategi diantaranya melalui revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang melalui peningkatan akses pada pelayanan kesehatan, terutama dikecamatan-kecamatan selain diibukota kabupaten.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan

- hidup sehat;
2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari: (1) Upaya promosi kesehatan; (2) Upaya kesehatan lingkungan; (3) Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana; (4) Upaya perbaikan gizi; (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) Upaya pengobatan.

Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Balangan pada tahun 2015 sebanyak 1 unit dan belum terdapat rumah sakit khusus. Jumlah puskesmas di Kabupaten Balangan sampai tahun 2015 sebanyak 58 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 1 unit puskesmas rawat inap dan 11 unit puskesmas non rawat inap, 14 puskesmas keliling dan 22 puskesmas pembantu. Adapun jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/ KOTA	TN/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			1				1
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			1				1
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			10				10
2	PUSKESMAS NON RAWAT			11				11
3	PUSKESMAS KELILING			14				14
4	PUSKESMAS PEMBANTU			22				22
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN							-
2	BALAI PENGobatan/KLINIK							-
3	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
4	PRAKTIK DOKTER						23	23
5	PRAKTIK PENGobatan TRADISIONAL						1	1
6	BANK DARAH RUMAH SAKIT							-
7	UNIT TRANSFUSI DARAH			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/ KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	USAHA KECIL OBAT							-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							-
6	APOTEK						3	3
7	TOKO OBAT						17	17
8	PENYALUR ALAT KESEHATAN							-

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Keterangan

- Praktik dokter perorangan terdiri dari dokter umum dan dokter gigi
- Toko obat terdiri dari toko obat tidak berizin 13 (Tiga Belas) buah dan toko obat berizin 4 (Empat) buah

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain: menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Di kabupaten Balangan terdapat 84 posyandu pratama, 88 madya dan 4 mandiri sedangkan posyandu aktif sebanyak 139 buah.

Berdasarkan data posyandu aktif terbanyak dikecamatan Paringin sebanyak 29, 25 dikecamatan Juai, 23 di kecamatan Paringin Selatan dan Awayan, 22 dikecamatan Batumandi, 9 dikecamatan Tebing Tinggi, 8 dikecamatan Juai, sedangkan dikecamatan Halong tidak ada posyandu yang aktif. Secara garis jumlah posyandu sudah cukup banyak namun tingkat sebaran tidak merata, contoh dikecamatan Paringin sebanyak 29 posyandu aktif sedangkan dikecamatan Halong tidak ada satupun posyandu aktif. Adapun jumlah posyandu menurut strata, kecamatan dan puskesmas Kabupaten Balangan tahun 2015 dilihat pada tabel 2.23:

Tabel 2.23 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF		
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Paringin	Paringin	29	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	29	29	100,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	4,2	21	87,5	0	0,0	2	8,3	24	23	95,8

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF		
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	Lampihong	Lampihong	20	95,2	1	4,8	0	0,0	0	0,0	21	1	4,8
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0,0	6	28,6	1	4,8	0	0,0	7	7	100,0
5	Batumandi	Batu Mandi	0	0,0	0	0,0	15	93,8	1	6,3	16	16	100,0
6	Batumandi	Lok Batu	2	25,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	8	6	75,0
7	Awayan	Awayan	0	0,0	22	95,7	0	0,0	1	4,3	23	23	100,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	4	30,8	8	61,5	1	7,7	0	0,0	13	9	69,2
9	Juai	Juai	0	0,0	17	100,0	0	0,0	0	0,0	17	17	100,0
10	Juai	Pirsus	0	0,0	7	87,5	1	12,5	0	0,0	8	8	100,0
11	Halong	Halong	21	262,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	0	0,0
12	Halong	Uren	7	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			84	43,3	88	45,4	18	9,3	4	2,1	194	139	71,6
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1,4		

Sumber: Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Sebagai perpanjangan tangan pelayanan kesehatan, agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat maka sudah cukup banyak dibangun Puskesmas, untuk terlayannya masyarakat. Pembangunan sarana kesehatan juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi pada beberapa sarana kesehatan yang ada, seperti Pustu dan Polindes.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan perlu digali potensi yang ada pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) dengan penekanan atau fokus pelayanan pada upaya promotif dan preventif. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sangat berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di kabupaten Balangan terdapat 105 poskesdes, 28 polindes dan 14 posbindu. Sebaran poskesdes terbanyak berada kecamatan Awayan yaitu sebanyak 23, sedangkan yang paling sedikit berada dikecamatan Paringin Selatan yaitu sebanyak 2. Sebaran polindes terbanyak dikecamatan Paringin Selatan dan Awayan, sedang dikecamatan lainnya tidak ada. Sedangkan data sebaran jumlah Posbindu terbanyak dikecamatan Batu Mandi sebanyak 6, dikecamatan Awayan ada 4, 2 dikecamatan Lampihong sedangkan dikecamatan lainnya tidak ada.

Tingkat sebaran poskesdes, polindes dan posbindu di kabupaten Balangan belum merata, hal tersebut dapat dilihat pada data jumlah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) menurut kecamatan pada tabel 2.24:

Tabel 2.24 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN	PAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA		
				POSKESDES	POLINDES	POSBINDU
1	2	3	4	5	6	7
1	Paringin	Paringin	16	7	0	-
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	2	14	-
3	Lampihong	Lampihong	20	13	0	2
4	Lampihong	Tanah Habang	7	6	0	-
5	Batumandi	Batu Mandi	12	11	0	2
6	Batumandi	Lok Batu	6	4	0	4
7	Awayan	Awayan	23	23	14	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	8	0	-
9	Juai	Juai	16	12	0	-
10	Juai	Pirsus	5	5	0	-
11	Halong	Halong	17	9	0	-
12	Halong	Uren	7	5	0	2
JUMLAH (KAB/KOTA)			157	105	28	14

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa

siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Desa yang dimaksud di sini dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu). Di kabupaten Balangan terdapat 53 kategori pratama, 52 madya, 2 purnama dan 1 mandiri.

Sebaran desa siaga menurut kecamatan terbanyak berada dikecamatan Lampihong yaitu sebanyak 27, 22 dikecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai 21, 18 dikecamatan Batu Mandi, 12 dikecamatan Tebing Tinggi, 7 dikecamatan Halong, 1 dikecamatan Awayan. Sedangkan dikecamatan Paringin tidak ada. Tingkat sebaran desa siaga di kabupaten Balangan belum merata hal ini terlihat pada jumlah di beberapa kecamatan mencapai 27 (kecamatan Lampihong) sedangkan dikecamatan Awayan hanya 1 desa siaga saja. Adapun jumlah desa siaga menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.25:

Tabel 2.25 Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA				JUMLAH	%
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paringin	Paringin	16	-	0	-	0	-	0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	-	21	-	1	22	137,50
3	Lampihong	Lampihong	20	19	1	-	0	20	100
4	Lampihong	Tanah Habang	7	-	6	1	0	7	100
5	Batumandi	Batu Mandi	17	-	11	1	0	12	70,59
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	-	-	0	6	100
7	Awayan	Awayan	6	1	-	-	0	1	16,67
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	23	12	-	-	0	12	52,173913
9	Juai	Juai	16	3	13	-	0	16	100
10	Juai	Pirsus	5	5	-	-	0	5	100

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA					JUMLAH	%
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI			
11	Halong	Halong		-	0	-	0	-	0	
12	Halong	Uren	17	7	0	-	0	7	41,1764706	
JUMLAH (KAB/KOTA)			149	53	52	2	1	108	72,48	

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, *physician* (dokter fisit), maupun *dentist* (dokter gigi). Di Kabupaten Balangan sendiri terdapat 6 orang dokter spesialis, 22 dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Sebaran di RSUD Balangan terdapat 6 orang dokter spesialis, 11 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Sebaran data dokter umum yang ada di kecamatan yang ada di Balangan terbagi atas, 2 orang di kecamatan Paringin Selatan dan Halong. Sedangkan di kecamatan lain ada masing-masing dokter umum, kecuali di kecamatan Tebing Tinggi. Sebaran dokter gigi hanya ada 1 orang di kecamatan Halong, sedangkan kecamatan lain tidak ada. Dengan melihat data sebaran tenaga medis maka dapat digambarkan bahwa di kecamatan Batu Mandi dan Tebing Tinggi belum ada dokter umum yang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2015 terdapat sarana puskesmas sebanyak 11 buah, dimana jumlah penduduk tahun 2015 hasil proyeksi penduduk adalah 123.449 jiwa sehingga secara rata-rata setiap puskesmas dapat melayani 11.223 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah dokter yang terdapat di Kabupaten Balangan sebanyak 32 orang. Maka dapat dikatakan rata-rata 1 orang dokter melayani 3.857 Orang. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini yang mengakibatkan kurangnya pelayanan di bidang kesehatan terhadap masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi himbauan kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan tenaga dokter dalam rekrutmen pegawai di masa yang akan datang. Berikut gambaran jumlah tenaga medis difasilitas kesehatan di kabupaten Balangan:

Tabel 2.26 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Puskesmas Paringin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Puskesmas Paringin Selatan			-	1	1	2	1	1	2										
3	Puskesmas Lampihong			-	1	-	1	1	-	1										
4	Puskesmas Tanah Habang			-	-	1	1	-	1	1										
5	Puskesmas Batu Mandi			-	1	-	1	1	-	1										
6	Puskesmas Lok Batu			-	-	-	-	-	-	-										
7	Puskesmas Awayan			-	-	1	1	-	1	1										
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-	-	-	-	-	-	-										
9	Puskesmas Juai			-	-	1	1	-	1	1										
10	Puskesmas Pirsus			-	-	1	1	-	1	1										
11	Puskesmas Halong			-	2	-	2	2	-	2		1	1					1	1	
12	Puskesmas Uren			-	1	-	1	1	-	1										
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		-	-	-	6	5	11	6	5	11	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
1	RSUD Balangan	4	2	6	2	9	11	6	11	17	1		1					1	-	1
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		4	2	6	2	9	11	6	11	17	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																				
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				-			-	-	-	-										
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-	-	-	-										
JUMLAH (KAB/KOTA)		4	2	6	8	14	22	12	16	28	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				4,9			18			22,7			1,6							1,6

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - ^a termasuk S3

- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga medis yang juga sangat berperan terhadap pelayanan kesehatan adalah perawat. Perawat sendiri terbagi atas bidan, perawat dan perawat gigi. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 176 bidan, 114 perawat dan 15 perawat gigi.

Sebaran Bidan terbanyak sebanyak 25 bidang ada di puskesmas Awayan, sedangkan yang paling sedikit sebanyak 6 orang di puskesmas Tanah Habang dan Pirsus. Sebaran Perawat paling banyak 16 orang di puskesmas Halong sedangkan paling sedikit berada di puskesmas Tanah Habang sebanyak 3 orang. Sedangkan Perawat Gigi terbanyak di puskesmas yang berada di puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Lok Batu dan Awayan sebanyak 2 orang. Sedangkan di puskesmas Tanah Habang, Pirsus dan Uren tidak ada Perawat Gigi. Dengan melihat data sebaran tenaga keperawatan maka dapat digambarkan bahwa untuk bidan dan perawat sudah cukup merata sedangkan untuk perawat gigi masih ada di kecamatan yang hanya memiliki 1 orang perawat gigi sedangkan yang lainnya minimal memiliki 2 orang perawat gigi.

Jumlah bidan tahun 2015 adalah 215 orang dan perawat 246 orang. Secara rata-rata dari seluruh jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 250 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2015. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan, merupakan salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya angka harapan hidup. Hal ini diduga dipicu juga oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih suka menggunakan tenaga kesehatan tradisional atau bahkan mengobati sendiri. Adapun gambaran jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.27:

Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	BIDAN	PERAWAT ^a			PERAWAT GIGI		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puskesmas Paringin	21	2	9	11	1	1	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	22	3	7	10	0	2	2
3	Puskesmas Lampihong	18	2	7	9	0	2	2
4	Puskesmas Tanah Habang	6	1	2	3	0	0	0
5	Puskesmas Batu Mandi	14	3	10	13	0	2	2
6	Puskesmas Lok Batu	7	2	6	8	1	1	2
7	Puskesmas Awayan	25	3	4	7	0	2	2
8	Puskesmas Tebing Tinggi	13	6	5	11	1	0	1
9	Puskesmas Juai	18	3	3	6	0	1	1
10	Puskesmas Pirusus	6	4	3	7	0	0	0
11	Puskesmas Halong	19	6	10	16	0	1	1
12	Puskesmas Uren	7	5	8	13	0	0	0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		176	40	74	114	3	12	15
1 RSUD Balangan		39	36	78	114	1	2	3
					0			0
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		39	36	78	114	1	2	3
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0	0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0	0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0	0			0
JUMLAH (KAB/KOTA)		215	76	152	228	4	14	18
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK		350,67			184,69			14,58

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - ^a termasuk perawat anastesi dan perawat spesialis
- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan, serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan

persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 21 tenaga teknis kefarmasian dan 7 orang apoteker. Sebaran dikecamatan Paringin dan Halong terdapat 2 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang dipuskesmas Paringin Selatan, Lampihong, Tanah Habang, Batu Mandi, Lok Batu, Juai, Pirsus dan Uren. Sedangkan Awayan dan Uren tidak ada tenaga teknis kefarmasian. Jumlah tenaga kefarmasian tahun 2015 adalah 40 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan. Adapun gambaran jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2.28 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIKIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas Paringin	-	2	2			-	-	2	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	-	1	1			-	-	1	1
3	Puskesmas Lampihong	-	1	1			-	-	1	1
4	Puskesmas Tanah Habang	-	1	1			-	-	1	1
5	Puskesmas Batu Mandi	-	1	1			-	-	1	1
6	Puskesmas Lok Batu	-	1	1			-	-	1	1
7	Puskesmas Awayan	-	-	-			-	-	-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi	-	-	-			-	-	-	-
9	Puskesmas Juai	-	1	1			-	-	1	1
10	Puskesmas Pirsus	-	1	1			-	-	1	1
11	Puskesmas Halong	1	1	2			-	1	1	2
12	Puskesmas Uren	-	1	1			-	-	1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		1	11	12	-	-	-	1	11	12
1	RSUD Balangan	6	15	21	-	7	7	6	22	28
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		6	15	21	-	7	7	6	22	28
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				-			-			-
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				-			-			-
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-			-
JUMLAH (KAB/KOTA)		7	26	33	-	7	7	7	33	40
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				26,7			5,7			32,4

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - a termasuk analis farmasi, asisten apoteker, sarjana farmasi
- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Ahli Gizi atau dietitian adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika, yaitu studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus untuk mencegah dan mengobati penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dikatakan bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374/MENKES/SK/III/2007, dikatakan bahwa ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit.

Tugas pokok *nutrisionis* adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit manapun di institusi kesehatan lainnya. *Nutrisionis* bersama dengan profesi lainnya saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi sekaligus status gizinya. Sedangkan Kegiatan *Nutrisionis* berkaitan dengan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan hasil laporan kegiatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 2 tenaga fisioterapis. Adapun gambaran jumlah tenaga gizi di fasilitas kesehatan di kabupaten Balangan masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.29:

Tabel 2.29 Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KETERAPIAN FISIK												TOTAL		
		FISIOTERAPIS			OKUPASI TERAPIS			TERAPIS WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Puskesmas Paringin			-			-			-			-		-	-
2	Puskesmas Paringin Selatan			-			-			-			-		-	-
3	Puskesmas Lampihong			-			-			-			-		-	-
4	Puskesmas Tanah Habang			-			-			-			-		-	-
5	Puskesmas Batu Mandi			-			-			-			-		-	-
6	Puskesmas Lok Batu			-			-			-			-		-	-
7	Puskesmas Aawayan			-			-			-			-		-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-			-			-			-		-	-
9	Puskesmas Juai			-			-			-			-		-	-
10	Puskesmas Pirsus			-			-			-			-		-	-
11	Puskesmas Halong			-			-			-			-		-	-
12	Puskesmas Uren			-			-			-			-		-	-
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	RSUD Balangan	1	1	2			-			-			-	1	1	2

NO	UNIT KERJA	TENAGA KETERAPIAN FISIK												TOTAL			
		FISIOTERAPIS			OKUPASI TERAPIS			TERAPIS WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			-			-			-			-	-	-	-	
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			-			-			-			-	-	-	-	
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			-			-			-			-	-	-	-	
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK																1,6

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga teknik elektromedik adalah seorang yang berpendidikan dalam bidang teknik elektromedik dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik, berdasarkan rekomendasi atau akreditasi organisasi profesi teknik elektromedik. Pelayanan teknik elektromedik mencakup perencanaan, pelaksanaan, wasdal, dan berperan serta dalam pengadaan/penerimaan, evaluasi dan pendayagunaan alat kesehatan serta bimbingan pengoperasian alat kesehatan.

Alat kesehatan menurut UU.No.23 tentang kesehatan adalah: Instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis. Berdasarkan data dikabupaten Balangan terdapat 5 orang radiografer, 1 orang tenaga elektromedis, 13 analisis kesehatan, 2 refraksonis optisen, 7 orang tenaga rekam medis dan informasi kesehatan. Sebaran tenaga keteknisan medis hanya ada pada analisis kesehatan, dimana terdapat 2 orang dipuskesmas Paringin, sedangkan dipuskesmas lainnya hanya terdapat 1 orang tenaga analisis kesehatan.

2.7.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup adalah jumlah bayi yang meninggal pada usia 1 hari sampai dengan 1 hari sebelum bayi tersebut merayakan ulang tahunnya yang pertama dalam suatu wilayah tertentu selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup (KH) diwilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1000.

AKB merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Ia tidak hanya berguna dalam memberikan informasi tentang bayi, tetapi juga sebagai gambaran penduduk dengan tingkat sosial ekonominya. Selain itu AKB merupakan indikator yang sensitif dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan keefektifan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan perinatal. Berdasarkan data tahun 2015 diketahui angka kematian bayi sebanyak 4 bayi. Angka kematian bayi sangat berkaitan erat dengan jumlah ibu hamil dan ibu yang melahirkan pada saat itu sehingga jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun dalam kurun waktu satu tahun akan mempengaruhi capaian angka kematian bayinya. Dari 2.446 jumlah kelahiran terdapat 4 bayi yang meninggal di Kabupaten Balangan pada tahun 2015. Sebarannya terdapat 2 orang di kecamatan Tebing Tinggi, masing-masing 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Halong. Adapun gambaran jumlah kelahiran dan kematian bayi menurut jenis kelamin, kecamatan dan puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN									IUFD
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paringin	Paringin	227	2	229	175	4	179	402	0	402	4
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	120	0	120	127	1	128	247	1	248	2
3	Lampihong	Lampihong	145	1	146	116	0	116	261	0	261	0
4	Lampihong	Tanah Habang	35	0	35	40	0	40	75	0	75	0
5	Batamandi	Batu Mandi	122	1	123	122	2	124	244	0	244	5
6	Batamandi	Lok Batu	48	0	48	40	0	40	88	0	88	0
7	Awayan	Awayan	122	0	122	124	2	126	246	0	246	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	68	2	70	65	2	67	133	2	135	0
9	Juai	Juai	112	1	113	143	1	144	255	0	255	1
10	Juai	Pirsus	43	0	43	34	1	35	77	0	77	2
11	Halong	Halong	155	1	156	154	2	156	309	0	309	2
12	Halong	Uren	60	0	60	45	1	46	105	1	106	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			1.257	8	1.265	1.185	16	1.201	2.442	4	2.446	
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				6,3			13,3			1,6		20

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Sedangkan angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Kematian ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa

sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Angka kematian neonatal di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 11,1. Angka kematian neonatal tertinggi di Kecamatan Paringin dan yang terendah di kecamatan Awayan. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 14,7. Dibandingkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 17/1.000 kelahiran hidup maka AKB di kabupaten Balangan Tengah tahun 2015 sudah melampaui target. AKB tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–5 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. AKABA kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 16,8. Dibandingkan dengan cakupan yang diharapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup, AKABA Kabupaten Balangan tahun 2015 sudah melampaui target. AKABA tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Tekait kematian neonatal, bayi dan balita dapat dilihat pada tabel 2.31:

Tabel 2.31 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+ PEREMPUAN			
			NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Paringin	Paringin	3	4	0	4	1	1	1	2	4	5	1	6
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	3	5	1	6	2	2	0	2	5	7	1	8
3	Lampihong	Lampihong	2	3	0	3	2	3	0	3	4	6	0	6

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA
4	Lampihong	Tanah Habang	1	2	0	2	0	1	0	1	1	3	0	3
5	Batumandi	BatuMandi	2	2	0	2	1	2	0	2	3	4	0	4
6	Batumandi	Lok Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Awayan	Awayan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	3	3	1	4	1	1	1	2	4	4	2	6
9	Juai	Juai	3	3	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3
10	Juai	Pirsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Halong	Halong	2	2	0	2	0	1	0	1	2	3	0	3
12	Halong	Uren	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
JUMLAH (KAB/KOTA)			19	24	2	26	8	12	3	15	27	36	5	41
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			15,1	19,1	1,6	20,7	6,8	10,1	2,5	12,7	11,1	14,7	2,0	16,8

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

2.7.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu dapat menunjukkan indikasi tingkat kesakitan seorang ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil hingga melahirkan. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan (BPS, 2015)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) juga berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Oleh karena itu Sektor kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator angka harapan hidup dapat diukur dengan melihat angka kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu.

AKI adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun di bagi jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada periode yang sama dikalikan 100.000. AKI mencerminkan risiko yang mengancam ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan. Angka ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, gizi, sanitasi dan yang tak kalah

pentingnya adalah pelayanan kesehatan ibu. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu di Kabupaten Balangan ada sebanyak 6 orang. Berdasarkan data terdapat 2 orang dikecamatan Paringin dan Batu Mandi, 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun gambaran jumlah kematian ibu dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU																
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU				
				<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	
1	Paringin	Paringin	402	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
3	Lampihong	Lampihong	261	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Lampihong	Tanah Habang	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	244	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2
6	Batumandi	Lok Batu	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Awayan	Awayan	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Juai	Juai	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Juai	Pirus	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Halong	Halong	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Halong	Uren	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			2.442	0	2	0	2	0	0	1	1	1	2	0	3	1	4	1	6	6
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																				246

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan: - Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas

- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

2.7.4 Angka Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 27 jumlah temuan dan semua telah mendapat perawatan. Sebaran kasus gizi buruk berdasarkan kecamatan dengan rincian terdapat 4 orang dikecamatan Halong, 3 orang dikecamatan Juai, 2 orang dikecamatan Batu Mandi dan masing-masing 1 orang dikecamatan Paringin, Paringin Selatan, Lampihong dan Tebing Tinggi. Keseluruhan kasus gizi buruk sudah mendapat perawatan semua. Adapun

gambaran jumlah cakupan kasus gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Balangan bisa dilihat pada tabel 2.33:

Tabel 2.33 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KASUS BALITA GIZI BURUK								
			JUMLAH DITEMUKAN			MENDAPAT PERAWATAN					
			L	P	L+P	L		P		L + P	
			S	%	S	%	S	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Paringin	Paringin	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	3	4	1	100,0	3	100,0	4	100,0
3	Lampihong	Lampihong	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
4	Lampihong	Tanah Habang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Batumandi	Batu Mandi	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
6	Batumandi	Lok Batu	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
7	Awayan	Awayan	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
9	Juai	Juai	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
10	Juai	Pirsus	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
11	Halong	Halong	4	7	11	4	100,0	7	100,0	11	100,0
12	Halong	Uren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)			13	14	27	13	100,0	14	100,0	27	100,0

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

2.7.5 Sanitasi dan Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka kejadian penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan air bersih adalah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Sarana air minum terdiri atas sumur gali, sumur bor, terminal air, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan perpipaan. Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 59,4 persen. Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) terbanyak ada dikecamatan Paringin, sedangkan yang terendah ada dikecamatan Tebing Tinggi.

Persentase Penyelenggara Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang

persyaratan kualitas air minum, setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. Adapun cakupan kualitas air minum di penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 98,23 persen. Adapun gambaran persentase kualitas air minum dipenyenggaraan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.34:

Tabel 2.34 Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENYELENGGARA AIR MINUM	JUMLAH SAMPEL DIPERIKSA	MEMENUHI SYARAT (FISIK, BAKTERIOLOGI, DAN KIMIA)	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7,00
1	Paringin	Paringin	24	23	17	73,91
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	13	18	14	77,78
3	Lampihong	Lampihong	1	1	0	0,00
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	7	21	15	71,43
6	Batumandi	Lok Batu	452	6	0	0,00
7	Awayan	Awayan	134	134	134	100,00
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	0	0	0	0
9	Juai	Juai	1	1.088	1.088	100,00
10	Juai	Pirsus	2	2	2	100,00
11	Halong	Halong	11	6	6	100,00
12	Halong	Uren	9	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			654	1.299	1.276	98,23

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi yang Layak Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2015 adalah 54,5% Jenis sarana

sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi jamban komunal (100%), Leher Angsa (87,7%), Plengsengan (22,5%) dan Cemplung (91,1%). Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) terbanyak ada dikecamatan Paringin Selatan (86,8%) sedangkan yang terendak ada dikecamatan Tebing Tinggi (5,1%).

Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 5 pilar yaitu: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, (2) Cuci Tangan pakai sabun, (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, (5) Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga. Capaian desa yang melaksanakan STBM pada tahun 2015 adalah sebanyak 39 desa (23,8%). Sebaran desa yang melaksanakan STBM sebanyak 13 desa dikecamatan Lampihong, 12 desa dikecamatan Halong, 9 desa dikecamatan Batu Mandi dan 5 desa dikecamatan Juai. Adapun gambaran desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.35:

Tabel 2.35 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
				DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paringin	Paringin	20	2	10	0	0,0	0	0,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	19	14	73,7	4	21,1	0	0,0
3	Lampihong	Lampihong	20	9	45,0	0	0,0	9	45,0
4	Lampihong	Tanah Habang	7	4	57,1	0	0,0	4	57,1
5	Batumandi	Batu Mandi	12	9	75,0	5	41,7	9	75,0
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
7	Awayan	Awayan	23	13	56,5	1	4,3	0	0,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	10	83,3	0	0,0	0	0,0
9	Juai	Juai	16	8	50,0	2	12,5	0	0,0
10	Juai	Pirsus	5	5	100,0	1	20,0	5	100,0
11	Halong	Halong	17	12	70,6	2	11,8	12	70,6
12	Halong	Uren	7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			164	99	60,4	15	9,1	39	23,8

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

2.7.6 Persebaran Tenaga Kesehatan

Dikabupaten Balangan ketersediaan dan kondisi persebaran tenaga kesehatan yang belum terpenuhi. Tenaga yang masih kurang antara lain tenaga dokter gigi, dokter, perawat dan bidan. Kekurangan Bidan selama ini diatasi dengan merekrut PTT daerah, selain itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan,

khususnya bidan dan perawat sejak tahun 2010 diprogramkan dengan beasiswa putra daerah wilayah setempat, hal ini merupakan salah satu jalan keluar bagi daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat didaerah-daerah yang terpencil. Penyebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Balangan dapat dikatakan masih belum merata. Untuk daerah dalam kota yang dekat dengan pusat pemerintahan, hampir tidak ada ditemui permasalahan persebaran tenaga kesehatan, bahkan kondisi tenaga kesehatannya berlebih namun sebaliknya di luar perkotaan masih kurang. Umumnya sangat sulit sekali untuk memindahkan tenaga kesehatan PNS yang sudah berada di daerah kota ke daerah luar kota/terpencil.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan sarana prasarana daerah- daerah terpencil atau sangat terpencil dalam hal ini transportasi, penerangan, sarana komunikasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dirasa perlu lebih memperhatikan masalah insentif yang seharusnya lebih banyak dibanding dengan petugas lain di daerah perkotaan serta kemudahan dalam pengembangan kualitas diri atau karir.

Sesuai dengan UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah kabupaten/kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Kesehatan pada IPM Kabupaten Balangan, dimana sektor sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Balangan. Proses pembangunan sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD serta dokumen RTRW. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah :

1. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Balangan dalam jangka panjang.
2. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap

kawasan.

3. Kawasan beresiko sanitasi.
4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah).

Adapun beberapa permasalahan utama dalam perbaikan sanitasi adalah terdapatnya sebesar 25,70% masyarakat belum mengakses jamban, terutama masyarakat miskin dalam mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu juga belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kondisi geografis wilayah Balangan juga kurang mendukung, sehingga menjadikan rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

Bentuk pengembangan pengelolaan sanitasi dibagi menjadi sistem on site (on site individual (*septic tank*) dan on site komunal-MCK) dan sistem off site (penyediaan instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan limbah tinja).

Dalam rangka pemasyarakatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), adalah sektor pengelolaan sampah. Hal penting dari pengelolaan sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yakni pembatasan dan pengurangan timbulan sampah (*reduce*), adalah pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendaur ulangan sampah (*recycle*). Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Balangan, volume timbulan sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga maupun non rumah tangga juga bertambah. Besarnya jumlah penduduk bisa menjadi potensi karena perannya sebagai pelaku pemilahan dan pengurangan sampah. Dalam hal penanganan sampah, faktor prasarana dan sarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat menentukan. Semakin kontinyu dan besarnya kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, maka semakin bagus juga pengelolaan persampahan. Dalam rangka pengelolaan persampahan baik di permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, peran pemerintah dan

swasta sangat menentukan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, pembinaan, menampung dan memasarkan produk 3R di masyarakat.

Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Balangan terdiri desa dan kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat. Bisa jadi merupakan desa dan kelurahan yang memiliki posisi strategis ekonomi salah satunya dilalui jalan nasional penghubung ke Kalimantan Timur dan desa-desa yang menjadi ibukota kecamatan dengan kegiatan ekonomi relatif homogen. Sedangkan untuk desa yang pertumbuhannya relatif lamban yakni daerah perdesaan untuk pengelolaan sampahnya masih dikelola secara mandiri oleh individu maupun lingkungannya masing-masing.

Rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Balangan terbagi menjadi penanganan secara langsung (direct) maupun sistem penanganan secara tidak langsung. Sistem penanganan langsung berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan sampah. Sedangkan penanganan tidak langsung merupakan bentuk pengurangan sampah melalui sistem 3R. Sistem penanganan langsung dilakukan di kawasan cepat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perkotaan yang dindikasikan dari adanya kawasan komersial, sedangkan penanganan tidak langsung melalui 3R dilakukan di kawasan yang lambat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perdesaan.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan

Metodologi merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan tentang isu-isu yang dihadapi. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Kabupaten Balangan. Berikut metode yang akan digunakan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan Di Kabupaten Balangan:

1. Metode Survey dengan teknik analisa data statistik

Survey kelapangan dengan terhadap Pendidik/kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa, untuk pengambilan angket survey.

2. Observasi, kuisisioner, dan dokumentasi

Observasi, kuisisioner dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data di lapangan berkaitan erat dengan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

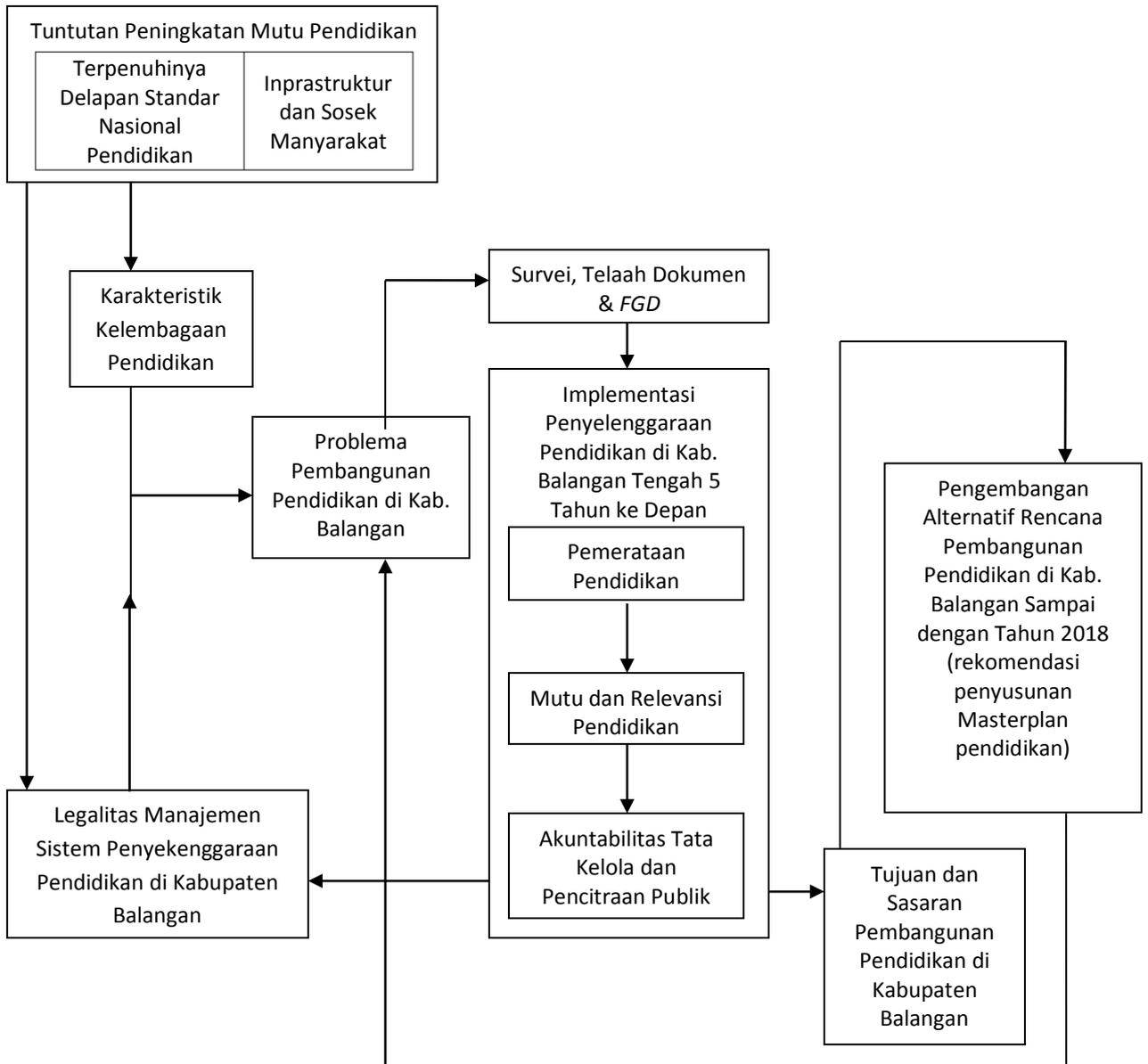
3.2 Analisis Data

Unit analisis untuk kepentingan Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan, meliputi : (1) Unsur Kepala Daerah dan DPRD; (2) Unsur Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3) Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan; (5) Dokumen-dokumen seperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (c) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan; (d) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); (e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (f) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021; (g) Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (h) RKPD 2013; (i) PerUndang-Undangan pendidikan; (j)

Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015; (k) Kajian tentang potensi sekolah kejuruan di Kabupaten Balangan; (l) Analisis butir soal UAS mata pelajaran PPKn di SMPN Kab. Balangan; (m) Kajian tentang identifikasi dan potensi anak usia sekolah di Kab. Balangan; (n) Kajian potensi pendidikan dan anak untuk pendidikan anak usia dini; (o) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; (p) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; (q) Kajian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Balangan tahun 2015.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, diilustrasikan seperti pada Gambar 3. 1 berikut ini.

Gambar 3. 1 Kerangka Analisis Review Masterplan Pendidikan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Balangan



Gambar 3. 2 Skema Review Master Plan Pendidikan Tahun 2011-2015



3.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terbagi kedalam dua ambilan data dilapangan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, FGD (Facus Grup Discussion) dan workshop yang dilakukan secara langsung oleh tim pendamping dengan jajaran pihak Pendidikan di Kabupaten Balangan. Data sekunder merupakan data yang terkumpul melalui penelusuran literature atau referensi dokumen di jajajaran Pendidikan Kabupaten Balangan dan dokumen penunjang dari situs resmi BPS Kabupaten Balangan maupun BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus ambilan data adalah data-data yang berkenaan dengan kondisi kesehatan terbaru saat ini (tahun 2017) maupun kondisi Pendidikan di tahun sebelumnya (2013-2016) yang berhubungan dengan 3 isu strategis pendidikan antara lain: 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru dan Murid. 2) Ketersediaan Guru yang memiliki kompetensi. 3) Ketersediaan sarana prasarana penunjang Pendidikan.

3.4 Instrumen (Kuesioner) Kajian

Istrumen disusun menggunakan teknik kuesinoer berupa butir-butir pernyataan yang dibagikan kepada responden. Dengan disertai rubrik isian responden diarahkan untuk mengisi pernyataan. Instrumen kuestioner di buat dalam tiga objek responden yaitu: Kepala sekolah, pendidik, masyarakat, dan siswa. Dari keempat responden tersebut dapat di ukur berbagai sisi demi kepentingan penelitian lapangan.

Setelah dilakukan penyusunan instrument maka dilanjutkan dengan kajian kualitatif dan kuantitatif yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk analisa data. Deskripsi hasil pembahasan mengungkapkan fakta-fakta sebagai kajian logis yang dicantumkan dalam bentuk catatan hasil temuan.

3.5 Sistematika Penulisan

Sestematika penulisan kajian kebijakan sebagai berikut :

1. Bab 1 terdiri dari Laporan Pendahuluan, latar belakang, Rencana Kegiatan, Jadwal kegiatan dan penelitian lapangan, Metode Penelitian. Demografi dan

sebagainya

2. Bab 2 terdiri dari visi misi pembangunan pendidikan berikut kondisi exciting pendidikan di Kabupaen Balangan
3. Bab 3 terdiri implementasi pembangunan pendidikan
4. Bab 4 terdiri perencanaan 5 tahunan pembangunan pendidikan di lihat dari dua pilar pembangunan yaitu pendidik dan masyarakat.
5. Bab 5 terdiri dari implementasi program pendidikan yang berkelanjutan sehingga pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat berjalan sesuai dengan koridornya.

BAB IV

GAMBARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

4.1 Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah

4.1.1 Visi Pembangunan Pendidikan Daerah

Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan merupakan perpanjangan Visi dari Kabupaten Balangan, yang artinya apa yang menjadi Visi Kabupaten Balangan juga merupakan Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia".

4.1.2 Misi Pembangunan Pendidikan Daerah

Berdasarkan visi dinas pendidikan tersebut maka dicanangkan misi pembangunan pendidikan Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Daerah

4.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan Pendidikan Daerah di Kabupaten Balangan yaitu "Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia".

4.2.2 Sasaran

Adapun sasaran Jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan adalah "meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan".

Indikator keberhasilan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Harapan Lama Sekolah (tahun)
2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
3. APK PAUD
4. APK TK sederajat
5. APK SD/sederajat
6. APM SD/sederajat
7. APK SMP/sederajat
8. APM SMP/sederajat
9. Angka Kelulusan SD sederajat
10. Angka Kelulusan SMP sederajat
11. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):
 - a. TK/PAUD
 - b. SD
 - c. SMP

4.3 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran rencana strategis tersebut, dipandang perlu untuk mengembangkannya ke dalam sebuah aspek strategis yang tertuang pada program dan kebijakan-kebijakan.

4.3.1 Strategi

Program Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2009 – 2014, terdapat 5 (lima) pilar utama program yang harus dilaksanakan ditambah 1 (satu) program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

mempunyai kapasitas dalam menyusun program operasional, sistem informasi, dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang merata pada semua tingkat dan jenjang pendidikan. Adapun strategi pencapaian tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
3. Tersedianya Prasarana dan Sarana perumahan & fasilitas umum serta perkantoran.

4.3.2 Kebijakan

Berdasarkan strategi diatas maka perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan teknis sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan disemua bidang sehingga akan terjadi sinkronisasi yang akan menunjang tercapainya sasaran kegiatan, Hal ini juga akan dapat dijadikan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi keberhasilan sebuah program kegiatan. Arah Kebijakan Pendidikan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
2. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
4. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
5. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
7. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar
8. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah
9. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah

10. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin
11. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses.
12. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
13. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil
14. Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan
15. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016 s.d 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas pendidikan	1. APK PAUD (%)	51,20	57,20	60,38	65,87	67,96	67,96
			2. APK TK Sederajat (%)	67,47	67,52	67,67	67,84	68,03	68,23
			4. APK SD/Sederajat (%)	105,96	106,01	106,11	106,24	106,44	106,66
			5. APM SD/Sederajat (%)	87,64	87,79	87,96	88,16	88,41	88,76
			6. APK SMP/Sederajat (%)	92,81	92,97	93,16	93,36	93,59	93,84
			7. APM SMP/Sederajat (%)	62,92	63,07	63,24	63,42	63,58	63,61
			8. Pendidik Kualifikasi S1						
			a. TK/PAUD (%)	42,36	42,46	43	44	45	45,5
			b. SD (%)	70,87	70,92	71,02	71,14	71,29	71,47
			c. SMP (%)	93,35	93,45	93,60	93,76	93,94	94,14
		Peningkatan angka rata-rata lama sekolah	1. Angka Kelulusan SD Sederajat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Angka Kelulusan SMP Sederajat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Harapan Lama Sekolah (Thn)	11,1	11,2	11,25	11,4	11,45	11,50
			4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	6,31	6,32	7	7,5	8	10
		Tersediannya sarana dan prasarana perumahan & fasilitas umum serta perkantoran	1. Pembangunan kompleks pendidikan terpadu di Islamic center (Unit)	0	10	30	70	100	100

Sumber : Resntra Diknas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

4.4 Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Balangan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan beberapa ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa *"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara"*.
2. Mahfud Yunus mengemukakan bahwa *"pendidikan merupakan usaha yang disengaja untuk mempengaruhi dan membantu anak untuk meningkatkan ilmu, jasmani, dan akhlak secara bertahap sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat"*.
3. M. J. Langeveld mengemukakan definisi pendidikan yaitu *"proses mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dan terjadi dalam lingkup pergaulan tertentu"*.
4. H. Home menjelaskan yang dimaksud dengan pendidikan adalah *"suatu proses penyesuaian terus menerus yang telah berkembang secara fisik dan mental yang termanifestasikan ke dalam intelektual, emosional dan kemauan manusia"*.
5. John Dewey menyebutkan bahwa pendidikan adalah *"suatu proses pengalaman yang membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia sehingga dapat meningkatkan kecapan di dalam perkembangan seseorang"*.

Dari beberapa penjelasan tentang diefinisi pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu usaha secara sadar untuk mempersiapkan seseorang melalui kegiatan pengajaran, pengalaman, maupun pelatihan sehingga mereka mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, masyarakat sekitar, Bangsa dan Negara.

Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar ini dapat

dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal, proses kegiatan belajar mengajar dapat diperoleh melalui pendidikan di sekolah atau institusi menurut jenjang atau lingkungannya yaitu dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTS. Sedangkan secara informal, proses kegiatan belajar mengajar dapat diperoleh melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat pada umumnya.

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta *stakeholders*, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan APK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Keberhasilan tersebut dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan program dan proyeksi pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang. Namun demikian, keberhasilan berdasarkan peningkatan APK harus terus dikaji dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan proyeksi karena pada dasarnya tinggi rendahnya APK ditentukan juga oleh perkembangan jumlah penduduk.

4.4.1 Kondisi Pendidikan Disetiap Tingkatan Kabupaten Balangan

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel yang meliputi tingkat satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SLB, Pendidikan non formal. Dari berbagai program pendidikan yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Balangan. Indikator keberhasilan pendidikan dapat dicermati melalui Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat yang telah melampaui target nasional (data tahun 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam setiap jenjang pendidikan di bawah ini:

4.4.1.1 Taman Kanak-kanak (TK) Sederajat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki empat lembaga tingkatan dibawahnya diantaranya: TK/RA, KB, TPA, dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). Perkembangan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak usia 4-6 tahun selama tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Perkembangan Pendidikan di Tingkat TK Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 4 - 6 th	7.221	7.319	7.533
2.	Jml siswa PAUD kelompok usia 4-6 th	4.473	4.833	5.037
3.	Jml Siswa PAUD	4.473	4.833	5.037
4.	APM PAUD (%)	N/A	N/A	N/A
5.	APK PAUD (%)	61,94%	66,03%	66,87%
6.	Jumlah lembaga (TK, KB, TPA & SPS)	112	119	128
7.	Jumlah ruang belajar :			
	Baik	140	150	189
	Rusak Sedang	10	12	8
	Rusak Berat	32	34	37
8.	Jumlah ruang penunjang :			
	Perpustakaan	2	2	2
	Mushala	N/A	N/A	N/A
	Tempat bermain	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah Guru	345	339	342
10	Angka Kelulusan	1.747	1.736	2.032

Sumber : Diknas Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari data di atas, secara umum perkembangan TK dan RA (kelompok PAUD) selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan secara kuantitas. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- a. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan.
- b. APM PAUD setiap tahun tidak dapat diketahui dikarenakan jumlah siswa PAUD kelompok usia 4-6th tidak ada.
- c. APK PAUD terjadi perubahan kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,09% (tahun 2015) dan 0,84% (tahun 2016)

- d. Jumlah lembaga PAUD yang ada di tahun 2016 meningkat sebanyak 128 buah.
- e. Jumlah ruang penunjang perpustakaan ada 2 buah sampai tahun 2016.
- f. Jumlah tenaga pendidik/guru di PAUD dilihat dari jumlah guru dibagi jumlah lembaga PAUD di tahun 2016 maka akan ditemukan perbandingan yaitu 2,67 (2-3 orang)
- g. Kondisi ruang belajar pada tahun 2013 : kondisi baik 80,76 %, rusak sedang 3,41%, dan rusak berat 15,81%.
- h. Angka kelulusan siswa pada tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 17,05%.

Tabel 4.3 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat TK Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016	
		TK	RA
1.	LAMPIHONG	21	1
2.	BATUMANDI	19	2
3.	AWAYAN	8	1
4.	TEBING TINGGI	7	0
5.	PARINGIN	14	2
6.	PARINGIN SELATAN	12	0
7.	JUAI	21	0
8.	HALONG	16	1
JUMLAH		118	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.4 Jumlah Guru TK Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016
		Jumlah
1.	LAMPIHONG	60
2.	BATUMANDI	55
3.	AWAYAN	23
4.	TEBING TINGGI	16
5.	PARINGIN	55
6.	PARINGIN SELATAN	35
7.	JUAI	57
8.	HALONG	41
Jumlah		342

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.5 Kondisi Ruang Kelas Tingkat TK Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016			
		B	RR	RB	Jumlah
1.	LAMPIHONG	25	0	5	30
2.	BATUMANDI	27	3	4	34
3.	AWAYAN	14	0	3	17
4.	TEBING TINGGI	7	0	4	11
5.	PARINGIN	41	0	0	41
6.	PARINGIN SELATAN	17	0	5	22
7.	JUAI	38	3	6	47
8.	HALONG	20	2	10	32
Jumlah		189	8	37	234

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat data di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan perlu mengupayakan peningkatan jumlah APK dan APM, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penambahan jumlah ruangan belajar dan perbaikan ruang yang rusak parah, penambahan jumlah ruangan penunjang terutama tempat bermain yang saat ini belum tersedia, pembukaan atau pendirian lembaga PAUD.

Pada tingkat pendidikan TK dan RA masih banyak yang perlu untuk di perbaiki terutama pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK)/RA/Paud. Pembangunan ruang pendukung perlu di tambah sebab Pendidikan di tingkat TK/RA/Paud sebagai proses pendidikan dasar dalam menciptakan SDM sebelum masuk kedalam pendidikan jenjang SD (Sekolah Dasar). Untuk lebih jelasnya berkaitan tentang ruang pendukung dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Ruang Pendukung Tingkat TK/RA Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Tempat Bermain
1.	LAMPIHONG	0	0	0
2.	BATUMANDI	0	1	0
3.	AWAYAN	0	0	0
4.	TEBING TINGGI	0	0	0
5.	PARINGIN	0	0	0
6.	PARINGIN SELATAN	0	0	0

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Tempat Barmain
7.	JUAI	0	1	0
8.	HALONG	0	0	0
Jumlah		0	2	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat pada tabel diatas bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Balangan terkait dengan ruang pendukung tingkat TK/RA/Paud ternyata didapatkan data bahwa hampir semua kecamatan 98 % belum memiliki ruang pendukung, yang ada hanya Kecamatan Batu Mandi untuk RA itu pun hanya memiliki 1 ruang perpustakaan dan kecamatan Juai untuk TK, untuk ruang bermain ternyata data tidak ada. Jelas sekali apabila dilihat dari data diatas perlu dukungan pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan bantuan sarana infrastruktur bagi setiap TK/RA/Paud sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Terkait dengan kondisi diatas ada beberapa masalah pada jenjang TK/RA/PAUD diantaranya adalah:

1. Masih minimnya pembentukan lembaga padahal setiap tahun penduduk usia dini terus bertambah.
2. Masih kurangnya guru pengajar di tingkat PAUD, baik yang bersertifikasi maupun tidak.
3. Sangat minimnya fasilitas pendukung pendidikan seperti tempat bermain, perpustakaan dan mushala padahal sangat diperlukan untuk membantu aktivitas belajar.
4. Adanya ruang belajar yang rusak ringan sekitar 3,42% dan rusak berat sekitar 15,81% pada tahun 2016.

Dari data diatas bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada jenjang pendidikan TK/RA/PAUD tidak hanya terkait pada infrastruktur sarana pendidikan akan tetapi juga menyangkut pada SDM pengajar di Tingkat TK/RA/PAUD. Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan untuk mendata TK/RA/PAUD mana saja yang perlu di bantu baik peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun peningkatan kualitas SDM guru PAUD/TK/RA.

4.4.1.2 Tingkat SD/Sederajat

Perkembangan pendidikan di tingkat SD/Sederajat tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Perkembangan Pendidikan di Tingkat SD/MI/SDLB Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 7-12 th	13.905	13.952	14.176
2.	Jml siswa SD/MI/SDLB kelompok usia 7-12 th	13.271	13.059	12.420
3.	Jml Siswa SD/MI/SDLB	16.071	15.763	14.811
4.	APM SD/MI/SDLB (%)	95,27%	93,42%	87,41%
5.	APK SD/MI/SDLB (%)	116,99%	115,04%	106,45
6.	Jumlah lembaga SD/MI/SDLB	214	217	208
7.	Jumlah Guru	1.857	1.859	1.793
8.	Angka Kelulusan	2.317	2.390	2.338
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	803	804	763
	b. Rusak Sedang	333	348	349
	c. Rusak berat	140	144	134
10.	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	130	137	143
	b. Mushala	33	49	44
	c. Halaman Sekolah	95	86	80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Secara kuantitas berdasarkan data di atas, perkembangan pendidikan di tingkat SD/MI/SDLB selama tahun 2014-2017 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- a. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SD/MI/SDLB kelompok usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SD/MI/SDLB (APM) tiap tahun mengalami penurunan yang signifikan dari 2014 sebanyak 95,27% turun sebesar 1,85% di tahun 2015 menjadi 93,42%, dan kembali turun kembali sebanyak 87,41% (6,01%) di tahun 2016.
- c. Jumlah siswa SD/MI/SDLB tahun 2014 (APK) sebanyak 116,99%, turun menjadi 115,04% di tahun 2015, dan tahun 2016 turun kembali sebanyak 8,59% menjadi 106,45%.
- d. Jumlah lembaga SD/MI/SDLB tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebanyak 3

buah dan mengalami penurunan jumlah sebanyak 9 menjadi 208 buah lembaga di tahun 2016.

- e. Jumlah guru perlembaga/sekolah tahun 2014 sebanyak 8,65 (9 orang guru), tahun 2015 sebanyak 8,47 guru (8 orang guru), tahun 2016 sebanyak 8,26 (8 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SD/MI/SDLB masing-masing sebanyak 8 orang guru.
- f. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar setiap tahun adalah : Tahun 2016 baik 61,23%, rusak sedang 28,00%, rusak berat 10,75%.
- g. Jumlah ruang penunjang perpustakaan sebanyak 143 buah dan mushala sebanyak 44 buah dan lapangan sebanyak 80 buah di tahun 2016.

Tabel 4.8 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SD Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1.	LAMPIHONG	26	0	1	4	31
2.	BATUMANDI	22	0	3	1	26
3.	AWAYAN	21	0	1	4	26
4.	TEBING TINGGI	12	0	0	0	12
5.	PARINGIN	19	0	1	3	22
6.	PARINGIN SELATAN	16	1	0	1	18
7.	JUAI	22	0	0	10	32
8.	HALONG	35	0	1	4	40
JUMLAH		173	1	7	27	208

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.9 Jumlah Guru SD Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
1.	LAMPIHONG	171	60	10	38	279
2.	BATUMANDI	167	18	25	34	244
3.	AWAYAN	121	46	9	41	217
4.	TEBING TINGGI	59	33	0	0	92
5.	PARINGIN	128	33	18	36	215
6.	PARINGIN SELATAN	116	42	0	10	168

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
7.	JUAI	137	43	97	98	375
8.	HALONG	167	87	5	34	293
Jumlah		1.066	362	68	290	1.883

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.10 Kondisi Ruang Kelas Tingkat SD Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016						Total
		SD			MI			
		B	RR	RB	B	RR	RB	
1.	LAMPIHONG	99	39	15	18	7	6	184
2.	BATUMANDI	79	47	14	24	1	0	165
3.	AWAYAN	68	36	12	17	7	8	148
4.	TEBING TINGGI	39	24	12	0	0	0	75
5.	PARINGIN	86	32	6	26	4	0	154
6.	PARINGIN SELATAN	79	21	12	4	2	0	118
7.	JUAI	86	44	5	30	19	11	195
8.	HALONG	96	60	23	12	6	10	207
Jumlah		632	303	99	131	46	35	1.246

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat data di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan perlu mengupayakan peningkatan jumlah APK dan APM, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penambahan jumlah ruangan belajar dan perbaikan ruang yang rusak parah, penambahan jumlah ruangan penunjang terutama tempat bermain yang saat ini belum tersedia, pembukaan atau pendirian lembaga PAUD.

Jika dilihat dari data di atas, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan masih perlu berusaha mengatasi kekurangan yang ada terutama dalam jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak ringan maupun berat, jumlah ruangan penunjang terutama mushola yang saat ini belum maksimal terpenuhi, pembukaan atau pendirian lembaga SD/MI/SDLB sehingga APM dan APK tetap meningkat hingga tahun 2021.

Masalah pendidikan di jenjang SD/M/SDLB selain dari kondisi ruang belajar, juga terkait pada ruang pendukung yang belum semuanya tersedia. Ruang pendukung sangat diperlukan selain dari ruang belajar, ruang guru, dan ruang

kepala sekolah. Apabila dilihat dari data bahwa ruang pendukung di jenjang pendidikan SD/MI/SDLB dapat dilihat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11 Ruang Pendukung Tingkat SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Halaman Sekolah
1	LAMPIHONG	7	23	11
2	BATUMANDI	13	24	14
3	AWAYAN	3	15	5
4	TEBING TINGGI	6	18	8
5	PARINGIN	5	25	17
6	PARINGIN SELATAN	4	17	16
7	JUAI	2	6	2
8	HALONG	4	15	7
JUMLAH		44	143	80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Apabila dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan masalah pendidikan di jenjang SD/MI/SDLB tidak hanya terkait kurangnya ruang belajar saja akan tetapi ada beberapa kecamatan yang belum dilengkapi ruang pendukung atau keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) dari Permendikbu no 23 Tahun 2013 diantaranya adalah:

- 1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
- 2) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
- 3) Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
- 4) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4

- (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
- 5) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
 - 6) Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 - 7) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
 - 8) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
 - 9) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

Dari data diatas masih ada beberapa hal masalah terkait pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya ruang belajar untuk siswa, dimana rata-rata setiap sekolah kelebihan peserta didik sekitar 2-3 orang/rombel.
2. Masih kurangnya guru pengajar tingkat SD/MI baik yang bersertifikat maupun tidak.
3. Rata-rata setiap lembaga memiliki 1 guru untuk 2 rombel.
4. Adanya ruang belajar masih rusak ringan 28,01% dan rusak berat skitar 10,75%.
5. Ruang penunjang pembelajaran seperti perpustakaan masih kurang sekitar 31,25% dari jumlah lembaga yang ada sedangkan mushala masih kurang sekitar 78,84% dari total lembaga yang tersedia dan untuk lapangan olahraga sebesar 61,53% dari total lembaga yang tersedia di Kab. Balangan.
6. Rasio perbandingan guru dan murid sangat besar yaitu 1 (guru) : 8,2 (murid).

masalah-masalah pendidikan di tingkat pelayanan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB dapat dilihat bahwa tidak hanya terkait sarana prasarana pendidikan saja akan tetapi juga terkait peningkatan SDM pendidik.

4.4.1.3 Tingkat SMP/MTs/SMPLB/SMPT

Kondisi Pendidikan pada SMP/MTs/SMPLB/SMPT pada tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12 Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP/MTs/SMPLB/SMPT Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 13-15 th	6.573	6.575	6.678
2.	Jml siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT kelompok usia 13-15 th	4.215	4.204	4.047
3.	Jml Siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT	5.667	5.928	5.743
4.	APM SMP/MTs/SMPLB/SMPT (%)	64.13%	63.94%	60.60%
5.	APK SMP/MTs/SMLB/SMPT (%)	90.78%	97.60%	93.32%
6.	Jumlah lembaga	38	40	42
7.	Jumlah Guru	580	618	631
8.	Angka Kelulusan	1.484	1.612	1.667
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	178	180	201
	b. Rusak Sedang	45	48	75
	c. Rusak berat	14	15	41
10.	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	26	26	26
	b. Mushala	17	17	17
	c. Halaman Sekolah	19	19	19
	d. Laboratorium	22	22	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari data di atas untuk kondisi secara umum perkembangan pendidikan di tingkat SMP/MTs/SMPLB/SMPT selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan dari ke sembilan indikator yang di data mengalami kenaikan, secara kuantitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

- a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT kelompok usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SMP/MTs/SMPLB/SMPT tahun 2014 sebanyak 64,13%, tahun 2015 sebanyak 63,94%, tahun 2016 sebanyak 60,60%.
- c. Jumlah siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT tahun 2014 (APK) sebanyak 90,78%, tahun 2015 sebanyak 97,60%, dan tahun 2016 sebanyak 93,32%.

- d. Jumlah lembaga SMP/MTs/SMPLBSMPT tahun 2014-2016 terjadi peningkatan sebanyak 4 buah.
- e. Jumlah guru perlembaga/sekolah tahun 2014 sebanyak 15,26 (15 orang guru), tahun 2015 sebanyak 15,45 guru (15-16 orang guru), tahun 2016 sebanyak 15,02 (15 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SMP/MTs/SMPLB/SMPT masing-masing sebanyak 15 orang guru/lembaga.
- f. Angka kelulusan siswa pada tahun 2015 meningkat sebesar 8,62% dan pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar 3,41%.
- g. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar di data : tahun 2016 baik 623,40%, rusak sedang 23,65%, dan rusak berat 12,93%.
- h. Jumlah ruang penunjang perpustakaan terpenuhi tahun 2016 sebanyak 26 buah, mushala sebanyak 17 buah, dan laboratorium ipa sebanyak 21 buah serta halaman sekolah sebanyak 19 buah.

Tabel 4.13 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SMP Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1.	LAMPIHONG	2	0	1	0	3
2.	BATUMANDI	4	0	1	1	6
3.	AWAYAN	2	0	1	1	4
4.	TEBING TINGGI	2	0	1	1	4
5.	PARINGIN	2	1	1	1	5
6.	PARINGIN SELATAN	3	0	0	3	6
7.	JUAI	2	0	0	5	7
8.	HALONG	6	0	1	1	8
JUMLAH		23	1	6	13	43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.14 Jumlah Guru SMP Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
1.	LAMPIHONG	19	7	11	17	54

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
2.	BATUMANDI	49	9	7	31	96
3.	AWAYAN	14	5	12	33	64
4.	TEBING TINGGI	16	6	0	17	39
5.	PARINGIN	19	21	16	36	92
6.	PARINGIN SELATAN	44	14	0	43	101
7.	JUAI	20	4	0	47	71
8.	HALONG	41	28	6	39	114
Jumlah		222	94	52	263	631

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.15 Kondisi Ruang Kelas Tingkat SD Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016						Total
		SMP			MTs			
		B	RR	RB	B	RR	RB	
1.	LAMPIHONG	5	6	3	10	5	0	29
2.	BATUMANDI	19	0	3	7	4	1	34
3.	AWAYAN	9	1	0	13	6	0	29
4.	TEBING TINGGI	12	0	0	3	0	1	16
5.	PARINGIN	12	0	3	15	7	0	37
6.	PARINGIN SELATAN	28	0	0	5	0	0	33
7.	JUAI	11	2	0	9	5	3	30
8.	HALONG	22	5	0	8	2	1	38
Jumlah		118	14	9	70	29	6	246

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat analisa data di atas maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada terutama dalam peningkatan jumlah APM dan APK, guru, jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak parah dan ringan, jumlah ruangan penunjang terutama mushola dan perpustakaan yang saat ini belum semua sekolah memiliki, pembukaan atau pendirian lembaga SMP/MTs/SMPLB/SMPT sehingga dapat meningkatkan pada jumlah APM dan APK sampai 100 %, selama tahun 2015-2021. Pada tingkatan SMP/Sederajat di kabupaten Balangan juga memiliki tingkatan masalah pendidikan terutama ruang pendukung pendidikan diantaranya`musholla, perpustakaan, halaman sekolah dan laboratorium IPA. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari

tabel 4.16 :

Tabel 4.16 Ruang Pendukung Tingkat SMP/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Tahun 2016			
		Mushola	Perpustakaan	Halaman Sekolah	Laboratorium IPA
1.	LAMPIHONG	2	2	2	2
2.	BATUMANDI	3	4	3	4
3.	AWAYAN	1	3	2	1
4.	TEBING TINGGI	0	1	1	1
5.	PARINGIN	5	3	1	4
6.	PARINGIN SELATAN	1	5	3	4
7.	JUAI	2	3	3	1
8.	HALONG	3	5	4	4
JUMLAH		17	26	19	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

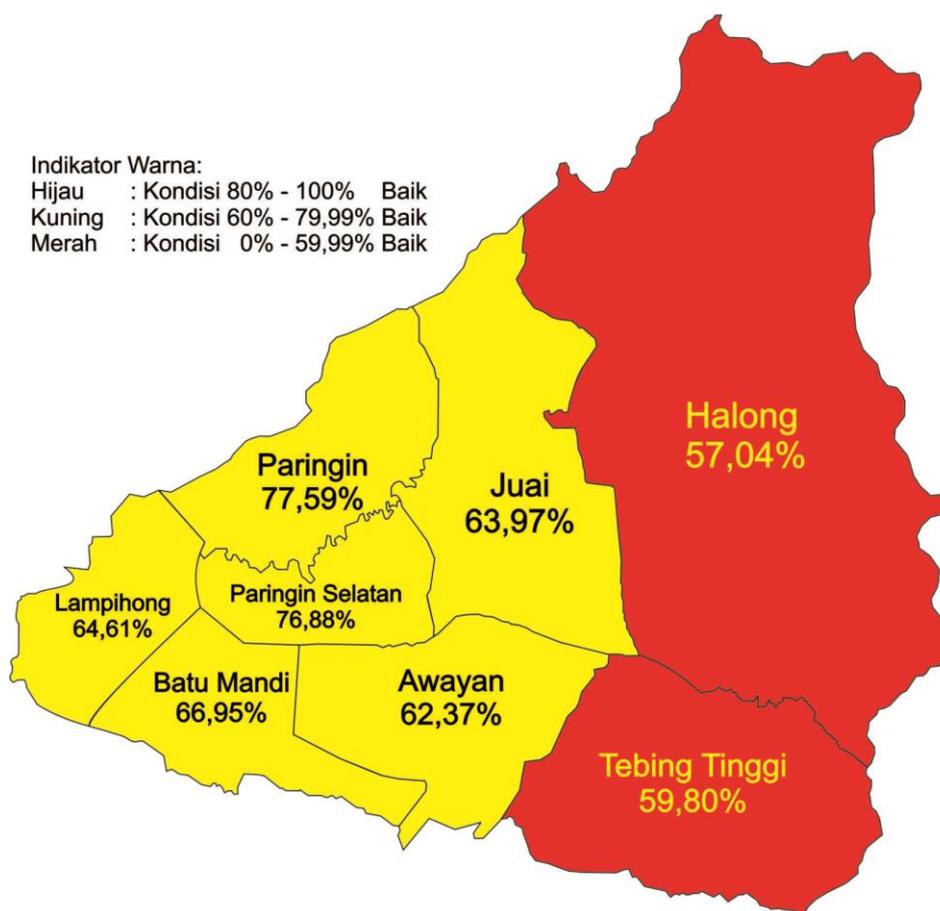
Dari data tabel diatas bahwa jenjang pendidikan SMP/Sederajat masih terdapat kekurangan ruangan penunjang. Apabila dilihat dari data diatas bahwa tidak semua kecamatan memiliki ruang penunjang mushola sebagai salah satu syarat mencetak karakter peserta didik yang berakhlak dan berimtaq. Kecamatan Tebing Tinggi belum mempunyai mushola. Hal ini merupakan permasalahan pendidikan yang harus segera ditindaklanjuti agar proses pelayanan dan belajar mengajar tidak mengganggu kualitas peserta didik. Selain dari ruang pendukung diatas ada beberapa issue (masalah) di jenjang SMP/MTS/SMPLB antara lain:

1. Dalam setiap rombel masih melebihi kapasitas SPM, sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah rombel di setiap lembaga.
2. Minimnya jumlah guru yang mengajar di setiap lembaga hanya ada 5-6 guru, padahal diperlukan sekitar 10 guru/lembaga.
3. Masih kurangnya ruangan penunjang pembelajaran dimana sekitar 74,35% untuk Laboratorium, 76,92% untuk mushala, dan 51,28% perpustakaan yang harus di bangun untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
4. Masih kurangnya ruang belajar siswa.
5. Masih kurangnya guru pengajar di setiap satuan pendidikan.

Ruang belajar di sekolah merupakan masalah pendidikan di Kabupaten

Balangan hal ini dapat dilihat dari gambaran kondisi ruang kelas di tiap kecamatan. Menurut Permendikbud no 15 tahun 2010 di setiap jenjang pendidikan memiliki Standar Pelayanan Minimal dimana untuk SD/MI yaitu 1 ruang belajar ditempati 32 siswa dan tingkatan SMP/MTs. Untuk melihat kondisi ruang kelas di setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan table 4.17 berikut:

4.1 Peta Kondisi Ruang Belajar Kabupaten Balangan



Tabel 4.17 Kondisi Ruang Belajar Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik (%)	R. Ringan (%)	R. Berat (%)
1	Lampihong	157	57	29	243	64.61	23.46	11.93
2	Batu Mandi	156	55	22	233	66.95	23.61	9.44
3	Awayan	121	50	23	194	62.37	25.77	11.86
4	Parangin	180	43	9	232	77.59	18.53	3.88

5	Juai	174	73	25	272	63.97	26.84	9.19
6	Halong	158	75	44	277	57.04	27.08	15.88
7	Tebing Tinggi	61	24	17	102	59.80	23.53	16.67
8	Paringin Selatan	133	23	17	173	76.88	13.29	9.83
Jumlah		1140	400	186	1726			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari peta diatas didapatkan kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dimana terdapat dua kecamatan yang memiliki indikator berwarna merah yaitu Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Dimana kedua lokasi ini memiliki tingkat ruang belajar yang rusak ringan sebesar 27,08% dan 23,53% dan rusak berat sebesar 15,88% dan 16,67%. Sedangkan untuk 6 kecamatan lainnya beridikator warna kuning yaitu dimana kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat pendidikan banyak ruang yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat dan perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah

4.4.2 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar lembaga sekolah. Pendidikan Non Formal ini setara dengan pendidikan formal. Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan:

4.4.2.1 Pendidikan Kesetaraan meliputi ; Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;

Pada jalur pendidikan non formal, jumlah warga belajar Keaksaraan Fungsional (KF)/Buta Aksara sebanyak 1.715 orang dengan Kelompok belajar 137 kelompok dan semua warga belajar telah melek aksara. Jumlah warga belajar Paket A setara SD sebanyak 262 orang dengan Kelompok belajar 32 kelompok dan siswa yang telah lulus 137 orang. Jumlah warga belajar Paket B setara SMP sebanyak 547 orang dengan Kelompok belajar 126 kelompok dan siswa yang telah lulus 128 orang Data pokok Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Pokok Pendidikan Non Formal

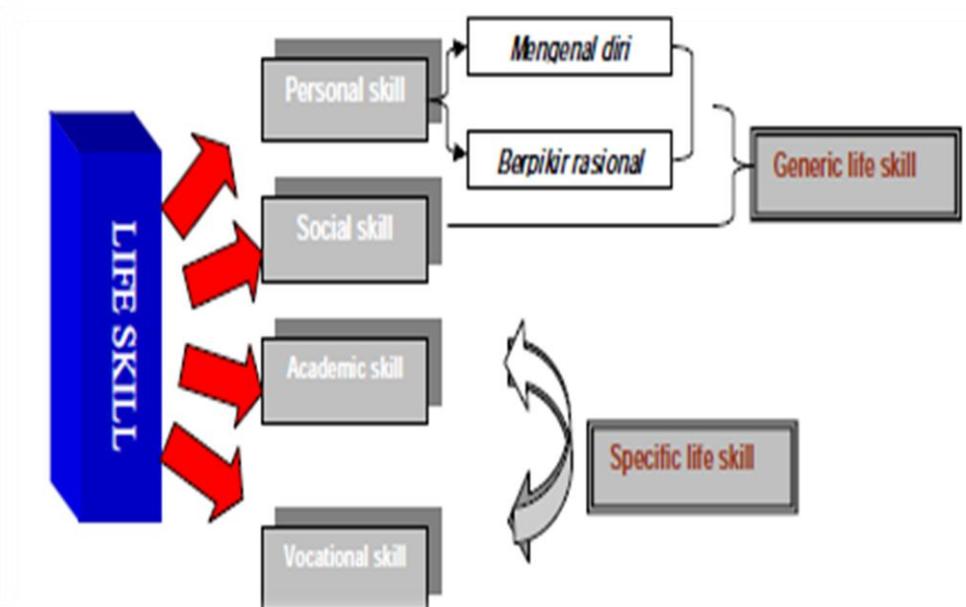
No	Komponen	KF	Paket A	Paket B
1.	Warga Belajar	1.715	262	547
2.	Kelompok Belajar	117	32	126
3.	Lulusan	1.715	137	128

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016

4.4.2.2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri. Azas pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada 'life skills' adalah manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) dan manajemen berbasis masyarakat (*Community Based Management*). Dana bantuan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan untuk hidup akan diberikan melalui prosedur '*block grant*' yang akuntabilitas keuangannya dilakukan dengan sistem akuntansi publik. Lembaga pendidikan yang tidak menjadi 'pilot project' untuk sementara melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut

Gambar 4.2
Ilustrasi Kecakapan Hidup



Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (*Life Skills*) hendaknya memuat upaya untuk mengembangkan kemampuan minimal sebagai berikut:

- a. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan sebagainya.)
- b. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses melalui pembelajaran berfikir ilmiah, eksploratif, 'discovery' dan 'inventory'.
- c. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk mendukung kedua kemampuan tersebut di atas.
- d. Kemampuan memanfaatkan teknologi dalam aneka ragam lapangan kehidupan seperti teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, transportasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan, olah raga, jasa, dsb.
- e. Kemampuan mengolah sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan untuk dapat hidup mandiri.
- f. Kemampuan bekerja dalam tim yang merupakan tuntutan ekonomi saat ini baik dalam sektor informal maupun formal.

- g. Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius berbasis Perda Pendidikan Al-Quran sebagai muatan lokal dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

4.4.2.3 Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang akan disusun menuju SDM Unggul dan Berkarakter tahun 2020 untuk pembinaan PKBM diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi penerapan perda no.3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dan menghubungkan pada potensi daerah.
- b. Revitalisasi program PKBM sehingga berdaya guna bagi masyarakat dan daerah.
- c. Implementasi program PKBM berbasis ICT dalam menyusun data potensi daerah.
- d. Perluasan akses masyarakat dalam menerima program PKBM di daerah.
- e. Bantuan pendanaan untuk program pembinaan PKBM di daerah.
- f. Evaluasi dan monitoring program pembinaan PKBM di daerah.

4.4.2.4 Pembinaan kursus dan pelatihan

Pembinaan kursus dan pelatihan di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan lebih dikhususkan dan difokuskan pada badan diklat. Dimana dalam hal ini proses pembinaan kursus diharapkan dapat menyelenggarakan kursus kependidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan. Program yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Implementasi program pembinaan lembaga kursus pendidikan
- b. Revitalisasi proram pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.
- c. Evaluasi dan monitoring lembaga kursus dan pelatihan berbasis ICT.

- d. Bimbingan teknis di lembaga kursus dan pelatihan non formal.
- e. Bantuan pembiayaan bagi lembaga kursus dan pelatihan

4.4.2.5 Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Program peningkatan budaya baca masyarakat dilaksanakan selain untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan warga masyarakat yang telah terbebas dari buta aksara juga untuk mencegah terjadinya fenomena kembalinya mereka yang telah melek aksara menjadi buta aksara lagi. Program peningkatan budaya baca masyarakat ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perencanaan yang disusun dalam grand design pendidikan sampai tahun 2025 sehingga diharapkan dapat mendorong pendidikan menuju SDM unggul dan berkarakter agamis. Diantaranya Program yang diusulkan:

- a. Sosialisasi gemar membaca bagi pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat.
- b. Penambahan/pengadaan bahan bacaan baik media buku, e-book, e-learning, di setiap perpustakaan di sekolah maupun taman bacaan masyarakat.
- c. Pembuatan/pengadaan perpustakaan masyarakat sebagai tempat belajar masyarakat baik dilingkungan keramaian maupun dilingkungan pedesaan, kecamatan, kabupaten.
- d. Revitalisasi jam belajar masyarakat di lingkungan desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- e. Pengadaan mobile-internet demi mendukung ICT untuk perpustakaan digital.
- f. Bantuan pendanaan bagi pengembangan perpustakaan di daerah berbasis ICT.

4.5 Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru dan siswa diindikasikan untuk mengetahui apakah jumlah guru yang tersedia sudah mencukupi untuk melayani proses pembelajaran siswa di jenjang sekolah tertentu. Dengan melihat perbandingan ini akan terlihat kebutuhan guru yang ideal dalam upaya mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Secara umum rasio jumlah guru dan siswa di kabupaten Balangan seperti terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.18 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah guru	1.857	1.859	1.793
1.2	jumlah siswa SD/MI	16.071	15.763	14.811
1.3	Rasio	1 : 9	1 : 8	1 : 8
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah guru	580	618	631
2.2	jumlah siswa SMP/MTs	5.667	5.928	5.743
2.3	Rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 9

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2017

Dari tabel 2.14 diatas mengenai rasio jumlah guru dan murid dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah siswa yang memasuki bangku sekolah tingkat SD mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 1,92%, dan pada tahun 2016 terjadi lagi penurunan yang signifikan sebanyak 6,03%. Untuk jumlah guru SD tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,10% dan 2016 mengalami penurunan sebesar 3,55%. Tingkat SMP jumlah siswa tahun 2015 meningkat sebanyak 4,60%, tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 3,12%, sedangkan jumlah guru tingkat SMP mengalami peningkatan 6,55% (tahun 2015), dan 2,10% di tahun 2016.

4.6 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, dapat dilihat table 4.19 berikut:

Tabel 4.19 Perkembangan Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah Gedung Sekolah	214	217	208

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.2	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	13.271	13.059	12.420
1.3	Rasio	1 : 62	1 : 60	1 : 60
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah Gedung Sekolah	38	40	42
2.2	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	4.215	4.204	4.047
2.3	Rasio	1 : 111	1 : 105	1 : 96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Balangan Tahun 2017

Dari tabel 4.19 diatas dapat diliaht rasio ketersediaan gedung sekolah (lembaga) dengan jumlah penduduk, tingkat SD/MI mengalami peningkatan sebesar 1,40% di tahun 2015 dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4,14%, jumlah penduduk usia 7 s/d 12 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,59% dan tahun 2016 menurun signifikan sebesar 4,89%. Untuk jumlah gedung sekolah (lembaga) SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,26% dan di tahun 2016 terjadi lagi penurunan sebesar 3,73%. Jumlah penduduk usia 13 s/d 15 tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,26% dan turun signifikan di tahun 2016 sebesar 3,73%.

4.7 Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan

Hasil survei yang dilakukan terhadap 300 responden yang terdiri para kepala sekolah, komite sekolah/orang tua siswa dan siswa adalah sebagai berikut ini:

4.7.1 Hasil Survei Kepada Kepala Sekolah

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari kepala sekolah maka dapat diuraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan dilihat dari aspek pembelajaran di sekolah, pengorganisasian sekolah (manajemen sekolah) dan kompetensi guru. Dilihat dari ketiga aspek tersebut maka dalam penilaian responden bahwa kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pembelajaran lebih baik dibandingkan kondisi manajemen sekolah dan kompetensi guru.

Tabel 4.20 Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kondisi Kemampuan Sekolah

No.	Kecamatan	Pembelajaran Di Sekolah (%)	Pengorganisasian Sekolah (%)	Kompetensi Guru (%)
1.	LAMPIHONG	85,47	80,71	59,44
2.	BATUMANDI	80,63	81,90	57,78
3.	AWAYAN	75,42	78,00	44,44
4.	TEBING TINGGI	77,14	82,28	60,44
5.	PARINGIN	77,50	77,85	46,11
6.	PARINGIN SELATAN	78,57	81,43	54,72
7.	JUAI	75,14	74,30	52,22
8.	HALONG	84,64	81,78	60,28
	Rata-rata	79,31	79,78	54,43

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

4.7.1.1 Aspek Pembelajaran

Berdasarkan tabel diatas, persepsi seluruh responden sebesar 79,31% menyatakan kondisi pembelajaran sudah berjalan dengan baik sisanya sebesar 20,69% menyatakan belum baik. Adapun kecamatan dengan persepsi paling tinggi adalah kecamatan Lampihong (85,47%) dan Halong (84,64%) sedangkan persepsi yang paling rendah adalah kecamatan Juai sebesar 75,14%.

4.7.1.2 Aspek Pengorganisasian (Manajemen) Sekolah

Dilihat pada aspek manajemen sekolah ternyata secara keseluruhan responden yaitu 79,78% menyetujui bahwa manajemen sekolah telah berjalan dengan baik dan sesuai arahan kebijakan. Kecamatan dengan tingkat penilaian yang tertinggi ternyata sama dengan aspek pembelajaran yaitu kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 82,28% diikuti Kecamatan Batu Mandi (81,90%) dan Kecamatan Halong (81,78%). Kecamatan Juai masih menduduki nilai 74,30% dimata para responden sebagai kecamatan dengan manajemen nilai terendah dan kecamatan Awayan (78,00%) dan Kecamatan Paringin (77,85%) sedangkan kecamatan lainnya telah di atas 80% berarti nilai yang sangat baik.

4.7.1.3 Aspek Kompetensi Guru Pengajar

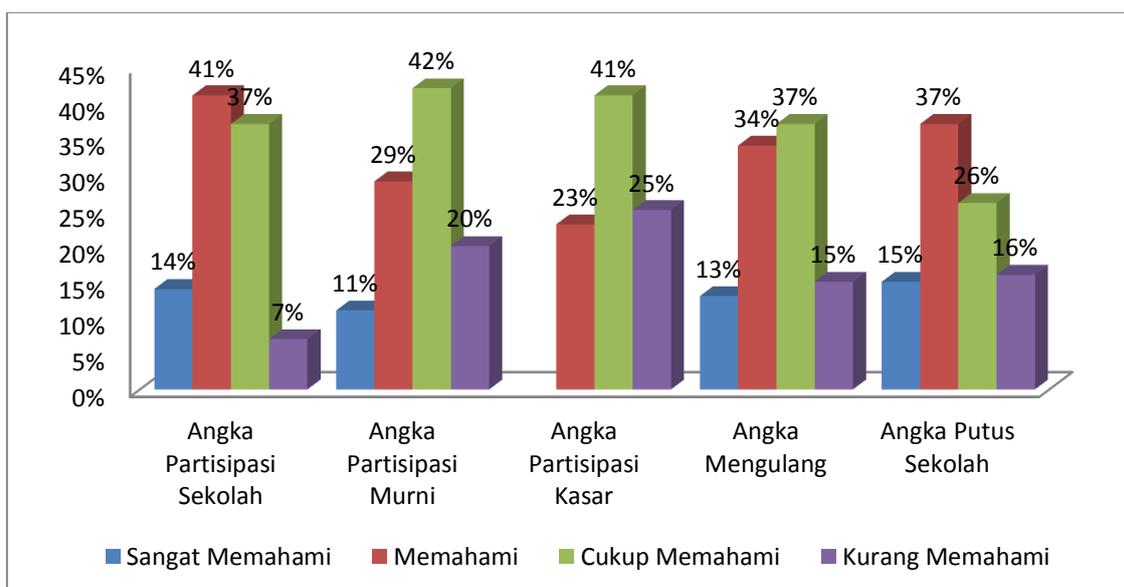
Penilaian responden terhadap tingkat kompetensi guru ternyata responden yang menyatakan bahwa kompetensi guru sudah memadai dan baik hanya 54,43% yang berarti nilai ini masih sangat jauh dari harapan paling tidak mencapai persepsi 70%. Persepsi tentang kompetensi guru yang cukup tinggi hanya di kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 60,44% dan Kecamatan Halong sebesar 60,28% walaupun masih dibawah 70%. Kecamatan lainnya ternyata dibawah 60% mencapai 6 kecamatan (75%). Berdasarkan hasil ini maka masalah kompetensi guru sangat perlu diperhatikan untuk dibenahi dan ditingkatkan melalui kebijakan dan program dalam perencanaan induk pendidikan di Kabupaten Balangan.

4.7.2 Hasil Survei Kepada Guru Pengajar

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari guru pengajar di sekolah. Menguraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan yang dilihat dari aspek pemahaman guru tentang angka partisipasi dan saran dari guru kepada pemerintah untuk membangun sekolah menengah atas. Berikut pada gambar 4.3 gambaran umum dari keterpahaman guru terhadap angka partisipasi.

Gambar 4.3

Gambaran Umum Guru di Kabupaten Balangan Terhadap Angka Partisipasi



Sumber: Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap angka partisipasi masih sangat kurang. Perlunya pemahaman guru tentang angka partisipasi agar dapat meningkatkan mutu guru dan kualitas proses pembelajaran di Kabupaten Balangan.

Survei juga kepada guru juga menunjukkan harapan guru kepada pemerintah untuk membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan Kabupaten Balangan. Sehingga siswa yang lulus mendapatkan pengalaman pembelajaran yang langsung diterapkan dalam dunia kerja.

4.7.3 Hasil Survei Kepada Komite Sekolah/Orang Tua Siswa

Data kedua yang di ambil di Balangan adalah persepsi survey kepada orang tua siswa/komite sekolah dimana tujuan dari pengambilan data survey adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pelayanan pendidikan yang telah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Balangan. Untuk mengetahui seberapa besar yang dirasakan manfaat pelayanan pendidikan sampai kepada masyarakat dilihat dari beberapa aspek pengamatan. Untuk mengetahui dapat dilihat dari tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21 Persepsi Komite Sekolah/Orang Tua Siswa Terhadap Kondisi Pendidikan Perkecamatan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Pendapat Orang Tua	Pelayanan Pendidikan	Pengeluaran Pendidikan	Harapan Terhadap Pelayanan Pendidikan
1.	LAMPIHONG	66% Berkisaran 2 Jt – 5 Jt rupiah	77% mendapatkan pelayanan yang memadai	80,5% gratis	85,5% Kualitas pelayanan pendidikan di tingkatkan lagi terutama dari kompetensi guru
2.	BATUMANDI	89% berisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	67,7% belum mendapatkan pelayanan yang memadai	89% Gratis	44 % menginginkan pendidikan gratis dan sarana prasana sekolah terpenuhi

No.	Kecamatan	Pendapat Orang Tua	Pelayanan Pendidikan	Pengeluaran Pendidikan	Harapan Terhadap Pelayanan Pendidikan
3.	AWAYAN	70% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% responden menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	90% Gratis	50% responden menyatakan harapan pendidikan gratis sepenuhnya
4.	TEBING TINGGI	80% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	90% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	100% mendapatkan pendidikan gratis	80% menginginkan pendidikan gratis
5.	PARINGIN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	83,5% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	75% mendapatkan pendidikan gratis	70,5% ingin peningkatan pelayanan pendidikan terutama kompetensi guru
6.	PARINGIN SELATAN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	42% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	75% Gratis	79,6% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi
7.	JUAI	100% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	63,6% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	88% pendidikan gratis	75,6% menginginkan sarana prasarana sekolah terpenuhi
8.	HALONG	50% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% menyatakan harga buku mahal	100% Gratis	67% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi
	Rata-rata				

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa : item pendapatan dari para orang tua siswa bermacam-macam dilihat dari sisi pekerjaan orang tua siswa yaitu: PNS, Pengusaha, Wiraswasta, dan Petani. Untuk segi pendapatan tidak terlalu mempersalahkan dimana tingkat pendapatan orang tua juga mempengaruhi tingkat keberlanjutan pendidikan anak-anaknya. untuk Kecamatan Lampihong dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 66% berkisar 2 juta – 5 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 80,5% menginginkan pendidikan gratis, walaupun dari segi pelayanan sebesar 77% pelayanan pendidikan tidak memadai dengan harapan sebesar 50% peningkatan sarana dan prasarana sekolah dapat di penuhi.

Untuk Kecamatan Batu Mandi dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar

89% berada di kisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pelayanan pendidikan sebesar 89% menginginkan pendidikan gratis walaupun dari segi pelayanan pendidikan sebesar 67,7% pelayanan pendidikan tidak memadai dan harapannya sebesar 44% menginginkan pendidikan gratis dan sarana prasana sekolah memadai.

Untuk Kecamatan Awayan dari segi pendapatan orang tua siswa sebesar 70% berkisar 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan kecamatan Awayan sebesar 90% mendapatkan pendidikan gratis, dari segi pelayanan sebesar 40% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai, dan harapannya sebesar 50% peningkatan kualitas pelayanan pendidikan terutama dari kompetensi guru dan pendidikan gratis.

Untuk Kecamatan Tebing Tinggi dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 80% berkisar 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 100% mendapatkan pendidikan gratis dengan harapan sebesar 80% sarana dan prasarana sekolah dapat di penuhi dan pendidikan gratis. Dari segi pelayanan pendidikan sebesar 90% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.

Untuk Kecamatan Paringin dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 75% berada di kisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 75% mendapatkan pendidikan gratis, dari segi pelayanan pendidikan sebesar 83,5% belum mendapatkan pendidikan yang memadai, dan harapannya sebesar 70,5% menginginkan peningkatan pelayanan pendidikan terutama kompetensi guru.

Untuk kecamatan Paringin Selatan dari segi penghasilan orang tua sebesar 75% berada dikisaran 500 ribu – 2 juta rupiah. Dilihat dari segi pendidikan Kecamatan Kuranji mendapatkan biaya pendidikan gratis sebesar 75%, pada pelayanan pendididkan sebesar 42% tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai, dengan harapan sebesar 79,6% menginginkan sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi.

Untuk Kecamatan Juai pendapatan orang tua siswa berada dikisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dilihat dari segi pendidikan Kecamatan Juai mendapatkan biaya pendidikan gratis sebanyak 88% dan pada pelayanan pendidikan sebesar 63,6% belum mendapatkan pelayanan yang memadai, dengan harapan sebesar 75,6% sarana dan prasarana sekolah dapat dipenuhi.

Untuk kecamatan Halong pendapatan orang tua siswa sebesar 50% berada

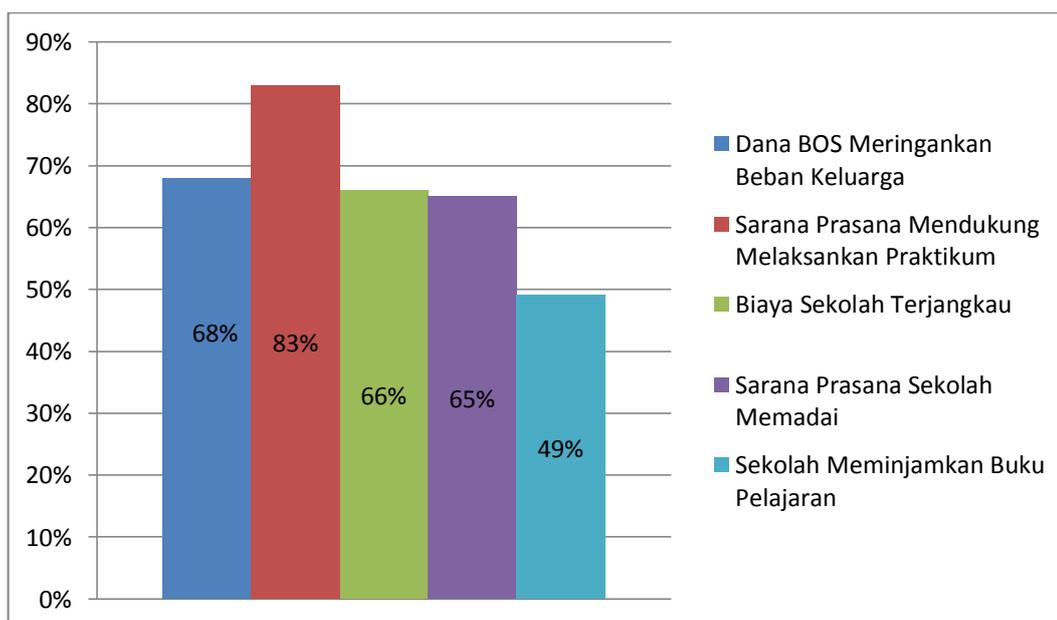
di kisaran 500 ribu sampai 2 juta rupiah dan 50% di atas 2 juta sampai 5 juta rupiah, dilihat dari segi pendidikan kecamatan Halong keseluruhan penduduk mendapatkan pendidikan gratis, dengan harapan sebesar 67% penduduk menginginkan sarana prasarana sekolah terpenuhi dan dari segi pelayanan pendidikan sekitar 40% menyatakan biaya buku mahal dan sisanya 60% menginginkan perbaikan mabel sekolah.

4.7.4 Hasil Survei Kepada Siswa

Survei yang ini bertujuan untuk melihat seberapa besar motivasi yang di peroleh oleh siswa baik dari orang tua maupun dari sekolah sebagaimana di terangkan gambar 4.4 berikut:

Gambar 4. 4

Kepuasan Siswa Terhadap Dunia Pendidikan Di Kabupaten Balangan



Dari ke lima item pertanyaan survey kepada orang tua siswa sebanyak 68% menyatakan bahwa Pentingnya dana BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan. Pada bidang sarana-prasana pendidikan sebanyak 83% menyatakan perlu adanya penambahan sarana-prasana pendidikan termasuk laboratorium. Siswa juga berharap pihak sekolah menyediakan buku materi pelajaran sebanyak 49% di ruangan perpustakaan sekolah sehingga buku dapat dipinjamkan kepada siswa.

Untuk sarana-prasarana pendidikan 65% responden siswa meminta perlu ditambah untuk meningkatkan kenyamanan dan keefektifan belajar. Sebanyak 66% responden siswa berharap biaya pendidikan terjangkau atau dengan kata lain adanya penggratisan biaya pendidikan agar mengurangi beban ekonomi keluarga mereka.

Dari data yang di ambil oleh penyusun dapat di simpulkan sementara bahwa gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan masih perlu ditingkatkan kembali baik dari sisi pelayanan, sarana prasarana, dukungan masyarakat, dukungan perusahaan sebagai user tenaga kerja terampil yang siap bekerja membangun daerah. Selain itu pula yang paling penting dalam mengulas gambaran umum pendidikan adalah Dana Alokasi Pendidikan di APBD dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama guru, siswa dan tenaga kependidikan. Dengan demikian proses pelayanan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Balangan. Untuk lebih mengulas kembali tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan akan diulas pada issue/masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada bab berikutnya.

4.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain dari yang disebutkan diatas ada beberapa issue utama pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Ruang kelas kurang

Ruang kelas pada beberapa sekolah yang berada di kawasan perkotaan dan pinggiran perbatasan perkotaan umumnya memiliki ruang kelas yang kurang. Masyarakat sekitar ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berada dekat kota. Berikut

2. Fasilitas kurang

Dukungan fasilitas sekolah dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler masih kurang. Demikian pula fasilitas yang bersifat pendukung praktikum, olah raga dan seni masih sangat kurang

3. Kesenjangan fasilitas dan kualitas sekolah antar daerah/kawasan

Terjadi kesenjangan antara fasilitas sekolah di kota atau pinggiran kota

dibandingkan di daerah yang jauh dan pedalaman sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan dan lulusan.

4.9 Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)

1. Kesejahteraan guru honor/swasta

Tingkat kesejahteraan guru honor dan swasta sangat jauh dengan PNS sehingga menimbulkan kecemburuan dan tanggung jawab pendidikan anak. Penyetaraan tunjangan tenaga pendidik dengan sertifikasi masih belum menyeluruh sehingga tidak menyentuh kesejahteraan pendidik.

2. Kualitas

Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih harus ditingkatkan agar kualitas kerjanya meningkat dan profesional. Rendahnya kualitas karena tenaga pendidik dan kependidikan penyebarannya tidak merata sehingga ada yang kekurangan dilain tempat terjadi kelebihan sehingga mengurangi kualitas pelayanan pendidikan.

4.10 Dukungan Sumber Dana

1. Terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah kabupaten

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membangun bidang pendidikan karena merupakan daerah pemekaran baru yang membutuhkan biaya besar dalam membangun infrastruktur dan sarana pendukung lainnya termasuk pembiayaan operasional pendidikan di daerah

2. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan pendidikan di daerah.

Potensi SDA yang melimpah tidak menjamin dunia usaha yang berinvestasi di daerah mau terlibat langsung dan memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Dengan banyaknya investor yang mengeruk hasil sumber daya alam ternyata masih rendah partisipasi mereka dalam membantu pembangunan bidang pendidikan. Keterlibatan masih bersifat sukarela melalui program CSR yang kurang terintegratif dengan program pembangunan daerah dalam jangka menengah sehingga hanya bersifat insidental saja.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang

pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang pendidikan masih sangat rendah sebab kesadaran masyarakat daerah masih perlu dimotivasi dan mereka umumnya menggantungkan pada program pemerintah. Yang terpenting dalam masalah partisipasi bukan pada masalah pembiayaan tetap adanya dukungan dari internal masyarakat dalam mendorong anak-anak agar tidak putus sekolah.

4.11 Masyarakat dan Lingkungan Sekolah

1. Akses pendidikan

Akses pendidikan di Kabupaten Balangan dari segi wilayah yang luas dan terpencil sehingga akses tempat menjadi kendala pendidikan. Akses peserta didik dalam proses pendidikan juga sulit karena faktor kemampuan ekonomi masih tingginya angka putus sekolah akibat tidak mampu sekolah.

2. Putus sekolah : kawin, kriminal, narkoba, masalah ekonomi, masalah keluarga

Putus sekolah tidak hanya karena sulitnya akses dan masalah ekonomi namun juga dapat diakibatkan oleh faktor sosial dan lingkungan yang kurang kondusif. Salah satunya karena pergaulan dan lingkungan yang mendorong terjadinya pernikahan dini sehingga banyak yang putus sekolah. Lingkungan keluarga yang kurang kondusif juga mengakibatkan tidak adanya dukungan dan motivasi dalam melanjutkan sekolah bagi anak usia sekolah. Banyak pula anak yang bekerja karena membantu perekonomian keluarga sehingga memperbesar terjadinya angka putus sekolah yang tinggi.

BAB V

ANALISIS SWOT

5.1 Analisis SWOT Terhadap Kondisi Pendidikan

Hasil analisis Strength, Weakness, Oppurtunity, Threath (SWOT) kondisi pendidikan Kabupaten Balangan berdasarkan hasil observasi, data dan indept interview.

5.1.1 Kekuatan

Memperhatikan kondisi pendidikan kabupaten Balangan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang dijadikan landasan untuk perencanaan pembangunan pendidikan.

1. Kondisi perekonomian dan investasi daerah yang meningkat sehingga mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
2. Sumber daya alam yang melimpah menjadi motivasi perlunya sumber daya manusia yang memadai
3. Kabupaten Balangan yang religious sehingga suasana menuntut ilmu dari lingkungan sangat kondusif.
4. Potensi SDA yang melimpah dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
5. Minat dan motivasi dari orang tua dan siswa untuk menempuh pendidikan sangat tinggi
6. Potensi penduduk yang pertumbuhannya cukup tinggi baik pertumbuhan natural maupun migrasi sehingga setiap jenjang pendidikan tidak akan kekurangan siswa
7. Kebutuhan tenaga kerja masih sangat tinggi baik sektor pertanian/perkebunan/perikanan, sektor pertambangan dan sektor industry terus terjadi peningkatan
8. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendidikan yang sudah memadai hampir merata pada seluruh kawasan
9. Potensi jumlah penduduk yang cukup besar membutuhkan pelayanan pendidikan

dapat menghasilkan SDM yang siap dan handal

10. Komitmen pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan
11. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan meningkatkan kualitas SDM

5.1.2 Kelemahan

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan
2. Masih adanya guru yang belum bersertifikasi dan rendahnya kualifikasi tenaga guru sesuai standar nasional
3. Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang nyaman.
4. Belum meratanya perbandingan guru dan siswa, perbandingan siswa dan ruang kelas perbandingan rombongan belajar dan perbandingan antar jenis pendidikan.
5. Masih adanya daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pendidikan dan masih terbatas dan sulitnya suatu daerah dalam mengakases pendidikan
6. Masih adanya disparitas pendidikan antar jenjang, APK dan APM dan antar daerah (dalam daerah desa, kecamatan dan kabupaten).
7. Masih ada terjadi putus sekolah akibat masalah ekonomi keluarga dan pernikahan dini
8. Masih rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja pada pasar kerja dan belum terpenuhinya penyediaan tenaga kerja siap latih dan siap kerja/pakai dalam penyerapan pasar kerja.
9. Masih belum sinkronnya perencanaan pembanguangan pendidikan antar daerah dan instansi.
10. Belum terpenuhi pelayanan pendidikan menyeluruh yaitu dengan masih terbatasnya pendidikan anak usia dini, kejar paket, dan pendidikan formal lainnya.
11. Belum memadainya database pendidikan yang integrative

5.1.3 Tantangan

1. Kemauan dan kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut

2. Perubahan kewenangan penanganan antara bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah memerlukan koordinasi yang baik antara kabupaten dan provinsi
3. Masih adanya sekolah di kawasan pinggiran dan terpencil
4. Masih adanya kejadian putus sekolah
5. Ketidak sesuaian antara lulusan dan kebutuhan lapangan kerja
6. Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang terdidik masih sangat tinggi
7. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan pendidikan
8. Tingginya kompetisi / persaingan tenaga kerja terdidik dari luar daerah yang menjadi tantangan bagi pembanguan pendidikan di daerah
9. Upaya pencapaian IPM memerlukan pembangunan pendidikan yang lebih baik
10. Pentingnya perhatian terhadap kualitas lulusan yang berkompetensi memadai
11. Pencapaian pembangunan dengan sinkronisasi dan kordinasi kebijakan dan implementasi pembangunan bidang pendidikan
12. Pembangunan sektor pendidikan menjadi fokus pendidikan di Kabupaten Balangan

5.1.4 Ancaman

1. Pengaruh globalisasi menjadi ancaman bagi penurunan kualitas keimanan, moral dan karakter masyarakat yang dapat mengancam pembangunan bidang pendidikan
2. Adanya ancaman peredaran narkoba, pergaulan bebas, perkelahian antar pelajar, pengaruh media sosial yang memerlukan perhatian dan program antisipasi dibidang pendidikan
3. Penetrasi masuknya pengaruh perkembangan teknologi informasi yang masiv memberikan kemudahan dalam pembangunan bidang pendidikan terutama dalam mendapatkan informasi dan komunikasi tapi sekaligus ancaman apabila tidak difilter
4. Maraknya siaran media masa baik tertulis maupun elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi pendidikan bagi anak-anak sekolah

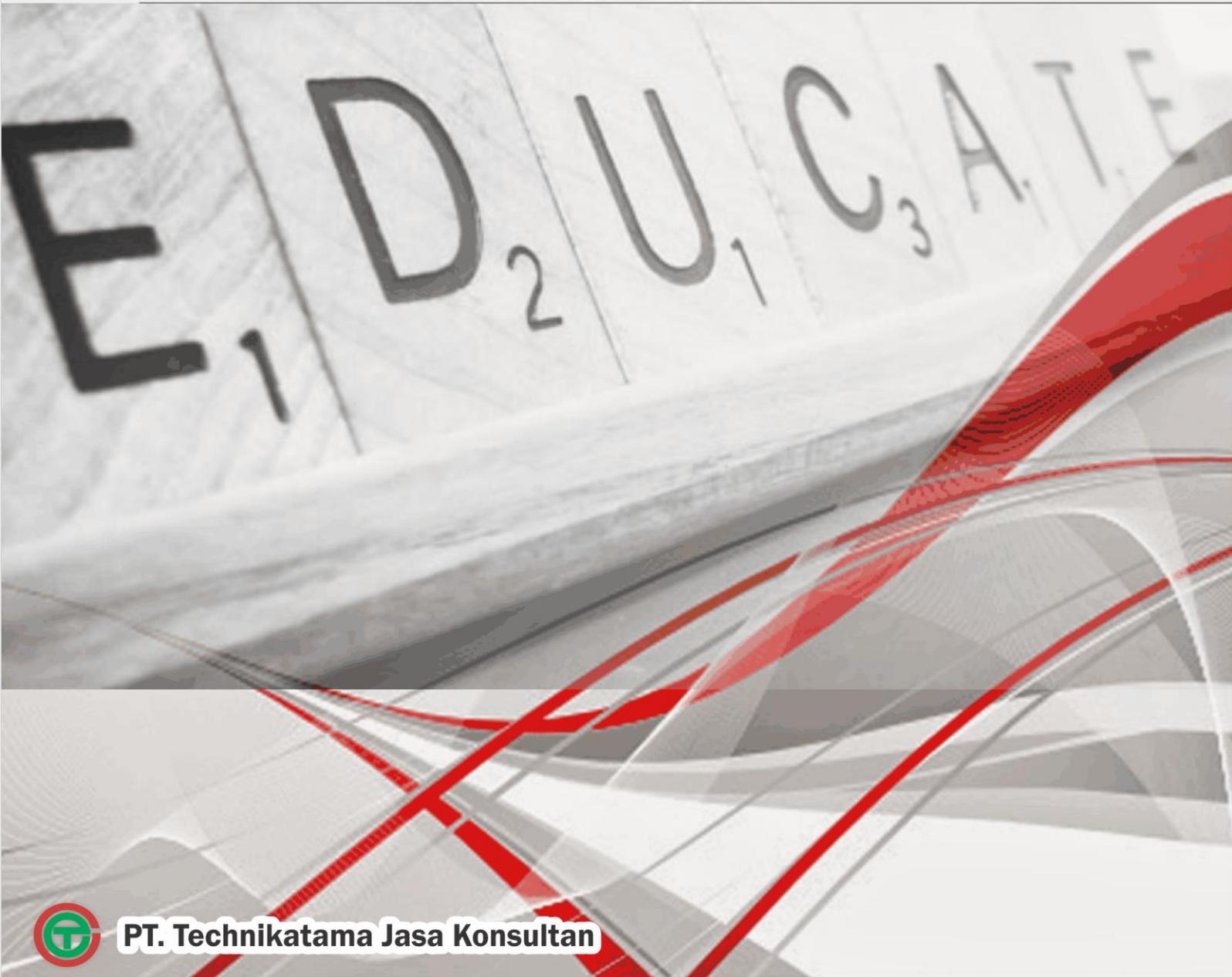
5. Penggunaan teknologi komunikasi/HP/BB/kamera dll yang merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan sekaligus ancaman jika disalahgunakan
6. Perubahan figure keteladanan dari para tokoh, ulama, pahlawan, orang tua menjadi tokoh imajiner dan dunia entertaint
7. Kemudahan dalam mendapatkan kelulusan dan tanda kelulusan pada beberapa lembaga pendidikan yang bersifat instan.

Untuk mengetahui program-program perencanaan sasaran pendidikan di Kabupaten Balangan berdasarkan hasil kajian mendalam dapat dilihat pada realisasi kebutuhan perencanaan 5 tahunan agar dapat mewujudkan MDG di pelayanan pendidikan. Perencanaan 5 tahunan tersebut kami sajikan dalam bentuk matrik kebutuhan yang kami susun pada laporan penutup berikutnya.



LAPORAN AKHIR

REVIEW MASTERPLAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing kami sehingga mampu menyelesaikan laporan akhir rencana penyusunan Review Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017.

Review Master plan pendidikan ini merupakan rencana induk jangka menengah. Disusun sebagai acuan rencana pendidikan lima tahun akan datang di Kabupaten Balangan.

Laporan akhir ini, penyusun menerangkan instrumen dan proses pengumpulan data, tanggapan terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja), analisis, asumsi hasil yang diharapkan, sistematika penyusunan Review Masterplan Pendidikan, laporan data di lapangan arah kebijakan pendidikan, prioritas program pendidikan serta penutup. Pada bab I berisi tentang latar belakang perlunya sebuah Review Master plan pendidikan sebagai acuan pembangunan pendidikan di daerah, khususnya di Kabupaten Balangan. Bab II berisi tentang gambaran umum daerah Kabupaten Balangan sebagai objek pembuatan Review Master plan Pendidikan ini. Pada bab III adalah metodologi yang digunakan untuk penyusunan Review Master plan Pendidikan. Sedangkan pada bab IV berisi gambaran umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan. Pada bab V berisikan analisis SWOT untuk mengantisipasi masalah tersebut. Bab VI berisi tentang arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan Kabupaten Balangan. Bab VII berisi tentang program prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan serta penutup pada bab VIII.

Kami ucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Balangan yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun Review Master plan Pendidikan ini. Kepada semua Tim yang telah bekerja keras hingga Review Master plan Pendidikan ini bisa disusun sesuai dengan yang telah direncanakan. Kepada para kepala sekolah dan pihak komite dalam lingkup Kabupaten Balangan, para orang tua siswa, dan pelajar yang telah berkontribusi dalam pendidikan Kabupaten Balangan. Serta semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Harapan kami semoga laporan Antara rencana penyusunan Review Master plan Pendidikan Kabupaten Balangan ini bisa memberikan gambaran sejauh mana keterlaksanaan Penyusunan Master plan Pendidikan sudah berjalan.

Banjarmasin

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Dasar Hukum	3
1.5 Target dan Sasaran	4
1.5.1 Target	4
1.5.2 Sasaran	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	5
2.1 Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan	5
2.1.1 Visi Kabupaten Balangan	5
2.1.2 Misi Kabupaten Balangan	5
2.1.3 Kebijakan	6
2.2 Kondisi Geografi dan Demografi	7
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	7
2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis	10
2.2.3 Demokrasi	16
2.3 Penduduk Kabupaten Balangan	17
2.4 Kondisi IPM Tahun 2015	19
2.4.1 Peringkat Masing-Masing Komponen IPM	21

2.5	Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan	24
2.5.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.5.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.5.3	Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	30
2.6	Pendidikan Kabupaten Balangan.....	32
2.6.1	Profil Pendidikan Kabupaten Balangan	32
2.6.2	Satuan dan Sebaran Pendidikan	33
2.6.3	Capaian Rata-Rata Lama dan Harapan Sekolah.....	38
2.7	Kesehatan Kabupaten Balangan	43
2.7.1	Sarana dan Prasarana.....	44
2.7.2	Angka Kematian Bayi.....	56
2.7.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	59
2.7.4	Angka Balita Gizi Buruk.....	60
2.7.5	Sanitasi dan Air Bersih	61
2.7.6	Persebaran Tenaga Kesehatan	63
BAB III METODE KEGIATAN		67
3.1	Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan	67
3.2	Analisis Data	67
3.3	Proses Pengumpulan Data.....	71
3.4	Instrumen (Kuesioner) Kajian.....	71
3.5	Sistematika Penulisan	71
3.6	Ruang Lingkup	72
BAB IV GAMBARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH.....		73
4.1	Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.1.1	Visi Pembangunan Pendidikan Daerah.....	73
4.1.2	Misi Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Daerah	73
4.2.1	Tujuan	73
4.2.2	Sasaran.....	74

4.3	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah	74
4.3.1	Strategi.....	74
4.3.2	Kebijakan	75
4.4	Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Balangan	77
4.4.1	Kondisi Pendidikan Disetiap Tingkatan Kabupaten Balangan	78
4.4.2	Pendidikan Non Formal	93
4.5	Rasio Guru dan Siswa	97
4.6	Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Peduduk Usia Sekolah.....	98
4.7	Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan.....	99
4.7.1	Hasil Survei Kepada Kepala Sekolah.....	99
4.7.2	Hasil Survei Kepada Guru Pengajar	101
4.7.3	Hasil Survei Kepada Komite Sekolah/Orang Tua Siswa	102
4.7.4	Hasil Survei Kepada Siswa.....	105
4.8	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	106
4.9	Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)	107
4.10	Dukungan Sumber Dana	107
4.11	Masyarakat dan Lingkungan Sekolah	108
BAB V ISSUE (MASALAH) PENDIDIKAN DAN ANALISIS SWOT		109
5.1	Analisis SWOT Terhadap Kondisi Pendidikan.....	109
5.1.1	Kekuatan	109
5.1.2	Kelemahan.....	110
5.1.2	Tantangan	110
5.1.4	Ancaman.....	111
BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG		
PENDIDIKAN		113
6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Balangan.....	113
6.2	Strategi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan	115
6.3	Prioritas Kebijakan Program Bidang Pendidikan	116

6.4	Sasaran Kebutuhan Tahunan Pendidikan Kabupaten Balagan	117
-----	--	-----

BAB VII PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

	KABUPATEN BALANGAN	120
7.1	Prioritas Program Berdasarkan Tiga Program Utama Sesuai Arah Kebijakan (Program disesuaikan Permendagri 13/2006, 59/2007 dan Permendikbud No. 23/2013.....	120
7.2	Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan	121

BAB VIII PENUTUP

8.1	Kesimpulan	123
8.2	Rekomendasi.....	124

Lampiran

	Lampiran 1: MATRIK Kebijakan, Strategi, Prioritas, Program, Kegiatan dan Target Keuangan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	125
	Lampiran 2: MATRIK Keterkaitan pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian target pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	128
	Lampiran 3: MATRIK Pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian target pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional	8
2.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan.....	10
2.3 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015.....	17
2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015.....	17
2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-trata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2015*	18
2.6 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015	21
2.7 HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015....	22
2.8 AHH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015.....	23
2.9 Pengeluaran Per kapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015	24
2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 (juta Rp)	26
2.11 PRDB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015.....	27
2.12 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Dan Daerah Lainnya Di Kalsel Tahun 2011–2015	28
2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (persen)	29
2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013-2015	30
2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2015	31
2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015	31

2.17	Perbandingan Pengelolaan Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2015	33
2.18	Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015	35
2.19	Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015	36
2.20	Rasio Jumlah Guru dengan Siswa di Kabupaten Balangan	37
2.21	Rasio Jumlah Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Balangan	37
2.22	Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014.....	38
2.23	Konversi Tahun Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pendidikan.....	40
2.24	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2012-2016.....	40
2.25	Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2011-2014.....	41
2.26	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015	42
2.27	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Balangan Tahun 2015	46
2.28	Jumlah Posyandu Menurut Strarta, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	47
2.29	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015.....	49
2.30	Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015	50
2.31	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015.....	52
2.32	Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015	53

2.33	Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015	54
2.34	Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015.....	55
2.35	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	57
2.36	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	58
2.37	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	60
2.38	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	61
2.39	Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015	62
2.40	Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2015	63
4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016 s.d 2021	76
4.2	Perkembangan Pendidikan di Tingkat TK/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016	79
4.3	Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat TK/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	80
4.4	Jumlah Guru TK Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	80
4.5	Kondisi Ruang Kelas Tingkat TK Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016.....	81
4.6	Ruang Pendukung Tingkat TK/RA Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	81
4.7	Perkembangan Pendidikan di Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Balangan	

	Tahun 2014-2016	83
4.8	Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	84
4.9	Jumlah Guru SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	84
4.10	Kondisi Ruang Kelas Tingkat SD/Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016.....	85
4.11	Ruang Pendukung Tingkat SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016.....	86
4.12	Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016.....	88
4.13	Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	89
4.14	Jumlah Guru SMP/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	89
4.15	Kondisi Ruang Kelas Tingkat SD/Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016.....	90
4.16	Ruang Pendukung Tingkat SMP/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016	91
4.17	Kondisi Ruang Belajar Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016.....	92
4.18	Pokok Pendidikan Non Formal	94
4.19	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan.....	98
4.20	Perkembangan Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan	98
4.21	Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kondisi Kemampuan Sekolah	100
4.22	Persepsi Komite Sekolah/Orang Tua Siswa Terhadap Kondisi Pendidikan Perkecamatan Kabupaten Balangan	102

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan.....	9
2.2 Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km ²	10
2.3 Rata-Rata Curah Hujan/Hari Menurut Stasiun Pengamat (mm), 2015.....	15
2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan.....	16
2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015	20
2.6 Perbandingan Status Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan.....	34
3.1 Kerangka Analisis Review Masterplan Pendidikan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Balangan.....	69
3.2 Skema Review Master Plan Pendidikan Tahun 2011-2015	70
4.1 Peta Kondisi Ruang Belajar Kabupaten Balangan	92
4.2 Ilustrasi Kecakapan Hidup	95
4.3 Gambaran Umum Guru di Kabupaten Balangan Terhadap Angka Partisipasi	101
4.4 Kepuasan Siswa Terhadap Dunia Pendidikan Di Kabupaten Balangan.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Pembangunan Kabupaten BaJangan tahun 2016 – 2021 adalah terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Salah satu misi untuk mengarahkan pencapaian visi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah menetapkan beberapa indikator kinerja pembangunaa daerah di bidang pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan serta guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV. Indikator kinerja ini untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Balangan.

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusla yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmanl-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berلمان dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabpaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Balangan telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar 6 tahun yang didukung pembangunaan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan wajib belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah/ APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Pada tahun 2015, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,38 persen dan APS usia 13-15 tahun 96,14 persen, APK SD mencapai 112,06, ini

berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar dari pada jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 12,06 persen penduduk di luar usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK Penduduk Balangan cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 98,82. Seperti halnya APK, APM juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD APM 95,67 persen. Artinya hanya 95,67 persen penduduk usia 7-12 tahun yang terserap sebagai siswa SD. Pada jenjang SMP, APM menjadi 77,12. Dari pencapaian tersebut diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu penyebab utama kemiskinan dan indikator tingkat kesejahteraan adalah pendidikan sehingga dalam kerangka jangka panjang dibutuhkan sebuah perencanaan pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dari berbagai sektor. Ide dasar ini yang mengharuskan Bappeda Kabupaten Balangan untuk melakukan kegiatan Penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dengan disusunnya Kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah memberikan arahan dalam penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari kegiatan Review Masterplan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan;
2. Mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan;
3. Menyusun strategi, kebijakan dan program lintas sektor dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Balangan;

1.3 Manfaat

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah direncanakan dengan melibatkan berbagai secktor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
3. Permerhati dan aktifi pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
4. Masyarakat di kabupaten Balangan dalam partisipasinya dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

1.4 Dasar Hukum

Landasan hokum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
7. Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
8. Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru.
9. Permendiknas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengolahan Pendidikan.
10. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian.
11. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarpras.
12. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
13. Permendiknas No. 11 Tahun 2008 Tentang Sertifikasi Guru Dalam.
14. Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Tentnag Standar Biaya.
15. SPM Pendidikan.

1.5 Target dan Sasaran

1.5.1 Target

Target yang menjadi tujuan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidik/Kepala sekolah, guru, masyarakat/orang tua siswa serta siswa.
- b. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam hal kualitas dan kuantitas pendidikan di daerah Kabupaten Balangan.
- c. Terlaksananya semua kegiatan yang di laksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam hal ini di bidang pendidikan.

1.5.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan adalah teridentifikasinya kondisi umum penyelenggaraan pendidikan serta terumusnya strategi, kebijakan dan program, yang seluruhnya tertuang dalam Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan. Hasil ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah kabupaten Balangan dalam membumikan visi-misi yang telah direncanakan dengan meilibatkan berbagai sektor dan potensinya.
2. Praktisi pendidikan diberbagai tingkatan dalam wilayah Kabupaten Balangan agar mampu memperbaiki perencanaan sektoralnya dan menyesuaikan sesuai perencanaan jangka panjang.
3. Pemerhati dan aktifis pendidikan dalam rangka mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dan program dibidang pendidikan.
4. Masyarakat di Kabupaten Balangan dalam partisipasi dan kerjasamanya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Visi, Misi dan Kebijakan Kabupaten Balangan

2.1.1. Visi Kabupaten Balangan

Menghadapi tantangan pembangunan maka dicanangkan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia" dengan makna visi berikut:

1. Maju

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan.

2. Sejahtera

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

2.1.2. Misi Kabupaten Balangan

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan

- dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
 6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
 7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

2.1.3. Kebijakan

Berikut ini ditampilkan rencana pemerintahh Jangka Menengah (RPKM) Tingkat Nasional dan Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
1. rioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Membangun kehidupan sosial dan budaya (P.11, P.10,P14)	1. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
2. Prioritas 2, Pendidikan	2. Membangun Sumber daya manusia (P2,P3,P4)	2. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3. Prioritas 3, Kesehatan	3. Peningkatan Perekonomian (P13,P5,P7,P8)	3. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan	4. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (P6)	4. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan	5. Pengelolaan lingkungan Hidup (P9)	5. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6. Prioritas 6, Infrastruktur	6. Melaksanakan pemerintahan yang baik (P1,P12)	
7. Prioritas 7, Iklim dan Investasi		
8. Prioritas 8, Energi		
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		

RPJM Nasional (2015-2019)	Pemprov Kalsel dalam RPJM Daerah (2015-2020)	RPJMD Kabupaten Balangan (2016-2021)
10. Prioritas 10, Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Prioritas 11, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 12. Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Prioritas 13, Perekonomian 14. Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat		6. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi 7. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar 8. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah 9. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah 10. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin 11. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses. 12. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 13. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil 14. Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan 15. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Sumber: RPJMD Kab. Balangan Revisi 2016-2021

2.2 Kondisi Geografis dan Demografi

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2^o 01' 37" sampai dengan 2^o 35' 58" Lintang Selatan dan 114^o 50' 24"

sampai dengan $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

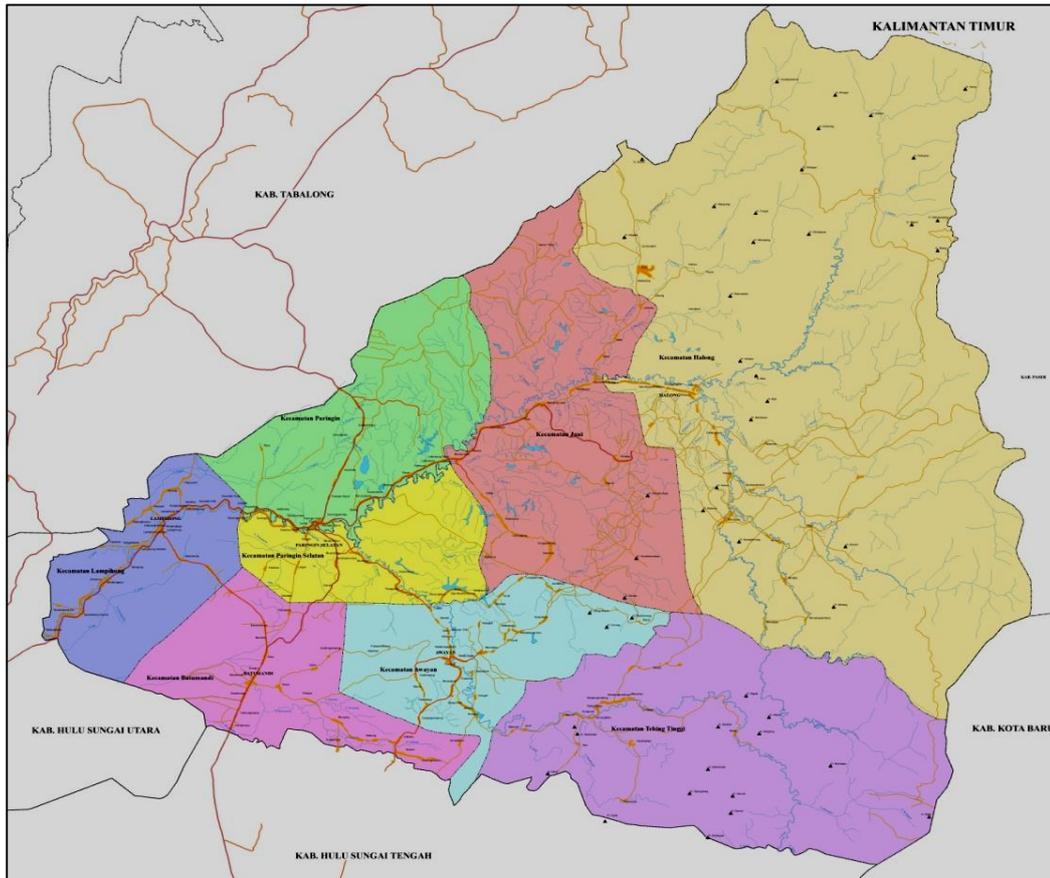
- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Balangan terdiri dari:

0 m - 7 m	= 1,87 %
7 m - 25 m	= 19,56 %
25 m -100 m	= 38,28 %
100 m – 500m	= 31,27 %
500 m keatas	= 9 %

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan :

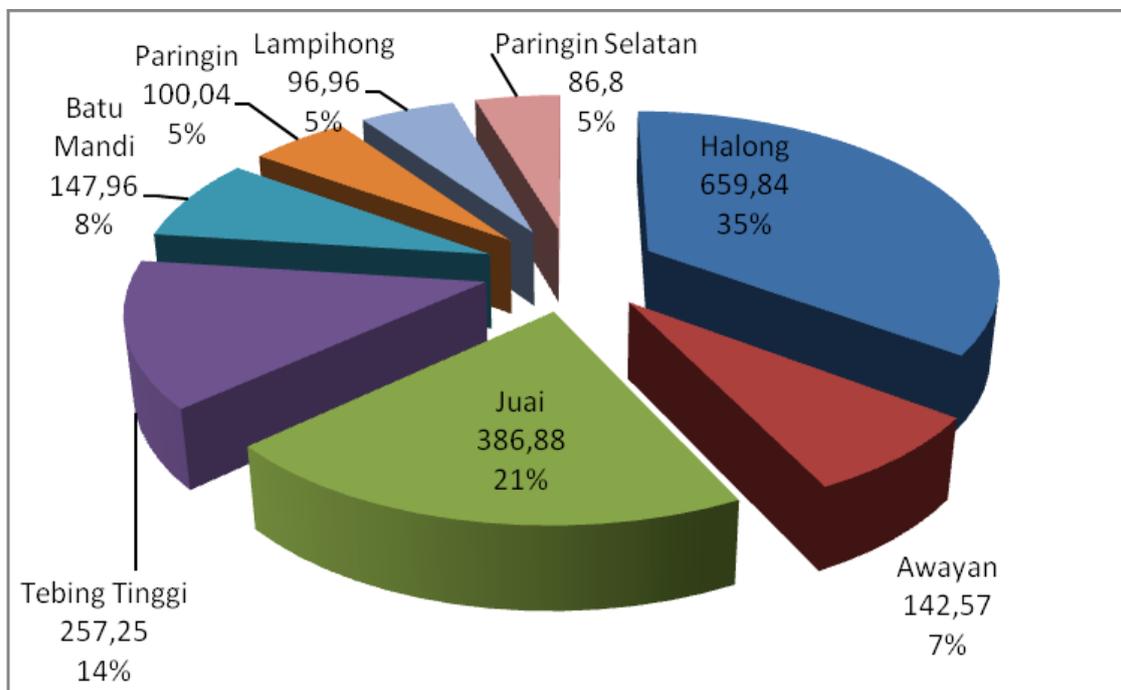
1. Paringin Selatan – Lampihong: 15 km.
2. Paringin Selatan – Batumandi: 12 km.
3. Paringin Selatan - Awayan: 13 km.
4. Paringin Selatan – Tebing Tinggi: 18 km.
5. Paringin Selatan - Paringin: 3 km.
6. Paringin Selatan – Juai: 21 km.
7. Paringin Selatan - Halong: 12 km.



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen) Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awayan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini.

Gambar 2.2 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Daerah	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	Simpang Tiga	96,96	-	27
Paringin	Paringin	100,04	2	14
Juai	Mungkur Uyam	386,88	-	21
Halong	Halong	659,84	-	24
Batu Mandi	Batu Mandi	147,96	-	18
Paringin Selatan	Batu Piring	86,80	1	15
Awayan	Putat Basiun	142,57	-	23
Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	257,25	-	12
Jumlah		1.878,30	3	154

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 20 02'25,99" sampai dengan 20 31' 57,96" Lintang Selatan dan 115o 18' 45,03" sampai dengan 115o 50' 11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157

desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong,

misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah -jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian. karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

a) Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak- anak sungainya

b) Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten

Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan pelapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

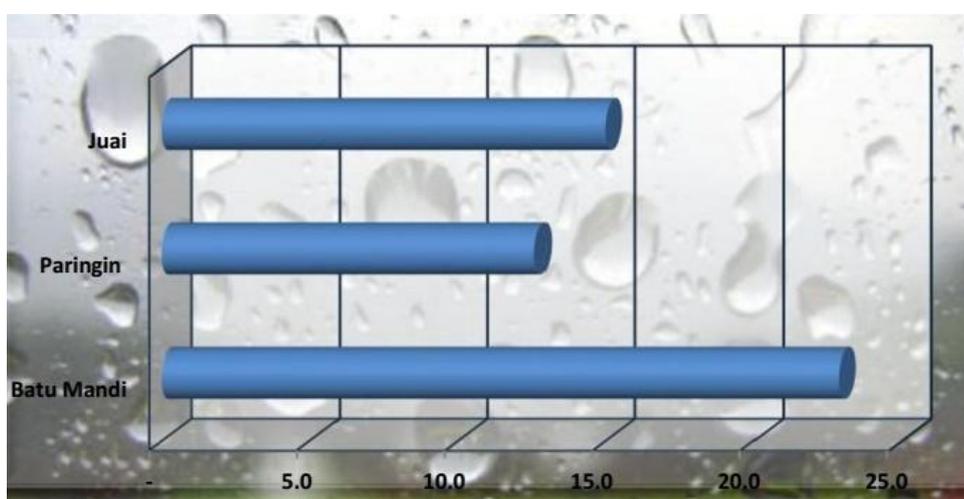
4) Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda.

Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2014 initerpantau di stasiun pengamatan Juaiyaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/Hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015



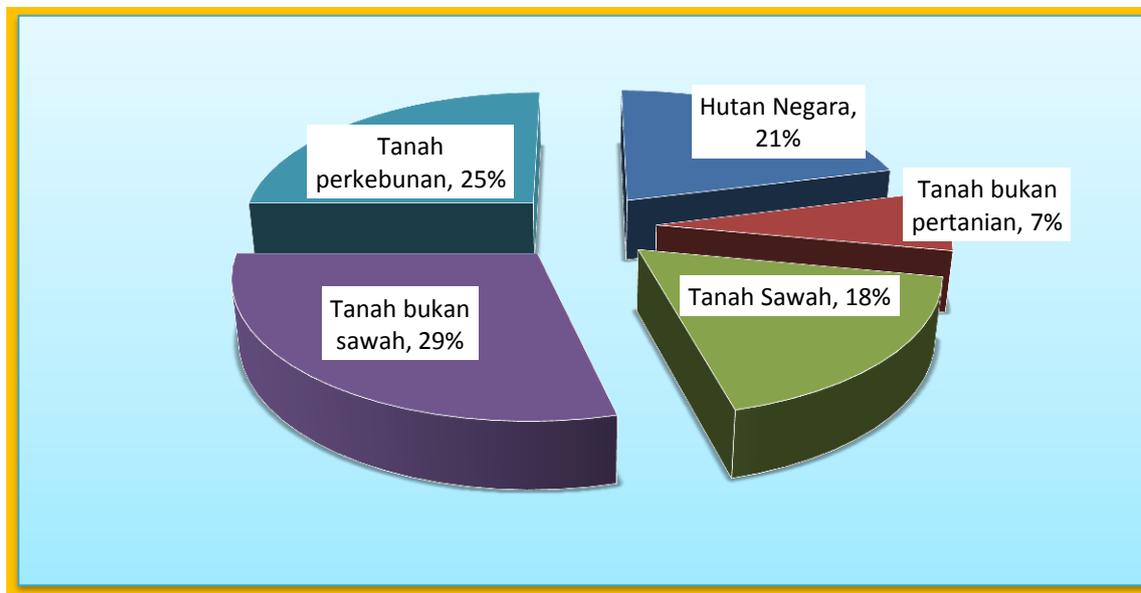
Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang

belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

2.2.3 Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4

Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/Total		
		Desa/Kel.	Rumah Tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber : Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-Laki		Perempuan		2014	2015	2014	2015
	2014	2015	2014	2015				
1. Lampihong	9.013	8.568	8.896	8.376	17.927	16.944	102	102
2. Batumandi	9.148	8.877	8.836	8.541	17.984	17.418	104	104
3. Awayan	6.706	6.944	6.743	6.995	13.939	13.939	99	99
4. Tebing Tinggi	3.462	3.206	3.348	3.074	6.280	6.280	103	104
5. Paringin	8.956	8.790	8.998	8.824	17.614	17.614	100	100
6. Paringin Selatan	6.467	6.294	6.399	6.221	12.515	12.515	101	101
7. Juai	8.448	8.815	8.261	8.577	17.392	17.392	102	103
8. Halong	9.394	10.985	8.951	10.408	21.393	21.393	105	106
Jumlah	76.505	62.479	60.432	61.016	122.044	123.495	102	102

Sumber: Dispencafil Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.3 Penduduk Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan hasil proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 123.449 jiwa yang terdiri dari 62.138 laki-laki dan 61.311 perempuan. Dengan luas wilayah 1.878,30 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 66 orang per kilometer persegi. Dua kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan Lampihong dengan kepadatan penduduk masing-masing 185 dan 176 orang per km². Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai dimana tingkat kepadatannya lebih rendah daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk Balangan 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah perlu menyiapkan

perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang.

Komposisi penduduk Kabupaten Balangan yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 0-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Balangan memiliki populasi penduduk muda yang relatif besar seperti seperti digambarkan oleh piramida penduduk dengan karakteristik ekspansif. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Ditinjau dari rasio jenis kelamin per kelompok umur, persentase penduduk laki-laki hampir pada setiap kelompok umur lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun pada kelompok umur tua (55 thn ke atas) akan terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dibanding penduduk laki-laki.

Pada tahun 2015, penduduk usia muda (usia di bawah 15 tahun) sebesar 30,4%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) 66,1% dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) 3,5%. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif ini mengimplikasikan tersedianya angkatan kerja dan basis konsumen yang besar dan potensial.

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin dan rata-rata penduduk per desa seerta kepadatan penduduk yang merupakan angka perkiraan pada tahun 2015.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Rata-rata, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Balangan Tahun 2015*

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
1	Lampihong	8 490	8 556	17.046	27	631	176
2	Batu Mandi	8 862	8 590	17.452	18	970	118
3	Awayan	6 550	6 712	13.262	23	577	93
4	Tebing Tinggi	3 281	3 275	6.556	12	546	25
5	Paringin	9 334	9 164	18.498	16	1.156	185

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Desa	Rata-rata Penduduk per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Laki-laki	Perempuan				
6	Paringin Selatan	6 347	6 249	12.596	16	787	145
7	Juai	8 810	8 630	17.440	21	830	45
8	Halong	10 464	10 135	20.599	24	858	31
	Balangan	62 138	61 311	123.449	157	786	66

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2016

*) Angka Sementara Proyeksi Penduduk Tahun 2015

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Kecamatan Paringin dengan luas 5,53% dari luas Kabupaten Balangan mendudukan urutan kedua setelah Kecamatan Halong dari segi jumlah penduduk yaitu sebanyak 18.498 jiwa atau sebesar 14,98% dari penduduk Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan dengan rasio 101. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 6.556 jiwa dengan rata-rata penduduk sebanyak 546 jiwa per desa atau di bawah rata-rata penduduk per desa di Kabupaten Balangan.

2.4 Kondisi IPM Tahun 2015

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

United Nations Development Programmes (UNDP) telah merekomendasikan

penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan daerah dan waktu lainnya.

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka akan tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.



Gambar 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015

IPM Kabupaten Balangan dengan perhitungan metode baru sebesar 62,88 pada tahun 2010 meningkat menjadi 65,34 pada tahun 2015. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPM Kabupaten Balangan menunjukkan kemajuan yang besar, namun masih dibawah rata-rata IPM provinsi Kalimantan Selatan dan status pembangunan manusia kabupaten Balangan masih stagnan pada kategori status sedang. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Balangan dengan Kabupaten/kota lainya di kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Perbandingan IPM Kabupaten/kota Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015

No	Kabupaten	Tahun										Peringkat	
		2010	Peringkat	2011	Peringkat	2012	Peringkat	2013	Peringkat	2014	Peringkat		2015
KALIMANTAN SELATAN		65.20		65.89		66.68		67.17		67.63		68.38	
1	TANAH LAUT	63.56	8	64.35	7	65.16	6	66.11	6	66.50	6	66.99	6
2	KOTA BARU	63.64	7	64.27	8	64.87	8	65.41	7	65.76	7	66.61	7
3	BANJAR	64.46	6	64.75	6	65.04	7	65.36	8	65.71	8	66.39	9
4	BARITO KUALA	60.24	12	60.93	12	61.62	12	62.12	12	62.56	12	63.53	12
5	TAPIN	64.89	5	65.41	5	65.92	5	66.48	5	66.99	4	67.67	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	62.80	11	63.44	10	64.03	10	64.59	10	65.25	10	66.31	10
7	HULU SUNGAI TENGAH	63.49	9	63.90	9	64.34	9	64.63	9	65.37	9	66.56	8
8	HULU SUNGAI UTARA	58.50	13	59.24	13	60.12	13	60.77	13	61.32	13	62.49	13
9	TABALONG	65.87	3	66.60	3	67.36	3	68.08	3	68.36	3	69.35	3
10	TANAH BUMBU	64.98	4	65.59	4	66.13	4	66.51	4	66.94	5	67.58	5
11	BALANGAN	62.88	10	63.28	11	63.69	11	64.03	11	64.44	11	65.38	11
12	KOTA BANJARMASIN	71.01	2	72.01	2	73.45	2	74.59	2	74.94	2	75.41	2
13	KOTA BANJAR BARU	75.49	1	76.23	1	76.67	1	77.10	1	77.30	1	77.56	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan perkembangan metode terbaru, IPM Kabupaten Balangan mengalami penurunan peringkat dari tahun 2010 ke 2011. Sedangkan perkembangan IPM dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat konstan pada peringkat ke 11. Jadi perlu upaya yang lebih keras mengingat beberapa kabupaten terlihat bisa meningkatkan IPM mereka ke arah yang lebih baik.

2.4.1 Peringkat Masing-masing Komponen IPM

2.4.1.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Selain angka harapan lama sekolah, indikator penting lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata- Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Berikut ini adalah Angka harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Balangan tahun 2014-2015 beserta perbandingan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.7 HLS dan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	HLS (Tahun)				RLS (Tahun)			
		Periode/Peringkat				Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat	2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		11.96		12.21		7.6		7.76	
1	TANAH LAUT	11.09	11	11.25	11	7.72	4	7.29	8
2	KOTA BARU	11.11	10	11.41	10	6.80	10	6.99	10
3	BANJAR	10.99	13	11.16	13	6.96	9	6.99	9
4	BARITO KUALA	11.54	6	11.72	7	6.47	12	6.81	11
5	TAPIN	11.17	9	11.21	12	7.17	8	7.43	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11.68	5	11.83	6	7.21	7	7.67	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11.42	7	11.94	5	7.27	5	7.52	5
8	HULU SUNGAI UTARA	12.1	3	12.78	3	6.63	11	6.73	12
9	TABALONG	11.96	4	12.32	4	7.95	3	8.24	3
10	TANAH BUMBU	11.2	8	11.42	9	7.26	6	7.38	7
11	BALANGAN	11.03	12	11.48	8	6.38	13	6.46	13
12	KOTA BANJARMASIN	13.73	2	13.76	2	9.88	2	9.90	2
13	KOTA BANJAR BARU	14.73	1	14.75	1	10.74	1	10.75	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.7 terlihat bahwa komponen HLS dan RLS pembentuk Indeks Pendidikan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia di Kabupaten Balangan masih rendah peringkat ke 12 untuk HLS pada tahun 2014 meskipun pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat 8 namun nilai HLS ini masih di Bawah HLS Provinsi tahun 2015 yaitu sebesar 12,21.

Ditinjau dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan tahun 2014-2015. Permasalahan ini harus menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi modal penting pada era kompetisi saat ini.

2.4.1.2 Kesehatan

Salah satu aspek penting pembangunan manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Komponen IPM yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH-e⁰). Berikut ini perbandingan derajat kesehatan yang ditunjukkan oleh nilai

Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.8 AHH Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)			
		Periode/Peringkat			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
KALIMANTAN SELATAN		67.47		67.8	
1	TANAH LAUT	68.22	6	68.62	6
2	KOTA BARU	68.14	7	68.49	7
3	BANJAR	65.32	9	65.97	9
4	BARITO KUALA	64.49	10	64.94	10
5	TAPIN	69.02	4	69.47	4
6	HULU SUNGAI SELATAN	63.64	12	64.14	12
7	HULU SUNGAI TENGAH	64.33	11	64.83	11
8	HULU SUNGAI UTARA	62.09	13	62.49	13
9	TABALONG	69.39	3	69.74	3
10	TANAH BUMBU	68.84	5	69.19	5
11	BALANGAN	66.65	8	66.95	8
12	KOTA BANJARMASIN	70.02	2	70.32	2
13	KOTA BANJAR BARU	71.76	1	71.36	1

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pada Tabel 2.8 terlihat bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Balangan berada pada peringkat 8 baik pada tahun 2014 maupun 2015. Angka harapan hidup kabupaten Balangan pada tahun 2015 mencapai 66,95 tahun masih berada di bawah rata-rata Provinsi. Perlu upaya yang keras pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat pada tahun-tahun mendatang agar peringkat pembangunan manusia menjadi lebih baik.

2.4.1.3 Ekonomi (Kesejahteraan Masyarakat)

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan kemampuan daya beli atau konsumsi riil per kapita. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Berikut ini pengeluaran per kapita Kabupaten Balangan dan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.9 Pengeluaran Per kapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015

NO	Kabupaten	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp. 000)			
		2014	Peringkat	2015	Peringkat
	KALIMANTAN	10,748		1089	
1	TANAH LAUT	10,632	8	10,753	8
2	KOTA BARU	10,536	10	10,645	10
3	BANJAR	12,004	3	12,185	3
4	BARITO KUALA	8,936	12	9,062	12
5	TAPIN	10,839	6	10,906	6
6	HULU SUNGAI SELATAN	11,077	4	11,161	4
7	HULU SUNGAI TENGAH	11,040	5	11,142	5
8	HULU SUNGAI UTARA	8,164	13	8,298	13
9	TABALONG	10,088	11	10,171	11
10	TANAH BUMBU	10,697	7	10,781	7
11	BALANGAN	10,617	9	10,736	9
12	KOTA BANJARMASIN	12,501	1	12,834	1
13	KOTA BANJAR BARU	12,376	2	12,467	2

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2015 Kabupaten Balangan mencapai Rp. 10.736.000,- per tahun dengan peringkat ke-9 dari 13 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kemampuan daya beli masyarakat ini relatif memiliki peringkat lebih baik dibandingkan dengan komponen pembentuk IPM lainnya seperti HLS dan RLS pada komponen Pendidikan dan AHH pada ukuran derajat kesehatan pada pembahasan sebelumnya.

Pengeluaran riil perkapita tertinggi di Kota Banjarmasin yaitu mencapai Rp. 12.834.000,- per kapita/tahun, dan terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp. 8.298.000,- per kapita/tahun. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata sebesar Rp. 10.891.000,- per kapita/Tahun.

2.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan

Pengeluaran penduduk dicatat dalam segala aspek, dari konsumsi makanan, non-makanan, dan aneka transaksi keuangan. Pengeluaran per kapita penduduk

Kabupaten Balangan di tahun 2015 paling besar di kelompok Rp 500.000,- hingga Rp 750.000,- perbulan dengan persentase sebanyak 35,20% dari total penduduk Balangan. Walaupun masih tercatat ada 1,84% penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah angka Rp 300.000,- per bulannya.

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 76,78%, dimana andil terbesar didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 65,30%. Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,02% terhadap total PDRB (dengan minyak bumi dan pertambangan batu bara) atas dasar harga berlaku.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Distribusi PDRB Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2015 (juta Rp)

NO	Lapangan Usaha	2014*		2015**	
		Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.005.985,0	10,73	1.081.429,5	11,48
2	Pertambangan dan Penggalian	6.453.129,2	68,82	6.152.916,5	65,30
3	Industri Pengolahan	141.979,7	1,51	160.316,6	1,70
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.499,8	0,02	2.162,0	0,02
5	Pengadaan Air	18.099,7	0,19	19.887,8	0,21
6	Konstruksi	327.495,0	3,49	376.382,9	3,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392.288,1	4,18	434.399,7	4,61
8	Transportasi dan Pergudangan	142.661,3	1,52	159.565,9	1,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.660,5	0,25	25.851,4	0,27
10	Informasi dan Komunikasi	104.387,6	1,11	112.070,6	1,19
11	Jasa Keuangan	22.401,6	0,24	25.283,8	0,27
12	Real Estate	73.752,0	0,79	80.484,5	0,85
13	Jasa Perusahaan	4.923,6	0,05	5.577,4	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	341.184,6	3,64	404.951,1	4,30
15	Jasa Pendidikan	224.435,5	2,39	266.420,4	2,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.416,8	0,66	71.700,3	0,76
17	Jasa lainnya	37.086,1	0,40	43.266,8	0,46
	PDRB dengan Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	9.376.386,2	100	9.422.667,1	100
	PDRB tanpa Pertambangan Minyak Bumi dan Batubara	2.927.069,6		3.274.386,0	

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku baik dengan sektor pertambangan, maupun tanpa sektor petambangan di Kabupaten Balangan

tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan. Dilihat dari lapangan usaha, Kabupaten Balangan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 65,30%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,48%, dan perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,61%. PDRB per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2015

PDRB Perkapita	2011	2012	2013	2014*	2015**
Dengan Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	64.977,72	67.366,73	72.705,60	77.287,68	76.328,42
ADHK (Ribu Rp)	58.239,96	61.046,24	64.801,00	67.482,17	68.383,19
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	19,10	3,68	7,93	6,30	(1,24)
ADHK (%)	6,75	4,82	6,15	4,14	1,34
Tanpa Pertambangan Batubara dan Lignit:					
ADHB (Ribu Rp)	19.038,17	20.356,27	21.935,97	24.12,725	26.524,20
ADHK (Ribu Rp)	18.007,05	18.503,65	19.097,85	19.691,48	20.507,24
Pertumbuhan:					
ADHB (%)	9,63	6,92	7,76	9,99	9,93
ADHK (%)	3,69	2,76	3,21	3,11	4,14

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

*) Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Balangan dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan meningkat dari 64,98 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 76,33 juta rupiah pada tahun 2015. Namun dari sisi pertumbuhan, PDRB perkapita cenderung melambat hingga 2014 bahkan menurun di tahun 2015. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan cenderung tumbuh melambat selama periode 2011-2015, atau dari 6,75% pada tahun 2011 menjadi 1,34% pada tahun

2015. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit dapat diketahui bawah selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Balangan semakin meningkat setiap tahunnya dari 19,04 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 26,52 juta rupiah pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 8,85% setiap tahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Balangan tanpa subkategori pertambangan batubara dan lignit tetap tumbuh selama periode 2011-2015, atau dari 3,69% pada tahun 2011 menjadi 4,14% pada tahun 2015. Selanjutnya, untuk melihat pemerataan pendapatan yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan maka dapat dilihat dari angka gini ratio di Kalimantan Selatan pada tahun 2015, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.12:

Tabel 2.12 PDRB Perkapita Kabupaten Balangan Dan Daerah Lainnya Di Kalsel Tahun 2011 – 2015

No	Kabupaten	Gini Ratio Tahunan
1	Tanah Laut	0,27
2	Kotabaru	0,35
3	Banjar	0,32
4	Barito Kuala	0,37
5	Tapin	0,35
6	Hulu Sungai Selatan	0,31
7	Hulu Sungai Tengah	0,33
8	Hulu Sungai Utara	0,36
9	Tabalong	0,29
10	Tanah Bumbu	0,33
11	Balangan	0,4
12	Kota Banjarmasin	0,39
13	Kota Banjarbaru	0,35
	Kaimantan Selatan	0,35

Sumber: BPS Kalsel 2016

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Balangan mendapatkan tingkat gini ratio sebesar 0,4. Angka ini paling tinggi dibandingkan dengan angka gini ratio di setiap kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi di Kalimantan Selatan.

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama tahun 2011-2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2011 sampai 2015 ditunjukkan dalam tabel 2.13:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (persen)

NO	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,99	2,68	3,44	4,06	4,45
2	Pertambangan dan Penggalian	10,30	7,63	9,34	6,45	1,94
3	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,74	4,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,61	8,50	2,61	12,99	16,70
5	Pengadaan Air	5,14	3,82	3,73	6,48	4,57
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,48	5,81	6,13	4,33	6,94
8	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,45	6,79	6,54	5,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	5,28	8,43	5,12	4,59
10	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,15	3,46	4,95	5,39
11	Jasa Keuangan	16,77	3,51	6,25	5,43	4,33
12	Real Estate	7,87	7,81	9,10	5,34	5,03
13	Jasa Perusahaan	4,40	5,43	7,89	7,54	7,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	5,90	5,69	5,54	8,71
15	Jasa Pendidikan	4,09	5,46	6,07	6,21	9,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	6,02	7,24	5,74	6,17
17	Jasa lainnya	7,36	5,35	3,64	5,78	6,34
	PDRB dengan Pertambangan Minyak	8,84	6,69	8,04	6,01	3,12
	PDRB tanpa subkategori pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara dan Lignit, dan Bijih Logam	5,72	4,60	5,05	4,97	5,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan

cenderung melambat di tahun 2012 yaitu sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontribusi subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan.

2.5.3 Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan memiliki tenaga kerja yang relatif besar. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 75,38% penduduk Balangan berumur 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan 24,62% sisanya bukan angkatan kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013-2015

Jenis Kegiatan Utama	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	77,24	78,26	75,38
- Bekerja	97,28	98,66	95,69
- Penganggur	2,72	1,34	4,31
Bukan Angkatan Kerja	22,76	21,74	24,62
- Sekolah	36,56	40,72	35,72
- Mengurus rumah tangga	50,98	45,69	53,81
- Lainnya	12,46	13,59	10,48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,24	78,26	75,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,72	1,34	4,31

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31%, meningkat dibandingkan dua tahun terakhir yang berkisar 1,34% di 2014 dan 2,72% 2013. Penyebab peningkatan pengangguran ini disebabkan perlambatan ekonomi Balangan.

Ditinjau dari sektor lapangan kerja utama, lebih dari separuh penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.15:

Tabel 2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Primer	56,03	58,85	57,21
Sekunder	8,99	3,82	6,80
Tersier	34,98	37,36	35,99
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57,21%. Sementara sektor tersier dan sekunder menyerap tenaga kerja masing-masing 35,99 dan 6,80%. Penduduk Kabupaten Balangan yang bekerja pada sektor primer dan tersier lebih banyak berjenis kelamin perempuan, hal ini bertolak belakang dengan jumlah penduduk yang lebih banyak laki-laki. Selanjutnya angkatan kerja di kabupaten balangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.16:

Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015

Jenis Kegiatan Utama	Pendidikan yang Ditamatkan			
	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Senior keatas
Angkatan Kerja	24,36	31,38	12,06	32,20
Bukan Angkatan Kerja	19,35	24,84	35,85	19,96
Jumlah	23,13	29,77	17,92	29,18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,39	79,46	50,74	83,16

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, Tahun 2016

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA ke atas sebesar 32,20%, demikian pula dengan TPAK pada tahun 2015 sebesar 83,16%. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2.6 Pendidikan Kabupaten Balangan

2.6.1 Profil Pendidikan Kabupaten Balangan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pemberdayaan peserta didik baik sebagai subjek maupun objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di daerah itu. Selain itu pendidikan juga sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan menciptakan lapisan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Faktor utama dalam peningkatan pendidikan adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Balangan hingga tahun 2015 antara lain 113 TK, 172 SD, 23 SMP, 11 SMA serta 3 SMK; dengan tenaga guru tercatat sebanyak 316 orang guru TK, 1.602 orang guru SD, 318 orang guru SMP, 307 orang guru SMU serta 72 orang guru SMK (Dinas Pendidikan dan KDA Balangan, 2016). Kemudian jumlah siswa pada masing-masing tingkatan pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa jumlah siswa TK sebanyak 4.560 orang, 12.892 orang siswa SD, 2.960 orang siswa SMP, sedangkan untuk tingkat SMU dan SMK masing-masing memiliki 2.730 orang murid dan 1.027 orang siswa.

Disamping itu terdapat sarana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jumlah sarana pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama di wilayah kabupaten Balangan antara lain 7 Raudatul Athfal/Bustanul Athfal dengan jumlah guru sebanyak 28 orang dan siswa sebanyak 302 orang, 34 Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 325 guru dengan siswa sebanyak 2.328 orang, 17 Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah guru sebanyak 303 guru dengan 2.903 siswa serta 6 Madrasah Aliyah dengan 119 orang guru dan 1.135 siswa.

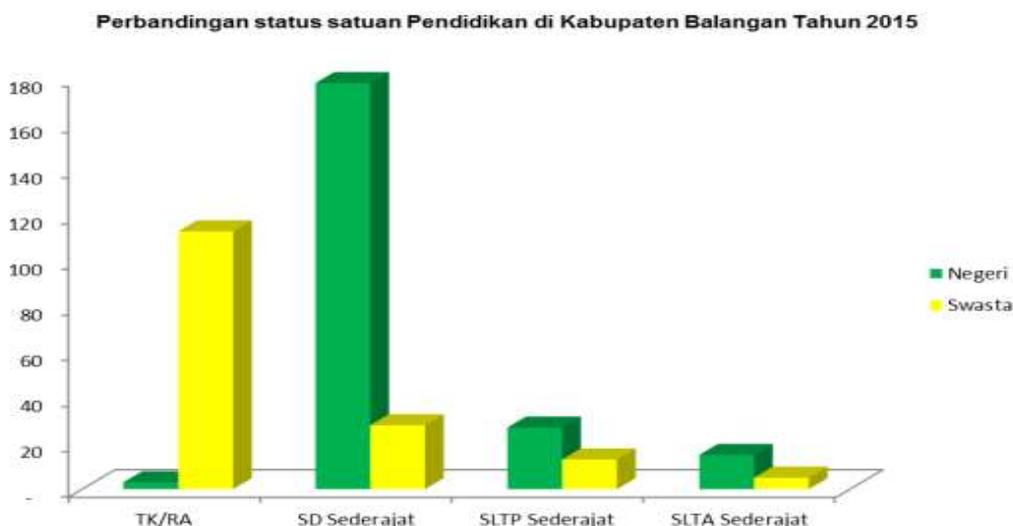
2.6.2 Satuan dan Sebaran Pendidikan

Satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK/RA), Pendidikan Dasar (SD Sederajat & SLTP) dan Pendidikan Menengah (SLTA sederajat). Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Balangan yakni 386 sekolah dengan perbandingan yakni 224 satuan pendidikan atau 58,03% berstatus negeri dan 162 satuan pendidikan atau 41,97% berstatus swasta, hal ini menunjukkan satuan pendidikan di Kabupaten Balangan hampir berimbang antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan yang dikelola masyarakat. Meskipun satuan pendidikan itu terlihat perbedaan yang nyata pada pendidikan TK sederajat dan SD Sederajat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah relatif baik pada pendidikan awal (pendidikan usia dini dan tingkat sekolah dasar), namun demikian proporsi terbesar satuan pendidikan yang dikelola masyarakat baru pada tingkat pendidikan usia dini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.17 dan Gambar 4.6 berikut ini.

Tabel 2.17 Perbandingan Pengelolaan Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Ruang Kelas		Siswa		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	13	224	259	4,602	18	315
	TK	3	110	13	211	259	4,301	18	289
	RA	-	6	-	13	-	301	-	26
2	SD Sederajat	178	28	1,036	4	12,81	74	1,435	7
	SD	171	1	1,036	4	2,817	74	1,435	167
	MI	7	27						
3	SLTP Sederajat	28	13	135	3	2,884	96	305	13
	SMP	23	1	135	3	2,884	96	305	13
	MTs	5	12						
4	SLTA Sederajat	15	5	154	54	3,366	1,526	326	142
	SMA	9	3	81	42	1,540	1,190	179	98
	SMK	2	-	35	-	1,027	-	72	-
	MA	4	2	38	12	799	336	75	44
Satuan Pendidikan		224	162	1,338	285	19,32	6,298	2,08	477
Persentase (%)		58.03	41.97	82.439	17.560	75.421	24.578	81.374	18.625

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Gambar 2.6 Perbandingan Status Satuan Pendidikan di Kabupaten Balangan

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Balangan sebagian besar dikelola masyarakat untuk tingkat pendidikan anak usia dini yaitu sebanyak 113 sekolah (97,41%) dan hanya 2,59% (3 sekolah) yang pengelolaannya oleh pemerintah baik itu dibawah dinas pendidikan ataupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah diatas 67% dikelola pemerintah, untuk tingkat SD sederajat 86,41% dikelola pemerintah baik oleh dinas pendidikan maupun dibawah kementerian agama. Sedangkan untuk sekolah SLTA sederajat 75% pengelolaannya oleh pemerintah dan baru 25% yang dikelola swasta. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengelolaan pendidikan dan ketersediaan sekolah masih bergantung pada pemerintah Kabupaten Balangan sehingga pemerintah memerlukan penganggaran pendidikan dari kas pemerintah daerah yang memadai untuk membiayai sekolah-sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan di dalamnya. Satuan pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Distribusi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan								Kabupaten Balangan
		Lampih ong	Batu Mandi	Awayan	Tebing Tinggi	Paringin	Paringin Selatan	Juai	Halong	
1	TK/RA	20	20	9	5	17	10	22	16	119
1a	TK	19	18	8	5	15	10	22	16	113
	Negeri Swasta	19	1	8	5	1	10	1	16	
	Swasta	19	17	8	5	14	10	21	16	
1b	RA	1	2	1		2				6
	Negeri Swasta	1	2	1		2				
	Swasta	1	2	1		2				
2	SD/MI	31	26	26	12	23	18	34	36	206
2a	SD	26	22	21	12	19	17	24	31	172
	Negeri Swasta	26	22	21	12	19	16	24	31	
	Swasta	26	22	21	12	19	1	24	31	
2b	MI	5	4	5		4	1	10	5	34
	Negeri Swasta	1	3	1		1		1	1	
	Swasta	4	1	4		3	1	10	4	
3	SMP/MTs	3	6	4	3	6	6	6	7	41
3a	SMP	2	4	2	2	4	3	2	5	24
	Negeri Swasta	2	4	2	2	3	3	2	5	
	Swasta	2	4	2	2	1	3	2	5	
3b	MTs	1	2	2	1	2	3	4	2	17
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1		1	1	
	Swasta	1	1	1	1	1	3	4	1	
4	SMA/MA/SMK	2	3	2	1	3	4	2	4	21
4a	SMA	1	1	1	1	1	3	2	2	12
	Negeri Swasta	1	1	1	1	1	2	2	2	
	Swasta	1	1	1	1	1	1	2	2	
4b	MA	1	1	1		1			2	6
	Negeri Swasta	1	1	1		1			1	
	Swasta	1	1	1		1			1	
4c	SMK		1			1	1			3
	Negeri Swasta		1			1	1			
	Swasta		1			1	1			
	Jumlah	5	55	4	2	49	38	6	6	387

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.18, jumlah satuan pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Balangan yaitu 386 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 64 satuan pendidikan dan yang paling terendah terdapat di kecamatan Tebing Tinggi yaitu 21 satuan pendidikan. Namun demikian, meskipun belum merata fasilitas sekolah pada masing-masing

Kecamatan tetapi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Balangan secara keseluruhan sudah memiliki semua jenjang pendidikan dari TK/RA hingga SLTA sederajat. Kemudian satuan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat diklasifikasikan berdasarkan status negeri dan swasta. Distribusi seluruh satuan pendidikan berdasarkan status negeri dan swasta menurut kecamatan di Kabupaten Balangan tersaji pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Satuan Pendidikan Berdasarkan Status Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2015

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan (%)		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Lampihong	32	24	56	57.14	42.86	100
2	Batu Mandi	32	22	54	59.26	40.74	100
3	Awayan	26	15	41	63.41	36.59	100
4	Tebing Tinggi	15	6	21	71.43	28.57	100
5	Paringin	27	22	49	55.10	44.90	100
6	Paringin Selatan	22	16	38	57.89	42.11	100
7	Juai	29	35	64	45.31	54.69	100
8	Halong	41	22	63	65.08	34.92	100
Total		224	162	386	58.03	41.97	100

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Berdasarkan Tabel 2.19, Jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri yaitu 224 satuan pendidikan. Satuan pendidikan berdasarkan berstatus negeri yang paling banyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 41 satuan pendidikan dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 15 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang berstatus swasta yaitu 162 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan berdasarkan status swasta yang paling banyak terdapat di Kecamatan Juai yaitu 35 satuan pendidikan dan kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan satuan pendidikan yang paling sedikit yang dikelola swasta yaitu 6 satuan pendidikan.

Berdasarkan paparan data pada tabel dan grafik di atas selanjutnya dapat dihitung rasio guru dengan murid, rasio murid dengan ruang kelas dan rasio sekolah dengan ruang kelas. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid di Kabupaten Balangan menunjukkan angka yang relatif sangat baik yakni 1:14, angka ini merupakan angka yang sangat ideal sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan mengenai rasio guru yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Uraian mengenai kondisi rasio jumlah guru dengan jumlah murid disajikan pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Rasio Jumlah Guru dengan Siswa di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	14.39	14.61
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	8.93	10.57
	SD	171	1	7	74	1,435	167		
	MI	7	27	12,817					
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,128	441	180	10.74	6.27
	SMP	23	1	2,884	76	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052	136	167		
4	SLTA Sederajat	16	5	3,366	1,526	326	142	10.33	10.75
	SMA	9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMK	3	-	1,027	-	72	-		
	MA	4	2	799	336	75	44		

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Selanjutnya rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas secara umum di Kabupaten Balangan menunjukkan angka rasio yang paling tinggi 1:28, angka ini sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya mengenai rasio jumlah guru dengan siswa yakni 1:32 untuk satu rombongan belajar. Rasio jumlah siswa dengan ruang kelas secara prinsip adalah untuk mengetahui rasio siswa setiap rombongan belajar, sehingga di Kabupaten Balangan secara keseluruhan telah memenuhi syarat jumlah ruang kelas untuk setiap rombongan belajar. Uraian rasio jumlah murid dengan jumlah ruang kelas disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Rasio Jumlah Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Balangan

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	TK/RA	3	116	259	4,602	18	315	19.92	20.54
	TK	3	110	259	4,301	18	289		
	RA	-	6	-	301	-	26		
2	SD Sederajat	178	28	12,81	74	1,435	7	12.37	18.50
	SD	171	1	12,817	74	1,435	167		
	MI	7	27						

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah		Siswa		Guru		Rasio Siswa-kelas	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
3	SLTP Sederajat	28	13	4,735	1,148	305	13	24.41	21.26
	SMP	23	1	2,884	96	305	13		
	MTs	5	12	1,851	1,052				
4	SLTA Sederajat	15	5	3,366	1,526	326	142	21.86	28.26
		9	3	1,540	1,190	179	98		
	SMA	2	-	1,027	-	72	-		
	SMK	4	2	799	336	75	44		
	MA								

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

2.6.3 Capaian Rata-rata Lama dan Harapan Sekolah

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat di suatu daerah maka semakin besar akses dan peluang daerah tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Sektor pendidikan merupakan sektor yang juga menjadi permasalahan utama dalam pembangunan manusia. Kebijakan pemerintah dengan Program Wajib Belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping upaya peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, perlu ada upaya untuk pemerataan pendidikan.

Salah satu target capaian suatu pembangunan manusia adalah menciptakan manusia yang pintar dan berkualitas dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dan urgen bagi pembangunan suatu bangsa.

Tabel 2.22 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/ belum Pernah Sekolah	0.85	3.47	2.16

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/ Bbelum Tamat SD	22.25	31.73	26.99
SD/ Sederajat	34.49	33.37	33.93
SLTP	21.46	16.42	18.94
SLTA	16.38	11.03	13.71
Diploma Keatas	4.57	3.98	4.27
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Pendidikan penduduk Kabupaten Balangan sebagian besarnya masih berpendidikan SD/sederajat ke bawah. Bahkan sekitar 26 persen di antaranya tidak tamat SD/sederajat dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sementara penduduk Kab. Balangan yang melanjutkan hingga pendidikan tinggi hanya pada kisaran 4 persen. Melihat hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Kab. Balangan untuk meningkatkan pendidikan penduduknya. Pemerintah harus memacu pembangunan pendidikan agar tingkat pendidikan penduduk Kab. Balangan terus meningkat. Namun demikian tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendidikan ini. Usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak terlepas dukungan dari semua pihak, terutama orang tua dan masyarakat.

Selain melihat tingkat pendidikan suatu daerah, indikator utama dalam pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan harapan lama sekolah (expected of years schooling), serta angka partisipasi sekolah. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menjadi komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM. Dua indikator ini menjadi ukuran seberapa besar dan seberapa lama partisipasi masyarakat usia sekolah yang bersekolah, serta melihat sejauh mana seseorang memiliki harapan untuk terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada metode baru usia 25 tahun ke atas digunakan dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalani oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah.

Tabel 2.23 Konversi Tahun Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pendidikan

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (th)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	16

Sumber : BPS

Secara relatif dibandingkan dengan angka Kalimantan Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan masih berada di bawah penduduk Kalimantan Selatan. Problema ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Kabupaten Balangan agar ke depannya ada peningkatan rata-rata lama sekolah sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Namun dari sisi pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan sebesar 1,52 persen per tahun, masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan (1,03) dan Indonesia (0,92).

Tabel 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2012-2016

Wilayah	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Balangan	6.21	6.23	6.36	6.46	6.71	1.52
Provinsi Kalsel	7.48	7.59	7.6	7.76	7.89	1.03
Indonesia	7.59	7.61	7.73			0.92

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Indikator lain dalam melihat pembangunan sektor pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (*Expected Years School/EYS*). Angka Harapan Lama Sekolah

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS ini menggantikan AMH dalam penghitungan IPM metode yang lama. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar anak SD yang dimulai dari usia 7 tahun.

Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Balangan, Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2011-2014

Wilayah	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kab. Balangan	10.49	10.63	10.85	11.03
Provinsi Kalsel	11.14	11.54	11.67	11.96
Indonesia	11.44	11.68	12.1	12.39

Sumber: Kajian IPM Kabupaten Balangan 2016

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Balangan pada tahun 2014 adalah 11,03 tahun. Angka rata-rata harapan lama sekolah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Tahun 2011, rata-rata harapan lama sekolah adalah 10,49 tahun dan meningkat menjadi 11,03 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rata-rata harapan penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 11,03 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Balangan mempunyai harapan berpendidikan sampai dengan kelas 2 atau 3 SMA sederajat. Meskipun demikian sebagaimana dengan rata-rata lama sekolah sebelumnya, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Balangan juga masih berada di bawah angka provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga perlu program-program yang dapat mengakselerasi tingkat pendidikan Kabupaten Balangan menjadi lebih tinggi lagi.

Harapan lama sekolah sangat terkait dengan angka partisipasi sekolah.

Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, semakin meningkat pula harapan lama sekolah. Oleh karena itu kita bisa melihat angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Balangan. Dalam hal ini yang digunakan hanya dari angka partisipasi murni (APM) yang sejalan dengan penghitungan harapan lama sekolah. Karena keterkaitan itu, maka harapan lama sekolah dapat ditingkatkan dengan upaya pencegahan seminim mungkin angka putus sekolah.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	APS				
	a. SD Sederajat	104.71%	102,54%	102.69%	96.11%
	b. SLTP	77.70%	91.61%	89.19%	82.51%
	c. SLTA	52.50%	46.67%	50.90%	54.97%
2	APK				
	a. SD Sederajat	116.57%	116.99%	115.04%	106.45%
	b. SLTP	99.78%	90.78%	97.60%	93.32%
	c. SLTA	74.81%	78.33%	81.58%	82.66%
3	APM				
	a. SD Sederajat	97.10%	95.27%	93.42%	87.41%
	b. SLTP	58.81%	64.13%	63.94%	60.60%
	c. SLTA	50.14%	39.69%	43.88%	47.71%

Sumber : Diknas Balangan 2016

APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, APM membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan, sebagaimana yang telah diatur pemerintah mengenai usia sekolah menurut jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD merupakan perbandingan antara

jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD berumur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SLTP merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTP berumur 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SLTA merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SLTA berumur 16-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

APM pada semua jenjang baik SD (7-12), SLTP (13-15) dan SLTA (16-18) menunjukkan tren yang meningkat sejak 2012 hingga 2015. APM di tingkat sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 95,67 persen, Angka ini menunjukkan terdapat 95-96 orang anak usia 7-12 tahun di antara 100 penduduk kelompok usia 7-12 sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Pada jenjang pendidikan lanjutan pertama APM sebesar 77,12 persen, menunjukkan ada sebanyak 77-78 anak usia 13-15 tahun dari 100 orang yang sama usia dengan mereka sedang mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut. Pada jenjang pendidikan lanjutan atas APM Kabupaten semakin menunjukkan penurunan, yakni sebesar 53,57 persen memberi arti hanya sebanyak 53-54 orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang mengikuti pendidikan di bangku SLTA/ sederajat, selebihnya sekitar 46 orang tidak bersekolah.

Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait agar dapat mewujudkan angka partisipasi murni sekolah di balangan khususnya untuk tingkat pendidikan menengah menjadi lebih baik lagi. Terkait dengan angka partisipasi murni sekolah penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2015 yang cenderung menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan (SD 95,67%, SLTP 77,12% dan SLTA 53,57%), perlu dipikirkan bagaimana cara mempertahankan anak yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas agar dapat menamatkan pendidikannya bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.7 Kesehatan Kabupaten Balangan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan

kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan SDM. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

2.7.1 Sarana dan Prasarana

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang mulia ini diperlukan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan secara berkesinambungan dan paripurna meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan yang membutuhkan sarana/fasilitas kesehatan.

Penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tersedianya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan menyangkut penyebaran dan akses atau kejangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan hal ini masih merupakan tantangan bagi negara Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Balangan yang merupakan daerah pemekaran. Menjawab tantangan ini diperlukan perencanaan sehingga penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan bermutu berdaya guna dan

berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan selaku koordinator pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Balangan telah menyusun strategi diantaranya melalui revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang melalui peningkatan akses pada pelayanan kesehatan, terutama dikecamatan-kecamatan selain diibukota kabupaten.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan

- hidup sehat;
2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari: (1) Upaya promosi kesehatan; (2) Upaya kesehatan lingkungan; (3) Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana; (4) Upaya perbaikan gizi; (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) Upaya pengobatan.

Jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Balangan pada tahun 2015 sebanyak 1 unit dan belum terdapat rumah sakit khusus. Jumlah puskesmas di Kabupaten Balangan sampai tahun 2015 sebanyak 58 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 1 unit puskesmas rawat inap dan 11 unit puskesmas non rawat inap, 14 puskesmas keliling dan 22 puskesmas pembantu. Adapun jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan dapat dilihat pada tabel 2.27 dibawah ini:

Tabel 2.27 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/ KOTA	TN/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM			1				1
2	RUMAH SAKIT KHUSUS							-
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP			1				1
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			10				10
2	PUSKESMAS NON RAWAT			11				11
3	PUSKESMAS KELILING			14				14
4	PUSKESMAS PEMBANTU			22				22
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN							-
2	BALAI PENGobatan/KLINIK							-
3	PRAKTIK DOKTER BERSAMA							-
4	PRAKTIK DOKTER						23	23
5	PRAKTIK PENGobatan TRADISIONAL						1	1
6	BANK DARAH RUMAH SAKIT							-
7	UNIT TRANSFUSI DARAH			1				1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI							-
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL							-

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/ KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	USAHA KECIL OBAT							-
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN							-
5	PEDAGANG BESAR FARMASI							-
6	APOTEK						3	3
7	TOKO OBAT						17	17
8	PENYALUR ALAT KESEHATAN							-

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Keterangan

- Praktik dokter perorangan terdiri dari dokter umum dan dokter gigi
- Toko obat terdiri dari toko obat tidak berizin 13 (Tiga Belas) buah dan toko obat berizin 4 (Empat) buah

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain: menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Di Kabupaten Balangan terdapat 84 posyandu pratama, 88 madya dan 4 mandiri sedangkan posyandu aktif sebanyak 139 buah.

Berdasarkan data posyandu aktif terbanyak dikecamatan Paringin sebanyak 29, 25 dikecamatan Juai, 23 di kecamatan Paringin Selatan dan Awayan, 22 dikecamatan Batumandi, 9 dikecamatan Tebing Tinggi, 8 dikecamatan Juai, sedangkan dikecamatan Halong tidak ada posyandu yang aktif. Secara garis jumlah posyandu sudah cukup banyak namun tingkat sebaran tidak merata, contoh dikecamatan Paringin sebanyak 29 posyandu aktif sedangkan dikecamatan Halong tidak ada satupun posyandu aktif. Adapun jumlah posyandu menurut strata, kecamatan dan puskesmas Kabupaten Balangan tahun 2015 dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2.28 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF				
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%		
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Paringin	Paringin	29	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	29	29	100,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	4,2	21	87,5	0	0,0	2	8,3	24	23	95,8		

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF		
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	Lampihong	Lampihong	20	95,2	1	4,8	0	0,0	0	0,0	21	1	4,8
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0,0	6	28,6	1	4,8	0	0,0	7	7	100,0
5	Batumandi	Batu Mandi	0	0,0	0	0,0	15	93,8	1	6,3	16	16	100,0
6	Batumandi	Lok Batu	2	25,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	8	6	75,0
7	Awayan	Awayan	0	0,0	22	95,7	0	0,0	1	4,3	23	23	100,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	4	30,8	8	61,5	1	7,7	0	0,0	13	9	69,2
9	Juai	Juai	0	0,0	17	100,0	0	0,0	0	0,0	17	17	100,0
10	Juai	Pirsus	0	0,0	7	87,5	1	12,5	0	0,0	8	8	100,0
11	Halong	Halong	21	262,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	0	0,0
12	Halong	Uren	7	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			84	43,3	88	45,4	18	9,3	4	2,1	194	139	71,6
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1,4		

Sumber: Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Sebagai perpanjangan tangan pelayanan kesehatan, agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat maka sudah cukup banyak dibangun Puskesmas, untuk terlayannya masyarakat. Pembangunan sarana kesehatan juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi pada beberapa sarana kesehatan yang ada, seperti Pustu dan Polindes.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan perlu digali potensi yang ada pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) dengan penekanan atau fokus pelayanan pada upaya promotif dan preventif. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sangat berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di kabupaten Balangan terdapat 105 poskesdes, 28 polindes dan 14 posbindu. Sebaran poskesdes terbanyak berada kecamatan Awayan yaitu sebanyak 23, sedangkan yang paling sedikit berada dikecamatan Paringin Selatan yaitu sebanyak 2. Sebaran polindes terbanyak dikecamatan Paringin Selatan dan Awayan, sedang dikecamatan lainnya tidak ada. Sedangkan data sebaran jumlah Posbindu terbanyak dikecamatan Batu Mandi sebanyak 6, dikecamatan Awayan ada 4, 2 dikecamatan Lampihong sedangkan dikecamatan lainnya tidak ada.

Tingkat sebaran poskesdes, polindes dan posbindu di kabupaten Balangan belum merata, hal tersebut dapat dilihat pada data jumlah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) menurut kecamatan pada tabel 2.29:

Tabel 2.29 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN	PAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA		
				POSKESDES	POLINDES	POSBINDU
1	2	3	4	5	6	7
1	Paringin	Paringin	16	7	0	-
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	2	14	-
3	Lampihong	Lampihong	20	13	0	2
4	Lampihong	Tanah Habang	7	6	0	-
5	Batumandi	Batu Mandi	12	11	0	2
6	Batumandi	Lok Batu	6	4	0	4
7	Awayan	Awayan	23	23	14	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	8	0	-
9	Juai	Juai	16	12	0	-
10	Juai	Pirsus	5	5	0	-
11	Halong	Halong	17	9	0	-
12	Halong	Uren	7	5	0	2
JUMLAH (KAB/KOTA)			157	105	28	14

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa

siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Desa yang dimaksud di sini dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu). Di kabupaten Balangan terdapat 53 kategori pratama, 52 madya, 2 purnama dan 1 mandiri.

Sebaran desa siaga menurut kecamatan terbanyak berada di kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 27, 22 di kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai 21, 18 di kecamatan Batu Mandi, 12 di kecamatan Tebing Tinggi, 7 di kecamatan Halong, 1 di kecamatan Awayan. Sedangkan di kecamatan Paringin tidak ada. Tingkat sebaran desa siaga di kabupaten Balangan belum merata hal ini terlihat pada jumlah di beberapa kecamatan mencapai 27 (kecamatan Lampihong) sedangkan di kecamatan Awayan hanya 1 desa siaga saja. Adapun jumlah desa siaga menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.30:

Tabel 2.30 Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA				JUMLAH	%
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paringin	Paringin	16	-	0	-	0	-	0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	16	-	21	-	1	22	137,50
3	Lampihong	Lampihong	20	19	1	-	0	20	100
4	Lampihong	Tanah Habang	7	-	6	1	0	7	100
5	Batumandi	Batu Mandi	17	-	11	1	0	12	70,59
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	-	-	0	6	100
7	Awayan	Awayan	6	1	-	-	0	1	16,67
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	23	12	-	-	0	12	52,173913
9	Juai	Juai	16	3	13	-	0	16	100
10	Juai	Pirsus	5	5	-	-	0	5	100

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN SIAGA					JUMLAH	%
				PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI			
11	Halong	Halong		-	0	-	0	-	0	
12	Halong	Uren	17	7	0	-	0	7	41,1764706	
JUMLAH (KAB/KOTA)			149	53	52	2	1	108	72,48	

Sumber : Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, *physician* (dokter fisit), maupun *dentist* (dokter gigi). Di kabupaten Balangan sendiri terdapat 6 orang dokter spesialis, 22 dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Sebaran di RSUD Balangan terdapat 6 orang dokter spesialis, 11 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Sebaran data dokter umum yang ada di kecamatan yang ada di Balangan terbagi atas, 2 orang di kecamatan Paringin Selatan dan Halong. Sedangkan di kecamatan lain ada masing-masing dokter umum, kecuali di kecamatan Tebing Tinggi. Sebaran dokter gigi hanya ada 1 orang di kecamatan Halong, sedangkan kecamatan lain tidak ada. Dengan melihat data sebaran tenaga medis maka dapat digambarkan bahwa di kecamatan Batu Mandi dan Tebing Tinggi belum ada dokter umum yang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2015 terdapat sarana puskesmas sebanyak 11 buah, dimana jumlah penduduk tahun 2015 hasil proyeksi penduduk adalah 123.449 jiwa sehingga secara rata-rata setiap puskesmas dapat melayani 11.223 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah dokter yang terdapat di Kabupaten Balangan sebanyak 32 orang. Maka dapat dikatakan rata-rata 1 orang dokter melayani 3.857 Orang. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini yang mengakibatkan kurangnya pelayanan di bidang kesehatan terhadap masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi himbauan kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan tenaga dokter dalam rekrutmen pegawai di masa yang akan datang. Berikut gambaran jumlah tenaga medis difasilitas kesehatan di kabupaten Balangan:

Tabel 2.31 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Puskesmas Paringin			-	-	-	-	-	-	-										
2	Puskesmas Paringin Selatan			-	1	1	2	1	1	2										
3	Puskesmas Lampihong			-	1	-	1	1	-	1										
4	Puskesmas Tanah Habang			-	-	1	1	-	1	1										
5	Puskesmas Batu Mandi			-	1	-	1	1	-	1										
6	Puskesmas Lok Batu			-	-	-	-	-	-	-										
7	Puskesmas Awayan			-	-	1	1	-	1	1										
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-	-	-	-	-	-	-										
9	Puskesmas Juai			-	-	1	1	-	1	1										
10	Puskesmas Pirsus			-	-	1	1	-	1	1										
11	Puskesmas Halong			-	2	-	2	2	-	2		1	1					1	1	
12	Puskesmas Uren			-	1	-	1	1	-	1										
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		-	-	-	6	5	11	6	5	11	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
1	RSUD Balangan	4	2	6	2	9	11	6	11	17	1		1					1	-	1
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		4	2	6	2	9	11	6	11	17	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN																				
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				-			-	-	-	-										
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-	-	-	-										
JUMLAH (KAB/KOTA)		4	2	6	8	14	22	12	16	28	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				4,9			18			22,7			1,6							1,6

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : -^a termasuk S3

- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga medis yang juga sangat berperan terhadap pelayanan kesehatan adalah perawat. Perawat sendiri terbagi atas bidan, perawat dan perawat gigi. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 176 bidan, 114 perawat dan 15 perawat gigi.

Sebaran Bidan terbanyak sebanyak 25 bidang ada di puskesmas Awayan, sedangkan yang paling sedikit sebanyak 6 orang di puskesmas Tanah Habang dan Pirsus. Sebaran Perawat paling banyak 16 orang di puskesmas Halong sedangkan paling sedikit berada di puskesmas Tanah Habang sebanyak 3 orang. Sedangkan Perawat Gigi terbanyak di puskesmas yang berada di puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Lok Batu dan Awayan sebanyak 2 orang. Sedangkan di puskesmas Tanah Habang, Pirsus dan Uren tidak ada Perawat Gigi. Dengan melihat data sebaran tenaga keperawatan maka dapat digambarkan bahwa untuk bidan dan perawat sudah cukup merata sedangkan untuk perawat gigi masih ada di kecamatan yang hanya memiliki 1 orang perawat gigi sedangkan yang lainnya minimal memiliki 2 orang perawat gigi.

Jumlah bidan tahun 2015 adalah 215 orang dan perawat 246 orang. Secara rata-rata dari seluruh jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 250 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2015. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan, merupakan salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya angka harapan hidup. Hal ini diduga dipicu juga oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih suka menggunakan tenaga kesehatan tradisional atau bahkan mengobati sendiri. Adapun gambaran jumlah tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.32:

Tabel 2.32 Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	BIDAN	PERAWAT ^a			PERAWAT GIGI		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puskesmas Paringin	21	2	9	11	1	1	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	22	3	7	10	0	2	2
3	Puskesmas Lampihong	18	2	7	9	0	2	2
4	Puskesmas Tanah Habang	6	1	2	3	0	0	0
5	Puskesmas Batu Mandi	14	3	10	13	0	2	2
6	Puskesmas Lok Batu	7	2	6	8	1	1	2
7	Puskesmas Awayan	25	3	4	7	0	2	2
8	Puskesmas Tebing Tinggi	13	6	5	11	1	0	1
9	Puskesmas Juai	18	3	3	6	0	1	1
10	Puskesmas Pirsus	6	4	3	7	0	0	0
11	Puskesmas Halong	19	6	10	16	0	1	1
12	Puskesmas Uren	7	5	8	13	0	0	0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		176	40	74	114	3	12	15
1	RSUD Balangan	39	36	78	114	1	2	3
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		39	36	78	114	1	2	3
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				0	0			0
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				0	0			0
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				0	0			0
JUMLAH (KAB/KOTA)		215	76	152	228	4	14	18
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK		350,67			184,69			14,58

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - ^a termasuk perawat anastesi dan perawat spesialis
- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan, serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan

persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 21 tenaga teknis kefarmasian dan 7 orang apoteker. Sebaran dikecamatan Paringin dan Halong terdapat 2 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 orang dipuskesmas Paringin Selatan, Lampihong, Tanah Habang, Batu Mandi, Lok Batu, Juai, Pirsus dan Uren. Sedangkan Awayan dan Uren tidak ada tenaga teknis kefarmasian. Jumlah tenaga kefarmasian tahun 2015 adalah 40 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum memadai di kabupaten Balangan. Adapun gambaran jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.33:

Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIKIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas Paringin	-	2	2			-	-	2	2
2	Puskesmas Paringin Selatan	-	1	1			-	-	1	1
3	Puskesmas Lampihong	-	1	1			-	-	1	1
4	Puskesmas Tanah Habang	-	1	1			-	-	1	1
5	Puskesmas Batu Mandi	-	1	1			-	-	1	1
6	Puskesmas Lok Batu	-	1	1			-	-	1	1
7	Puskesmas Awayan	-	-	-			-	-	-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi	-	-	-			-	-	-	-
9	Puskesmas Juai	-	1	1			-	-	1	1
10	Puskesmas Pirsus	-	1	1			-	-	1	1
11	Puskesmas Halong	1	1	2			-	1	1	2
12	Puskesmas Uren	-	1	1			-	-	1	1
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		1	11	12	-	-	-	1	11	12
1	RSUD Balangan	6	15	21	-	7	7	6	22	28
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		6	15	21	-	7	7	6	22	28
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN				-			-			-
KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT				-			-			-
KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA				-			-			-
JUMLAH (KAB/KOTA)		7	26	33	-	7	7	7	33	40
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				26,7			5,7			32,4

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - a termasuk analis farmasi, asisten apoteker, sarjana farmasi
- data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Ahli Gizi atau dietitian adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika, yaitu studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus untuk mencegah dan mengobati penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dikatakan bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374/MENKES/SK/III/2007, dikatakan bahwa ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit.

Tugas pokok *nutrisionis* adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit manapun di institusi kesehatan lainnya. *Nutrisionis* bersama dengan profesi lainnya saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi sekaligus status gizinya. Sedangkan Kegiatan *Nutrisionis* berkaitan dengan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan hasil laporan kegiatan. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 2 tenaga fisioterapis. Adapun gambaran jumlah tenaga gizi di fasilitas kesehatan di kabupaten Balangan 34 masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.34:

Tabel 2.34 Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TENAGA KETERAPIAN FISIK												TOTAL		
		FISIOTERAPIS			OKUPASI TERAPIS			TERAPIS WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Puskesmas Paringin			-			-			-			-	-	-	-
2	Puskesmas Paringin Selatan			-			-			-			-	-	-	-
3	Puskesmas Lampihong			-			-			-			-	-	-	-
4	Puskesmas Tanah Habang			-			-			-			-	-	-	-
5	Puskesmas Batu Mandi			-			-			-			-	-	-	-
6	Puskesmas Lok Batu			-			-			-			-	-	-	-
7	Puskesmas Aawayan			-			-			-			-	-	-	-
8	Puskesmas Tebing Tinggi			-			-			-			-	-	-	-
9	Puskesmas Juai			-			-			-			-	-	-	-
10	Puskesmas Pirsus			-			-			-			-	-	-	-
11	Puskesmas Halong			-			-			-			-	-	-	-
12	Puskesmas Uren			-			-			-			-	-	-	-
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	RSUD Balangan	1	1	2			-			-			-	1	1	2

NO	UNIT KERJA	TENAGA KETERAPIAN FISIK												TOTAL			
		FISIOTERAPIS			OKUPASI TERAPIS			TERAPIS WICARA			AKUPUNKTUR			L	P	L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
	SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			-			-			-			-	-	-	-	
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			-			-			-			-	-	-	-	
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			-			-			-			-	-	-	-	
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK																1,6

Sumber : Sekretariat Dinkes dan RSUD Balangan

Keterangan : - data terdiri dari PNS dan PTT/Kontrak

Tenaga teknik elektromedik adalah seorang yang berpendidikan dalam bidang teknik elektromedik dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik, berdasarkan rekomendasi atau akreditasi organisasi profesi teknik elektromedik. Pelayanan teknik elektromedik mencakup perencanaan, pelaksanaan, wasdal, dan berperan serta dalam pengadaan/penerimaan, evaluasi dan pendayagunaan alat kesehatan serta bimbingan pengoperasian alat kesehatan.

Alat kesehatan menurut UU.No.23 tentang kesehatan adalah: Instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis. Berdasarkan data dikabupaten Balangan terdapat 5 orang radiografer, 1 orang tenaga elektromedis, 13 analisis kesehatan, 2 refraksonis optisen, 7 orang tenaga rekam medis dan informasi kesehatan. Sebaran tenaga keteknisan medis hanya ada pada analisis kesehatan, dimana terdapat 2 orang dipuskesmas Paringin, sedangkan dipuskesmas lainnya hanya terdapat 1 orang tenaga analisis kesehatan.

2.7.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup adalah jumlah bayi yang meninggal pada usia 1 hari sampai dengan 1 hari sebelum bayi tersebut merayakan ulang tahunnya yang pertama dalam suatu wilayah tertentu selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup (KH) diwilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1000.

AKB merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Ia tidak hanya berguna dalam memberikan informasi tentang bayi, tetapi juga sebagai gambaran penduduk dengan tingkat sosial ekonominya. Selain itu AKB merupakan indikator yang sensitif dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan keefektifan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan perinatal. Berdasarkan data tahun 2015 diketahui angka kematian bayi sebanyak 4 bayi. Angka kematian bayi sangat berkaitan erat dengan jumlah ibu hamil dan ibu yang melahirkan pada saat itu sehingga jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun dalam kurun waktu satu tahun akan mempengaruhi capaian angka kematian bayinya. Dari 2.446 jumlah kelahiran terdapat 4 bayi yang meninggal di Kabupaten Balangan pada tahun 2015. Sebarannya terdapat 2 orang di kecamatan Tebing Tinggi, masing-masing 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Halong. Adapun gambaran jumlah kelahiran dan kematian bayi menurut jenis kelamin, kecamatan dan puskesmas dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut:

Tabel 2.35 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN									IUFD
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paringin	Paringin	227	2	229	175	4	179	402	0	402	4
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	120	0	120	127	1	128	247	1	248	2
3	Lampihong	Lampihong	145	1	146	116	0	116	261	0	261	0
4	Lampihong	Tanah Habang	35	0	35	40	0	40	75	0	75	0
5	Batamandi	Batu Mandi	122	1	123	122	2	124	244	0	244	5
6	Batamandi	Lok Batu	48	0	48	40	0	40	88	0	88	0
7	Awayan	Awayan	122	0	122	124	2	126	246	0	246	4
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	68	2	70	65	2	67	133	2	135	0
9	Juai	Juai	112	1	113	143	1	144	255	0	255	1
10	Juai	Pirsus	43	0	43	34	1	35	77	0	77	2
11	Halong	Halong	155	1	156	154	2	156	309	0	309	2
12	Halong	Uren	60	0	60	45	1	46	105	1	106	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			1.257	8	1.265	1.185	16	1.201	2.442	4	2.446	
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				6,3			13,3			1,6		20

Sumber: Bidang Kesehatan Keluarga

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Sedangkan angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Kematian ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa

sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Angka kematian neonatal di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 11,1. Angka kematian neonatal tertinggi di Kecamatan Paringin dan yang terendah di kecamatan Awayan. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 14,7. Dibandingkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 17/1.000 kelahiran hidup maka AKB di kabupaten Balangan Tengah tahun 2015 sudah melampaui target. AKB tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–5 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. AKABA kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 16,8. Dibandingkan dengan cakupan yang diharapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup, AKABA Kabupaten Balangan tahun 2015 sudah melampaui target. AKABA tertinggi di Kecamatan Lampihong dan yang terendah di kecamatan Awayan.

Tekait kematian neonatal, bayi dan balita dapat dilihat pada tabel 2.36:

Tabel 2.36 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+ PEREMPUAN			
			NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Paringin	Paringin	3	4	0	4	1	1	1	2	4	5	1	6
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	3	5	1	6	2	2	0	2	5	7	1	8
3	Lampihong	Lampihong	2	3	0	3	2	3	0	3	4	6	0	6

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
			NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	^a BAYI	ANAK BALITA	BALITA
4	Lampihong	Tanah Habang	1	2	0	2	0	1	0	1	1	3	0	3
5	Batumandi	BatuMandi	2	2	0	2	1	2	0	2	3	4	0	4
6	Batumandi	Lok Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Awayan	Awayan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	3	3	1	4	1	1	1	2	4	4	2	6
9	Juai	Juai	3	3	0	3	0	0	0	0	3	3	0	3
10	Juai	Pirsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Halong	Halong	2	2	0	2	0	1	0	1	2	3	0	3
12	Halong	Uren	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
JUMLAH (KAB/KOTA)			19	24	2	26	8	12	3	15	27	36	5	41
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			15,1	19,1	1,6	20,7	6,8	10,1	2,5	12,7	11,1	14,7	2,0	16,8

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

2.7.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu dapat menunjukkan indikasi tingkat kesakitan seorang ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil hingga melahirkan. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan (BPS, 2015)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) juga berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Oleh karena itu Sektor kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator angka harapan hidup dapat diukur dengan melihat angka kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu.

AKI adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun di bagi jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada periode yang sama dikalikan 100.000. AKI mencerminkan risiko yang mengancam ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan. Angka ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, gizi, sanitasi dan yang tak kalah

pentingnya adalah pelayanan kesehatan ibu. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu di Kabupaten Balangan ada sebanyak 6 orang. Berdasarkan data terdapat 2 orang dikecamatan Paringin dan Batu Mandi, 1 orang dikecamatan Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun gambaran jumlah kematian ibu dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU																
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU				
				< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	
1	Paringin	Paringin	402	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Lampihong	Lampihong	261	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Lampihong	Tanah Habang	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	244	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2
6	Batumandi	Lok Batu	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Awayan	Awayan	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Juai	Juai	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Juai	Pirusus	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Halong	Halong	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Halong	Uren	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			2.442	0	2	0	2	0	0	1	1	1	2	0	3	1	4	1	6	
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																				246

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

Keterangan: - Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas

- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

2.7.4 Angka Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Berdasarkan data di kabupaten Balangan terdapat 27 jumlah temuan dan semua telah mendapat perawatan. Sebaran kasus gizi buruk berdasarkan kecamatan dengan rincian terdapat 4 orang dikecamatan Halong, 3 orang dikecamatan Juai, 2 orang dikecamatan Batu Mandi dan masing-masing 1 orang dikecamatan Paringin, Paringin Selatan, Lampihong dan Tebing Tinggi. Keseluruhan kasus gizi buruk sudah mendapat perawatan semua. Adapun

gambaran jumlah cakupan kasus gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Balangan bisa dilihat pada tabel 2.38:

Tabel 2.38 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KASUS BALITA GIZI BURUK								
			JUMLAH DITEMUKAN			MENDAPAT PERAWATAN					
			L	P	L+P	L		P		L + P	
			S	%	S	%	S	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Paringin	Paringin	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	1	3	4	1	100,0	3	100,0	4	100,0
3	Lampihong	Lampihong	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
4	Lampihong	Tanah Habang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Batumandi	Batu Mandi	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
6	Batumandi	Lok Batu	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
7	Awayan	Awayan	-	1	1	-	-	1	100,0	1	100,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	1	-	1	1	100,0	-	-	1	100,0
9	Juai	Juai	1	1	2	1	100,0	1	100,0	2	100,0
10	Juai	Pirsus	2	-	2	2	100,0	-	-	2	100,0
11	Halong	Halong	4	7	11	4	100,0	7	100,0	11	100,0
12	Halong	Uren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)			13	14	27	13	100,0	14	100,0	27	100,0

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga)

2.7.5 Sanitasi dan Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka kejadian penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan air bersih adalah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Sarana air minum terdiri atas sumur gali, sumur bor, terminal air, mata air terlindung, penampungan air hujan, dan perpipaan. Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 59,4 persen. Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) terbanyak ada dikecamatan Paringin, sedangkan yang terendah ada dikecamatan Tebing Tinggi.

Persentase Penyelenggara Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang

persyaratan kualitas air minum, setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. Adapun cakupan kualitas air minum di penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2015 sebesar 98,23 persen. Adapun gambaran persentase kualitas air minum dipenyenggaraan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.39:

Tabel 2.39 Persentase Kualitas Air Minum di Penyelenggara Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENYELENGGARA AIR MINUM	JUMLAH SAMPEL DIPERIKSA	MEMENUHI SYARAT (FISIK, BAKTERIOLOGI, DAN KIMIA)	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7,00
1	Paringin	Paringin	24	23	17	73,91
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	13	18	14	77,78
3	Lampihong	Lampihong	1	1	0	0,00
4	Lampihong	Tanah Habang	0	0	0	0
5	Batumandi	Batu Mandi	7	21	15	71,43
6	Batumandi	Lok Batu	452	6	0	0,00
7	Awayan	Awayan	134	134	134	100,00
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	0	0	0	0
9	Juai	Juai	1	1.088	1.088	100,00
10	Juai	Pirsus	2	2	2	100,00
11	Halong	Halong	11	6	6	100,00
12	Halong	Uren	9	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			654	1.299	1.276	98,23

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi yang Layak Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2015 adalah 54,5% Jenis sarana

sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi jamban komunal (100%), Leher Angsa (87,7%), Plengsengan (22,5%) dan Cemplung (91,1%). Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) terbanyak ada dikecamatan Paringin Selatan (86,8%) sedangkan yang terendak ada dikecamatan Tebing Tinggi (5,1%).

Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 5 pilar yaitu: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, (2) Cuci Tangan pakai sabun, (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, (5) Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga. Capaian desa yang melaksanakan STBM pada tahun 2015 adalah sebanyak 39 desa (23,8%). Sebaran desa yang melaksanakan STBM sebanyak 13 desa dikecamatan Lampihong, 12 desa dikecamatan Halong, 9 desa dikecamatan Batu Mandi dan 5 desa dikecamatan Juai. Adapun gambaran desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40 Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
				DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Paringin	Paringin	20	2	10	0	0,0	0	0,0
2	Paringin Selatan	Paringin Selatan	19	14	73,7	4	21,1	0	0,0
3	Lampihong	Lampihong	20	9	45,0	0	0,0	9	45,0
4	Lampihong	Tanah Habang	7	4	57,1	0	0,0	4	57,1
5	Batumandi	Batu Mandi	12	9	75,0	5	41,7	9	75,0
6	Batumandi	Lok Batu	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
7	Awayan	Awayan	23	13	56,5	1	4,3	0	0,0
8	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	12	10	83,3	0	0,0	0	0,0
9	Juai	Juai	16	8	50,0	2	12,5	0	0,0
10	Juai	Pirsus	5	5	100,0	1	20,0	5	100,0
11	Halong	Halong	17	12	70,6	2	11,8	12	70,6
12	Halong	Uren	7	7	100,0	0	0,0	0	0,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			164	99	60,4	15	9,1	39	23,8

Sumber: Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

2.7.6 Persebaran Tenaga Kesehatan

Dikabupaten Balangan ketersediaan dan kondisi persebaran tenaga kesehatan yang belum terpenuhi. Tenaga yang masih kurang antara lain tenaga dokter gigi, dokter, perawat dan bidan. Kekurangan Bidan selama ini diatasi dengan merekrut PTT daerah, selain itu untuk pemenuhan tenaga kesehatan,

khususnya bidan dan perawat sejak tahun 2010 diprogramkan dengan beasiswa putra daerah wilayah setempat, hal ini merupakan salah satu jalan keluar bagi daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat didaerah-daerah yang terpencil. Penyebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Balangan dapat dikatakan masih belum merata. Untuk daerah dalam kota yang dekat dengan pusat pemerintahan, hampir tidak ada ditemui permasalahan persebaran tenaga kesehatan, bahkan kondisi tenaga kesehatannya berlebih namun sebaliknya di luar perkotaan masih kurang. Umumnya sangat sulit sekali untuk memindahkan tenaga kesehatan PNS yang sudah berada di daerah kota ke daerah luar kota/terpencil.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan sarana prasarana daerah- daerah terpencil atau sangat terpencil dalam hal ini transportasi, penerangan, sarana komunikasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dirasa perlu lebih memperhatikan masalah insentif yang seharusnya lebih banyak dibanding dengan petugas lain di daerah perkotaan serta kemudahan dalam pengembangan kualitas diri atau karir.

Sesuai dengan UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah kabupaten/kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan Indeks Kesehatan pada IPM Kabupaten Balangan, dimana sektor sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Balangan. Proses pembangunan sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD serta dokumen RTRW. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah :

1. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Balangan dalam jangka panjang.
2. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap

kawasan.

3. Kawasan beresiko sanitasi.
4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah).

Adapun beberapa permasalahan utama dalam perbaikan sanitasi adalah terdapatnya sebesar 25,70% masyarakat belum mengakses jamban, terutama masyarakat miskin dalam mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu juga belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kondisi geografis wilayah Balangan juga kurang mendukung, sehingga menjadikan rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

Bentuk pengembangan pengelolaan sanitasi dibagi menjadi sistem on site (on site individual (*septic tank*) dan on site komunal-MCK) dan sistem off site (penyediaan instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan limbah tinja).

Dalam rangka pemasyarakatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), adalah sektor pengelolaan sampah. Hal penting dari pengelolaan sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yakni pembatasan dan pengurangan timbulan sampah (*reduce*), adalah pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendaur ulangan sampah (*recycle*). Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Balangan, volume timbulan sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga maupun non rumah tangga juga bertambah. Besarnya jumlah penduduk bisa menjadi potensi karena perannya sebagai pelaku pemilahan dan pengurangan sampah. Dalam hal penanganan sampah, faktor prasarana dan sarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat menentukan. Semakin kontinyu dan besarnya kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, maka semakin bagus juga pengelolaan persampahan. Dalam rangka pengelolaan persampahan baik di permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, peran pemerintah dan

swasta sangat menentukan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, pembinaan, menampung dan memasarkan produk 3R di masyarakat.

Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Balangan terdiri desa dan kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat. Bisa jadi merupakan desa dan kelurahan yang memiliki posisi strategis ekonomi salah satunya dilalui jalan nasional penghubung ke Kalimantan Timur dan desa-desa yang menjadi ibukota kecamatan dengan kegiatan ekonomi relatif homogen. Sedangkan untuk desa yang pertumbuhannya relatif lamban yakni daerah perdesaan untuk pengelolaan sampahnya masih dikelola secara mandiri oleh individu maupun lingkungannya masing-masing.

Rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Balangan terbagi menjadi penanganan secara langsung (direct) maupun sistem penanganan secara tidak langsung. Sistem penanganan langsung berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan sampah. Sedangkan penanganan tidak langsung merupakan bentuk pengurangan sampah melalui sistem 3R. Sistem penanganan langsung dilakukan di kawasan cepat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perkotaan yang dindikasikan dari adanya kawasan komersial, sedangkan penanganan tidak langsung melalui 3R dilakukan di kawasan yang lambat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perdesaan.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Metodologi dan Pendekatan Pelaksanaan

Metodologi merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan tentang isu-isu yang dihadapi. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Kabupaten Balangan. Berikut metode yang akan digunakan untuk penyusunan Review Masterplan Pendidikan Di Kabupaten Balangan:

1. Metode Survey dengan teknik analisa data statistik

Survey kelapangan dengan terhadap Pendidik/kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa, untuk pengambilan angket survey.

2. Observasi, kuisisioner, dan dokumentasi

Observasi, kuisisioner dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data di lapangan berkaitan erat dengan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

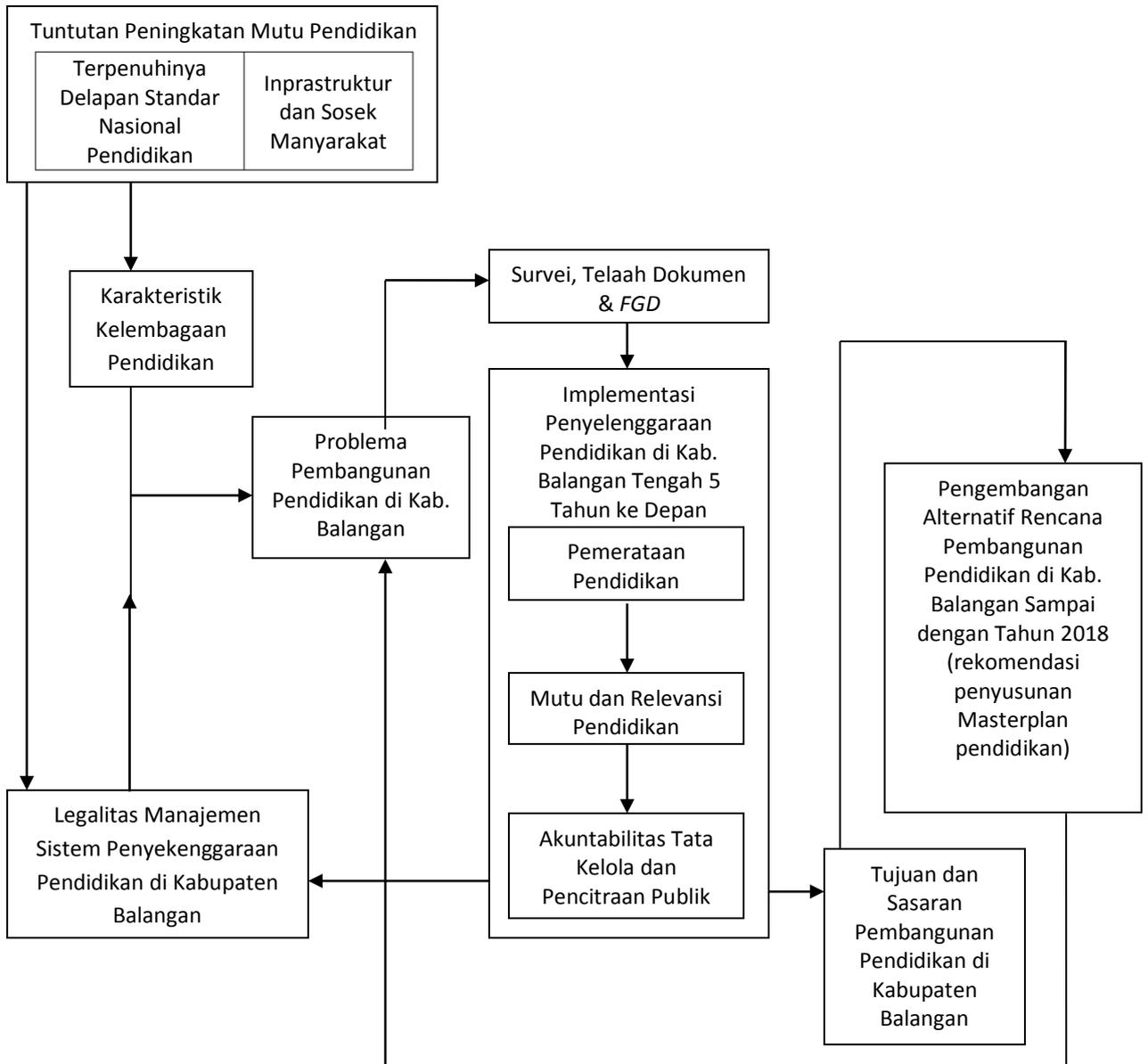
3.2 Analisis Data

Unit analisis untuk kepentingan Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Balangan, meliputi : (1) Unsur Kepala Daerah dan DPRD; (2) Unsur Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3) Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan; (5) Dokumen-dokumen seperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (c) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan; (d) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); (e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (f) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021; (g) Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; (h) RKPD 2013; (i) PerUndang-Undangan pendidikan; (j)

Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015; (k) Kajian tentang potensi sekolah kejuruan di Kabupaten Balangan; (l) Analisis butir soal UAS mata pelajaran PPKn di SMPN Kab. Balangan; (m) Kajian tentang identifikasi dan potensi anak usia sekolah di Kab. Balangan; (n) Kajian potensi pendidikan dan anak untuk pendidikan anak usia dini; (o) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; (p) Kajian potensi sekolah dan siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; (q) Kajian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Balangan tahun 2015.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, diilustrasikan seperti pada Gambar 3. 1 berikut ini.

Gambar 3. 1 Kerangka Analisis Review Masterplan Pendidikan Tahun 2011-2015 Di Kabupaten Balangan



Gambar 3. 2 Skema Review Master Plan Pendidikan Tahun 2011-2015

3.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terbagi kedalam dua ambilan data dilapangan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, FGD (Facus Grup Discussion) dan workshop yang dilakukan secara langsung oleh tim pendamping dengan jajaran pihak Pendidikan di Kabupaten Balangan. Data sekunder merupakan data yang terkumpul melalui penelusuran literature atau referensi dokumen di jajajaran Pendidikan Kabupaten Balangan dan dokumen penunjang dari situs resmi BPS Kabupaten Balangan maupun BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus ambilan data adalah data-data yang berkenaan dengan kondisi kesehatan terbaru saat ini (tahun 2017) maupun kondisi Pendidikan di tahun sebelumnya (2013-2016) yang berhubungan dengan 3 isu strategis pendidikan antara lain: 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru dan Murid. 2) Ketersediaan Guru yang memiliki kompetensi. 3) Ketersediaan sarana prasarana penunjang Pendidikan.

3.4 Instrumen (Kuesioner) Kajian

Istrumen disusun menggunakan teknik kuesinoer berupa butir-butir pernyataan yang dibagikan kepada responden. Dengan disertai rubrik isian responden diarahkan untuk mengisi pernyataan. Instrumen kuestioner di buat dalam tiga objek responden yaitu: Kepala sekolah, pendidik, masyarakat, dan siswa. Dari keempat responden tersebut dapat di ukur berbagai sisi demi kepentingan penelitian lapangan.

Setelah dilakukan penyusunan instrument maka dilanjutkan dengan kajian kualitatif dan kuantitatif yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk analisa data. Deskripsi hasil pembahasan mengungkapkan fakta-fakta sebagai kajian logis yang dicantumkan dalam bentuk catatan hasil temuan.

3.5 Sistematika Penulisan

Sestematika penulisan kajian kebijakan sebagai berikut :

1. Bab 1 terdiri dari Laporan Pendahuluan, latar belakang, Rencana Kegiatan, Jadwal kegiatan dan penelitian lapangan, Metode Penelitian. Demografi dan

sebagainya

2. Bab 2 terdiri dari visi misi pembangunan pendidikan berikut kondisi exciting pendidikan di Kabupaen Balangan
3. Bab 3 terdiri implementasi pembangunan pendidikan
4. Bab 4 terdiri perencanaan 5 tahunan pembangunan pendidikan di lihat dari dua pilar pembangunan yaitu pendidik dan masyarakat.
5. Bab 5 terdiri dari implementasi program pendidikan yang berkelanjutan sehingga pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan dapat berjalan sesuai dengan koridornya.
6. Bab 6 teridri dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan
7. Bab 7 prioritas program pembangunan pendidikan yang mengarah pada Permendagri dan Permendikbud
8. Bab 8 terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi review masterplan pendidikan

3.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Pengambilan data dan pemetaan kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan Existing kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Balangan meliputi:
 - Pendidikan anak usia dini
 - Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/Wajar Dikdas dan
 - Pendidikan non Formal.
3. Analisis data - Survey
4. Analisis Kebijakan dan Manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan.
5. Penyusunan Program dan Kegiatan Jangka Menengah
6. Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan
7. Penyusunan Rancangan Kajian Kebijakan.
8. Rencana Pendidikan.

BAB IV

GAMBARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

4.1 Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah

4.1.1 Visi Pembangunan Pendidikan Daerah

Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan merupakan perpanjangan Visi dari Kabupaten Balangan, yang artinya apa yang menjadi Visi Kabupaten Balangan juga merupakan Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia".

4.1.2 Misi Pembangunan Pendidikan Daerah

Berdasarkan visi dinas pendidikan tersebut maka dicanangkan misi pembangunan pendidikan Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Daerah

4.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan Pendidikan Daerah di Kabupaten Balangan yaitu "Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia".

4.2.2 Sasaran

Adapun sasaran Jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan adalah “meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan”.

Indikator keberhasilan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Harapan Lama Sekolah (tahun)
2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
3. APK PAUD
4. APK TK sederajat
5. APK SD/sederajat
6. APM SD/sederajat
7. APK SMP/sederajat
8. APM SMP/sederajat
9. Angka Kelulusan SD sederajat
10. Angka Kelulusan SMP sederajat
11. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):
 - a. TK/PAUD
 - b. SD
 - c. SMP

4.3 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran rencana strategis tersebut, dipandang perlu untuk mengembangkannya ke dalam sebuah aspek strategis yang tertuang pada program dan kebijakan-kebijakan.

4.3.1 Strategi

Program Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2009 – 2014, terdapat 5 (lima) pilar utama program yang harus dilaksanakan ditambah 1 (satu) program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

mempunyai kapasitas dalam menyusun program operasional, sistem informasi, dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang merata pada semua tingkat dan jenjang pendidikan. Adapun strategi pencapaian tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah
3. Tersedianya Prasarana dan Sarana perumahan & fasilitas umum serta perkantoran.

4.3.2 Kebijakan

Berdasarkan strategi diatas maka perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan teknis sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan disemua bidang sehingga akan terjadi sinkronisasi yang akan menunjang tercapainya sasaran kegiatan, Hal ini juga akan dapat dijadikan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi keberhasilan sebuah program kegiatan. Arah Kebijakan Pendidikan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
2. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
4. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
5. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
7. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar
8. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah
9. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah

10. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin
11. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses.
12. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
13. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil
14. Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan
15. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016 s.d 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas pendidikan	1. APK PAUD (%)	51,20	57,20	60,38	65,87	67,96	67,96
			2. APK TK Sederajat (%)	67,47	67,52	67,67	67,84	68,03	68,23
			4. APK SD/Sederajat (%)	105,96	106,01	106,11	106,24	106,44	106,66
			5. APM SD/Sederajat (%)	87,64	87,79	87,96	88,16	88,41	88,76
			6. APK SMP/Sederajat (%)	92,81	92,97	93,16	93,36	93,59	93,84
			7. APM SMP/Sederajat (%)	62,92	63,07	63,24	63,42	63,58	63,61
			8. Pendidik Kualifikasi S1						
			a. TK/PAUD (%)	42,36	42,46	43	44	45	45,5
			b. SD (%)	70,87	70,92	71,02	71,14	71,29	71,47
			c. SMP (%)	93,35	93,45	93,60	93,76	93,94	94,14
		Peningkatan angka rata-rata lama sekolah	1. Angka Kelulusan SD Sederajat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Angka Kelulusan SMP Sederajat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Harapan Lama Sekolah (Thn)	11,1	11,2	11,25	11,4	11,45	11,50
			4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	6,31	6,32	7	7,5	8	10
		Tersediannya sarana dan prasarana perumahan & fasilitas umum serta perkantoran	1. Pembangunan komplek pendidikan terpadu di Islamic center (Unit)	0	10	30	70	100	100

Sumber : Resntra Diknas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

4.4 Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Balangan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan beberapa ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa *"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara"*.
2. Mahfud Yunus mengemukakan bahwa *"pendidikan merupakan usaha yang disengaja untuk mempengaruhi dan membantu anak untuk meningkatkan ilmu, jasmani, dan akhlak secara bertahap sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat"*.
3. M. J. Langeveld mengemukakan definisi pendidikan yaitu *"proses mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dan terjadi dalam lingkup pergaulan tertentu"*.
4. H. Home menjelaskan yang dimaksud dengan pendidikan adalah *"suatu proses penyesuaian terus menerus yang telah berkembang secara fisik dan mental yang termanifestasikan ke dalam intelektual, emosional dan kemauan manusia"*.
5. John Dewey menyebutkan bahwa pendidikan adalah *"suatu proses pengalaman yang membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia sehingga dapat meningkatkan kecapan di dalam perkembangan seseorang"*.

Dari beberapa penjelasan tentang diefinisi pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu usaha secara sadar untuk mempersiapkan seseorang melalui kegiatan pengajaran, pengalaman, maupun pelatihan sehingga mereka mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, masyarakat sekitar, Bangsa dan Negara.

Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar ini dapat

dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal, proses kegiatan belajar mengajar dapat diperoleh melalui pendidikan di sekolah atau institusi menurut jenjang atau lingkungannya yaitu dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTS. Sedangkan secara informal, proses kegiatan belajar mengajar dapat diperoleh melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat pada umumnya.

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta *stakeholders*, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan APK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Keberhasilan tersebut dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan program dan proyeksi pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang. Namun demikian, keberhasilan berdasarkan peningkatan APK harus terus dikaji dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan proyeksi karena pada dasarnya tinggi rendahnya APK ditentukan juga oleh perkembangan jumlah penduduk.

4.4.1 Kondisi Pendidikan Disetiap Tingkatan Kabupaten Balangan

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel yang meliputi tingkat satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SLB, Pendidikan non formal. Dari berbagai program pendidikan yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Balangan. Indikator keberhasilan pendidikan dapat dicermati melalui Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat yang telah melampaui target nasional (data tahun 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam setiap jenjang pendidikan di bawah ini:

4.4.1.1 Taman Kanak-kanak (TK) Sederajat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki empat lembaga tingkatan dibawahnya diantaranya: TK/RA, KB, TPA, dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). Perkembangan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak usia 4-6 tahun selama tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Perkembangan Pendidikan di Tingkat TK/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 4 - 6 th	7.221	7.319	7.533
2.	Jml siswa PAUD kelompok usia 4-6 th	4.473	4.833	5.037
3.	Jml Siswa PAUD	4.473	4.833	5.037
4.	APM PAUD (%)	N/A	N/A	N/A
5.	APK PAUD (%)	61,94%	66,03%	66,87%
6.	Jumlah lembaga (TK, KB, TPA & SPS)	112	119	128
7.	Jumlah ruang belajar :			
	Baik	140	150	189
	Rusak Sedang	10	12	8
	Rusak Berat	32	34	37
8.	Jumlah ruang penunjang :			
	Perpustakaan	2	2	2
	Mushala	N/A	N/A	N/A
	Tempat bermain	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah Guru	345	339	342
10	Angka Kelulusan	1.747	1.736	2.032

Sumber : Diknas Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari data di atas, secara umum perkembangan TK dan RA (kelompok PAUD) selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan secara kuantitas. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- a. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan.
- b. APM PAUD setiap tahun tidak dapat diketahui dikarenakan jumlah siswa PAUD kelompok usia 4-6th tidak ada.
- c. APK PAUD terjadi perubahan kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,09% (tahun 2015) dan 0,84% (tahun 2016)

- d. Jumlah lembaga PAUD yang ada di tahun 2016 meningkat sebanyak 128 buah.
- e. Jumlah ruang penunjang perpustakaan ada 2 buah sampai tahun 2016.
- f. Jumlah tenaga pendidik/guru di PAUD dilihat dari jumlah guru dibagi jumlah lembaga PAUD di tahun 2016 maka akan ditemukan perbandingan yaitu 2,67 (2-3 orang)
- g. Kondisi ruang belajar pada tahun 2013 : kondisi baik 80,76 %, rusak sedang 3,41%, dan rusak berat 15,81%.
- h. Angka kelulusan siswa pada tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 17,05%.

Tabel 4.3 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat TK/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016	
		TK	RA
1.	LAMPIHONG	21	1
2.	BATUMANDI	19	2
3.	AWAYAN	8	1
4.	TEBING TINGGI	7	0
5.	PARINGIN	14	2
6.	PARINGIN SELATAN	12	0
7.	JUAI	21	0
8.	HALONG	16	1
JUMLAH		118	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.4 Jumlah Guru TK/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016
		Jumlah
1.	LAMPIHONG	60
2.	BATUMANDI	55
3.	AWAYAN	23
4.	TEBING TINGGI	16
5.	PARINGIN	55
6.	PARINGIN SELATAN	35
7.	JUAI	57
8.	HALONG	41
Jumlah		342

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.5 Kondisi Ruang Kelas Tingkat TK/Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016			
		B	RR	RB	Jumlah
1.	LAMPIHONG	25	0	5	30
2.	BATUMANDI	27	3	4	34
3.	AWAYAN	14	0	3	17
4.	TEBING TINGGI	7	0	4	11
5.	PARINGIN	41	0	0	41
6.	PARINGIN SELATAN	17	0	5	22
7.	JUAI	38	3	6	47
8.	HALONG	20	2	10	32
Jumlah		189	8	37	234

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat data di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan perlu mengupayakan peningkatan jumlah APK dan APM, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penambahan jumlah ruangan belajar dan perbaikan ruang yang rusak parah, penambahan jumlah ruangan penunjang terutama tempat bermain yang saat ini belum tersedia, pembukaan atau pendirian lembaga PAUD.

Pada tingkat pendidikan TK dan RA masih banyak yang perlu untuk di perbaiki terutama pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK)/RA/Paud. Pembangunan ruang pendukung perlu di tambah sebab Pendidikan di tingkat TK/RA/Paud sebagai proses pendidikan dasar dalam menciptakan SDM sebelum masuk kedalam pendidikan jenjang SD (Sekolah Dasar). Untuk lebih jelasnya berkaitan tentang ruang pendukung dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Ruang Pendukung Tingkat TK/RA Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Tempat Bermain
1.	LAMPIHONG	0	0	0
2.	BATUMANDI	0	1	0
3.	AWAYAN	0	0	0
4.	TEBING TINGGI	0	0	0
5.	PARINGIN	0	0	0
6.	PARINGIN SELATAN	0	0	0

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Tempat Barmain
7.	JUAI	0	1	0
8.	HALONG	0	0	0
Jumlah		0	2	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat pada tabel diatas bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Balangan terkait dengan ruang pendukung tingkat TK/RA/Paud ternyata didapatkan data bahwa hampir semua kecamatan 98 % belum memiliki ruang pendukung, yang ada hanya Kecamatan Batu Mandi untuk RA itu pun hanya memiliki 1 ruang perpustakaan dan kecamatan Juai untuk TK, untuk ruang bermain ternyata data tidak ada. Jelas sekali apabila dilihat dari data diatas perlu dukungan pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan bantuan sarana infrastruktur bagi setiap TK/RA/Paud sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Terkait dengan kondisi diatas ada beberapa masalah pada jenjang TK/RA/PAUD diantaranya adalah:

1. Masih minimnya pembentukan lembaga padahal setiap tahun penduduk usia dini terus bertambah.
2. Masih kurangnya guru pengajar di tingkat PAUD, baik yang bersertifikasi maupun tidak.
3. Sangat minimnya fasilitas pendukung pendidikan seperti tempat bermain, perpustakaan dan mushala padahal sangat diperlukan untuk membantu aktivitas belajar.
4. Adanya ruang belajar yang rusak ringan sekitar 3,42% dan rusak berat sekitar 15,81% pada tahun 2016.

Dari data diatas bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada jenjang pendidikan TK/RA/PAUD tidak hanya terkait pada infrastruktur sarana pendidikan akan tetapi juga menyangkut pada SDM pengajar di Tingkat TK/RA/PAUD. Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan untuk mendata TK/RA/PAUD mana saja yang perlu di bantu baik peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun peningkatan kualitas SDM guru PAUD/TK/RA.

4.4.1.2 Tingkat SD/Sederajat

Perkembangan pendidikan di tingkat SD/Sederajat tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Perkembangan Pendidikan di Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 7-12 th	13.905	13.952	14.176
2.	Jml siswa SD/MI/SDLB kelompok usia 7-12 th	13.271	13.059	12.420
3.	Jml Siswa SD/MI/SDLB	16.071	15.763	14.811
4.	APM SD/MI/SDLB (%)	95,27%	93,42%	87,41%
5.	APK SD/MI/SDLB (%)	116,99%	115,04%	106,45
6.	Jumlah lembaga SD/MI/SDLB	214	217	208
7.	Jumlah Guru	1.857	1.859	1.793
8.	Angka Kelulusan	2.317	2.390	2.338
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	803	804	763
	b. Rusak Sedang	333	348	349
	c. Rusak berat	140	144	134
10.	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	130	137	143
	b. Mushala	33	49	44
	c. Halaman Sekolah	95	86	80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Secara kuantitas berdasarkan data di atas, perkembangan pendidikan di tingkat SD/ sederajat selama tahun 2014-2017 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- a. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SD/ sederajat kelompok usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SD/ sederajat (APM) tiap tahun mengalami penurunan yang signifikan dari 2014 sebanyak 95,27% turun sebesar 1,85% di tahun 2015 menjadi 93,42%, dan kembali turun kembali sebanyak 87,41% (6,01%) di tahun 2016.
- c. Jumlah siswa SD/ sederajat tahun 2014 (APK) sebanyak 116,99%, turun menjadi 115,04% di tahun 2015, dan tahun 2016 turun kembali sebanyak 8,59% menjadi 106,45%.
- d. Jumlah lembaga SD/ sederajat tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebanyak 3

buah dan mengalami penurunan jumlah sebanyak 9 menjadi 208 buah lembaga di tahun 2016.

- e. Jumlah guru perlembaga/sekolah tahun 2014 sebanyak 8,65 (9 orang guru), tahun 2015 sebanyak 8,47 guru (8 orang guru), tahun 2016 sebanyak 8,26 (8 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SD/MI/SDLB masing-masing sebanyak 8 orang guru.
- f. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar setiap tahun adalah : Tahun 2016 baik 61,23%, rusak sedang 28,00%, rusak berat 10,75%.
- g. Jumlah ruang penunjang perpustakaan sebanyak 143 buah dan mushala sebanyak 44 buah dan lapangan sebanyak 80 buah di tahun 2016.

Tabel 4.8 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1.	LAMPIHONG	26	0	1	4	31
2.	BATUMANDI	22	0	3	1	26
3.	AWAYAN	21	0	1	4	26
4.	TEBING TINGGI	12	0	0	0	12
5.	PARINGIN	19	0	1	3	22
6.	PARINGIN SELATAN	16	1	0	1	18
7.	JUAI	22	0	0	10	32
8.	HALONG	35	0	1	4	40
JUMLAH		173	1	7	27	208

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.9 Jumlah Guru SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
1.	LAMPIHONG	171	60	10	38	279
2.	BATUMANDI	167	18	25	34	244
3.	AWAYAN	121	46	9	41	217
4.	TEBING TINGGI	59	33	0	0	92
5.	PARINGIN	128	33	18	36	215
6.	PARINGIN SELATAN	116	42	0	10	168

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SD		MI		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
7.	JUAI	137	43	97	98	375
8.	HALONG	167	87	5	34	293
Jumlah		1.066	362	68	290	1.883

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.10 Kondisi Ruang Kelas Tingkat SD/Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016						Total
		SD			MI			
		B	RR	RB	B	RR	RB	
1.	LAMPIHONG	99	39	15	18	7	6	184
2.	BATUMANDI	79	47	14	24	1	0	165
3.	AWAYAN	68	36	12	17	7	8	148
4.	TEBING TINGGI	39	24	12	0	0	0	75
5.	PARINGIN	86	32	6	26	4	0	154
6.	PARINGIN SELATAN	79	21	12	4	2	0	118
7.	JUAI	86	44	5	30	19	11	195
8.	HALONG	96	60	23	12	6	10	207
Jumlah		632	303	99	131	46	35	1.246

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat dari data di atas, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan masih perlu berusaha mengatasi kekurangan yang ada terutama dalam jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak ringan maupun berat, jumlah ruangan penunjang terutama mushola yang saat ini belum maksimal terpenuhi, pembukaan atau pendirian lembaga SD//sederajat sehingga APM dan APK tetap meningkat hingga tahun 2021.

Masalah pendidikan di jenjang SD/sederajat selain dari kondisi ruang belajar, juga terkait pada ruang pendukung yang belum semuanya tersedia. Ruang pendukung sangat diperlukan selain dari ruang belajar, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Apabila dilihat dari data bahwa ruang pendukung di jenjang pendidikan SD/MI/SDLB dapat dilihat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11 Ruang Pendukung Tingkat SD/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016		
		Mushola	Perpustakaan	Halaman Sekolah
1	LAMPIHONG	7	23	11
2	BATUMANDI	13	24	14
3	AWAYAN	3	15	5
4	TEBING TINGGI	6	18	8
5	PARINGIN	5	25	17
6	PARINGIN SELATAN	4	17	16
7	JUAI	2	6	2
8	HALONG	4	15	7
JUMLAH		44	143	80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Apabila dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan masalah pendidikan di jenjang SD/sederajat tidak hanya terkait kurangnya ruang belajar saja akan tetapi ada beberapa kecamatan yang belum dilengkapi ruang pendukung atau keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) dari Permendikbu no 23 Tahun 2013 diantaranya adalah:

- 1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/sederajat I tidak melebihi 32 orang Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
- 2) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/sederajat dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
- 3) Di setiap SD/sederajat tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
- 4) Di setiap SD/sederajat tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
- 5) Di setiap SD/sederajat tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

- 6) Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/ sederajat berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
- 7) Setiap SD/ sederajat menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
- 8) Setiap SD/ sederajat menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
- 9) Setiap SD/ sederajat memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/ sederajat memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

Dari data diatas masih ada beberapa hal masalah terkait pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya ruang belajar untuk siswa, dimana rata-rata setiap sekolah kelebihan peserta didik sekitar 2-3 orang/rombel.
2. Masih kurang nya guru pengajar tingkat SD/ sederajat baik yang bersertifikat maupun tidak.
3. Rata-rata setiap lembaga memiliki 1 guru untuk 2 rombel.
4. Adanya ruang belajar masih rusak ringan 28,01% dan rusak berat skitar 10,75%.
5. Ruang penunjang pembelajaran seperti perpustakaan masih kurang sekitar 31,25% dari jumlah lembaga yang ada sedangkan mushala masih kurang sekitar 78,84% dari total lembaga yang tersedia dan untuk lapangan olahraga sebesar 61,53% dari total lembaga yang tersedia di Kab. Balangan.
6. Rasio perbandingan guru dan murid sangat besar yaitu 1 (guru) : 8,2 (murid).

masalah-masalah pendidikan di tingkat pelayanan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB dapat dilihat bahwa tidak hanya terkait sarana prasarana pendidikan saja akan tetapi juga terkait peningkatan SDM pendidik.

4.4.1.3 Tingkat SMP/ Sederajat

Kondisi Pendidikan pada SMP/ sederajat pada tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12 Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 13-15 th	6.573	6.575	6.678
2.	Jml siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT kelompok usia 13-15 th	4.215	4.204	4.047
3.	Jml Siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT	5.667	5.928	5.743
4.	APM SMP/MTs/SMPLB/SMPT (%)	64.13%	63.94%	60.60%
5.	APK SMP/MTs/SMLB/SMPT (%)	90.78%	97.60%	93.32%
6.	Jumlah lembaga	38	40	42
7.	Jumlah Guru	580	618	631
8.	Angka Kelulusan	1.484	1.612	1.667
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	178	180	201
	b. Rusak Sedang	45	48	75
	c. Rusak berat	14	15	41
10.	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	26	26	26
	b. Mushala	17	17	17
	c. Halaman Sekolah	19	19	19
	d. Laboratorium	22	22	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari data di atas untuk kondisi secara umum perkembangan pendidikan di tingkat SMP/ sederajat selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan dari ke sembilan indikator yang di data mengalami kenaikan, secara kuantitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

- a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SMP/ sederajat kelompok usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SMP/MTs/SMPLB/SMPT tahun 2014 sebanyak 64,13%, tahun 2015 sebanyak 63,94%, tahun 2016 sebanyak 60,60%.
- c. Jumlah siswa SMP/ sederajat tahun 2014 (APK) sebanyak 90,78%, tahun 2015 sebanyak 97,60%, dan tahun 2016 sebanyak 93,32%.
- d. Jumlah lembaga SMP/ sederajat tahun 2014-2016 terjadi peningkatan sebanyak 4 buah.
- e. Jumlah guru perlembaga/ sekolah tahun 2014 sebanyak 15,26 (15 orang guru), tahun 2015 sebanyak 15,45 guru (15-16 orang guru), tahun 2016 sebanyak

15,02 (15 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SMP/ sederajat masing-masing sebanyak 15 orang guru/ lembaga.

- f. Angka kelulusan siswa pada tahun 2015 meningkat sebesar 8,62% dan pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar 3,41%.
- g. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar di data : tahun 2016 baik 623,40%, rusak sedang 23,65%, dan rusak berat 12,93%.
- h. Jumlah ruang penunjang perpustakaan terpenuhi tahun 2016 sebanyak 26 buah, mushala sebanyak 17 buah, dan laboratorium ipa sebanyak 21 buah serta halaman sekolah sebanyak 19 buah.

Tabel 4.13 Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SMP Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1.	LAMPIHONG	2	0	1	0	3
2.	BATUMANDI	4	0	1	1	6
3.	AWAYAN	2	0	1	1	4
4.	TEBING TINGGI	2	0	1	1	4
5.	PARINGIN	2	1	1	1	5
6.	PARINGIN SELATAN	3	0	0	3	6
7.	JUAI	2	0	0	5	7
8.	HALONG	6	0	1	1	8
JUMLAH		23	1	6	13	43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.14 Jumlah Guru SMP Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
1.	LAMPIHONG	19	7	11	17	54
2.	BATUMANDI	49	9	7	31	96
3.	AWAYAN	14	5	12	33	64
4.	TEBING TINGGI	16	6	0	17	39
5.	PARINGIN	19	21	16	36	92
6.	PARINGIN SELATAN	44	14	0	43	101
7.	JUAI	20	4	0	47	71

No.	Kecamatan	Tahun 2016				Total
		SMP		MTs		
		PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	
8.	HALONG	41	28	6	39	114
Jumlah		222	94	52	263	631

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Tabel 4.15 Kondisi Ruang Kelas Tingkat SMP/Sederajat Kecamatan Balangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2016						Total
		SMP			MTs			
		B	RR	RB	B	RR	RB	
1.	LAMPIHONG	5	6	3	10	5	0	29
2.	BATUMANDI	19	0	3	7	4	1	34
3.	AWAYAN	9	1	0	13	6	0	29
4.	TEBING TINGGI	12	0	0	3	0	1	16
5.	PARINGIN	12	0	3	15	7	0	37
6.	PARINGIN SELATAN	28	0	0	5	0	0	33
7.	JUAI	11	2	0	9	5	3	30
8.	HALONG	22	5	0	8	2	1	38
Jumlah		118	14	9	70	29	6	246

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Jika dilihat analisa data di atas maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada terutama dalam peningkatan jumlah APM dan APK, guru, jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak parah dan ringan, jumlah ruangan penunjang terutama mushola dan perpustakaan yang saat ini belum semua sekolah memiliki, pembukaan atau pendirian lembaga SMP/MTs/SMPLB/SMPT sehingga dapat meningkatkan pada jumlah APM dan APK sampai 100 %, selama tahun 2015-2021. Pada tingkatan SMP/Sederajat di kabupaten Balangan juga memiliki tingkatan masalah pendidikan terutama ruang pendukung pendidikan diantaranya`musholla, perpustakaan, halaman sekolah dan laboratorium IPA. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel 4.16 :

Tabel 4.16 Ruang Pendukung Tingkat SMP/Sederajat Di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Tahun 2016			
		Mushola	Perpustakaan	Halaman Sekolah	Laboratorium IPA
1.	LAMPIHONG	2	2	2	2
2.	BATUMANDI	3	4	3	4
3.	AWAYAN	1	3	2	1
4.	TEBING TINGGI	0	1	1	1
5.	PARINGIN	5	3	1	4
6.	PARINGIN SELATAN	1	5	3	4
7.	JUAI	2	3	3	1
8.	HALONG	3	5	4	4
JUMLAH		17	26	19	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

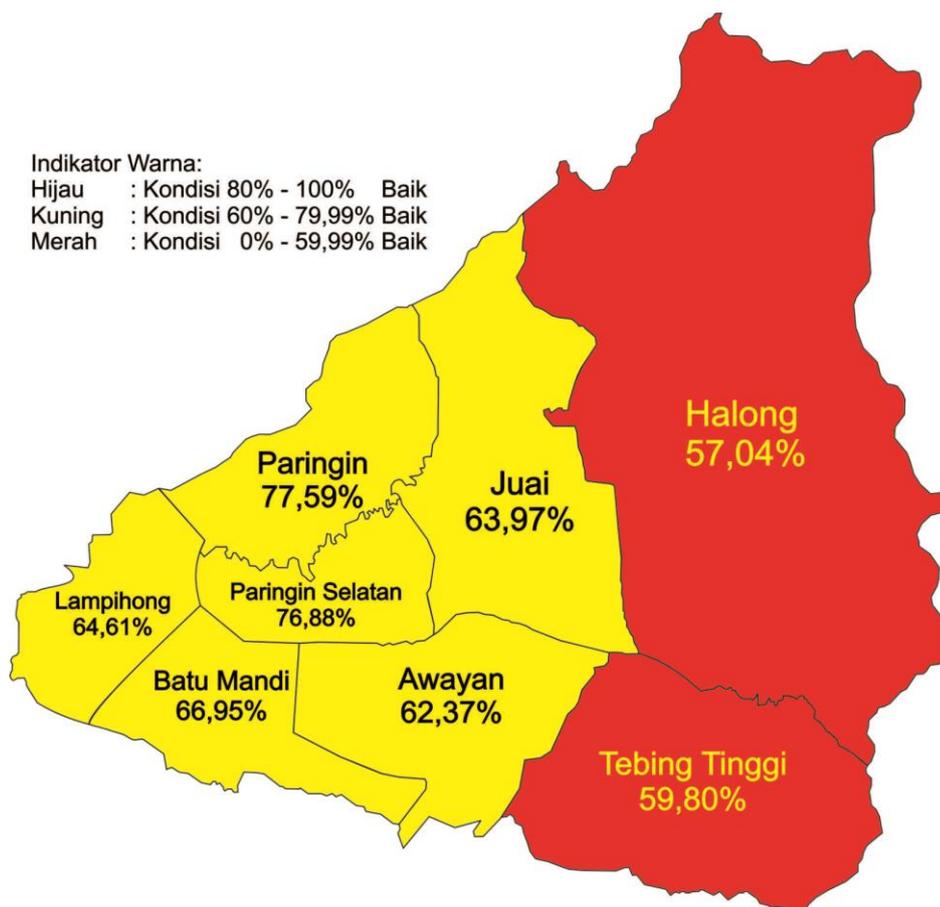
Dari data tabel 4.16 diatas bahwa jenjang pendidikan SMP/Sederajat masih terdapat kekurangan ruangan penunjang. Apabila dilihat dari data diatas bahwa tidak semua kecamatan memiliki ruang penunjang mushola sebagai salah satu syarat mencetak karakter peserta didik yang berakhlak dan berimtaq. Kecamatan Tebing Tinggi belum mempunyai mushola. Hal ini merupakan permasalahan pendidikan yang harus segera ditindaklanjuti agar proses pelayanan dan belajar mengajar tidak mengganggu kualitas peserta didik. Selain dari ruang pendukung diatas ada beberapa issue (masalah) di jenjang SMP/ sederajat antara lain:

1. Dalam setiap rombel masih melebihi kapasitas SPM, sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah rombel di setiap lembaga.
2. Minimnya jumlah guru yang mengajar di setiap lembaga hanya ada 5-6 guru, padahal diperlukan sekitar 10 guru/lembaga.
3. Masih kurangnya ruangan penunjang pembelajaran dimana sekitar 74,35% untuk Laboratorium, 76,92% untuk mushala, dan 51,28% perpustakaan yang harus di bangun untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
4. Masih kurangnya ruang belajar siswa.
5. Masih kurangnya guru pengajar di setiap satuan pendidikan.

Ruang belajar di sekolah merupakan masalah pendidikan di Kabupaten Balangan hal ini dapat dilihat dari gambaran kondisi ruang kelas di tiap kecamatan. Menurut Permendikbud no 15 tahun 2010 di setiap jenjang pendidikan memiliki

Standar Pelayanan Minimal dimana untuk SD/MI yaitu 1 ruang belajar ditempati 32 siswa dan tingkatan SMP/MTs. Untuk melihat kondisi ruang kelas di setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan table 4.17 berikut:

4.1 Peta Kondisi Ruang Belajar Kabupaten Balangan



Tabel 4.17 Kondisi Ruang Belajar Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik (%)	R. Ringan (%)	R. Berat (%)
1	Lampihong	157	57	29	243	64.61	23.46	11.93
2	Batu Mandi	156	55	22	233	66.95	23.61	9.44
3	Awayan	121	50	23	194	62.37	25.77	11.86
4	Paringin	180	43	9	232	77.59	18.53	3.88
5	Juai	174	73	25	272	63.97	26.84	9.19

No	Kecamatan	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik (%)	R. Ringan (%)	R. Berat (%)
6	Halong	158	75	44	277	57.04	27.08	15.88
7	Tebing Tinggi	61	24	17	102	59.80	23.53	16.67
8	Paringin Selatan	133	23	17	173	76.88	13.29	9.83
Jumlah		1140	400	186	1726			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari gambar peta 4.1 dan table 4.17 diatas didapatkan kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dimana terdapat dua kecamatan yang memiliki indikator berwarna merah yaitu Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Dimana kedua lokasi ini memiliki tingkat ruang belajar yang rusak ringan sebesar 27,08% dan 23,53% dan rusak berat sebesar 15,88% dan 16,67%. Sedangkan untuk 6 kecamatan lainnya beridikator warna kuning yaitu dimana kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat pendidikan banyak ruang yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat dan perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah

4.4.2 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar lembaga sekolah. Pendidikan Non Formal ini setara dengan pendidikan formal. Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan:

4.4.2.1 Pendidikan Kesetaraan meliputi ; Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;

Pada jalur pendidikan non formal, jumlah warga belajar Keaksaraan Fungsional (KF)/Buta Aksara sebanyak 1.715 orang dengan Kelompok belajar 137 kelompok dan semua warga belajar telah melek aksara. Jumlah warga belajar Paket A setara SD sebanyak 262 orang dengan Kelompok belajar 32 kelompok dan siswa yang telah lulus 137 orang. Jumlah warga belajar Paket B setara SMP sebanyak 547 orang dengan Kelompok belajar 126 kelompok dan siswa yang telah lulus 128 orang Data pokok Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.18 Pokok Pendidikan Non Formal

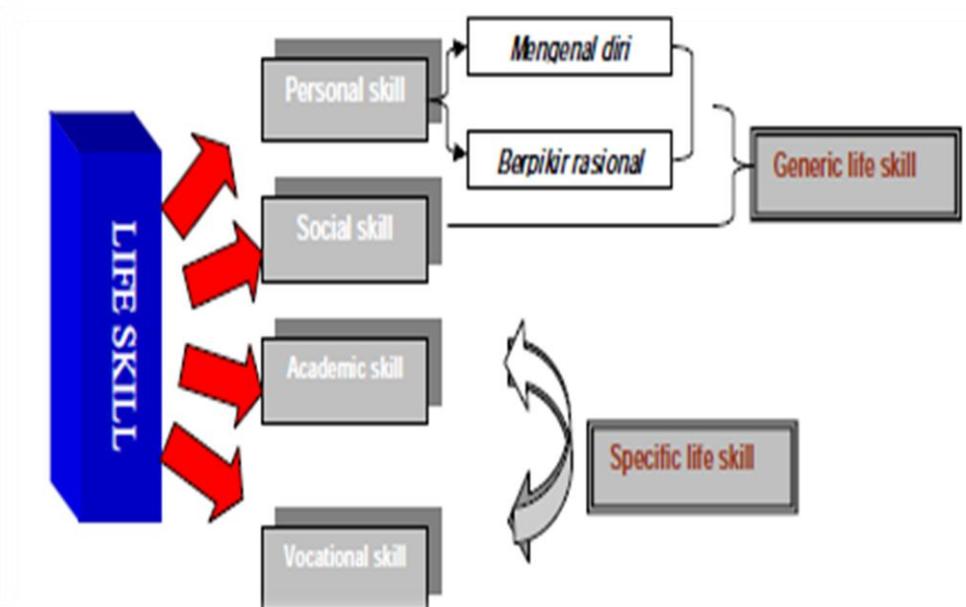
No	Komponen	KF	Paket A	Paket B
1.	Warga Belajar	1.715	262	547
2.	Kelompok Belajar	117	32	126
3.	Lulusan	1.715	137	128

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016

4.4.2.2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri. Azas pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada 'life skills' adalah manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) dan manajemen berbasis masyarakat (*Community Based Management*). Dana bantuan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan untuk hidup akan diberikan melalui prosedur '*block grant*' yang akuntabilitas keuangannya dilakukan dengan sistem akuntansi publik. Lembaga pendidikan yang tidak menjadi 'pilot project' untuk sementara melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut

Gambar 4.2
Ilustrasi Kecakapan Hidup



Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (*Life Skills*) hendaknya memuat upaya untuk mengembangkan kemampuan minimal sebagai berikut:

- Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan sebagainya.)
- Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses melalui pembelajaran berfikir ilmiah, eksploratif, 'discovery' dan 'inventory'.
- Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk mendukung kedua kemampuan tersebut di atas.
- Kemampuan memanfaatkan teknologi dalam aneka ragam lapangan kehidupan seperti teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, transportasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan, olah raga, jasa, dsb.
- Kemampuan mengolah sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan untuk dapat hidup mandiri.
- Kemampuan bekerja dalam tim yang merupakan tuntutan ekonomi saat ini baik dalam sektor informal maupun formal.

- g. Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius berbasis Perda Pendidikan Al-Quran sebagai muatan lokal dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

4.4.2.3 Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang akan disusun menuju SDM Unggul dan Berkarakter tahun 2020 untuk pembinaan PKBM diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi penerapan perda no.3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dan menghubungkan pada potensi daerah.
- b. Revitalisasi program PKBM sehingga berdaya guna bagi masyarakat dan daerah.
- c. Implementasi program PKBM berbasis ICT dalam menyusun data potensi daerah.
- d. Perluasan akses masyarakat dalam menerima program PKBM di daerah.
- e. Bantuan pendanaan untuk program pembinaan PKBM di daerah.
- f. Evaluasi dan monitoring program pembinaan PKBM di daerah.

4.4.2.4 Pembinaan kursus dan pelatihan

Pembinaan kursus dan pelatihan di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan lebih dikhususkan dan difokuskan pada badan diklat. Dimana dalam hal ini proses pembinaan kursus diharapkan dapat menyelenggarakan kursus kependidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan. Program yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Implementasi program pembinaan lembaga kursus pendidikan
- b. Revitalisasi proram pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.
- c. Evaluasi dan monitoring lembaga kursus dan pelatihan berbasis ICT.

- d. Bimbingan teknis di lembaga kursus dan pelatihan non formal.
- e. Bantuan pembiayaan bagi lembaga kursus dan pelatihan

4.4.2.5 Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Program peningkatan budaya baca masyarakat dilaksanakan selain untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan warga masyarakat yang telah terbebas dari buta aksara juga untuk mencegah terjadinya fenomena kembalinya mereka yang telah melek aksara menjadi buta aksara lagi. Program peningkatan budaya baca masyarakat ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perencanaan yang disusun dalam grand design pendidikan sampai tahun 2025 sehingga diharapkan dapat mendorong pendidikan menuju SDM unggul dan berkarakter agamis. Diantaranya Program yang diusulkan:

- a. Sosialisasi gemar membaca bagi pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat.
- b. Penambahan/pengadaan bahan bacaan baik media buku, e-book, e-learning, di setiap perpustakaan di sekolah maupun taman bacaan masyarakat.
- c. Pembuatan/pengadaan perpustakaan masyarakat sebagai tempat belajar masyarakat baik dilingkungan keramaian maupun dilingkungan pedesaan, kecamatan, kabupaten.
- d. Revitalisasi jam belajar masyarakat di lingkungan desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- e. Pengadaan mobile-internet demi mendukung ICT untuk perpustakaan digital.
- f. Bantuan pendanaan bagi pengembangan perpustakaan di daerah berbasis ICT.

4.5 Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru dan siswa diindikasikan untuk mengetahui apakah jumlah guru yang tersedia sudah mencukupi untuk melayani proses pembelajaran siswa di jenjang sekolah tertentu. Dengan melihat perbandingan ini akan terlihat kebutuhan guru yang ideal dalam upaya mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Secara umum rasio jumlah guru dan siswa di kabupaten Balangan seperti terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.19 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah guru	1.857	1.859	1.793
1.2	jumlah siswa SD/MI	16.071	15.763	14.811
1.3	Rasio	1 : 9	1 : 8	1 : 8
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah guru	580	618	631
2.2	jumlah siswa SMP/MTs	5.667	5.928	5.743
2.3	Rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 9

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2017

Dari tabel 2.19 diatas mengenai rasio jumlah guru dan murid dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah siswa yang memasuki bangku sekolah tingkat SD mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 1,92%, dan pada tahun 2016 terjadi lagi penurunan yang signifikan sebanyak 6,03%. Untuk jumlah guru SD tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,10% dan 2016 mengalami penurunan sebesar 3,55%. Tingkat SMP jumlah siswa tahun 2015 meningkat sebanyak 4,60%, tahun 2016 mengalami penurun sebanyak 3,12%, sedangkan jumlah guru tingkat SMP mengalami peningkatan 6,55% (tahun 2015), dan 2,10% di tahun 2016.

4.6 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, dapat dilihat tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20 Perkembangan Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah Gedung Sekolah	214	217	208

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.2	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	13.271	13.059	12.420
1.3	Rasio	1 : 62	1 : 60	1 : 60
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah Gedung Sekolah	38	40	42
2.2	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	4.215	4.204	4.047
2.3	Rasio	1 : 111	1 : 105	1 : 96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Balangan Tahun 2017

Dari tabel 4.20 diatas dapat diliaht rasio ketersediaan gedung sekolah (lembaga) dengan jumlah penduduk, tingkat SD/MI mengalami peningkatan sebesar 1,40% di tahun 2015 dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4,14%, jumlah penduduk usia 7 s/d 12 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,59% dan tahun 2016 menurun signifikan sebesar 4,89%. Untuk jumlah gedung sekolah (lembaga) SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,26% dan di tahun 2016 terjadi lagi penurunan sebesar 3,73%. Jumlah penduduk usia 13 s/d 15 tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,26% dan turun signifikan di tahun 2016 sebesar 3,73%.

4.7 Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan

Hasil survei yang dilakukan terhadap 300 responden yang terdiri para kepala sekolah, komite sekolah/orang tua siswa dan siswa adalah sebagai berikut ini:

4.7.1 Hasil Survei Kepada Kepala Sekolah

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari kepala sekolah maka dapat diuraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan dilihat dari aspek pembelajaran di sekolah, pengorganisasian sekolah (manajemen sekolah) dan kompetensi guru. Dilihat dari ketiga aspek tersebut maka dalam penilaian responden bahwa kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pembelajaran lebih baik dibandingkan kondisi manajemen sekolah dan kompetensi guru.

Tabel 4.21 Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kondisi Kemampuan Sekolah

No.	Kecamatan	Pembelajaran Di Sekolah (%)	Pengorganisasian Sekolah (%)	Kompetensi Guru (%)
1.	LAMPIHONG	85,47	80,71	59,44
2.	BATUMANDI	80,63	81,90	57,78
3.	AWAYAN	75,42	78,00	44,44
4.	TEBING TINGGI	77,14	82,28	60,44
5.	PARINGIN	77,50	77,85	46,11
6.	PARINGIN SELATAN	78,57	81,43	54,72
7.	JUAI	75,14	74,30	52,22
8.	HALONG	84,64	81,78	60,28
	Rata-rata	79,31	79,78	54,43

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

4.7.1.1 Aspek Pembelajaran

Berdasarkan tabel diatas, persepsi seluruh responden sebesar 79,31% menyatakan kondisi pembelajaran sudah berjalan dengan baik sisanya sebesar 20,69% menyatakan belum baik. Adapun kecamatan dengan persepsi paling tinggi adalah kecamatan Lampihong (85,47%) dan Halong (84,64%) sedangkan persepsi yang paling rendah adalah kecamatan Juai sebesar 75,14%.

4.7.1.2 Aspek Pengorganisasian (Manajemen) Sekolah

Dilihat pada aspek manajemen sekolah ternyata secara keseluruhan responden yaitu 79,78% menyetujui bahwa manajemen sekolah telah berjalan dengan baik dan sesuai arahan kebijakan. Kecamatan dengan tingkat penilaian yang tertinggi ternyata sama dengan aspek pembelajaran yaitu kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 82,28% diikuti Kecamatan Batu Mandi (81,90%) dan Kecamatan Halong (81,78%). Kecamatan Juai masih menduduki nilai 74,30% dimata para responden sebagai kecamatan dengan manajemen nilai terendah dan kecamatan Awayan (78,00%) dan Kecamatan Paringin (77,85%) sedangkan kecamatan lainnya telah di atas 80% berarti nilai yang sangat baik.

4.7.1.3 Aspek Kompetensi Guru Pengajar

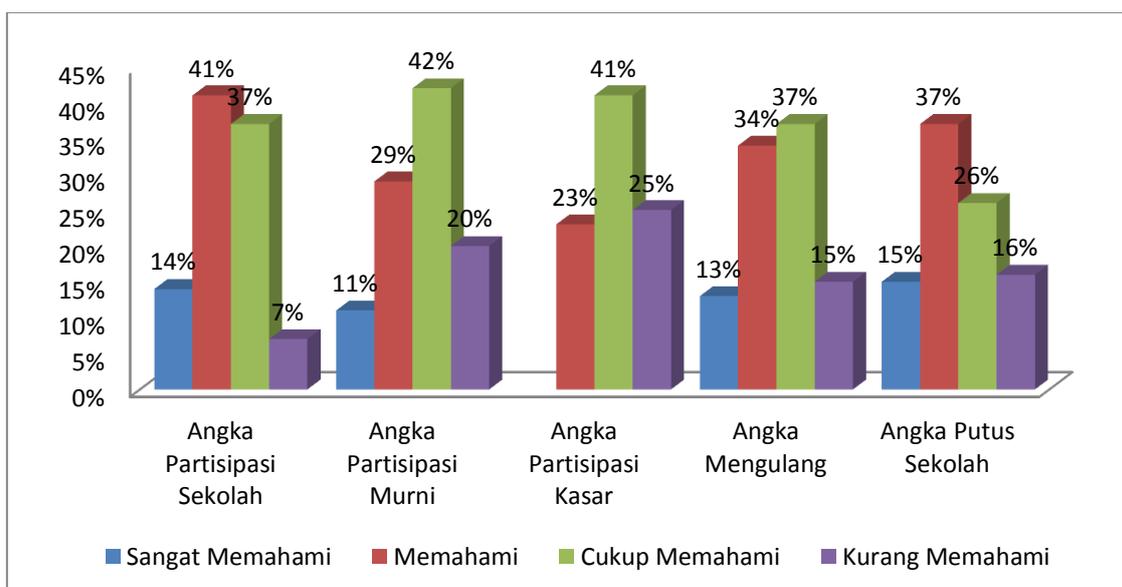
Penilaian responden terhadap tingkat kompetensi guru ternyata responden yang menyatakan bahwa kompetensi guru sudah memadai dan baik hanya 54,43% yang berarti nilai ini masih sangat jauh dari harapan paling tidak mencapai persepsi 70%. Persepsi tentang kompetensi guru yang cukup tinggi hanya di kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 60,44% dan Kecamatan Halong sebesar 60,28% walaupun masih dibawah 70%. Kecamatan lainnya ternyata dibawah 60% mencapai 6 kecamatan (75%). Berdasarkan hasil ini maka masalah kompetensi guru sangat perlu diperhatikan untuk dibenahi dan ditingkatkan melalui kebijakan dan program dalam perencanaan induk pendidikan di Kabupaten Balangan.

4.7.2 Hasil Survei Kepada Guru Pengajar

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari guru pengajar di sekolah. Menguraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan yang dilihat dari aspek pemahaman guru tentang angka partisipasi dan saran dari guru kepada pemerintah untuk membangun sekolah menengah atas. Berikut pada gambar 4.3 gambaran umum dari keterpahaman guru terhadap angka partisipasi.

Gambar 4.3

Gambaran Umum Guru di Kabupaten Balangan Terhadap Angka Partisipasi



Sumber: Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap angka partisipasi masih sangat kurang. Perlunya pemahaman guru tentang angka partisipasi agar dapat meningkatkan mutu guru dan kualitas proses pembelajaran di Kabupaten Balangan.

Survei juga kepada guru juga menunjukkan harapan guru kepada pemerintah untuk membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan Kabupaten Balangan. Sehingga siswa yang lulus mendapatkan pengalaman pembelajaran yang langsung diterapkan dalam dunia kerja.

4.7.3 Hasil Survei Kepada Komite Sekolah/Orang Tua Siswa

Data kedua yang di ambil di Balangan adalah persepsi survey kepada orang tua siswa/komite sekolah dimana tujuan dari pengambilan data survey adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pelayanan pendidikan yang telah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Balangan. Untuk mengetahui seberapa besar yang dirasakan manfaat pelayanan pendidikan sampai kepada masyarakat dilihat dari beberapa aspek pengamatan. Untuk mengetahui dapat dilihat dari tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22 Persepsi Komite Sekolah/Orang Tua Siswa Terhadap Kondisi Pendidikan Perkecamatan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Pendapat Orang Tua	Pelayanan Pendidikan	Pengeluaran Pendidikan	Harapan Terhadap Pelayanan Pendidikan
1.	LAMPIHONG	66% Berkisaran 2 Jt – 5 Jt rupiah	77% mendapatkan pelayanan yang memadai	80,5% gratis	85,5% Kualitas pelayanan pendidikan di tingkatkan lagi terutama dari kompetensi guru
2.	BATUMANDI	89% berisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	67,7% belum mendapatkan pelayanan yang memadai	89% Gratis	44 % menginginkan pendidikan gratis dan sarana prasana sekolah terpenuhi

No.	Kecamatan	Pendapat Orang Tua	Pelayanan Pendidikan	Pengeluaran Pendidikan	Harapan Terhadap Pelayanan Pendidikan
3.	AWAYAN	70% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% responden menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	90% Gratis	50% responden menyatakan harapan pendidikan gratis sepenuhnya
4.	TEBING TINGGI	80% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	90% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	100% mendapatkan pendidikan gratis	80% menginginkan pendidikan gratis
5.	PARINGIN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	83,5% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	75% mendapatkan pendidikan gratis	70,5% ingin peningkatan pelayanan pendidikan terutama kompetensi guru
6.	PARINGIN SELATAN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	42% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	75% Gratis	79,6% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi
7.	JUAI	100% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	63,6% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	88% pendidikan gratis	75,6% menginginkan sarana prasarana sekolah terpenuhi
8.	HALONG	50% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% menyatakan harga buku mahal	100% Gratis	67% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi
	Rata-rata				

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa : item pendapatan dari para orang tua siswa bermacam-macam dilihat dari sisi pekerjaan orang tua siswa yaitu: PNS, Pengusaha, Wiraswasta, dan Petani. Untuk segi pendapatan tidak terlalu mempersalahkan dimana tingkat pendapatan orang tua juga mempengaruhi tingkat keberlanjutan pendidikan anak-anaknya. untuk Kecamatan Lampihong dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 66% berkisar 2 juta – 5 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 80,5% menginginkan pendidikan gratis, walaupun dari segi pelayanan sebesar 77% pelayanan pendidikan tidak memadai dengan harapan sebesar 50% peningkatan sarana dan prasarana sekolah dapat di penuhi.

Untuk Kecamatan Batu Mandi dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar

89% berada di kisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pelayanan pendidikan sebesar 89% menginginkan pendidikan gratis walaupun dari segi pelayanan pendidikan sebesar 67,7% pelayanan pendidikan tidak memadai dan harapannya sebesar 44% menginginkan pendidikan gratis dan sarana prasana sekolah memadai.

Untuk Kecamatan Awayan dari segi pendapatan orang tua siswa sebesar 70% berkisar 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan kecamatan Awayan sebesar 90% mendapatkan pendidikan gratis, dari segi pelayanan sebesar 40% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai, dan harapannya sebesar 50% peningkatan kualitas pelayanan pendidikan terutama dari kompetensi guru dan pendidikan gratis.

Untuk Kecamatan Tebing Tinggi dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 80% berkisar 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 100% mendapatkan pendidikan gratis dengan harapan sebesar 80% sarana dan prasarana sekolah dapat di penuhi dan pendidikan gratis. Dari segi pelayanan pendidikan sebesar 90% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.

Untuk Kecamatan Paringin dari segi penghasilan orang tua siswa sebesar 75% berada di kisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dari segi pendidikan sebesar 75% mendapatkan pendidikan gratis, dari segi pelayanan pendidikan sebesar 83,5% belum mendapatkan pendidikan yang memadai, dan harapannya sebesar 70,5% menginginkan peningkatan pelayanan pendidikan terutama kompetensi guru.

Untuk kecamatan Paringin Selatan dari segi penghasilan orang tua sebesar 75% berada dikisaran 500 ribu – 2 juta rupiah. Dilihat dari segi pendidikan Kecamatan Kuranji mendapatkan biaya pendidikan gratis sebesar 75%, pada pelayanan pendididkan sebesar 42% tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai, dengan harapan sebesar 79,6% menginginkan sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi.

Untuk Kecamatan Juai pendapatan orang tua siswa berada dikisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dilihat dari segi pendidikan Kecamatan Juai mendapatkan biaya pendidikan gratis sebanyak 88% dan pada pelayanan pendidikan sebesar 63,6% belum mendapatkan pelayanan yang memadai, dengan harapan sebesar 75,6% sarana dan prasarana sekolah dapat dipenuhi.

Untuk kecamatan Halong pendapatan orang tua siswa sebesar 50% berada

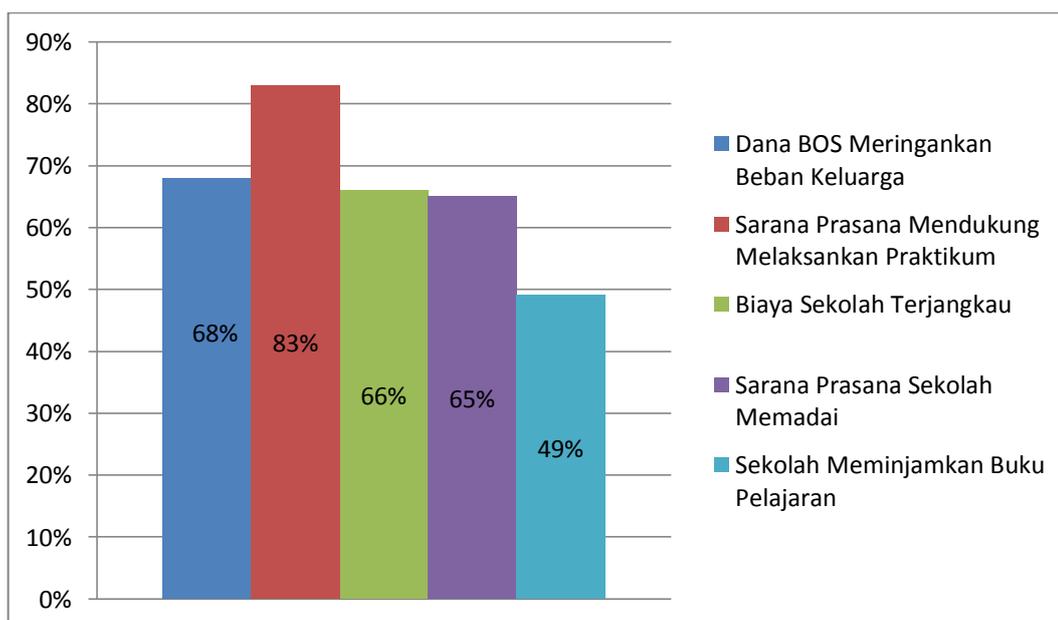
di kisaran 500 ribu sampai 2 juta rupiah dan 50% di atas 2 juta sampai 5 juta rupiah, dilihat dari segi pendidikan kecamatan Halong keseluruhan penduduk mendapatkan pendidikan gratis, dengan harapan sebesar 67% penduduk menginginkan sarana prasarana sekolah terpenuhi dan dari segi pelayanan pendidikan sekitar 40% menyatakan biaya buku mahal dan sisanya 60% menginginkan perbaikan mabel sekolah.

4.7.4 Hasil Survei Kepada Siswa

Survei yang ini bertujuan untuk melihat seberapa besar motivasi yang di peroleh oleh siswa baik dari orang tua maupun dari sekolah sebagaimana di terangkan gambar 4.4 berikut:

Gambar 4. 4

Kepuasan Siswa Terhadap Dunia Pendidikan Di Kabupaten Balangan



Dari ke lima item pertanyaan survey kepada orang tua siswa sebanyak 68% menyatakan bahwa Pentingnya dana BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan. Pada bidang sarana-prasana pendidikan sebanyak 83% menyatakan perlu adanya penambahan sarana-prasana pendidikan termasuk laboratorium. Siswa juga berharap pihak sekolah menyediakan buku materi pelajaran sebanyak 49% di ruangan perpustakaan sekolah sehingga buku dapat dipinjamkan kepada siswa.

Untuk sarana-prasarana pendidikan 65% responden siswa meminta perlu ditambah untuk meningkatkan kenyamanan dan keefektifan belajar. Sebanyak 66% responden siswa berharap biaya pendidikan terjangkau atau dengan kata lain adanya penggratisan biaya pendidikan agar mengurangi beban ekonomi keluarga mereka.

Dari data yang di ambil oleh penyusun dapat di simpulkan sementara bahwa gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan masih perlu ditingkatkan kembali baik dari sisi pelayanan, sarana prasarana, dukungan masyarakat, dukungan perusahaan sebagai user tenaga kerja terampil yang siap bekerja membangun daerah. Selain itu pula yang paling penting dalam mengulas gambaran umum pendidikan adalah Dana Alokasi Pendidikan di APBD dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama guru, siswa dan tenaga kependidikan. Dengan demikian proses pelayanan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Balangan. Untuk lebih mengulas kembali tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan akan diulas pada issue/masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada bab berikutnya.

4.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain dari yang disebutkan diatas ada beberapa issue utama pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Ruang kelas kurang

Ruang kelas pada beberapa sekolah yang berada di kawasan perkotaan dan pinggiran perbatasan perkotaan umumnya memiliki ruang kelas yang kurang. Masyarakat sekitar ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berada dekat kota. Berikut

2. Fasilitas kurang

Dukungan fasilitas sekolah dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler masih kurang. Demikian pula fasilitas yang bersifat pendukung praktikum, olah raga dan seni masih sangat kurang

3. Kesenjangan fasilitas dan kualitas sekolah antar daerah/kawasan

Terjadi kesenjangan antara fasilitas sekolah di kota atau pinggiran kota

dibandingkan di daerah yang jauh dan pedalaman sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan dan lulusan.

4.9 Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)

1. Kesejahteraan guru honor/swasta

Tingkat kesejahteraan guru honor dan swasta sangat jauh dengan PNS sehingga menimbulkan kecemburuan dan tanggung jawab pendidikan anak. Penyetaraan tunjangan tenaga pendidik dengan sertifikasi masih belum menyeluruh sehingga tidak menyentuh kesejahteraan pendidik.

2. Kualitas

Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih harus ditingkatkan agar kualitas kerjanya meningkat dan profesional. Rendahnya kualitas karena tenaga pendidik dan kependidikan penyebarannya tidak merata sehingga ada yang kekurangan dilain tempat terjadi kelebihan sehingga mengurangi kualitas pelayanan pendidikan.

4.10 Dukungan Sumber Dana

1. Terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah kabupaten

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membangun bidang pendidikan karena merupakan daerah pemekaran baru yang membutuhkan biaya besar dalam membangun infrastruktur dan sarana pendukung lainnya termasuk pembiayaan operasional pendidikan di daerah

2. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan pendidikan di daerah.

Potensi SDA yang melimpah tidak menjamin dunia usaha yang berinvestasi di daerah mau terlibat langsung dan memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Dengan banyaknya investor yang mengeruk hasil sumber daya alam ternyata masih rendah partisipasi mereka dalam membantu pembangunan bidang pendidikan. Keterlibatan masih bersifat sukarela melalui program CSR yang kurang terintegratif dengan program pembangunan daerah dalam jangka menengah sehingga hanya bersifat insidental saja.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang

pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang pendidikan masih sangat rendah sebab kesadaran masyarakat daerah masih perlu dimotivasi dan mereka umumnya menggantungkan pada program pemerintah. Yang terpenting dalam masalah partisipasi bukan pada masalah pembiayaan tetap adanya dukungan dari internal masyarakat dalam mendorong anak-anak agar tidak putus sekolah.

4.11 Masyarakat dan Lingkungan Sekolah

1. Akses pendidikan

Akses pendidikan di Kabupaten Balangan dari segi wilayah yang luas dan terpencil sehingga akses tempat menjadi kendala pendidikan. Akses peserta didik dalam proses pendidikan juga sulit karena faktor kemampuan ekonomi masih tingginya angka putus sekolah akibat tidak mampu sekolah.

2. Putus sekolah : kawin, kriminal, narkoba, masalah ekonomi, masalah keluarga

Putus sekolah tidak hanya karena sulitnya akses dan masalah ekonomi namun juga dapat diakibatkan oleh faktor sosial dan lingkungan yang kurang kondusif. Salah satunya karena pergaulan dan lingkungan yang mendorong terjadinya pernikahan dini sehingga banyak yang putus sekolah. Lingkungan keluarga yang kurang kondusif juga mengakibatkan tidak adanya dukungan dan motivasi dalam melanjutkan sekolah bagi anak usia sekolah. Banyak pula anak yang bekerja karena membantu perekonomian keluarga sehingga memperbesar terjadinya angka putus sekolah yang tinggi.

BAB V

ANALISIS SWOT

5.1 Analisis SWOT Terhadap Kondisi Pendidikan

Hasil analisis Strength, Weakness, Oppurtunity, Threath (SWOT) kondisi pendidikan Kabupaten Balangan berdasarkan hasil observasi, data dan indept interview.

5.1.1 Kekuatan

Memperhatikan kondisi pendidikan kabupaten Balangan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang dijadikan landasan untuk perencanaan pembangunan pendidikan.

1. Kondisi perekonomian dan investasi daerah yang meningkat sehingga mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
2. Sumber daya alam yang melimpah menjadi motivasi perlunya sumber daya manusia yang memadai
3. Kabupaten Balangan yang religious sehingga suasana menuntut ilmu dari lingkungan sangat kondusif.
4. Potensi SDA yang melimpah dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
5. Minat dan motivasi dari orang tua dan siswa untuk menempuh pendidikan sangat tinggi
6. Potensi penduduk yang pertumbuhannya cukup tinggi baik pertumbuhan natural maupun migrasi sehingga setiap jenjang pendidikan tidak akan kekurangan siswa
7. Kebutuhan tenaga kerja masih sangat tinggi baik sektor pertanian/perkebunan/perikanan, sektor pertambangan dan sektor industry terus terjadi peningkatan
8. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendidikan yang sudah memadai hampir merata pada seluruh kawasan
9. Potensi jumlah penduduk yang cukup besar membutuhkan pelayanan pendidikan

dapat menghasilkan SDM yang siap dan handal

10. Komitmen pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan
11. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan meningkatkan kualitas SDM

5.1.2 Kelemahan

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan
2. Masih adanya guru yang belum bersertifikasi dan rendahnya kualifikasi tenaga guru sesuai standar nasional
3. Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang nyaman.
4. Belum meratanya perbandingan guru dan siswa, perbandingan siswa dan ruang kelas perbandingan rombongan belajar dan perbandingan antar jenis pendidikan.
5. Masih adanya daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pendidikan dan masih terbatas dan sulitnya suatu daerah dalam mengakases pendidikan
6. Masih adanya disparitas pendidikan antar jenjang, APK dan APM dan antar daerah (dalam daerah desa, kecamatan dan kabupaten).
7. Masih ada terjadi putus sekolah akibat masalah ekonomi keluarga dan pernikahan dini
8. Masih rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja pada pasar kerja dan belum terpenuhinya penyediaan tenaga kerja siap latih dan siap kerja/pakai dalam penyerapan pasar kerja.
9. Masih belum sinkronnya perencanaan pembanguangan pendidikan antar daerah dan instansi.
10. Belum terpenuhi pelayanan pendidikan menyeluruh yaitu dengan masih terbatasnya pendidikan anak usia dini, kejar paket, dan pendidikan formal lainnya.
11. Belum memadainya database pendidikan yang integrative

5.1.3 Tantangan

1. Kemauan dan kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut

2. Perubahan kewenangan penanganan antara bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah memerlukan koordinasi yang baik antara kabupaten dan provinsi
3. Masih adanya sekolah di kawasan pinggiran dan terpencil
4. Masih adanya kejadian putus sekolah
5. Ketidak sesuaian antara lulusan dan kebutuhan lapangan kerja
6. Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang terdidik masih sangat tinggi
7. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan pendidikan
8. Tingginya kompetisi / persaingan tenaga kerja terdidik dari luar daerah yang menjadi tantangan bagi pembanguan pendidikan di daerah
9. Upaya pencapaian IPM memerlukan pembanguan pendidikan yang lebih baik
10. Pentingnya perhatian terhadap kualitas lulusan yang berkompetensi memadai
11. Pencapaian pembangunan dengan sinkronisasi dan kordinasi kebijakan dan implementasi pembangunan bidang pendidikan
12. Pembanguan sektor pendidikan menjadi fokus pendidikan di Kabupaten Balangan

5.1.4 Ancaman

1. Pengaruh globalisasi menjadi ancaman bagi penurunan kualitas keimanan, moral dan karakter masyarakat yang dapat mengancam pembanguan bidang pendidikan
2. Adanya ancaman peredaran narkoba, pergaulan bebas, perkelahian antar pelajar, pengaruh media sosial yang memerlukan perhatian dan program antisipasi dibidang pendidikan
3. Penetrasi masuknya pengaruh perkembangan teknologi informasi yang masiv memberikan kemudahan dalam pembanguan bidang pendidikan terutama dalam mendapatkan informasi dan komunikasi tapi sekaligus ancaman apabila tidak difilter
4. Maraknya siaran media masa baik tertulis maupun elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi pendidikan bagi anak-anak sekolah

5. Penggunaan teknologi komunikasi/HP/BB/kamera dll yang merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan sekaligus ancaman jika disalahgunakan
6. Perubahan figure keteladanan dari para tokoh, ulama, pahlawan, orang tua menjadi tokoh imajiner dan dunia entertaint
7. Kemudahan dalam mendapatkan kelulusan dan tanda kelulusan pada beberapa lembaga pendidikan yang bersifat instan.

Untuk mengetahui program-program perencanaan sasaran pendidikan di Kabupaten Balangan berdasarkan hasil kajian mendalam dapat dilihat pada realisasi kebutuhan perencanaan 5 tahunan agar dapat mewujudkan MDG di pelayanan pendidikan. Perencanaan 5 tahunan tersebut kami sajikan dalam bentuk matrik kebutuhan yang kami susun pada laporan penutup berikutnya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Balangan

Visi kabupaten Balangan dalam RPJM Tahun 2016-2021 adalah :
"Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia".

Visi tersebut dijabarkan dalam makna yang lebih mendalam maka semuanya bermuara akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, karena makna maju dan sejahtera menghendaki pembangunan manusia seutuhnya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Misi Kabupaten Balangan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 dengan mengacu pada visi yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Arah kebijakan pembangunan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 memuat program yang merespon pada program MDGs, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi di antaranya adalah :

- a. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi

guru

- b. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
- c. Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
- d. Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
- e. Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
- f. Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
- g. Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar
- h. Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah
- i. Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah
- j. Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin
- k. Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses.
- l. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- m. Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil
- n. Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan tersebut maka perlu disusun perencanaan yang menjadi induk dalam bidang pendidikan berupa review Masterplan Pendidikan tahun 2011-2015. Keterkaitan prioritas pembangunan yang termaktub dalam RPJM Nasional menjelaskan prioritas kedua (P2) adalah pembangunan pendidikan, selanjutnya pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan prioritas pembangunan sumber daya manusia (P1,) sedangkan pada RPJMD Kabupaten Balangan memuat prioritas membangun sumber daya manusia (P1). Dengan adanya sinkronisasi perencanaan ini maka Review Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan ini menjadi kebutuhan sebagai acuan dalam melaksanakan program

pembangunan untuk mencapai prioritas yang tertera dalam semua dokumen perencanaan tersebut.

Kabupaten Balangan sebagai kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan dengan luasan mencapai 1.819,75 km persegi. Kabupaten Balangan dengan angka IPM sebesar 68,25 tahun 2016 dengan urutan ke 11 dalam Provinsi Kalimantan Selatan.

Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) masih di bawah rata-rata provinsi. Kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitasnya dengan indikator meningkatnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan utama adalah:

- a. Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan
- b. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan
- c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik

6.2. Strategi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan

1. Tersedia dan terlayannya pelayanan pendidikan berbagai jenjang pendidikan (PAUD dan dasar) yang setara dan bermutu
2. Optimalisasi perbaikan dan pelayanan manajemen pendidikan
3. Penyediaan dan penguatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional dengan kualifikasi standar nasional dan bersertifikasi
4. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan sarana pendukung bidang pendidikan lainnya yang memadai
5. Penyediaan dan pengembangan sistem pendidikan berbasis kompetensi, karakter dan teknologi informasi

6. Tersedia dan terjangkau pendidikan yang berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
7. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dan layanan prima melalui perbaikan perencanaan, penganggaran dan penguatan kelembagaan, prosedur operasional standar
8. Optimalisasi sistem pengawasan internal

6.3 Prioritas Kebijakan Program Bidang Pendidikan

Penjabaran Arah Kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Balangan melalui prioritas kebijakan program sebagai berikut :

1. Prioritas program peningkatan dan pemerataan akses disemua jenis dan jenjang pendidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pendidikan
 - b. Peningkatan akses pendidikan terhadap siswa miskin
2. Prioritas program penuntasan wajib belajar 9 tahun, dengan kebijakan program:
 - a. Peningkatan dan pengembangan pendidikan didalam dan luar sekolah
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
3. Prioritas program peningkatan kewirausahaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Meningkatkan kewirausahaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Prioritas program pemantapan pengembangan kurikulum 2013, dengan kebijakan program:
 - a. meningkatkan pendidikan moral dan etika, sikap dan perilaku (etos kerja, kreativitas dan lain-lain).
5. Prioritas program peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Pengembangan Sistem Informasi kependidikan
6. Prioritas program pengembangan kreativitas anak didik dalam penelitian terapan, dengan kebijakan program :

- a. Pengembangan wawasan pola pikir ilmiah yang berbasis penelitian.
7. Prioritas program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Meningkatkan kompetensi skill tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui diklat/workshop/lokakarya/pendidikan.
8. Prioritas program peningkatan kemampuan anak didik dalam baca tulis Al Qur'an, dengan kebijakan program :
 - a. Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Al Qur'an.
 - b. Meningkatkan siswa berkarakter akhlak terpuji sesuai dengan karakter lokal daerah.

6.4 Sasaran Kebutuhan Tahunan Pendidikan Kabupaten Balangan

Sasaran Kebutuhan tahunan Pendidikan di Kabupaten Balangan dengan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN dan APBD. Dari sisi pelaksanaan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Untuk lebih terincinya sasaran tahunan ini akan dijabarkan dalam Review Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Sasaran strategis tahunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan sebagai berikut ini:

1. Tahun Pertama (2016-2017)

Sasaran reformasi birokrasi pada tahap pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di pendidikan Kabupaten Balangan. Sasaran tahunan tahap pertama 2016-2017 diprioritaskan pada :

- a. Pemerataan akses pendidikan/pelayanan di setiap Kecamatan

- b. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dan pembinaan Aksara Kewirausahaan
- c. Implementasi wajib belajar 9 tahun
- d. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik berbasis Imtaq dan Iptek.
- e. Penuntasan dan pembinaan program berkebutuhan khusus.
- f. Revitalisasi gedung pendidikan dan sarana prasana pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

2. Tahap kedua (2018-2019) sebagai jangka menengah

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap pertama, pada tahap kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis pendidikan tahun kedua berwawasan regional/nasional. Sasaran tahunan tahap kedua 2018-2019 diprioritaskan pada

- a. Optimalisasi pelayanan pendidikan di setiap Kecamatan.
- b. Penambahan sarana prasana penunjang, gedung pendidikan baik formal dan non formal berbasis Imtaq dan Iptek
- c. Peningkatan kualitas kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik formal dan non formal
- d. Implementasi Program Pendidikan dan kegiatan berbasis Imtaq dan Iptek ditataran regional
- e. Optimalisasi system tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dan pecintraan publik yang baik berdasarkan imtaq dan iptek.
- f. Optimalisasi pengembangan pelayanan pendidikan berbasis ICT.
- g. Revitalisasi gedung pendidikan dan sarana prasana pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

3. Tahap ketiga (2020-2021) sebagai jangka akhir

Pada periode tahun ketiga, pendidikan di Kalimantan diarahkan pada tataran implementasi dan penguatan karakter agamis, serta meningkatkan

kompetensi professional pendidik serta lembaga sehingga dapat bersaing secara global (internasional) sebagai kelanjutan pada tahun kedua. Sasaran tahunan tahap ketiga 2020-2021 diprioritaskan pada:

- a. Mewujudkan peran serta masyarakat yang bermutu berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif berdasarkan Imtaq dan Iptek.
- b. Peningkatan tata kelola pendidikan formal dan non formal berbasis ICT.
- c. Pencapaian sertifikasi akreditasi bagi semua lembaga pendidikan formal dan non formal.
- d. Implementasi Pendidikan berbasis Imtaq dan Iptek di tataran regional dan nasional.
- e. Optimalisasi pendidikan karakter agamis dalam pendidikan formal dan informal dalam menghadapi zaman modern (global)
- f. Peningkatan kualitas kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik formal dan non formal dalam tataran regional dan nasional.
- g. Optimalisasi dan evaluasi gedung pendidikan beserta sarana prasana pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

BAB VII

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

Prioritas program pembangunan pendidikan Kabupaten Balangan dibagi dalam 2 pendekatan yaitu : prioritas program yang sesuai arah kebijakan pembangunan dan berdasarkan pelaksanaan pada jenjang pendidikan.

7.1 Prioritas Program berdasarkan Tiga Program Utama sesuai Arah Kebijakan (Programnya disesuaikan Permendagri 13/2006, 59/2007 dan Permendikbud no.23 tahun 2013)

Prioritas program pembangunan pendidikan kabupaten Balangan dapat di tinjau dari lima program utama yang dikerucutkan menjadi tiga program utama di antaranya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan
 - a. Pembangunan unit sekolah baru
 - b. Pembangunan ruang kelas baru
 - c. Rehabilitasi gedung sekolah
 - d. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan
 - e. Penyediaan sarana transportasi untuk Pendidik di daerah tertinggal
 - f. Pembangunan Pendidikan Terpadu di Kompleks Islamic Center
- 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan
 - a. Peningkatan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan, kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik.
 - b. Peningkatan mutu proses belajar mengajar
 - 1) Pengembangan pembelajaran berkarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
 - 2) Pengembangan pembelajaran berstandar SNI
 - 3) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif
 - 4) Pengembangan pembelajaran IPA/IPS Terpadu, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal
 - 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan

- perpustakaan
- 6) Pengembangan pendidikan berbasis informasi teknologi
 - 7) Pembinaan MGMP di tingkat Kecamatan
- c. Peningkatan penilaian pendidikan
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan
 - e. Pembinaan kesiswaan
 - f. Peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan
 - g. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik
- a. Penggunaan dan pengembangan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) di setiap satu pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah (SMP/ sederajat).
 - b. Peningkatan dan pengembangan akreditasi sekolah dengan 8 SNP.
 - c. Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan.
 - d. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan.
 - e. Pengembangan supervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan.
 - f. Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah melalui sistem terintegrasi antar satuan pendidikan.
 - g. Peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar.

7.2 Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan

- 1) Program Pendidikan Usia Dini (PAUD)
 - a. Meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini bagi masyarakat sekitar.
 - b. Meningkatkan kesiapan kognitif, mental dan karakter anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi :

 - a. Pemerataan dan Perluasan Akses
 - b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
 - c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
- 2) Program Pendidikan Dasar
 - a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelaksanaan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan
 - b. Meningkatkan pemberdayaan KKG/KKS

- c. Optimalisasi fungsi dan peran MGMP di setiap UPT
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasaran Pendidikan (USB/RKB dan semua pendukungnya)
- e. Meningkatkan angka melanjutkan sekolah bagi lulusan PAUD sampai sekolah dasar.
- f. Meningkatkan angka menyelesaikan sekolah (menurunkan angka putus sekolah)
- g. Meningkatkan tingkat kelulusan UN secara kuantitas dan kualitas

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi :

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

3) Program Pendidikan Non Formal

- a. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan non formal berupa PKBM, sistem paket A, B, C
- b. Peningkatan minat pendidikan sepanjang hayat berupa sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan.
- c. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan non formal berupa diklat, workshop di setiap kecamatan.
- d. Mengembangkan sistem dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan non formal baru yang belum tersedia berbasis jaringan internet.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi:

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

BAB VIII

PENUTUP

8.1 KESIMPULAN

1. Penyusunan Review Master plan Pendidikan Balangan Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan permasalahan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Balangan.
2. Review Master Plan Pendidikan Balangan dilihat dari berbagai aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di setiap Kecamatan Kabupaten Balangan.
3. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai Acuan strategis pembinaan dan pengembangan Pendidikan Kabupaten Balangan yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Balangan, dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional
4. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai pengendali kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instransi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
5. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai pemberi informs kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai dasar mengembangkan strategis dan alternative kebijakan seta merancang rencana dan program pembangunan pendidikan.
7. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai dasar mengembangkan strategi dan alternative kebijakan serta merancang rencana dan program pembangunan pendidikan;
8. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai salah satu alat atau instrument pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengendalian rencana dan program pembangunan pendidikan;
9. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai rujukan dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan pendidikan;
10. Review Master Plan Pendidikan Balangan Merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan pada lingkungan yang semakin kompetitif;
11. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai Kerangka Acuan Kerja yang memuat petunjuk bagi stakeholder, yang berisi dari masukan azas, criteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya, dengan Review Master Plan ini diharapkan stakeholder dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik untuk menghasilkan output yang optimal untuk perbaikan dunia pendidikan Kabupaten Balangan.

8.2 REKOMENDASI

Rekomendasi dari penyusunan review master plan pendidikan Kabupaten Balangan untuk tahun 2016-2021 diantaranya:

1. Peningkatan dan pemerataan akses disemua jenis dan jenjang pendidikan
2. Penuntasan wajib belajar 9 tahun
3. Pemantapan pengembangan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi.
4. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan melalui sistem tata kelola yang handal dan layanan prima melalui perbaikan perencanaan, penganggaran dan penguatan kelembagaan, prosedur operasional standar.
5. Pengembangan kreativitas anak didik dalam penelitian terapan
6. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
7. Peningkatan kemampuan anak didik dalam baca tulis Al Qur'an
8. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis siswa.
9. Pembangunan ruang pertemuan KKG di setiap UPK.
10. Penyediaan dan pengembangan sistem pendidikan berbasis kompetensi, karakter dan teknologi informasi berbasis layanan data (SIP = Sistem Informasi Pendidikan)
11. Penyediaan dan penguatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan professional dengan kualifikasi standar nasional dan bersertifikasi dengan penempatan di daerah yang masih kekurangan.



EXECUTIVE SUMMARY

REVIEW MASTERPLAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017



Excesutive Summary

REVIEW MASTERPLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2017

Oleh

PT. Teknikatama Jasa Konsultan

A. Pendahuluan

Visi Pembangunan Kabupaten BaJangan tahun 2016 – 2021 adalah terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Salah satu misi untuk mengarahkan pencapaian visi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah menetapkan beberapa indikator kinerja pembangunaa daerah di bidang pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan serta guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV. Indikator kinerja ini untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Balangan.

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusla yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmanl-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berلمان dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabpaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Balangan telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar 6 tahun yang didukung pembangunaan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan wajib belajar 9 tahun

adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah/ APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Pada tahun 2015, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,38 persen dan APS usia 13-15 tahun 96,14 persen, APK SD mencapai 112,06, ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar dari pada jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 12,06 persen penduduk di luar usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK Penduduk Balangan cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 98,82. Seperti halnya APK, APM juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD APM 95,67 persen. Artinya hanya 95,67 persen penduduk usia 7-12 tahun yang terserap sebagai siswa SD. Pada jenjang SMP, APM menjadi 77,12. Dari pencapaian tersebut diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu penyebab utama kemiskinan dan indikator tingkat kesejahteraan adalah pendidikan sehingga dalam kerangka jangka panjang dibutuhkan sebuah perencanaan pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dari berbagai sektor. Ide dasar ini yang mengharuskan Bappeda Kabupaten Balangan untuk melakukan kegiatan Penyusunan Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Balangan.

B. Pembahasan

1. Kondisi Pendidikan Disetiap Tingkatan Kabupaten Balangan

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel yang meliputi tingkat satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SLB, Pendidikan non formal. Dari berbagai program pendidikan yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Balangan. Indikator keberhasilan pendidikan dapat dicermati melalui Angka Partisipasi Murni (APM)

SD sederajat dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat yang telah melampaui target nasional (data tahun 2015). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam setiap jenjang pendidikan di bawah ini:

1.1 Taman Kanak-kanak (TK) Sederajat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki empat lembaga tingkatan dibawahnya diantaranya: TK/RA, KB, TPA, dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). Perkembangan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak usia 4-6 tahun selama tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Perkembangan Pendidikan di Tingkat TK/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 4 - 6 th	7.221	7.319	7.533
2.	Jml siswa PAUD kelompok usia 4-6 th	4.473	4.833	5.037
3.	Jml Siswa PAUD	4.473	4.833	5.037
4.	APM PAUD (%)	N/A	N/A	N/A
5.	APK PAUD (%)	61,94%	66,03%	66,87%
6.	Jumlah lembaga (TK, KB, TPA & SPS)	112	119	128
7.	Jumlah ruang belajar :			
	Baik	140	150	189
	Rusak Sedang	10	12	8
	Rusak Berat	32	34	37
8.	Jumlah ruang penunjang :			
	Perpustakaan	2	2	2
	Mushala	N/A	N/A	N/A
	Tempat bermain	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah Guru	345	339	342
10	Angka Kelulusan	1.747	1.736	2.032

Sumber : Diknas Kabupaten Balangan Tahun 2017 (diolah)

Dari data di atas, secara umum perkembangan TK dan RA (kelompok PAUD) selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan secara kuantitas. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- Jumlah penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan.
- APM PAUD setiap tahun tidak dapat diketahui dikarenakan jumlah siswa PAUD kelompok usia 4-6th tidak ada.
- APK PAUD terjadi perubahan kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,09% (tahun 2015) dan 0,84% (tahun 2016)

- d. Jumlah lembaga PAUD yang ada di tahun 2016 meningkat sebanyak 128 buah.
- e. Jumlah ruang penunjang perpustakaan ada 2 buah sampai tahun 2016.
- f. Jumlah tenaga pendidik/guru di PAUD dilihat dari jumlah guru dibagi jumlah lembaga PAUD di tahun 2016 maka akan ditemukan perbandingan yaitu 2,67 (2-3 orang)
- g. Kondisi ruang belajar pada tahun 2013 : kondisi baik 80,76 %, rusak sedang 3,41%, dan rusak berat 15,81%.
- h. Angka kelulusan siswa pada tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 17,05%.

Jika dilihat data di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan perlu mengupayakan peningkatan jumlah APK dan APM, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penambahan jumlah ruangan belajar dan perbaikan ruang yang rusak parah, penambahan jumlah ruangan penunjang terutama tempat bermain yang saat ini belum tersedia, pembukaan atau pendirian lembaga PAUD.

Pada tingkat pendidikan TK dan RA masih banyak yang perlu untuk di perbaiki terutama pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK)/RA/Paud. Pembangunan ruang pendukung perlu di tambah sebab Pendidikan di tingkat TK/RA/Paud sebagai proses pendidikan dasar dalam menciptakan SDM sebelum masuk kedalam pendidikan jenjang SD (Sekolah Dasar).

Pada tahun 2016 didapatkan data bahwa hampir semua kecamatan 98% belum memiliki ruang pendukung, yang ada hanya Kecamatan Batu Mandi untuk RA itu pun hanya memiliki 1 ruang perpustakaan dan kecamatan Juai untuk TK, untuk ruang bermain ternyata data tidak ada. Untuk itulah perlu dukungan pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan bantuan sarana infrastruktur bagi setiap TK/RA/Paud sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Terkait dengan kondisi diatas ada beberapa masalah pada jenjang TK/RA/PAUD diantaranya adalah:

1. Masih minimnya pembentukan lembaga padahal setiap tahun penduduk usia dini terus bertambah.

2. Masih kurangnya guru pengajar di tingkat PAUD, baik yang bersertifikasi maupun tidak.
3. Sangat minimnya fasilitas pendukung pendidikan seperti tempat bermain, perpustakaan dan mushala padahal sangat diperlukan untuk membantu aktivitas belajar.
4. Adanya ruang belajar yang rusak ringan sekitar 3,42% dan rusak berat sekitar 15,81% pada tahun 2016.

Dari data diatas bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada jenjang pendidikan TK/RA/PAUD tidak hanya terkait pada infrastruktur sarana pendidikan akan tetapi juga menyangkut pada SDM pengajar di Tingkat TK/RA/PAUD. Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan untuk mendata TK/RA/PAUD mana saja yang perlu di bantu baik peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun peningkatan kualitas SDM guru PAUD/TK/RA.

1.2 Tingkat SD/Sederajat

Perkembangan pendidikan di tingkat SD/Sederajat tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 Perkembangan Pendidikan di Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 7-12 th	13.905	13.952	14.176
2.	Jml siswa SD/MI/SDLB kelompok usia 7-12 th	13.271	13.059	12.420
3.	Jml Siswa SD/MI/SDLB	16.071	15.763	14.811
4.	APM SD/MI/SDLB (%)	95,27%	93,42%	87,41%
5.	APK SD/MI/SDLB (%)	116,99%	115,04%	106,45
6.	Jumlah lembaga SD/MI/SDLB	214	217	208
7.	Jumlah Guru	1.857	1.859	1.793
8	Angka Kelulusan	2.317	2.390	2.338
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	803	804	763
	b. Rusak Sedang	333	348	349
	c. Rusak berat	140	144	134
10	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	130	137	143
	b. Mushala	33	49	44
	c. Halaman Sekolah	95	86	80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017 (diolah)

Secara kuantitas berdasarkan data di atas, perkembangan pendidikan di tingkat SD/ sederajat selama tahun 2014-2017 di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan. Keadaan tersebut dapat dijelaskan sbb :

- a. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SD/ sederajat kelompok usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SD/ sederajat (APM) tiap tahun mengalami penurunan yang signifikan dari 2014 sebanyak 95,27% turun sebesar 1,85% di tahun 2015 menjadi 93,42%, dan kembali turun kembali sebanyak 87,41% (6,01%) di tahun 2016.
- c. Jumlah siswa SD/ sederajat tahun 2014 (APK) sebanyak 116,99%, turun menjadi 115,04% di tahun 2015, dan tahun 2016 turun kembali sebanyak 8,59% menjadi 106,45%.
- d. Jumlah lembaga SD/ sederajat tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebanyak 3 buah dan mengalami penurunan jumlah sebanyak 9 menjadi 208 buah lembaga di tahun 2016.
- e. Jumlah guru perlembaga/sekolah tahun 2014 sebanyak 8,65 (9 orang guru), tahun 2015 sebanyak 8,47 guru (8 orang guru), tahun 2016 sebanyak 8,26 (8 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SD/MI/SDLB masing-masing sebanyak 8 orang guru.
- f. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar setiap tahun adalah : Tahun 2016 baik 61,23%, rusak sedang 28,00%, rusak berat 10,75%.
- g. Jumlah ruang penunjang perpustakaan sebanyak 143 buah dan mushala sebanyak 44 buah dan lapangan sebanyak 80 buah di tahun 2016.

Jika dilihat dari data di atas, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan masih perlu berusaha mengatasi kekurangan yang ada terutama dalam jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak ringan maupun berat, jumlah ruangan penunjang terutama mushola yang saat ini belum maksimal terpenuhi, pembukaan atau pendirian lembaga SD//sederajat sehingga APM dan APK tetap meningkat hingga tahun 2021.

Masalah pendidikan di jenjang SD/ sederajat selain dari kondisi ruang belajar, juga terkait pada ruang pendukung yang belum semuanya tersedia. Ruang

pendukung sangat diperlukan selain dari ruang belajar, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Agar terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) dari Permendikbu no 23 Tahun 2013.

Dari data diatas masih ada beberapa hal masalah terkait pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya ruang belajar untuk siswa, dimana rata-rata setiap sekolah kelebihan peserta didik sekitar 2-3 orang/rombel.
 2. Masih kurangnya guru pengajar tingkat SD/ sederajat baik yang bersertifikat maupun tidak.
 3. Rata-rata setiap lembaga memiliki 1 guru untuk 2 rombel.
 4. Adanya ruang belajar masih rusak ringan 28,01% dan rusak berat sekitar 10,75%.
 5. Ruang penunjang pembelajaran seperti perpustakaan masih kurang sekitar 31,25% dari jumlah lembaga yang ada sedangkan mushala masih kurang sekitar 78,84% dari total lembaga yang tersedia dan untuk lapangan olahraga sebesar 61,53% dari total lembaga yang tersedia di Kab. Balangan.
 6. Rasio perbandingan guru dan murid sangat besar yaitu 1 (guru) : 8,2 (murid).
- masalah-masalah pendidikan di tingkat pelayanan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB dapat dilihat bahwa tidak hanya terkait sarana prasarana pendidikan saja akan tetapi juga terkait peningkatan SDM pendidik.

1.3 Tingkat SMP/Sederajat

Kondisi Pendidikan pada SMP/ sederajat pada tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3 Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Balangan Tahun 2014-2016

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jml Penduduk usia 13-15 th	6.573	6.575	6.678
2.	Jml siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT kelompok usia 13-15 th	4.215	4.204	4.047
3.	Jml Siswa SMP/MTs/SMPLB/SMPT	5.667	5.928	5.743
4.	APM SMP/MTs/SMPLB/SMPT (%)	64.13%	63.94%	60.60%
5.	APK SMP/MTs/SMLB/SMPT (%)	90.78%	97.60%	93.32%

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
6.	Jumlah lembaga	38	40	42
7.	Jumlah Guru	580	618	631
8.	Angka Kelulusan	1.484	1.612	1.667
9.	Jumlah Ruang belajar			
	a. Baik	178	180	201
	b. Rusak Sedang	45	48	75
	c. Rusak berat	14	15	41
10.	Jumlah ruang penunjang :			
	a. Perpustakaan	26	26	26
	b. Mushala	17	17	17
	c. Halaman Sekolah	19	19	19
	d. Laboratorium	22	22	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017

Dari data di atas untuk kondisi secara umum perkembangan pendidikan di tingkat SMP/ sederajat selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Balangan dari ke sembilan indikator yang di data mengalami kenaikan, secara kuantitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

- a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Jumlah siswa SMP/ sederajat kelompok usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan di jenjang SMP/MTs/SMPLB/SMPT tahun 2014 sebanyak 64,13%, tahun 2015 sebanyak 63,94%, tahun 2016 sebanyak 60,60%.
- c. Jumlah siswa SMP/ sederajat tahun 2014 (APK) sebanyak 90,78%, tahun 2015 sebanyak 97,60%, dan tahun 2016 sebanyak 93,32%.
- d. Jumlah lembaga SMP/ sederajat tahun 2014-2016 terjadi peningkatan sebanyak 4 buah.
- e. Jumlah guru perlembaga/sekolah tahun 2014 sebanyak 15,26 (15 orang guru), tahun 2015 sebanyak 15,45 guru (15-16 orang guru), tahun 2016 sebanyak 15,02 (15 orang guru). Artinya apabila dibagi perlembaga SMP/ sederajat masing-masing sebanyak 15 orang guru/ lembaga.
- f. Angka kelulusan siswa pada tahun 2015 meningkat sebesar 8,62% dan pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar 3,41%.
- g. Sedangkan data jumlah kondisi ruang belajar di data : tahun 2016 baik 623,40%, rusak sedang 23,65%, dan rusak berat 12,93%.

- h. Jumlah ruang penunjang perpustakaan terpenuhi tahun 2016 sebanyak 26 buah, mushala sebanyak 17 buah, dan laboratorium ipa sebanyak 21 buah serta halaman sekolah sebanyak 19 buah.

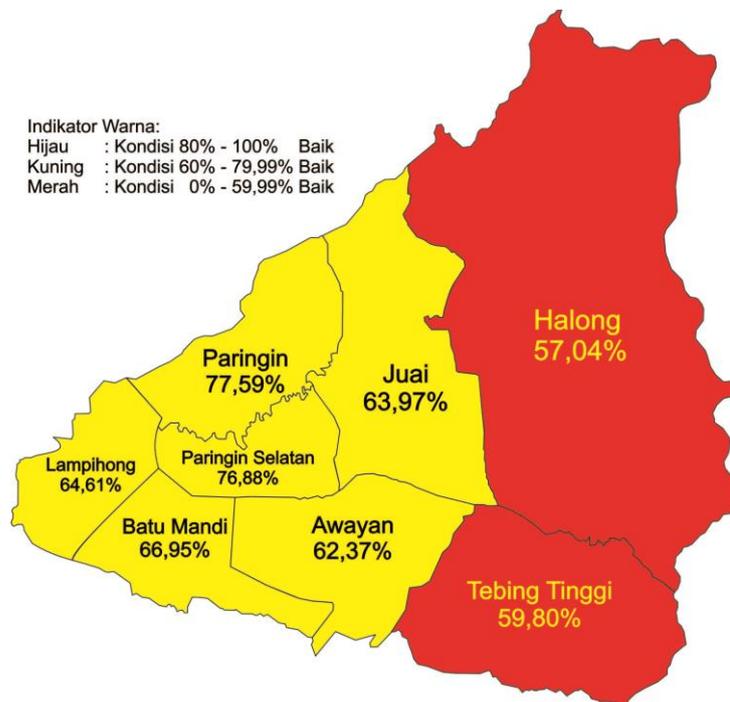
Jika dilihat analisa data di atas maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada terutama dalam peningkatan jumlah APM dan APK, guru, jumlah ruangan belajar, perbaikan ruang belajar yang rusak parah dan ringan, jumlah ruangan penunjang terutama mushola dan perpustakaan yang saat ini belum semua sekolah memiliki, pembukaan atau pendirian lembaga SMP/MTs/SMPLB/SMPT sehingga dapat meningkatkan pada jumlah APM dan APK sampai 100 %, selama tahun 2015-2021. Pada tingkatan SMP/Sederajat di kabupaten Balangan juga memiliki tingkatan masalah pendidikan terutama ruang pendukung pendidikan diantaranya`musholla, perpustakaan, halaman sekolah dan laboratorium IPA. tidak semua kecamatan memiliki ruang penunjang mushola sebagai salah satu syarat mencetak karakter peserta didik yang berakhlak dan berimtaq. Kecamatan Tebing Tinggi belum mempunyai mushola. Hal ini merupakan permasalahan pendidikan yang harus segera ditindaklanjuti agar proses pelayanan dan belajar mengajar tidak mengganggu kualitas peserta didik. Selain dari ruang pendukung diatas ada beberapa issue (masalah) di jenjang SMP/ sederajat antara lain:

1. Dalam setiap rombel masih melebihi kapasitas SPM, sehingga perlu untuk meningkatkan jumlah rombel di setiap lembaga.
2. Minimnya jumlah guru yang mengajar di setiap lembaga hanya ada 5-6 guru, padahal diperlukan sekitar 10 guru/lembaga.
3. Masih kurangnya ruangan penunjang pembelajaran dimana sekitar 74,35% untuk Laboratorium, 76,92% untuk mushala, dan 51,28% perpustakaan yang harus di bangun untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
4. Masih kurangnya ruang belajar siswa.
5. Masih kurangnya guru pengajar di setiap satuan pendidikan.

Ruang belajar di sekolah merupakan masalah pendidikan di Kabupaten Balangan hal ini dapat dilihat dari gambaran kondisi ruang kelas di tiap kecamatan. Menurut Permendikbud no 15 tahun 2010 di setiap jenjang pendidikan

memiliki Standar Pelayanan Minimal dimana untuk SD/MI yaitu 1 ruang belajar ditempati 32 siswa dan tingkatan SMP/MTs. Untuk melihat kondisi ruang kelas di setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar 1 dan table 7 berikut:

Gambar 1 Peta Kondisi Ruang Belajar Kabupaten Balangan



Dari Gambar 1 diatas didapatkan kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dimana terdapat dua kecamatan yang memiliki indikator berwarna merah yaitu Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Dimana kedua lokasi ini memiliki tingkat ruang belajar yang rusak ringan sebesar 27,08% dan 23,53% dan rusak berat sebesar 15,88% dan 16,67%. Sedangkan untuk 6 kecamatan lainnya beridikator warna kuning yaitu dimana kondisi ruang belajar siswa di semua tingkat pendidikan banyak ruang yang mengalami rusak ringan maupun rusak berat dan perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah

1.4 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar lembaga sekolah. Pendidikan Non Formal ini setara dengan pendidikan formal. Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan:

1.4.1 Pendidikan Kesetaraan meliputi ; Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;

Pada jalur pendidikan non formal, jumlah warga belajar Keaksaraan Fungsional (KF)/Buta Aksara sebanyak 1.715 orang dengan Kelompok belajar 137 kelompok dan semua warga belajar telah melek aksara. Jumlah warga belajar Paket A setara SD sebanyak 262 orang dengan Kelompok belajar 32 kelompok dan siswa yang telah lulus 137 orang. Jumlah warga belajar Paket B setara SMP sebanyak 547 orang dengan Kelompok belajar 126 kelompok dan siswa yang telah lulus 128 orang Data pokok Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Pokok Pendidikan Non Formal

No	Komponen	KF	Paket A	Paket B
1.	Warga Belajar	1.715	262	547
2.	Kelompok Belajar	117	32	126
3.	Lulusan	1.715	137	128

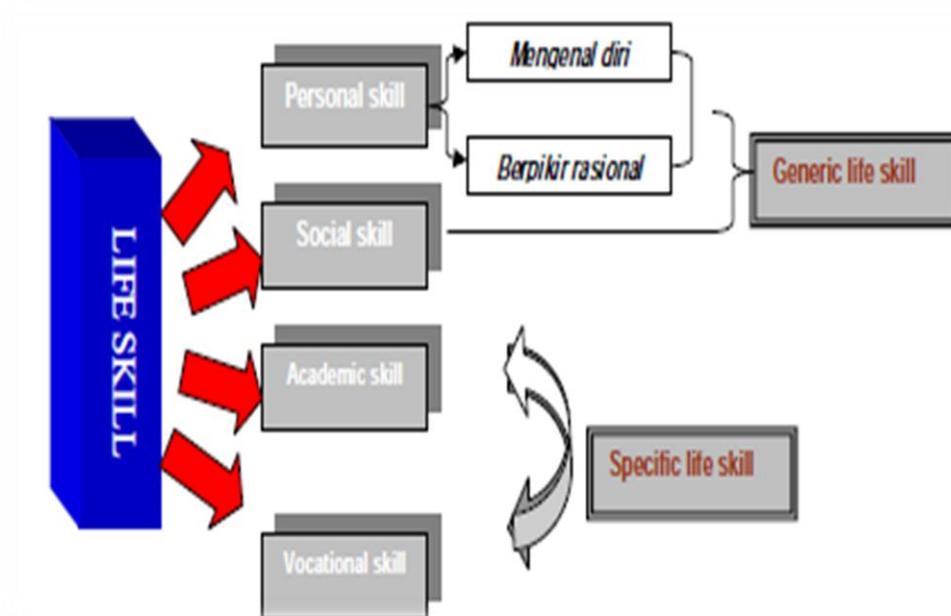
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016

1.4.2 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praksis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi

sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri. Azas pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada 'life skills' adalah manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) dan manajemen berbasis masyarakat (*Community Based Management*). Dana bantuan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan untuk hidup akan diberikan melalui prosedur 'block grant' yang akuntabilitas keuangannya dilakukan dengan sistem akuntansi publik. Lembaga pendidikan yang tidak menjadi 'pilot project' untuk sementara melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2
Ilustrasi Kecakapan Hidup



Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (*Life Skills*) hendaknya memuat upaya untuk mengembangkan kemampuan minimal sebagai berikut:

- a. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan sebagainya.)

- b. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses melalui pembelajaran berfikir ilmiah, eksploratif, 'discovery' dan 'inventory'.
- c. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk mendukung kedua kemampuan tersebut di atas.
- d. Kemampuan memanfaatkan teknologi dalam aneka ragam lapangan kehidupan seperti teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, transportasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan, olah raga, jasa, dsb.
- e. Kemampuan mengolah sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan untuk dapat hidup mandiri.
- f. Kemampuan bekerja dalam tim yang merupakan tuntutan ekonomi saat ini baik dalam sektor informal maupun formal.
- g. Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius berbasis Perda Pendidikan Al-Quran sebagai muatan lokal dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

1.4.3 Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang akan disusun menuju SDM Unggul dan Berkarakter tahun 2021 untuk pembinaan PKBM diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi penerapan perda no.3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dan mehubungkan pada potensi daerah.
- b. Revitalisasi program PKBM sehingga berdaya guna bagi masyarakat dan daerah.

- c. Implementasi program PKBM berbasis ICT dalam menyusun data potensi daerah.
- d. Perluasan akses masyarakat dalam menerima program PKBM di daerah.
- e. Bantuan pendanaan untuk program pembinaan PKBM di daerah.
- f. Evaluasi dan monitoring program pembinaan PKBM di daerah.

1.4.4 Pembinaan kursus dan pelatihan

Pembinaan kursus dan pelatihan di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan lebih dikhususkan dan difokuskan pada badan diklat. Dimana dalam hal ini proses pembinaan kursus diharapkan dapat menyelenggarakan kursus kependidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan. Program yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Implementasi program pembinaan lembaga kursus pendidikan
- b. Revitalisasi proram pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan non kependidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.
- c. Evaluasi dan monitoring lembaga kursus dan pelatihan berbasis ICT.
- d. Bimbingan teknis di lembaga kursus dan pelatihan non formal.
- e. Bantuan pembiayaan bagi lembaga kursus dan pelatihan

1.4.5 Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Program peningkatan budaya baca masyarakat dilaksanakan selain untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan warga masyarakat yang telah terbebas dari buta aksara juga untuk mencegah terjadinya fenomena kembalinya mereka yang telah melek aksara menjadi buta aksara lagi. Program peningkatan budaya baca masyarakat ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perencanaan yang disusun dalam grand design pendidikan sampai tahun 2025 sehingga diharapkan dapat mendorong pendidikan menuju SDM unggul dan berkarakter agamis. Diantaranya Program yang diusulkan:

- a. Sosialisasi gemar membaca bagi pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat.
- b. Penambahan/pengadaan bahan bacaan baik media buku, e-book, e-learning, di setiap perpustakaan di sekolah maupun taman bacaan masyarakat.

- c. Pembuatan/pengadaan perpustakaan masyarakat sebagai tempat belajar masyarakat baik dilingkungan keramaian maupun dilingkungan pedesaan, kecamatan, kabupaten.
- d. Revitalisasi jam belajar masyarakat di lingkungan desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- e. Pengadaan mobile-internet demi mendukung ICT untuk perpustakaan digital.
- f. Bantuan pendanaan bagi pengembangan perpustakaan di daerah berbasis ICT.

1.5 Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru dan siswa diindikasikan untuk mengetahui apakah jumlah guru yang tersedia sudah mencukupi untuk melayani proses pembelajaran siswa di jenjang sekolah tertentu. Dengan melihat perbandingan ini akan terlihat kebutuhan guru yang ideal dalam upaya mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Secara umum rasio jumlah guru dan siswa di kabupaten Balangan seperti terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 5 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah guru	1.857	1.859	1.793
1.2	jumlah siswa SD/MI	16.071	15.763	14.811
1.3	Rasio	1 : 9	1 : 8	1 : 8
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah guru	580	618	631
2.2	jumlah siswa SMP/MTs	5.667	5.928	5.743
2.3	Rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 9

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2017

Dari tabel 5 diatas mengenai rasio jumlah guru dan murid dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah siswa yang memasuki bangku sekolah tingkat SD mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 1,92%, dan pada tahun 2016 terjadi lagi penurunan yang signifikan sebanyak 6,03%. Untuk jumlah guru SD tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,10% dan 2016 mengalami penurunan sebesar 3,55%. Tingkat SMP jumlah siswa tahun 2015 meningkat sebanyak 4,60%, tahun 2016 mengalami penurun sebanyak 3,12%, sedangkan

jumlah guru tingkat SMP mengalami peningkatan 6,55% (tahun 2015), dan 2,10% di tahun 2016.

1.6 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, dapat dilihat tabel 6 berikut:

Tabel 6 Perkembangan Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Balangan

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1.	SD/MI			
1.1	jumlah Gedung Sekolah	214	217	208
1.2	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	13.271	13.059	12.420
1.3	Rasio	1 : 62	1 : 60	1 : 60
2.	SMP/MTs			
2.1	jumlah Gedung Sekolah	38	40	42
2.2	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	4.215	4.204	4.047
2.3	Rasio	1 : 111	1 : 105	1 : 96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Balangan Tahun 2017

Dari tabel 6 diatas dapat diliaht rasio ketersediaan gedung sekolah (lembaga) dengan jumlah penduduk, tingkat SD/MI mengalami peningkatan sebesar 1,40% di tahun 2015 dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4,14%, jumlah penduduk usia 7 s/d 12 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,59% dan tahun 2016 menurun signifikan sebesar 4,89%. Untuk jumlah gedung sekolah (lembaga) SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,26% dan di tahun 2016 terjadi lagi penurunan sebesar 3,73%. Jumlah penduduk usia 13 s/d 15 tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,26% dan turun signifikan di tahun 2016 sebesar 3,73%.

1.7 Evaluasi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan

Hasil survei yang dilakukan terhadap 300 responden yang terdiri para kepala sekolah, komite sekolah/orang tua siswa dan siswa adalah sebagai berikut ini:

1.7.1 Hasil Survei Kepada Kepala Sekolah

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari kepala sekolah maka dapat diuraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan dilihat dari aspek pembelajaran di sekolah, pengorganisasian sekolah (manajemen sekolah) dan kompetensi guru. Dilihat dari ketiga aspek tersebut maka dalam penilaian responden bahwa kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pembelajaran lebih baik dibandingkan kondisi manajemen sekolah dan kompetensi guru.

Tabel 7 Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kondisi Kemampuan Sekolah

No.	Kecamatan	Pembelajaran Di Sekolah (%)	Pengorganisasian Sekolah (%)	Kompetensi Guru (%)
1.	LAMPIHONG	85,47	80,71	59,44
2.	BATUMANDI	80,63	81,90	57,78
3.	AWAYAN	75,42	78,00	44,44
4.	TEBING TINGGI	77,14	82,28	60,44
5.	PARINGIN	77,50	77,85	46,11
6.	PARINGIN SELATAN	78,57	81,43	54,72
7.	JUAI	75,14	74,30	52,22
8.	HALONG	84,64	81,78	60,28
	Rata-rata	79,31	79,78	54,43

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

1.7.1.1 Aspek Pembelajaran

Berdasarkan tabel diatas, persepsi seluruh responden sebesar 79,31% menyatakan kondisi pembelajaran sudah berjalan dengan baik sisanya sebesar 20,69% menyatakan belum baik. Adapun kecamatan dengan persepsi paling tinggi adalah kecamatan Lampihong (85,47%) dan Halong (84,64%) sedangkan persepsi yang paling rendah adalah kecamatan Juai sebesar 75,14%.

1.7.1.2 Aspek Pengorganisasian (Manajemen) Sekolah

Dilihat pada aspek manajemen sekolah ternyata secara keseluruhan responden yaitu 79,78% menyetujui bahwa manajemen sekolah telah berjalan dengan baik dan sesuai arahan kebijakan. Kecamatan dengan tingkat penilaian yang tertinggi ternyata sama dengan aspek pembelajaran yaitu kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 82,28% diikuti Kecamatan Batu Mandi (81,90%) dan Kecamatan Halong (81,78%). Kecamatan Juai masih menduduki nilai 74,30% dimata para responden sebagai kecamatan dengan manajemen nilai terendah dan kecamatan Awaran (78,00%) dan Kecamatan Paringin (77,85%) sedangkan kecamatan lainnya telah di atas 80% berarti nilai yang sangat baik.

1.7.1.3 Aspek Kompetensi Guru Pengajar

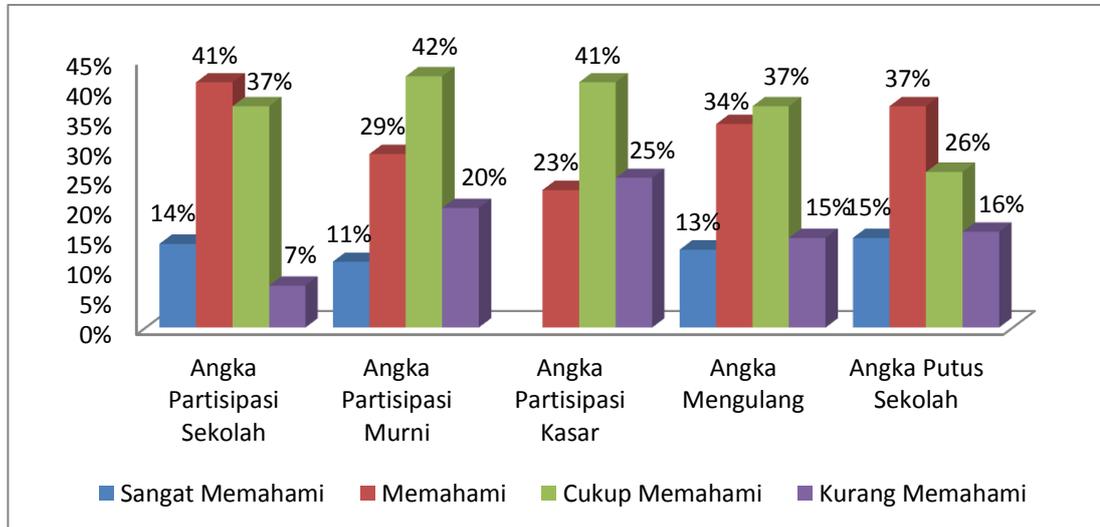
Penilaian responden terhadap tingkat kompetensi guru ternyata responden yang menyatakan bahwa kompetensi guru sudah memadai dan baik hanya 54,43% yang berarti nilai ini masih sangat jauh dari harapan paling tidak mencapai persepsi 70%. Persepsi tentang kompetensi guru yang cukup tinggi hanya di kecamatan Tebing Tinggi yaitu mencapai 60,44% dan Kecamatan Halong sebesar 60,28% walaupun masih dibawah 70%. Kecamatan lainnya ternyata dibawah 60% mencapai 6 kecamatan (75%). Berdasarkan hasil ini maka masalah kompetensi guru sangat perlu diperhatikan untuk dibenahi dan ditingkatkan melalui kebijakan dan program dalam perencanaan induk pendidikan di Kabupaten Balangan.

1.7.2 Hasil Survei Kepada Guru Pengajar

Hasil survey yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari guru pengajar di sekolah. Menguraikan peta kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan yang dilihat dari aspek pemahaman guru tentang angka partisipasi dan saran dari guru kepada pemerintah untuk membangun sekolah menengah atas. Berikut pada gambar 4.3 gambaran umum dari keterpahaman guru terhadap angka partisipasi.

Gambar 3

Gambaran Umum Guru di Kabupaten Balangan Terhadap Angka Partisipasi



Sumber: Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Gambar 3 menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap angka partisipasi masih sangat kurang. Perlunya pemahaman guru tentang angka partisipasi agar dapat meningkatkan mutu guru dan kualitas proses pembelajaran di Kabupaten Balangan.

Survei juga kepada guru juga menunjukkan harapan guru kepada pemerintah untuk membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan Kabupaten Balangan. Sehingga siswa yang lulus mendapatkan pengalaman pembelajaran yang langsung diterapkan dalam dunia kerja.

1.7.3 Hasil Survei Kepada Komite Sekolah/Orang Tua Siswa

Data kedua yang di ambil di Balangan adalah persepsi survey kepada orang tua siswa/komite sekolah dimana tujuan dari pengambilan data survey adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pelayanan pendidikan yang telah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Balangan. Untuk mengetahui seberapa besar yang dirasakan manfaat pelayanan pendidikan sampai kepada masyarakat dilihat dari beberapa aspek pengamatan. Untuk mengetahui dapat dilihat dari tabel 8 berikut:

Tabel 8 Persepsi Komite Sekolah/Orang Tua Siswa Terhadap Kondisi Pendidikan Perkecamatan Kabupaten Balangan

No.	Kecamatan	Pendapat Orang Tua	Pelayanan Pendidikan	Pengeluaran Pendidikan	Harapan Terhadap Pelayanan Pendidikan
1.	LAMPIHONG	66% Berkisaran 2 Jt – 5 Jt rupiah	77% mendapatkan pelayanan yang memadai	80,5% gratis	85,5% Kualitas pelayanan pendidikan di tingkatkan lagi terutama dari kompetensi guru
2.	BATUMANDI	89% berisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	67,7% belum mendapatkan pelayanan yang memadai	89% Gratis	44 % menginginkan pendidikan gratis dan sarana prasana sekolah terpenuhi
3.	AWAYAN	70% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% responden menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	90% Gratis	50% responden menyatakan harapan pendidikan gratis sepenuhnya
4.	TEBING TINGGI	80% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	90% mendapatkan pelayana yang tidak memadai	100% mendapatkan pendidikan gratis	80% menginginkan pendidikan gratis
5.	PARINGIN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	83,5% tidak mendapatkan pelayanan yang memadai	75% mendapatkan pendidikan gratis	70,5% ingin peningkatan pelayanan pendidikan terutama kompetensi guru
6.	PARINGIN SELATAN	75% berkisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	42% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	75% Gratis	79,6% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi
7.	JUAI	100% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	63,6% mendapatkan pelayanan yang tidak memadai	88% pendidikan gratis	75,6% menginginkan sarana prasarana sekolah terpenuhi
8.	HALONG	50% di kisaran Rp.500.000-Rp. 2.000.000	40% menyatakan harga buku mahal	100% Gratis	67% menginginkan sarana dan prasarana terpenuhi

Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Dari data diatas dapat terlihat bahwa : item pendapatan dari para orang tua siswa bermacam-macam dilihat dari sisi pekerjaan orang tua siswa yaitu: PNS, Pengusaha, Wiraswasta, dan Petani. Untuk segi pendapatan tidak terlalu mempersalahkan dimana tingkat pendapatan orang tua juga mempengaruhi tingkat keberlanjutan pendidikan anak-anaknya. Rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten Balangan berkisaran 500 ribu – 2 juta rupiah, dengan hampir rata-rata mendapatkan pelayanan pendidikan yang tidak memadai. Serta masyarakat

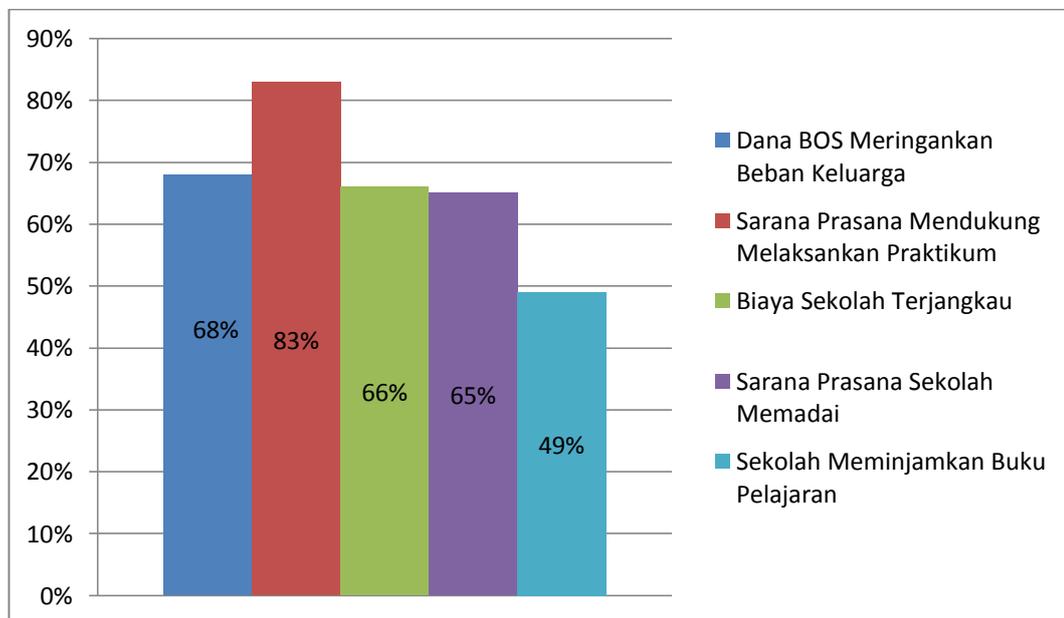
menginginkan terpenuhinya sarana dan prasana sekolah serta peningkatan kompetensi guru pengajar.

1.7.4 Hasil Survei Kepada Siswa

Survei yang ini bertujuan untuk melihat seberapa besar motivasi yang di peroleh oleh siswa baik dari orang tua maupun dari sekolah sebagaimana di terangkan gambar 4 berikut:

Gambar 4

Kepuasan Siswa Terhadap Dunia Pendidikan Di Kabupaten Balangan



Sumber Data : Data Primer (Hasil Survei, 2017 diolah)

Dari ke lima item pertanyaan survey kepada orang tua siswa sebanyak 68% menyatakan bahwa Pentingnya dana BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan. Pada bidang sarana-prasarana pendidikan sebanyak 83% menyatakan perlu adanya penambahan sarana-prasarana pendidikan termasuk laboratorium. Siswa juga berharap pihak sekolah menyediakan buku materi pelajaran sebanyak 49% di ruangan perpustakaan sekolah sehingga buku dapat dipinjamkan kepada siswa. Untuk sarana-prasarana pendidikan 65% responden siswa meminta perlu ditambah untuk meningkatkan kenyamanan dan keefektifan belajar. Sebanyak

66% responden siswa berharap biaya pendidikan terjangkau atau dengan kata lain adanya penggratisan biaya pendidikan agar mengurangi beban ekonomi keluarga mereka.

Dari data yang di ambil oleh penyusun dapat di simpulkan sementara bahwa gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan masih perlu ditingkatkan kembali baik dari sisi pelayanan, sarana prasarana, dukungan masyarakat, dukungan perusahaan sebagai user tenaga kerja terampil yang siap bekerja membangun daerah. Selain itu pula yang paling penting dalam mengulas gambaran umum pendidikan adalah Dana Alokasi Pendidikan di APBD dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama guru, siswa dan tenaga kependidikan. Dengan demikian proses pelayanan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Balangan. Untuk lebih mengulas kembali tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan akan diulas pada issue/masalah pendidikan di Kabupaten Balangan pada bab berikutnya.

1.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain dari yang disebutkan diatas ada beberapa issue utama pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Ruang kelas kurang

Ruang kelas pada beberapa sekolah yang berada di kawasan perkotaan dan pinggiran perbatasan perkotaan umumnya memiliki ruang kelas yang kurang. Masyarakat sekitar ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berada dekat kota. Berikut

2. Fasilitas kurang

Dukungan fasilitas sekolah dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler masih kurang. Demikian pula fasilitas yang bersifat pendukung praktikum, olah raga dan seni masih sangat kurang

3. Kesenjangan fasilitas dan kualitas sekolah antar daerah/kawasan

Terjadi kesenjangan antara fasilitas sekolah di kota atau pinggiran kota dibandingkan di daerah yang jauh dan pedalaman sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan dan lulusan.

1.9 Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)

1. Kesejahteraan guru honor/swasta

Tingkat kesejahteraan guru honor dan swasta sangat jauh dengan PNS sehingga menimbulkan kecemburuan dan tanggung jawab pendidikan anak. Penyetaraan tunjangan tenaga pendidik dengan sertifikasi masih belum menyeluruh sehingga tidak menyentuh kesejahteraan pendidik.

2. Kualitas

Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih harus ditingkatkan agar kualitas kerjanya meningkat dan profesional. Rendahnya kualitas karena tenaga pendidik dan kependidikan penyebarannya tidak merata sehingga ada yang kekurangan dilain tempat terjadi kelebihan sehingga mengurangi kualitas pelayanan pendidikan.

1.10 Dukungan Sumber Dana

1. Terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah kabupaten

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membangun bidang pendidikan karena merupakan daerah pemekaran baru yang membutuhkan biaya besar dalam membangun infrastruktur dan sarana pendukung lainnya termasuk pembiayaan operasional pendidikan di daerah

2. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan pendidikan di daerah.

Potensi SDA yang melimpah tidak menjamin dunia usaha yang berinvestasi di daerah mau terlibat langsung dan memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Dengan banyaknya investor yang mengeruk hasil sumber daya alam ternyata masih rendah partisipasi mereka dalam membantu pembangunan bidang pendidikan. Keterlibatan masih bersifat sukarela melalui program CSR yang kurang terintegratif dengan program

pembangunan daerah dalam jangka menengah sehingga hanya bersifat insidental saja.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan bidang pendidikan masih sangat rendah sebab kesadaran masyarakat daerah masih perlu dimotivasi dan mereka umumnya menggantungkan pada program pemerintah. Yang terpenting dalam masalah partisipasi bukan pada masalah pembiayaan tetap adanya dukungan dari internal masyarakat dalam mendorong anak-anak agar tidak putus sekolah.

1.11 Masyarakat dan Lingkungan Sekolah

1. Akses pendidikan

Akses pendidikan di Kabupaten Balangan dari segi wilayah yang luas dan terpencil sehingga akses tempat menjadi kendala pendidikan. Akses peserta didik dalam proses pendidikan juga sulit karena faktor kemampuan ekonomi masih tingginya angka putus sekolah akibat tidak mampu sekolah.

2. Putus sekolah : kawin, kriminal, narkoba, masalah ekonomi, masalah keluarga

Putus sekolah tidak hanya karena sulitnya akses dan masalah ekonomi namun juga dapat diakibatkan oleh faktor sosial dan lingkungan yang kurang kondusif. Salah satunya karena pergaulan dan lingkungan yang mendorong terjadinya pernikahan dini sehingga banyak yang putus sekolah. Lingkungan keluarga yang kurang kondusif juga mengakibatkan tidak adanya dukungan dan motivasi dalam melanjutkan sekolah bagi anak usia sekolah. Banyak pula anak yang bekerja karena membantu perekonomian keluarga sehingga memperbesar terjadinya angka putus sekolah yang tinggi.

2. Analisis Swot

Hasil analisis Strength, Weakness, Oppurtunity, Threath (SWOT) kondisi pendidikan Kabupaten Balangan berdasarkan hasil observasi, data dan indept interview.

2.1 Kekuatan

Memperhatikan kondisi pendidikan kabupaten Balangan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang dijadikan landasan untuk perencanaan pembangunan pendidikan.

1. Kondisi perekonomian dan investasi daerah yang meningkat sehingga mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
2. Sumber daya alam yang melimpah menjadi motivasi perlunya sumber daya manusia yang memadai
3. Kabupaten Balangan yang religious sehingga suasana menuntut ilmu dari lingkungan sangat kondusif.
4. Potensi SDA yang melimpah dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mendorong pentingnya pembangunan bidang pendidikan
5. Minat dan motivasi dari orang tua dan siswa untuk menempuh pendidikan sangat tinggi
6. Potensi penduduk yang pertumbuhannya cukup tinggi baik pertumbuhan natural maupun migrasi sehingga setiap jenjang pendidikan tidak akan kekurangan siswa
7. Kebutuhan tenaga kerja masih sangat tinggi baik sektor pertanian/perkebunan/perikanan, sektor pertambangan dan sektor industry terus terjadi peningkatan
8. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendidikan yang sudah memadai hampir merata pada seluruh kawasan
9. Potensi jumlah penduduk yang cukup besar membutuhkan pelayanan pendidikan dapat menghasilkan SDM yang siap dan handal

10. Komitmen pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan
11. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan meningkatkan kualitas SDM

2.2 Kelemahan

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan
2. Masih adanya guru yang belum bersertifikasi dan rendahnya kualifikasi tenaga guru sesuai standar nasional
3. Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang nyaman.
4. Belum meratanya perbandingan guru dan siswa, perbandingan siswa dan ruang kelas perbandingan rombongan belajar dan perbandingan antar jenis pendidikan.
5. Masih adanya daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pendidikan dan masih terbatas dan sulitnya suatu daerah dalam mengakases pendidikan
6. Masih adanya disparitas pendidikan antar jenjang, APK dan APM dan antar daerah (dalam daerah desa, kecamatan dan kabupaten).
7. Masih ada terjadi putus sekolah akibat masalah ekonomi keluarga dan pernikahan dini
8. Masih belum sinkronnya perencanaan pembangunan pendidikan antar daerah dan instansi.
9. Belum terpenuhi pelayanan pendidikan menyeluruh yaitu dengan masih terbatasnya pendidikan anak usia dini, kejar paket, dan pendidikan formal lainnya.
10. Belum memadainya database pendidikan yang integrative

2.3 Tantangan

1. Kemauan dan kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut

2. Perubahan kewenangan penanganan antara bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah memerlukan koordinasi yang baik antara kabupaten dan provinsi
3. Masih adanya sekolah di kawasan pinggir dan terpencil
4. Masih adanya kejadian putus sekolah
5. Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang terdidik masih sangat tinggi
6. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan pendidikan
7. Upaya pencapaian IPM memerlukan pembanguan pendidikan yang lebih baik
8. Pentingnya perhatian terhadap kualitas lulusan yang berkompetensi memadai
9. Pencapaian pembangunan dengan sinkronisasi dan kordinasi kebijakan dan implementasi pembangunan bidang pendidikan
10. Pembangunan sektor pendidikan menjadi fokus pendidikan di Kabupaten Balangan

2.4 Ancaman

1. Pengaruh globalisasi menjadi ancaman bagi penurunan kualitas keimanan, moral dan karakter masyarakat yang dapat mengancam pembangunan bidang pendidikan
2. Adanya ancaman peredaran narkoba, pergaulan bebas, perkelahian antar pelajar, pengaruh media sosial yang memerlukan perhatian dan programantisipasi dibidang pendidikan
3. Penetrasi masuknya pengaruh perkembangan teknologi informasi yang masiv memberikan kemudahan dalam pembangunan bidang pendidikan terutama dalam mendapatkan informasi dan komunikasi tapi sekaligus ancaman apabila tidak difilter
4. Maraknya siaran media masa baik tertulis maupun elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi pendidikan bagi anak-anak sekolah
5. Penggunaan teknologi komunikasi/HP/BB/kamera dll yang merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan sekaligus ancaman jika disalahgunakan

6. Perubahan figure keteladanan dari para tokoh, ulama, pahlawan, orang tua menjadi tokoh imajiner dan dunia entertaint
7. Kemudahan dalam mendapatkan kelulusan dan tanda kelulusan pada beberapa lembaga pendidikan yang bersifat instan.

Untuk mengetahui program-program perencanaan sasaran pendidikan di Kabupaten Balangan berdasarkan hasil kajian mendalam dapat dilihat pada realisasi kebutuhan perencanaan 5 tahunan agar dapat mewujudkan MDG di pelayanan pendidikan. Perencanaan 5 tahunan tersebut kami sajikan dalam bentuk matrik kebutuhan yang kami susun pada laporan penutup berikutnya.

3. Arah Kebijakan dan Startegi Pendidikan

3.1 Prioritas Kebijakan Program Bidang Pendidikan

Penjabaran Arah Kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Balangan melalui prioritas kebijakan program sebagai berikut :

1. Prioritas program peningkatan dan pemerataan akses disemua jenis dan jenjang pendidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pendidikan
 - b. Peningkatan akses pendidikan terhadap siswa miskin
2. Prioritas program penuntasan wajib belajar 9 tahun, dengan kebijakan program:
 - a. Peningkatan dan pengembangan pendidikan didalam dan luar sekolah
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
3. Prioritas program peningkatan kewirausahaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Meningkatkan kewirausahaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Prioritas program pemantapan pengembangan kurikulum 2013, dengan kebijakan program:
 - a. meningkatkan pendidikan moral dan etika, sikap dan perilaku (etos kerja, kreativitas dan lain-lain).

5. Prioritas program peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Pengembangan Sistem Informasi kependidikan
6. Prioritas program pengembangan kreativitas anak didik dalam penelitian terapan, dengan kebijakan program :
 - a. Pengembangan wawasan pola pikir ilmiah yang berbasis penelitian.
7. Prioritas program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kebijakan program :
 - a. Meningkatkan kompetensi skill tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui diklat/workshop/lokakarya/pendidikan.
8. Prioritas program peningkatan kemampuan anak didik dalam baca tulis Al Qur'an, dengan kebijakan program :
 - a. Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Al Qur'an.
 - b. Meningkatkan siswa berkarakter akhlak terpuji sesuai dengan karakter lokal daerah.

3.2 Sasaran Kebutuhan Tahunan Pendidikan Kabupaten Balangan

Sasaran Kebutuhan tahunan Pendidikan di Kabupaten Balangan dengan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN dan APBD. Dari sisi pelaksanaan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Untuk lebih terincinya sasaran tahunan ini akan dijabarkan dalam Review Masterplan Pendidikan Kabupaten Balangan mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Sasaran strategis tahunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan sebagai berikut ini:

1. Tahun Pertama (2016-2017)

Sasaran reformasi birokrasi pada tahap pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di pendidikan Kabupaten Balangan. Sasaran tahunan tahap pertama 2016-2017 diprioritaskan pada :

- a. Pemerataan akses pendidikan/pelayanan di setiap Kecamatan
- b. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dan pembinaan Aksara Kewirausahaan
- c. Implementasi wajib belajar 9 tahun
- d. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik berbasis Imtaq dan Iptek.
- e. Penuntasan dan pembinaan program berkebutuhan khusus.
- f. Revitalisasi gedung pendidikan dan sarana prasana pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

2. Tahap kedua (2018-2019) sebagai jangka menengah

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap pertama, pada tahap kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis pendidikan tahun kedua berwawasan regional/nasional. Sasaran tahunan tahap kedua 2018-2019 diprioritaskan pada

- a. Optimalisasi pelayanan pendidikan di setiap Kecamatan.
- b. Penambahan sarana prasana penunjang, gedung pendidikan baik formal dan non formal berbasis Imtaq dan Iptek
- c. Peningkatan kualitas kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik formal dan non formal
- d. Implementasi Program Pendidikan dan kegiatan berbasis Imtaq dan Iptek ditataran regional
- e. Optimalisasi system tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dan pecintraan publik yang baik berdasarkan imtaq dan iptek.
- f. Optimalisasi pengembangan pelayanan pendidikan berbasis ICT.
- g. Revitalisasi gedung pendidikan dan sarana prasana pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

3. Tahap ketiga (2020-2021) sebagai jangka akhir

Pada periode tahun ketiga, pendidikan di Kalimantan diarahkan pada tataran implementasi dan penguatan karakter agamis, serta meningkatkan kompetensi profesional pendidik serta lembaga sehingga dapat bersaing secara global (internasional) sebagai kelanjutan pada tahun kedua. Sasaran tahunan tahap ketiga 2020-2021 diprioritaskan pada:

- a. Mewujudkan peran serta masyarakat yang bermutu berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif berdasarkan Imtaq dan Iptek.
- b. Peningkatan tata kelola pendidikan formal dan non formal berbasis ICT.
- c. Pencapaian sertifikasi akreditasi bagi semua lembaga pendidikan formal dan non formal.
- d. Implementasi Pendidikan berbasis Imtaq dan Iptek di tataran regional dan nasional.
- e. Optimalisasi pendidikan karakter agamis dalam pendidikan formal dan informal dalam menghadapi zaman modern (global)
- f. Peningkatan kualitas kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik formal dan non formal dalam tataran regional dan nasional.
- g. Optimalisasi dan evaluasi gedung pendidikan beserta sarana prasana pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

4.1 Prioritas Program berdasarkan Tiga Program Utama sesuai Arah Kebijakan (Programnya disesuaikan Permendagri 13/2006, 59/2007 dan Permendikbud no.23 tahun 2013)

Prioritas program pembangunan pendidikan kabupaten Balangan dapat di tinjau dari lima program utama yang dikerucutkan menjadi tiga program utama di antaranya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan
 - a. Pembangunan unit sekolah baru
 - b. Pembangunan ruang kelas baru

- c. Rehabilitasi gedung sekolah
 - d. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan
 - e. Penyediaan sarana transportasi untuk Pendidik di daerah tertinggal
 - f. Pembangunan sekolah model satu atap bagi daerah terpencil
 - g. Pembangunan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan
 - h. Pembangunan Pendidikan Terpadu di Kompleks Islamic Center
- 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan
- a. Peningkatan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan, kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik.
 - b. Peningkatan mutu proses belajar mengajar
 - 1) Pengembangan pembelajaran berkarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
 - 2) Pengembangan pembelajaran berstandar SNI
 - 3) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif
 - 4) Pengembangan pembelajaran IPA/IPS Terpadu, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal
 - 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan
 - 6) Pengembangan pendidikan berbasis informasi teknologi
 - 7) Pembinaan MGMP di tingkat Kecamatan
 - c. Peningkatan penilaian pendidikan
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan
 - e. Pembinaan kesiswaan
 - f. Peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan
 - g. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik

- a. Penggunaan dan pengembangan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) di setiap satu pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah (SMP/ sederajat).
- b. Peningkatan dan pengembangan akreditasi sekolah dengan 8 SNP.
- c. Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan.
- d. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan.
- e. Pengembangan supervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan.
- f. Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah melalui sistem terintegrasi antar satuan pendidikan.
- g. Peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar.

4.2 Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1) Program Pendidikan Usia Dini (PAUD)

- a. Meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini bagi masyarakat sekitar.
- b. Meningkatkan kesiapan kognitif, mental dan karakter anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi :

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

2) Program Pendidikan Dasar

- a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelaksanaan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan
- b. Meningkatkan pemberdayaan KKG/KKS
- c. Optimalisasi fungsi dan peran MGMP di setiap UPT

- d. Meningkatkan angka melanjutkan sekolah bagi lulusan PAUD sampai sekolah dasar.
- e. Meningkatkan angka menyelesaikan sekolah (menurunkan angka putus sekolah)
- f. Meningkatkan tingkat kelulusan UN secara kuantitas dan kualitas
- g. Bantuan beasiswa kepada penduduk usia sekolah yang termasuk masyarakat miskin.
- h. Bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi :

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

3) Program Pendidikan Non Formal

- a. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan non formal berupa PKBM, sistem paket A, B, C
- b. Peningkatan minat pendidikan sepanjang hayat berupa sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan.
- c. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan non formal berupa diklat, workshop di setiap kecamatan.
- d. Mengembangkan sistem dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan non formal baru yang belum tersedia berbasis jaringan internet.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 antara lain meliputi:

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. Penyusunan Review Master plan Pendidikan Balangan Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan permasalahan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Balangan.
- b. Review Master Plan Pendidikan Balangan dilihat dari berbagai aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di setiap Kecamatan Kabupaten Balangan.
- c. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai Acuan strategis pembinaan dan pengembangan Pendidikan Kabupaten Balangan yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Balangan, dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional
- d. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai pengendali kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- e. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai pemberi informs kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan.
- f. Review Master Plan Pendidikan Balangan sebagai dasar mengembangkan strategis dan alternative kebijakan seta merancang rencana dan program pembangunan pendidikan.
- g. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai dasar mengembangkan strategi dan alternative kebijakan serta merancang rencana dan program pembangunan pendidikan;
- h. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai salah satu alat atau instrument pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengendalian rencana dan program pembangunan pendidikan;
- i. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai rujukan dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan pendidikan;

- j. Review Master Plan Pendidikan Balangan Merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan pada lingkungan yang semakin kompetitif;
- k. Review Master Plan Pendidikan Balangan Sebagai Kerangka Acuan Kerja yang memuat petunjuk bagi stakeholder, yang berisi dari masukan azas, criteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugasnya, dengan Review Master Plan ini diharapkan stakeholder dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan output yang optimal untuk perbaikan dunia pendidikan Kabupaten Balangan.

2. Rekomendasi

Rekomendasi dari penyusunan review master plan pendidikan Kabupaten Balangan untuk tahun 2016-2021 diantaranya:

- a. Peningkatan dan pemerataan akses disemua jenis dan jenjang pendidikan
- b. Penuntasan wajib belajar 9 tahun
- c. Pemantapan pengembangan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi.
- d. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan melalui sistem tata kelola yang handal dan layanan prima melalui perbaikan perencanaan, penganggaran dan penguatan kelembagaan, prosedur operasional standar.
- e. Pengembangan kreativitas anak didik dalam penelitian terapan
- f. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- g. Peningkatan kemampuan anak didik dalam baca tulis Al Qur'an
- h. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis siswa.
- i. Pembangunan ruang pertemuan KKG di setiap UPK.
- j. Penyediaan dan pengembangan sistem pendidikan berbasis kompetensi, karakter dan teknologi informasi berbasis layanan data (SIP = Sistem Informasi Pendidikan)
- k. Penyediaan dan penguatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan professional dengan kualifikasi standar nasional dan bersertifikasi dengan penempatan di daerah yang masih kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Kab. Balangan. 2016. *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan*. Paringin.
- Dinas Pendidikan Kab. Balangan. 2016. *Laporan Evaluasi Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan*. Paringin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN I;

MATRIK Kebijakan, Strategi, Prioritas, Program, Kegiatan dan Target Keuangan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Kebijakan	Strategi	Prioritas	Program	Kegiatan	Target Indikatif					
						2016-2021					
I	Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan terlayannya pelayanan pendidikan berbagai jenjang pendidikan (PAUD, dasar dan menengah) yang setara dan bermutu 2. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan sarana pendukung bidang pendidikan lainnya yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Program berdasarkan Lima Program Utama sesuai Arah Kebijakan (Ketersediaan, Peningkatan, Pengembangan, Evaluasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan unit sekolah baru b. Pembangunan ruang kelas baru c. Rehabilitasi gedung sekolah d. Penyediaan fasilitas pendukung / pununjang pendidikan (Lab, Perpustakaan, Mushola, Olahraga) e. Penyediaan sarana transportasi untuk Pendidik di daerah tertinggal f. Pembangunan Pendidikan Terpadu di Kompleks Islamic Center 	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemantapan pengembangan kurikulum 2013 b. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan c. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik d. Peningkatan jiwa kewirausahaan pada tenaga pendidik dan peserta didik e. Pengembangan kreativitas anak didik dalam pengajaran kreatif dan inovatif serta penelitian terapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi perbaikan pelayanan manajemen pendidikan 2. Penyediaan dan penguatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional dengan kualifikasi standar nasional dan bersertifikasi 3. Penyediaan dan pengembangan sistem pendidikan berbasis kompetensi, karakter dan teknologi informasi 4. Tersedia dan terjangkau pendidikan yang berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 				<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan, kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik b. Peningkatan mutu proses belajar mengajar <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pembelajaran berakarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) 2) Pengembangan pembelajaran berstandar SNI 3) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif 4) Pengembangan pembelajaran IPA / IPS Terpadu, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan 	16,6	33,3	50	66,6

No	Kebijakan	Strategi	Prioritas	Program	Kegiatan	Target Indikatif					
						2016-2021					
					6) Pengembangan pendidikan berbasis informasi teknologi 7) Pembinaan MGMP di tingkat kecamatan c. Peningkatan penilaian pendidikan d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan e. Pembinaan kesiswaan f. Peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan g. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan						
II	Pengembangan Tata Kelola dan Kualitas Mutu Layanan Pendidikan	1. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dan layanan prima melalui perbaikan perencanaan, penganggaran dan penguatan kelembagaan, prosedur operasional standar 2. Pengawasan sistem pengawasan internal	1. Prioritas Program berdasarkan Lima Program Utama sesuai Arah Kebijakan (Ketersediaan, Peningkatan, Pengembangan, Evaluasi)	3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik	a. Penggunaan dan pengembangan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) di setiap satuan pendidikan tingkat dasar b. Peningkatan dan pengembangan akreditasi sekolah dengan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) c. Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan d. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan. e. Pengembangan supervise, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan f. Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah melalui sistem terintegrasi antar satuan pendidikan g. Peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar.	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100

No	Kebijakan	Strategi	Prioritas	Program	Kegiatan	Target Indikatif					
						2016-2021					
III	Penuntasan program wajib belajar 9 tahun		2. Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan	a. Program Pendidikan Usia Dini TK/RA	a. Meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini bagi masyarakat di sekitar b. Meningkatkan kesiapan kognitif, mental, dan karakter anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar.	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100
				b. Program Pendidikan Dasar	a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui Melaksanakan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan b. Meningkatkan pemberdayaan KKG/KKS c. Pemetaan MGMP di setiap UPK d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (USB/RKB dan semua pendukungnya)	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100
				c. Program Pendidikan Non Formal	a. Penurunan angka buta aksara di setiap kecamatan b. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan non formal berupa PKBM, sistem paket A, B, C c. Peningkatan minat pendidikan sepanjang hayat berupa sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan d. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan non formal berupa diklat, worksop, di setiap kecamatan e. Mengembangkan sistem dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan non formal berupa pendirian unit-unit pendidikan non formal baru yang belum tersedia berbasis online	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100

LAMPIRAN II;

MATRIK Keterkaitan pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian target pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Prioritas	Program	Kegiatan	SKPD Terkait	Aspek Keterkaitan
1.	Prioritas Program berdasarkan Tiga Program Utama sesuai Arah Kebijakan (Programnya disesuaikan Permendagri 13/2006, 59/2007 dan permendikbud no 23 tahun 2013)	1) Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan unit sekolah baru PAUD, SD, SMP/Sederajat b. Pembangunan ruang kelas baru c. Rehabilitasi gedung sekolah d. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan e. Penyediaan sarana transportasi untuk Pendidik di daerah tertinggal f. Pembangunan Pendidikan Terpadu di Kompleks Islamic Center 	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda	Bappeda sebagai perencana Dinas PU sebagai pelaksana proyek, Dinas Pendidikan sebagai penerima.
a. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan, kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik b. Peningkatan mutu proses belajar mengajar <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pembelajaran berkarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 2) Pengembangan pembelajaran berstandar SNI 3) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif 4) Pengembangan pembelajaran IPA / IPS Terpadu/Matematika, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan 6) Pengembangan pendidikan berbasis informasi teknologi 7) Pembinaan MGMP di tingkat kecamatan 8) Pembinaan guru-guru pendidikan Agama dalam memperkuat karakter Agamis c. Peningkatan penilaian pendidikan d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan e. Pembinaan kesiswaan f. Peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan g. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan h. Pengembangan Model Pendidikan berwawasan gender dan keluarga 	BKD, Dinas Pendidikan, Kemenag	BKD sebagai proses perizinan ASN, Dinas pendidikan sebagai pelaksana kegiatan, Kemenag sebagai pelaksana kegiatan	

No.	Prioritas	Program	Kegiatan	SKPD Terkait	Aspek Keterkaitan
		b. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik	a. Penggunaan dan pengembangan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) di setiap satuan pendidikan tingkat dasar b. Peningkatan dan pengembangan akreditasi sekolah dengan 8 NSP. c. Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan d. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan. e. Pengembangan supervise, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan f. Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah melalui sistem terintegrasi antar satuan pendidikan g. Peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar	Bappeda, Disdik, Dinas Komunikasi dan Teknologi Informasi	Bappeda sebagai perencanaan. Dinas Pendidikan sebagai user. Dinas KTI sebagai pengelola IT didaerah dan proses perizinan
2.	Prioritas Berdasarkan Program Pendidikan	1) Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) a. Program Pendidikan Dasar b. Program Pendidikan Non Formal	a. Meningkatkan partisipasi pendidikan usia dini bagi masyarakat di sekitar b. Meningkatkan kesiapan kognitif, mental, dan karakter anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar. b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui Melaksanakan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan c. Meningkatkan pemberdayaan KKG/KKS d. Pemetaan MGMP di setiap UPK e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (USB/RKB dan semua pendukungnya) a. Penurunan angka buta aksara di setiap kecamatan dan desa b. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan non formal berupa PKBM, sistem paket A, B, c. Peningkatan minat pendidikan sepanjang hayat berupa sosialisasi kepada masyarakat disetiap kecamatan d. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan non formal berupa diklat, work sop, di setiap kecamatan e. Mengembangkan sistem dan kemitraan penyelenggaraan program pendidikan non formal f. berwujud pendirian unit-unit pendidikan non formal baru yang belum tersedia berbasis jaringan intranet	Dinas Pendidikan, Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, Kabid PLS	Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas

Lampiran III

MATRIK Pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian target pembangunan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan dan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan yang merata		Evaluasi tolak ukur kinerja/capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	1.1 Pembangunan unit sekolah baru	Tersedianya lembaga pendidikan yang baru dan ruang kelas baru berikut ruang penunjang kegiatan sekolah	Gedung sekolah yang tersedia untuk PAUD 118 unit dan 7 unit RA, untuk SD/MI ada 208 unit gedung sekolah, dan untuk SMP/MTs ada 43 unit gedung sekolah	Untuk gedung PAUD sekitar 2 unit di kecamatan Halong, Tebing Tinggi, dan Paringin Selatan Untuk gedung SD/MI 1 unit di kecamatan Paringin dan Batu Mandi, 2 unit di kecamatan Paringin Selatan	Untuk gedung PAUD sekitar 1 unit daerah Juai dan 1 unit di daerah Awayan beserta mebel, untuk SD sekitar 1 unit, dan 1 untuk SMP/MTs (Rp. 1.700.000.000)	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di 3 Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di 3 Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di 2 kecamatan
	1.2 Pembangunan ruang kelas baru	Tersedianya lembaga pendidikan yang baru dan ruang kelas baru berikut ruang penunjang kegiatan sekolah sebanyak 17 unit di setiap tingkatan PAUD/Sederajat, SD/MI, dan SMP/MTs.	Ruang yang tersedia untuk PAUD/TK sebanyak 125 untuk SD/MI ada 1.883 unit ruang kelas, untuk SMP/MTs ada 246 unit ruang kelas	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di Seluruh Kecamatan	Untuk Kecamatan Awayan, 1 unit ruang kelas di TK Alhidayah, 1 unit untuk PAUD Terpadu Negeri Pembina, Kecamatan Batu Mandi 1 unit untuk TK Cempaka, dan Kecamatan Halong 1 unit untuk TK Dahlia. Kec. Parsel 1 unit untuk MTs Al Hidayah Inan	Kecamatan Awayan 1 unit untuk SDN Pulantan, Kecamatan Batu Mandi 1 unit untuk SDN Teluk Mesjid 1, Kecamatan Halong masing-masing 1 unit untuk SDN Halong 1, SDN Baruh Penyambaran 1, dan MI Al-Ikhlas Halong Kecamatan Lampihong 1 unit untuk SDN Tampang	Kecamatan Juai 1 unit untuk ruang kelas di tingkat SMP, Kecamatan Paringin 1 unit untuk SMP Ikhwanul Muslimin, Kec. Tebing Tinggi 1 unit masing-masing pada SDN Sumsung dan SDN Mayanau	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di Seluruh Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3	Rehabilitasi gedung sekolah	Rehabilitasi gedung sekolah yang R.Ringan maupun R. Berat di seluruh Sekolah Pendidikan PAUD maupun Dasar	Gedung sekolah yang tersedia untuk PAUD dalam kondisi R. Ringan sebanyak 8 unit dan R.Berat sebanyak 37 unit, untuk SD/MI ada kondisi R. Ringan sebanyak 349 dan R. Berat sebanyak 134, untuk SMP/MTs sebanyak 43 unit R. Ringan dan 15 R. Berat	Kecamatan Halong perbaikan R. Berat pada 10 unit ruang tingkat PAUD, 23 unit tingkat SDN, dan 1 unit pada tingkat MTs. Kecamatan Tebing Tinggi perbaikan R. Berat pada 4 unit ruang tingkat PAUD, 12 unit tingkat SDN, perbaikan atap kelas di SDN Tanah Hanbang Kanan, dan 1 unit pada tingkat MTs	Kecamatan Halong perbaikan R. Berat 10 unit pada tingkat MI. Kecamatan Awaran perbaikan R. Berat pada 3 unit ruang tingkat PAUD, 12 unit tingkat SDN, 8 unit pada tingkat MI, Kecamatan Juai perbaikan R. Berat pada 6 unit ruang tingkat PAUD, 5 unit tingkat SDN, 11 unit tingkat MI, dan 3 unit pada tingkat MTs	Kecamatan Lampihong perbaikan R. Berat pada 5 unit ruang tingkat PAUD, 15 unit tingkat SDN, 6 Unit pada tingkat MI, dan 3 unit pada tingkat SMP. Kecamatan Batu Mandi perbaikan R. Berat pada 4 unit ruang tingkat PAUD, 14 unit tingkat SDN, 3 unit pada tingkat SMP dan 1 unit pada tingkat MTs	Kecamatan Paringin Selatan perbaikan R. Berat pada 5 unit ruang tingkat PAUD dan 12 unit tingkat SDN. Kecamatan Paringin perbaikan R. Berat pada 6 unit ruang tingkat SDN dan 3 unit pada tingkat SMP.	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di Seluruh Kecamatan
1.4	Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan	Tersedianya fasilitas penunjang pendidikan berupa: Ruang Ibadah, Perpustakaan, laboratorium IPA, dan Halaman Sekolah.	Fasilitas pendukung untuk PAUD ada 2 unit dari 118 lembaga, untuk SD/MI ada 267 unit dari 208 lembaga, untuk SMP/MTs ada 83 unit dari 43 lembaga	Kecamatan Paringin Selatan penambahan 1 ruang Kesek dan 1 ruang guru untuk SDN Inan dan SDN Muara Pitap serta WC untuk SDN Inan, Ruang Ibadah pada SDN Maradap, pembuatan Lab Komputer pada SMPN 2 Paringin. Kecamatan Paringin untuk SDN Danau Banta penambahan ruang baca siswa dan SDN Balida Penambahan ruang Kepsek. Untuk SDN Gunung Pandau penambahan WC	Kecamatan Lampihong untuk SMPN Lampihong ditambahkan WC dan Pagar Sekolah, Perputakaan pada SDN Tampang dan Lampihong Kiri, Pagar pada SDN Lok Panginangan. Kecamatan Tebing tersedianya Perpustakaan pada Tinggi SDN Sungsum dan MTs Ainul Amin, tersedianya Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Aula untuk SMPN 2 Awaran	Kecamatan Halong untuk SDN Baruh Penyambaran dan SDN Bijai Punggal masing-masing 1 unit perpustakaan, dan ruang ibadah untuk MI Al Ikhlas Halong, dan 1 unit Aula untuk SMPN 1 Halong. Kecamatan Juai 1 unit Lab. IPA dan ruang ibadah untuk MTs Hayatuddin Hukai, 1 unit perpustakaan dan ruang ibadah untuk MI Hayatuddin Hukai	Kecamatan Awaran untuk SDN Baramaban 1 unit ruang ibadah dan 1 unit ruang perpustakaan untuk MTsN 3 Balangan 1 unit ruang ibadah, 1 unit perpustakaan dan 1 unit ruang lab. IPA Kecamatan Batu Mandi 2 unit perpustakaan dan 4 unit ruang ibadah pada tingkat SD	Monitoring dan Evaluasi akhir kinerja di Seluruh Kecamatan
1.5	Penyediaan sarana transportasi untuk pendidik di daerah terpencil dan tertinggal	Tersedianya sarana transportasi untuk penduduk usia sekolah di daerah terpencil dan tertinggal.	Belum tersedia	Setiap sekolah yang berada pada daerah terpencil, siswa yang berprestasi mendapatkan 4-5 unit sepeda/sekolah 55 unit DIPA : (Rp. 110.000.000)	Setiap sekolah yang berada pada daerah terpencil, siswa yang berprestasi mendapatkan 4-5 unit sepeda/sekolah 55 unit DIPA : (Rp. 110.000.000)	Setiap sekolah yang berada pada daerah terpencil, siswa yang berprestasi mendapatkan 4-5 unit sepeda/sekolah 55 unit DIPA : (Rp. 110.000.000)	Setiap sekolah yang berada pada daerah terpencil, siswa yang berprestasi mendapatkan 4-5 unit sepeda/sekolah 55 unit DIPA : (Rp. 110.000.000)	Setiap sekolah yang berada pada daerah terpencil, siswa yang berprestasi mendapatkan 4-5 unit sepeda/sekolah 55 unit DIPA : (Rp. 110.000.000)

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.6 Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center	tersedianya Pendidikan terpadu di Kompleks Islamic Center	konsep awal penyusunan pendidikan terpadu di Kompleks Islamaic Center	Tahap pembangunan 10%	Tahap pembangunan 30%	Tahap pembangunan 70%	Tahap pembangunan 100%	Tahap pembangunan 100%
2	Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Layanan Pendidikan		Evaluasi tolak ukur kinerja/ capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	2.1 Peningkatan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan, kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik	Meningkatkan mutu lulusan berdasarkan aspek karakter lulusan kecakapan hidup, nilai dan angka lulusan, penurunan angka putus sekolah dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0,09% SMP/MTs untuk angka lulusan 99,96% dan Angka putus sekolah 0,15%	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0,01% SMP/MTs untuk angka lulusan 99,99% dan	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0% SMP/MTs untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0%	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0% dan SMP/MTs untuk angka lulusan 100%	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0% SMP/MTs untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0%	SD/MI untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0% SMP/MTs untuk angka lulusan 100% dan Angka putus sekolah 0%
	2.2 Peningkatan mutu proses belajar mengajar :	Meningkatkan mutu belajar dan pembelajaran	Belum tersedianya data mutu belajar dan pembelajaran dari tenaga pendidik sehingga perlu adanya peningkatan mutu	Diselenggarakannya diklat dan pelatihan untuk peningkatan kualifikasi pendidik dari tingkat SD/MI, SMP/MTs 60%	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
	2.2.1 Pengembangan pembelajaran berkarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan	Meningkatkan mutu belajar dan pembelajaran berbasis PAIKEM	N/A	Diklat/pelatihan untuk pengembangan pembelajaran berkarakter, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 60%	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
	2.2.2 Pengembangan pembelajaran berstandar SNI	Meningkatkan mutu belajar dan pembelajaran di setiap satuan pendidikan	N/A	Pelaksanaan diklat/pelatihan pembelajaran berstandar SNI (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
	2.2.3 Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif	Tersedianya bahan ajar dan media pembelajaran oleh para pendidik di satuan pendidikan	Belum optimalnya bahan ajar dan media pembelajaran yang ada para pendidik masih terbatas konvensional	Pelaksanaan diklat/pelatihan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran kreatif dan inovatif (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.4	Pengembangan pembelajaran IPA / IPS Terpadu, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal	Terpenuhinya kualitas pendidik bersertifikat professional bagi bidang studi penunjang berbasis keunggulan lokal	Belum optimalnya secara kuantitas tenaga pendidik bersertifikat professional berbasis keunggulan lokal	Pelaksanaan diklat/pelatihan pengembangan pembelajaran IPA / IPS Terpadu/Matematika, kemampuan berbahasa asing, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
2.2.5	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan	Terpenuhinya kualitas pendidik bersertifikat professional dalam bidang lab dan pustaka	Pendidik bersertifikat professional di bidang pengelolaan laboratorium dan pengelolaan perpustakaan oleh tenaga Staf perpustakaan di sekolah masih kurang dan belum terdata dengan maksimal	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
2.2.6	Pengembangan pendidikan berbasis informasi teknologi	Terpenuhinya kualitas pendidik bersertifikat professional Teknologi informasi	Pendidik berkualifikasi dan tersertifikasi professional di bidang Teknologi Informasi perlu di penuhi di setiap tingkatan satuan pendidikan	Pelaksanaan diklat/pelatihan pengembangan pendidikan berbasis infor masi teknologi (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
3.3	Peningkatan nilai pendidikan	Terpenuhinya kualitas pendidik professional dalam bidang penilaian proses belajar mengajar	Pendidik yang memiliki penguasaan penilaian proses belajar mengajar dengan mengikuti kurikulum nasional yang baru perlu di tingkatkan karena hanya sebagian yang sudah mengikuti dari total guru di lingkungan satuan pendidikan.	Peningkatan kualifikasi pendidik dengan menyelenggarakan diklat/pelatihan untuk peningkatan nilai pendidikan dari tingkat PAUD sampai pendidikan menengah (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
3.4	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan di setiap kecamatan	Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di setiap kecamatan	PAUD APK 51,20% dan APM 51,20%, TK APK 67,47% dan APM 67,47%, SD/MI APK 105,96% dan APM 87,64% SMP/MTs APK 92,81% dan APM 62,92%	PAUD APK 57,20% dan APM 57,20%, TK APK 67,52% dan APM 67,52%, SD/MI APK 106,01% dan APM 87,79%, SMP/MTs APK 92,97% dan APM 63,07%	PAUD APK 60,38% dan APM 60,38% TK APK 67,67% dan APM 67,67% SD/MI APK 106,11% dan APM 87,96% SMP/MTs APK 93,16% dan APM 63,24%	PAUD APK 65,87% dan APM 65,87% TK APK 67,84% dan APM 67,84% SD/MI APK 106,24% dan APM 88,16% SMP/MTs APK 93,36% dan APM 63,42%	PAUD APK 67,96 % dan APM 67,96% TK APK 68,03% dan APM 68,03% SD/MI APK 106,44% dan APM 88,41% SMP/MTs APK 93,59% dan APM 63,58%	PAUD APK 67,96% dan APM 67,96% TK APK 68,23% dan APM 68,23% SD/MI APK 106,66% dan APM 88,76% SMP/MTs APK 93,84% dan APM 63,61%
3.5	Pembinaan kesiswaan	Terlaksananya pembinaan kesiswaan baik intra maupun ekstra kulikuler secara menyeluruh dari tingkat SD samapi SMP sederajat	Dibeberapa sekolah sudah berjalan program pembinaan intra maupun ekstrakulikuler baik dari tingkat SD sampai SMP sederajat misalnya: PMR, Pramuka, Tahfidz, OSIS, MPK, Seni Budaya dsb	Berjalannya kegiatan intra dan ekstra kulikuler secara menyeluruh di setiap tingkat SD sampai SMP sederajat(60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3.6 Peningkatan layanan sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya layanan sarana prasarana pendidikan yang memadai sesuai SNP	Sudah tersedia akan tetapi perlu di lengkapi terutama peralatan lab, olah raga, seni, Multimedia, Perpustakaan, Ruang BK, Ruang UKS, Kantin dan sebagainya	Optimalisasi layanan sarana dan prasarana pendidikan (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
	3.7 Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan (diklat pengembangan bagi guru dan TU)	Terpenuhinya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan profesi guru dan profesionalitas tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan saat ini masih belum optimal baik dari tingkatan SD dan SMP sederajat	Diklat/pelatihan untuk Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan Untuk guru TK 10,50% SD /MI 61,99% SMP/MTs 97,76% (@ Rp. 500000,- /tenga pendidik) untuk kegiatan total: 25.000.000	Diklat/pelatihan untuk Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan TK 15,74% SD /MI 67,99% SMP/MTs 98,76% (@ Rp. 500000,- /tenga pendidik) untuk kegiatan total: 25.000.000	Diklat/pelatihan untuk Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan TK 21,74% SD /MI 75,99% SMP/MTs 99,76% (@ Rp. 700000,- /tenga pendidik) untuk kegiatan total: 35.000.000	Diklat/pelatihan untuk Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan TK 30,74% SD /MI 80,99% SMP/MTs 99,86% (@ Rp. 700000,- /tenga pendidik) untuk kegiatan total: 35.000.000	Diklat/pelatihan untuk Peningkatan mutu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan TK 45,74% SD /MI 90,99% SMP/MTs 100% (@ Rp. 900000,- /tenga pendidik) untuk kegiatan total: 35.000.000
	2.8 Pengembangan model pendidikan berwawasan gender dan keluarga melalui diklat dan sosialisasi bagi pendidik dan orang tua siswa	Pengembangan model pendidikan berwawasan gender dan keluarga di setiap satuan pendidikan	Belum optimalnya model pendidikan berwawasan gender dan keluarga secara islami dari tingkat PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs.	Pembinaan untuk mengembangkan model pendidikan berwawasan gender dan keluarga melalui diklat dan sosialisasi bagi pendidik dan orang tua siswa (60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik		Evaluasi tolak ukur kinerja/ capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	3.8 Penggunaan dan pengembangan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) di setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah	Penguasaan pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah	Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih belum optimal saat ini terutama pengisian data DAPODIK di setiap satuan pendidikan baik Kepala Sekolah, Guru, dan Operator di setiap satuan pendidikan tingkat dasar	Pelatihan/diklat serta pembinaan terhadap Penggunaan dan pengembangan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) di setiap satuan pendidikan tingkat dasar (60%) (@ Rp. 400.000,-/tenga pendidik)/kegiatan Rp. 2500000	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
	3.9 Peningkatan dan pengembangan akreditasi sekolah sesuai dengan SNP	Terpenuhinya akreditasi setiap satuan pendidikan berkategori minimal B		Akreditas setiap satuan pendidikan minimal B 50%	Akreditas setiap satuan pendidikan minimal B 70%	Akreditas setiap satuan pendidikan minimal B 95%	Akreditas setiap satuan pendidikan minimal B 100%	Akreditas setiap satuan pendidikan Terkreditasi A

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.10	Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan malalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan	Tersedianya kelengkapan data base dan profil pendidikan melalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan	N/A	Pembinaan dan pelatihan untuk Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan malalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik/operator)/Kegiatan 35.000.000	Pembinaan dan pelatihan untuk Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan malalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik/operator)/Kegiatan 35.000.000	Pembinaan dan pelatihan untuk Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan malalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan di 2 Kecamatan (@ Rp. 400.000,-/tenaga pendidik/operator)/kegiatan: 35.000.000	Pembinaan dan pelatihan untuk Peningkatan kelengkapan data base dan profil pendidikan malalui SIP (Sistem Informasi Pendidikan) di setiap satuan pendidikan di 2 Kecamatan (@ Rp. 400.000,-/tenaga pendidik/operator)/Kegiatan: 35.000.000	Evaluasi akhir tolak ukur kinerja
3.11	Pengembangan sistem manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan	Tersedianya sistem manajemen mutu berbasis website di satuan pendidikan	Belum optimalnya system manajemen mutu internal berbasis website di satuan pendidikan	Pembinaan dan pelatihan/dikalt untuk Pengembangan sistem manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik)	Pembinaan dan pelatihan/dikalt untuk Pengembangan sistem manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik)	Pembinaan dan pelatihan/dikalt untuk Pengembangan sistem manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 400.000,-/tenaga pendidik)	Pembinaan dan pelatihan/dikalt untuk Pengembangan sistem manajemen Mutu melalui sosialisasi dan diklat Mutu berbasis website di setiap satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 400.000,-/tenaga pendidik)	Evaluasi akhir kinerja seluruh kecamatan
3.12	Pengembangan surpervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan	Mengembangkan supervisi, monitoring dan evaluasi	Belum optimalnya peran pengawas pendidikan dalam proses supervisi, monitoring dan evaluasi di setiap satuan pendidikan	Pelatihan/dikalat untuk Pengembangan surpervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 200.000,-/tenaga pengawas)/Kegiatan: 25.000.000	Pelatihan/dikalat untuk Pengembangan surpervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 200.000,-/tenaga pengawas)/Kegiatan: 25.000.000	Pelatihan/dikalat untuk Pengembangan surpervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pengawas) Kegiatan: 25.000.000/	Pelatihan/dikalat untuk Pengembangan surpervisi, monitoring dan evaluasi melalui upaya peningkatan SDM para pengawas dan Kepala di satuan pendidikan di 2 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pengawas)/Kegiatan: 25.000.000	Evaluasi akhir kinerja seluruh kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3.13 PEMBERDAYAAN sekolah dan komite sekolah melalui sistem terintegrasi antar satuan pendidikan	Meningkatkan pemberdayaan sekolah dan komite sekolah	Perlu meningkatkan pemberdayaan sekolah dan komite sekolah dalam pengelolaan manajerial dan fungsi koordinasi	Pelaksanaan sistem terintegrasi antar satuan pendidikan untuk pemberdayaan sekolah dan komite sekolah di 3 kecamatan (@ Rp. 200.000,-/tenaga pendidik)/Kegiatan: Rp.20.000.000	Pelaksanaan sistem terintegrasi antar satuan pendidikan untuk pemberdayaan sekolah dan komite sekolah di 3 kecamatan (@ Rp. 200.000,- /tenaga pendidik)/Rp.20.000.000	Pelaksanaan sistem terintegrasi antar satuan pendidikan untuk pemberdayaan sekolah dan komite sekolah di 4 kecamatan (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik)/Kegiatan: 30.000.000	Evaluasi pelaksanaan sistem integrasi di 3 kecamatan	Evaluasi pelaksanaan sistem integrasi di 3 kecamatan
	3.14 Peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar	Terpenuhinya kualitas sekolah melalui pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar	Belum optimalnya lembaga-lembaga dan unit-unit usaha perekonomian dalam mendukung pendidikan di kabupaten Balangan	Sosialisasi kualitas mutu pendidikan ditingkat stakeholder dan masyarakat sekitar di 2 kecamatan	Sosialisasi kualitas mutu pendidikan ditingkat stakeholder dan masyarakat sekitar 2 kecamatan	Sosialisasi kualitas mutu pendidikan ditingkat stakeholder dan masyarakat sekitar 2 kecamatan	Sosialisasi kualitas mutu pendidikan ditingkat stakeholder dan masyarakat sekitar 2 kecamatan	Evaluasi tolak ukur kinerja keterlibatan dunia usaha di seluruh Kecamatan
4	Pendidikan Usia Dini (PAUD)		Evaluasi tolak ukur kinerja/ capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	1.1 Peningkatan partisipasi pendidikan usia dini bagi masyarakat di sekitar	Peningkatan APK dan APM	APK 51,20% dan APM 51,20%	APK 57,20% dan APM 57,20%	APK 60,38% dan APM 60,38%	APK 65,87% dan APM 65,87%	APK 67,96% dan APM 67,96%	APK 67,96% dan APM 67,96%
	1.2 Meningkatkan kesiapan kognitif, mental, dan karakter anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar.	Peningkatan mutu dan kualitas lulusan PAUD	APK 51,20% dan APM 51,20%	APK 57,20% dan APM 57,20%	APK 60,38% dan APM 60,38%	APK 65,87% dan APM 65,87%	APK 67,96% dan APM 67,96%	APK 67,96% dan APM 67,96%
5	Program Pendidikan Dasar		Evaluasi tolak ukur kinerja/ capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	5.1 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui Melaksanakan diklat bagi guru dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan		Pelaksanaan diklat/pelatihan untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (50 %) (@ Rp. 200.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan :30000000	Pelaksanaan diklat/pelatihan untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (60%) (@ Rp. 200.000,- /tenaga pendidik)/Kegiatan: 30.000.000	Pelaksanaan diklat/pelatihan untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (70%) (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik)/ Kegiatan: 30.000.000	Pelaksanaan diklat/pelatihan untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (80%) (@ Rp. 300.000,- /tenaga pendidik)/ Kegiatan: 30.000.000	Pelaksanaan diklat/pelatihan untuk Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (90%) (@ Rp. 350.000,-/tenaga pendidik) Kegiatan: 40.000.000/

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	5.2 Meningkatkan pemberdayaan KKG/KKS	Tersedianya SDM pendidik professional pada KKG/KKS masing-masing satuan pendidikan	Belum optimalnya pengelolaan KKG/KKS di masing-masing satuan pendidikan	Pelaksanaan diklat dan workshop bagi KKG/KKS setiap satuan pendidikan (60%) (@ Rp. 200.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan :15.000.000	Pelaksanaan diklat dan workshop bagi KKG/KKS setiap satuan pendidikan (70%) (@ Rp. 250.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan :20.000.000	Pelaksanaan diklat dan workshop bagi KKG/KKS setiap satuan pendidikan (80%) (@ Rp. 250.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan :20.000.000	Pelaksanaan diklat dan workshop bagi KKG/KKS setiap satuan pendidikan (90%) (@ Rp. 300.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan : 25.000.000	Pelaksanaan diklat dan workshop bagi KKG/KKS setiap satuan pendidikan (100%) (@ Rp. 350.000,-/tenaga pendidik)/kegiatan :28.000.000
	5.3 Pemetaan MGMP di setiap UPK	Terpetanya MGMP di setiap UPK dalam memenuhi bidang studi masing-masing satuan pendidikan	Belum optimalnya fungsi dan peran bidang studi di setiap MGMP satuan pendidikan	Pelaksanaan mismatch MGMP di setiap satuan pendidikan 70%	Pelaksanaan mismatch MGMP di setiap satuan pendidikan 80%	Pelaksanaan mismatch MGMP di setiap satuan pendidikan 90%	Pelaksanaan mismatch MGMP di setiap satuan pendidikan 100%	Evaluasi akhir kinerja
	5.4 Bantuan Beasiswa bagi siswa miskin	Terpenuhinya asas keadilan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengenyam bangku pendidikan	Sudah tersedia akan tetapi setiap tahun akan ditingkatkan sehingga wajar 9 tahun terpenuhi	Bantuan diberikan kepada siswa miskin yang sudah terdata	Bantuan pendanaan sebesar Rp. 677.620.000	Bantuan pendanaan sebesar Rp. 677.620.000	Bantuan pendanaan sebesar Rp. 677.620.000	Evaluasi akhir kinerja
6.	Pendidikan non Formal		Evaluasi tolak ukur kinerja/ capaian program (Kondisi Awal RPJMD Tahap III)					
	6.1 Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan non formal berupa PKBM, sistem paket A, B, C	Tersedianya pelayanan pendidikan non formal di setiap kecamatan	Sudah berdiri 10 lembaga	Pelaksanaan, Pengelolaan dan monitoring PKBM sistem Paket (60%)	(75%)	(85%)	(95%)	(98%)
	6.2 Peningkatan minat pendidikan sepanjang hayat berupa sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan	Tersosialisasinya pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat di setiap kecamatan	Belum adanya sosialisasi pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat di setiap kecamatan					
	6.3 Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan non formal berupa diklat, worksop, di setiap kecamatan	Terpenuhinya kualitas SDM lulusan pendidikan non formal	Belum adanya kursus pengembangan diri bagi SDM Lulusan pendidikan non formal untuk meningkatkan <i>life skill</i>	Pelatihan dan workshop berupa diklat pengembangan kemampuan diri (60%) (@ Rp. 100.000,- / peserta)/ kegiatan: 25.000.000	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2016)	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.4	Mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pendidikan non formal berupa pendirian unit-unit pendidikan non formal baru yang belum tersedia berbasis jaringan intranet	Pengembangan sistem dan penyelenggaraan pendidikan non formal yang baru berbasis jaringan internet di setiap kecamatan	Belum tersistematis jaringan internet bagi pendidikan non formal (PKBM)	Pendirian pendidikan non formal berbasis jaringan internet di 3 kecamatan (Rp. 100.000.000)	Pendirian pendidikan non formal berbasis jaringan internet di 3 kecamatan (Rp. 100.000.000)	Pendirian pendidikan non formal berbasis jaringan internet di 3 kecamatan (Rp. 100.000.000)	Pendirian pendidikan non formal berbasis jaringan internet di 2 kecamatan (Rp. 120.000.000)	Evaluasi akhir kinerja di seluruh kecamatan